BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan sebagai dokumen tahun pemerintah daerah;

b. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai denan asumsi awal serta adanya kebutuhan mendesak dan perubahan kondisi strategis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
15. Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun pembangunan Daerah.
14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta hasil evaluasi sampai triwulan I tahun 2025, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:
   a. pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025;
   b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   - BAB I : Pendahuluan
   - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun Berkenaan
   - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
   - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
   - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
   - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   - BAB VII : Penutup.
(3) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai:
   a. dasar penetapan Perubahan Renja PD; dan.
   b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
(2) Perubahan Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.
(3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(4) Bapelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD.
(5) Penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah mencakup Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Renja PD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 16

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan Penyusunan RKPD I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-6

BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN I RKPD 2025 ..... II-1
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro II-1
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi..... II-1
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional II-1
2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan II-2
2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Luwu..... II-3
2.1.2. PDRB per Kapita..... II-6
2.1.3. Inflasi II-8
2.1.4. Ketenagakerjaaan II-11
2.1.5. Kemiskinan II-13
2.1.6. Gini Rasio II-16
2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia..... II-18
2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu..... II-20
2.3. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja..... II-23
2.3.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025..... II-23
2.3.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025..... II-23
2.3.3. Evaluasi Capaian Pendanaan Program dan Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-25
2.3.4. Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... II-30
2.3.5. Evaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan Mandatori dan Urusan II-158
2.3.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD

berdasarkan Mandatori (SPM) II-158
2.3.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD
berdasarkan Urusan II-159
2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi
Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 ..... II-166
2.4.1. Hambatan dalam Pelaksanaan RKPD
Triwulan I Tahun 2025 ..... II-166
2.4.2. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2025
sampai dengan Triwulan ke I II-167
2.4.3. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025
Triwulan selanjutnya..... II-168

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro ... III-1
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi III-2
3.1.1.2. Inflasi III-4
3.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka..... III-5
3.1.1.4. Tingkat Kemiskinan III-6
3.1.1.5. PDRB Per Kapita III-7
3.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia III-7
3.2. Tantangan Perekonomian Daerah III-8
3.2.1. Aspek Eksternal III-8
3.2.2. Aspek Internal III-10
3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-10
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-12
3.3.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah III-12
3.3.2. Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah III-17
3.3.2.1. Belanja Operasi III-18
3.3.2.2. Belanja Modal III-19
3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga..... III-20
3.3.2.4. Belanja Transfer III-21
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025 ..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-13

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 .. IV-13
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu IV-28
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-51
4.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-56
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... V-1
5.2. Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Rkpd Tahun 2025 ..... V-4
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1. Indikator Makro Pembangunan VI-1
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-4
6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-6
6.4. Indikator Utama Pembangunan VI-44
6.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-48
6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .. VI-54
BAB VII PENUTUP VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2. Kesimpulan VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen),Tahun 2020-2024..... II-4
Tabel 2.2. Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-7
Tabel 2.3. IHK dan Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu April 2025, Tahun Kalender 2025 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran II-8
Tabel 2.4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-10
Tabel 2.5. Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Agustus 2024 .... II-11
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Maret 2024 ..... II-14
Tabel 2.7. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-19
Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-20
Tabel 2.9. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025..... II-23
Tabel 2.10. Realiasasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 Hingga Triwulan I II-24
Tabel 2.11. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-27
Tabel 2.12. Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... II-31
Tabel 2.13. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Luwu Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-34
Tabel 2.14. Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Luwu Triwulan I Tahun 2025 Berdasarakan Urusan Pemerintahan..... II-160
Tabel 3.1. Target Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro

Kabupaten Luwu Tahun 2025 ..... III-11
Tabel 3.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ..... III-15
Tabel 3.3. Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ..... III-23
Tabel 3.4. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ..... III-26
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 ..... IV-3
Tabel 4.2. Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional IV-14
Tabel 4.3. Dukungan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Terhadap Sasaran RKP Tahun 2025 ..... IV-15
Tabel 4.4. Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025..... IV-26
Tabel 4.5. Tema Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-28
Tabel 4.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Target Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 ..... IV-29
Tabel 4.7. Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pemangunan Tahun 2025 . IV-33
Tabel 4.8. Strategi Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025..... IV-35
Tabel 4.9. Arah Kebijakakan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025..... IV-52
Tabel 4.10. Program Prioritas Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 ..... IV-56
Tabel 5.1. Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-2
Tabel 5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah V-5
Tabel 5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2025 ..... V-17
Tabel 6.1. Capaian dan Target Kinerja Indikator Makro Tahun 2024-2026..... VI-2
Tabel 6.2. Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026 ..... VI-5

Tabel 6.3. Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Tahun 2024 – 2026..... VI-6
Tabel 6.4. Capaian dan Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan Tahun 2024-2026 ..... VI-44
Tabel 6.5. Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026 ..... VI-49
Tabel 6.6. Capaian, Proyeksi dan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2024 – 2025..... VI-55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi PDB beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) II-2
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi PDRB beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 ..... II-3
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024..... II-5
Grafik 2.4. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024 ..... II-8
Grafik 2.5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024 ..... II-10
Grafik 2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Agustus 2024 .. II-12
Grafik 2.7. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024 ..... II-13
Grafik 2.8. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-15
Grafik 2.9. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2020-2024 ..... II-16
Grafik 2.10. Gini Rasio Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Periode Maret 2024 ..... II-17
Grafik 2.11. Gini Rasio Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-17
Grafik 2.12. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024 ..... II-18
Grafik 2.13. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-19
Grafik 2.14. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024..... II-20
Grafik 2.15. Realisasi SPM Triwulan I Tahun 2025 ..... II-158
Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian

Tahun 2024 (Persen)..... III-4
Grafik 3.2. Inflasi Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 (Persen)..... III-5
Grafik 3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)..... III-6
Grafik 3.4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)..... III-7
Grafik 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta. Rp)..... III-7
Grafik 3.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Angka) III-8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERUTURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun.Untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota. Ketentuan tentang penyusunan RKPD bagi pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan di atas, serta berdasrkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program/kegiatan berikut dengan target indikator kinerja. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Program Strategis Nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk menyesuaikan program dan kemampuan anggaran kondisi rill dilapangan tentunya perubahan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi ini kemudian dituangkan dalam bentuk RKPD Perubahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 Ayat (1) menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan atau
b) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025-2029
c) keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
d) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025

Perubahan RKPD sebagaimna dimaksud diatas meliputi perubahan:

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pemabngunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan atau pengurangan dan kegiatan perangkat Daerah;
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke I (ke-satu) pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu 2025-2029, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perda perubahan RPJMD Kab. Luwu dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) yang selanjutnya dibahas serta ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648)
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
15. Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu tahun 2011 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6)
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Luwu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD kabupaten terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada, baik di tingkat nasional (RKP/program strategis nasional), provinsi (RKPD Provinsi), dan kabupaten (RPJMD Kabupaten). Secara singkat, hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan yang partisipatif, Perubahan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
b) Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan antara Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.
c) ➢ Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Perubahan RKPD Kabupaten Luwu disusun dengan

berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

d) Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RENJA-PD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2025.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

a. Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2
b. Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD. Serta pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kab. Luwu dengan Bupati Luwu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2025.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumne Perubahan RKPD tahun 2025 yang mencakup atar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan , dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025, Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

Bab ini memaparkan rancangan tentang Kerangka ekonomi Daerah dan Kerangka keuangan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2025 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan

BAB VII: PENUTUP

Bab ini menjelaskan poin-poin kaidah pelaksanaan, kesimpulan dan menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu dijabarkan sebagai berikut.

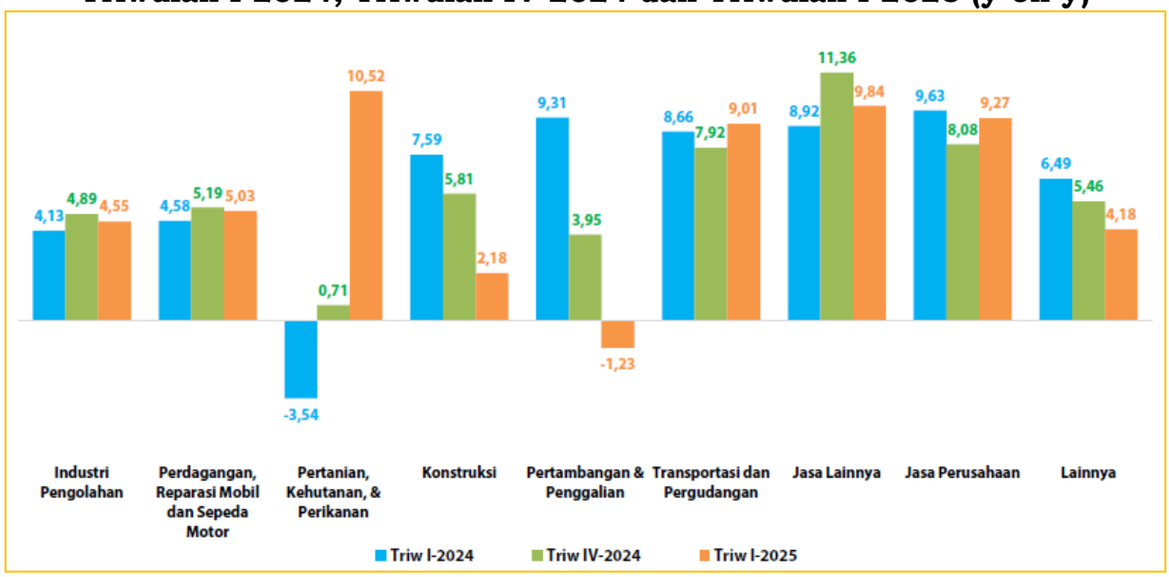
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 2.1.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi PDB beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y)



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS 2025.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

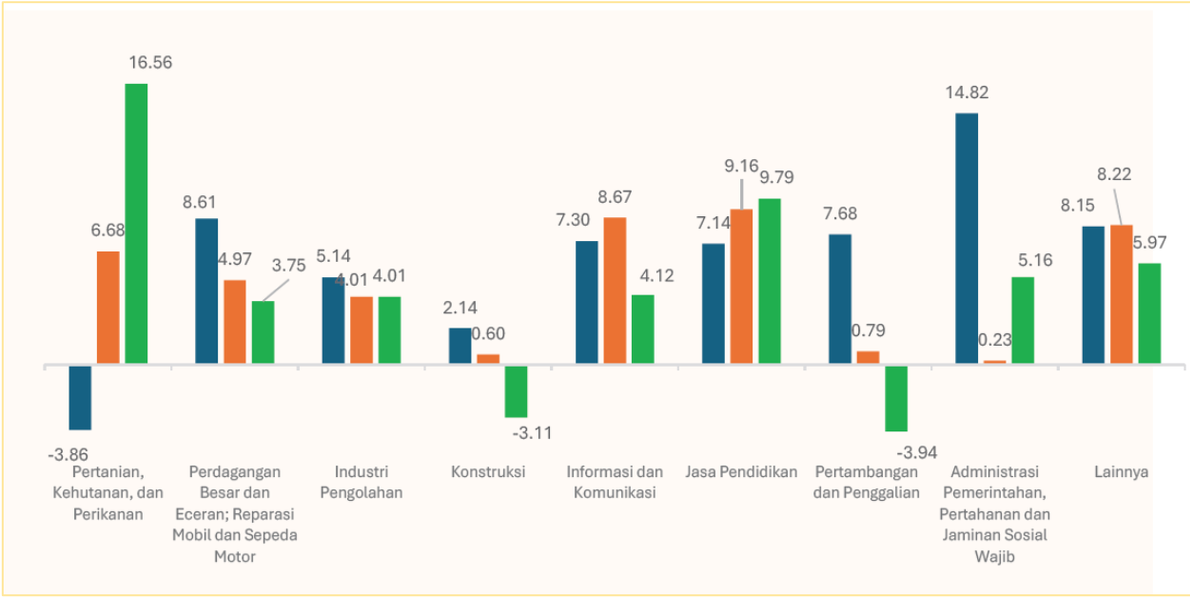
Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen dibanding triwulan I-2024. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian, dan Konstruksi yang terkontraksi masing-masing sebesar -3,94 persen dan -3,11

persen. Lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yakni sebesar 16,56 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori Jasa Lainnya sebesar 10,42 persen; Jasa Pendidikan sebesar 9,79 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,72 persen; dan Real Estate sebesar 6,95 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2025 tidak mengalami perubahan berarti. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan andil terbesar pada perekonomian Sulawesi Selatan, yakni sebesar 24,20 persen. Selanjutnya dikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,15 persen; Industri Pengolahan sebesar 13,18 persen; Konstruksi sebesar 11,56 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 5,54 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 68,63 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi PDRB beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS SulSel 2025.

2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Luwu

Berdasarkan PDRB harga konstan 2010 menurut lapangan, pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh positif sebesar 4,36 persen, pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,64 persen. Hal ini terjadi karena terdapat dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi). Kontraksi ini terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air sebesar -0,06 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

-0,14 persen. Fenomena penurunan pada lapangan usaha Pengadaan Air disebabkan adanya kemarau Panjang El Nino yang melanda Kabupaten Luwu sehingga debit air pada sumber air PDAM berkurang. Sementara itu, penurunan pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib disebebakan oleh realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen. Penyebab kenaikan pada lapangan usaha ini disebabkan munculnya kegiatan-kegiatan hiburan baru seperti pasar malam, festival, dan event lari yang menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, pada tahun 2024 juga diadakan Pemilu dan Pilkada. Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 15,33 persen, meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,35 persen. Peningkatan ini ditunjang oleh aktivitas pengolahan mineral yang mulai aktif di PT Bumi Mineral Sulawesi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi, terdapat dua yang mengalami pertumbuhan negatif. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 10 persen. Sembilan lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen. Sedangkan tiga lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/*Industry*		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishing*	0,32	5,29	5,01	2,29	1,74
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,93	3,77	4,32	9,76	5,39
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	-6,73	7,66	4,51	4,35	15,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	5,54	5,38	4,59	13,18	11,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	7,88	1,07	9,46	3,27	-0,06
F	Konstruksi/*Construction*	1,94	1,74	9,39	15,71	3,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	-0,58	9,68	8,74	10,09	8,07

Lapangan Usaha/*Industry*		2020	2021	2022	2023*	2024**
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	-9,84	7,79	16,58	8,77	7,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	-3,95	10,26	17,58	12,03	6,88
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	12,91	7,83	5,79	8,7	7,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	5,74	9,03	0,5	-3,01	4,07
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	5,78	6,13	4,78	5,57	6,03
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	-4,07	4,06	13,1	9,63	7,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	-0,17	6,05	-0,29	3,72	-0,14
P	Jasa Pendidikan/*Education*	7,28	5,05	4,07	8,31	6,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	12,33	10,52	6,2	7,14	8,25
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	-3,51	8,27	8,75	9,56	15,66
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**1,3**	**6,03**	**5,69**	**5,64**	**4,36**

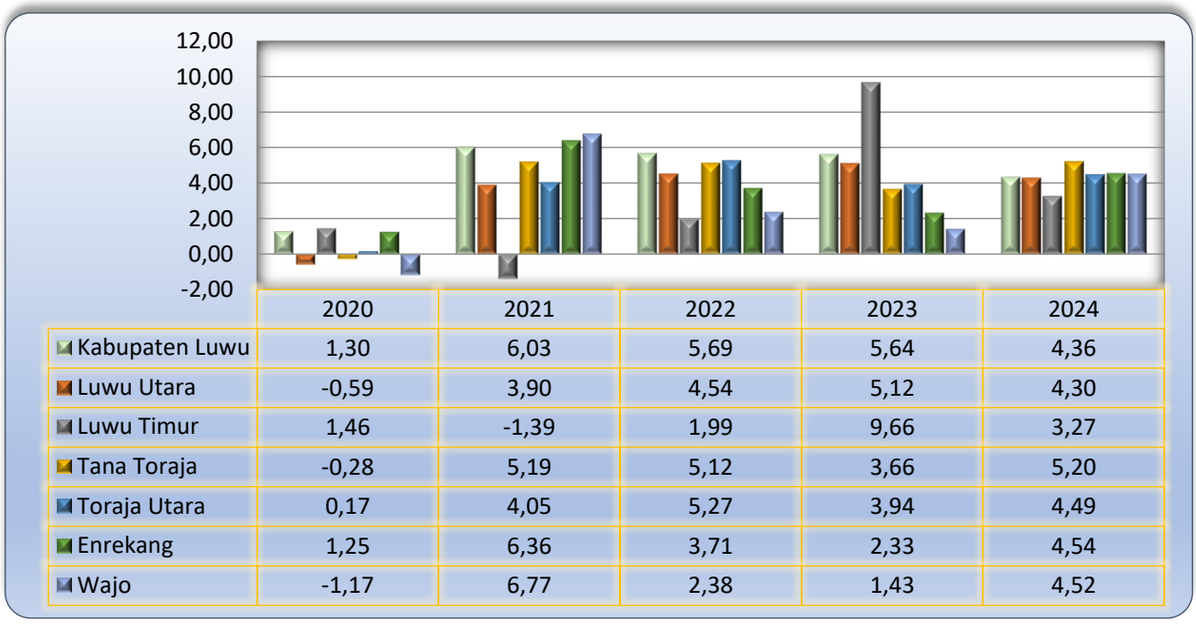
** Angka sementara/ Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures*

Sumber : BPS Kab. Luwu, 2025.

Grafik 2.3.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Luwu	1,30	6,03	5,69	5,64	4,36
Luwu Utara	-0,59	3,90	4,54	5,12	4,30
Luwu Timur	1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,20
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49
Enrekang	1,25	6,36	3,71	2,33	4,54
Wajo	-1,17	6,77	2,38	1,43	4,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu mengalami fluktuasi. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,03% dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 4,36%. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan, diakibatkan adanya bencana alam pada triwulan II tahun 2024, sehingga produksi pertanian mengalami kontraksi. Kemudian harga Jagung mengalami penurunan sehingga, para petani memilih untuk tidak menjual hasil produksi jagung. Sementara itu, terdapat dua sektor yang mengalami kontraksi yaitu Sektor Pengadaan air yang disebabkan oleh bencana banjir dan longsor sehingga sarana dan prasarana PDAM mengalami kerusakan dan produksi air mengalami penurunan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib juga mengalami kontraksi diakibatkan realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Adapun strategi pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain mendorong komoditas unggulan pada sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan; Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; Pemberdayaan Kelompok usaha tani; dan Pengembangan Pasar Digital dan *e-commerce* untuk Produk Lokal.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2024 berada di posisi ke lima di bawah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Toraja Utara.

2.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, dimana nilai PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB perkapita

tercatat sebesar 43,91 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 59,73 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga terus meningkat. Pada tahun 2020 nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar 26,99 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2024 menjadi sebesar 31,68 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	9.855.911,31	10.449.750,24	11.044.670,90	11.668.140,40	12.176.000,49
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	16.031.067,61	17.839.990,46	19.980.972,20	21.755.643,50	22.952.200,00
Jumlah Penduduk (Jiwa)	365.608	367.454	369.820	380.679	385.361
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)	26,99	28,29	29,51	30,76	31,68
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)	43,91	48,29	53,38	57,36	59,73

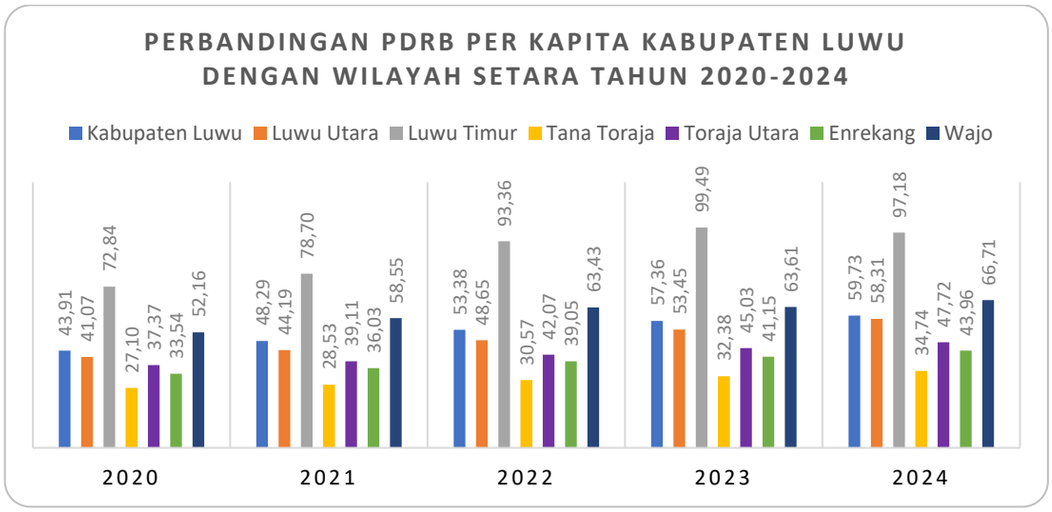
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2020-2024 nilai pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.43,91 juta, mengalami peningkatan sebesar 15,82 juta menjadi sebesar Rp.59,73 juta pada tahun 2024. Adapun peningkatan PDRB ADHB tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut. Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama juga terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 pendapatan perkapita ADHK mencapai Rp.26,99 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.4,69 juta atau menjadi sebesar Rp.31,68 juta pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, PDRB per kapita Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir berada di urutan ketiga tertinggi di bawah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Wajo. Dimana pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Luwu sebesar Rp. 59,73 juta atau meningkat sebesar Rp. 2,37 juta dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.1.3. Inflasi

Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada April Tahun 2025 sebesar 0,97 persen (yoy), hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan April 2025 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,94 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,14 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

IHK dan Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu April 2025, Tahun Kalender 2025 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK April 2025	Tingkat Inflasi April 2025 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2025 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi mtm April 2025 (%)	Andil Inflasi yoy April 2025 (%)
	Umum (Headline)	**106,87**	**107,91**	**1,07**	**1,65**	**0,97**	**1,07**	**0,97**

No	Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK April 2025	Tingkat Inflasi April 2025 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2025 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi mtm April 2025 (%)	Andil Inflasi yoy April 2025 (%)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	114,12	115,1	0,9	3,47	0,86	0,32	0,3
2	Pakaian dan Alas Kaki	101,86	103,02	0,11	0,63	1,14	0,01	0,06
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	100,54	101,47	4,5	0,67	0,93	0,69	0,14
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,46	102,01	0,07	0,47	0,54	~0	0,02
5	Kesehatan	100,19	100,68	0,05	0,19	0,49	~0	0,01
6	Transportasi	109,92	110,16	-0,33	-0,08	0,22	-0,04	0,03
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,88	98,74	-0,33	-0,34	-1,14	-0,02	-0,06
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,15	102,19	~0	0,24	0,04	~0	~0
9	Pendidikan	102	104,08	~0	0,98	2,04	~0	0,05
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104	104,16	~0	0,01	0,15	~0	0,02
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,27	111,51	1,74	4,65	6,94	0,11	0,4

Keterangan : [1] *Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Maret 2025.*
[2] *Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Desember 2024.*
[3] *Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK April 2024.*
~0 Data sangat kecil/mendekati nol.
Sumber: BPS Kota Palopo 2025.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada April 2025, antara lain: Emas perhiasan, udang basah, ikan cakalang/ikan sisik, minyak goreng, cabai rawit, ikan teri, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kontrak rumah, mobil, ikan tembang, ikan selar/ikan tude, sewa rumah, bawang putih, mie kering instant, wortel, ikan layang/ikan benggol, bayam, ikan kembung/ikan gembung, dan akademi/perguruan tinggi. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy antara lain: Beras, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, angkutan antar kota, telepon seluler, sawi hijau, tahu mentah, ikan bandeng/ikan bolu, tarif pulsa ponsel, daun bawang, jagung manis, gula merah, bensin, ketimun, kangkung, ayam hidup, ketela rambat, popok bayi sekali pakai/ diapers, dan tauge/kecambah.

Tingkat inflasi Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori inflasi ringan yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa yang relatif rendah yaitu tidak lebih dari 10% per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di wilayah sekitar pada tahun 2024, yang tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu sebesar 2,02% dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68%. Jika dibandingkan dengan Provinsi

Sulawesi Selatan dan Nasional, tingkat inflasi Kabupaten Luwu pada tahun 2024 masih lebih tinggi yaitu sebesar 1,87% sementara provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,23% dan Nasional sebesar 1,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.4.

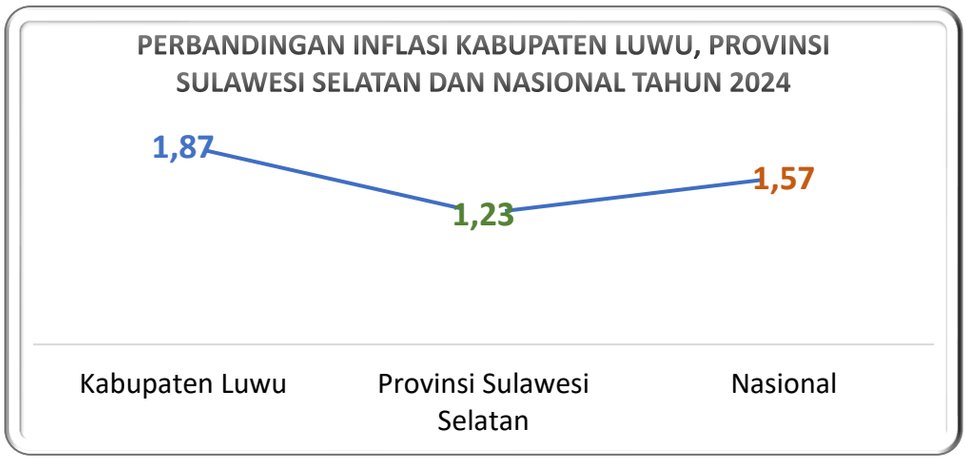
Perbandingan Inflasi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bulukumba	2,30	2,16	4,12	2,78	0,91
2	Watampone	1,89	2,26	5,52	2,84	1,11
3	Kab. Wajo	n.a	n.a	n.a	n.a	0,68
4	Kab. Sidrap	n.a	n.a	n.a	n.a	1,03
5	Kab. Luwu Timur	n.a	n.a	n.a	n.a	2,02
6	Kota Makassar	2,13	2,26	5,81	2,89	1,19
7	Kota Pare-Pare	1,61	4,09	6,66	2,22	1,73
8	Kota Palopo (Luwu)	1,21	2,96	5,13	2,21	1,87

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Grafik 2.5.

Perbandingan Inflasi Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerapkan beberapa strategi untuk menekan laju inflasi antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, Forkopimda dan dukungan pemerintah pusat; Menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi dan alat pertanian; Program Gerakan Pangan Murah dilaksanakan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan

pasokan dan keterjangkauan harga pangan; dan Pemantauan pasokan (operasi pasar) dan permintaan di tingkat daerah. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak tingkat inflasi yang lebih stabil dan terkendali.

2.1.4. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2024 di Kabupaten Luwu sebesar 290.190 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 198.230 orang yang terdiri dari penduduk bekerja 190.018 orang dan pengangguran 8.212 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang mencakup penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya sebanyak 91.960 orang.

Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 tercatat 7.251.384 orang. Sebanyak 4.885.688 merupkan angkatan kerja yang terdiri dari 4.680.928 penduduk yang bekerja dan 204.760 orang adalah pengangguran. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 2.365.696 orang. Pada tingkat nasional, jumlah usia kerja di Indonesia pada Agustus 2024 sebanyak 215.371.168 orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 152.107.603 orang yang terdiri dari 144.642.004 penduduk yang bekerja dan 7.465.599 orang merupakan pengangguran. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah sebesar 63.263.565 orang. Selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Agustus 2024

No	Kab/Provinsi/ Nasional	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja		Total	Bukan Angkatan Kerja
			Bekerja	Pengangguran		
1	Kabupaten Luwu	290.190	190.018	8.212	198.230	91.960
2	Sulawesi Selatan	7.251.384	4.680.928	204.760	4.885.688	2.365.696
3	Nasional	215.371.168	144.642.004	7.465.599	152.107.603	63.263.565

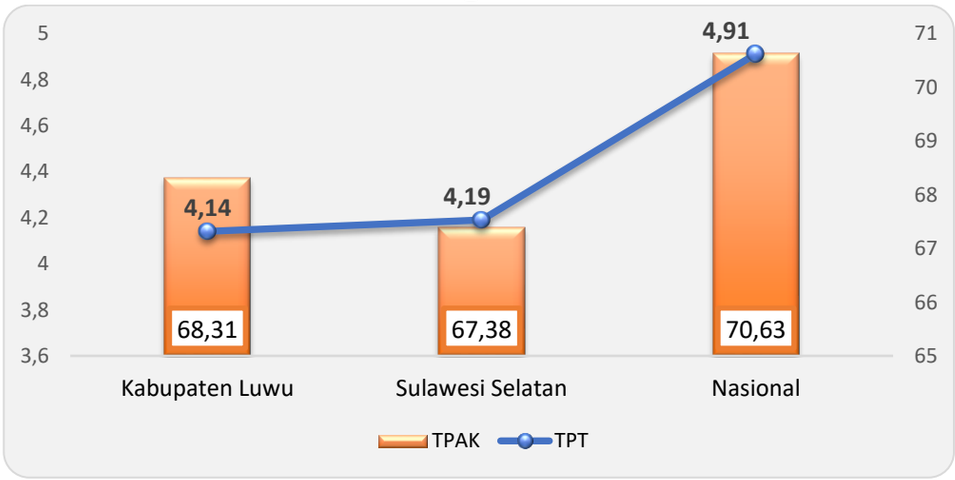
Sumber: Badan Pusat Statistik 2025.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Luwu pada Agustus 2024 tercatat 68,31 persen, capaian tersebut masih di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,38 persen, namun masih di bawah Nasional yaitu sebesar 70,63 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah guna mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kompetensi para pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Kabupaten Luwu pada periode yang sama adalah sebesar 4,14 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yaitu masing-masing sebesar 4,19 persen dan 4,91 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Agustus 2024

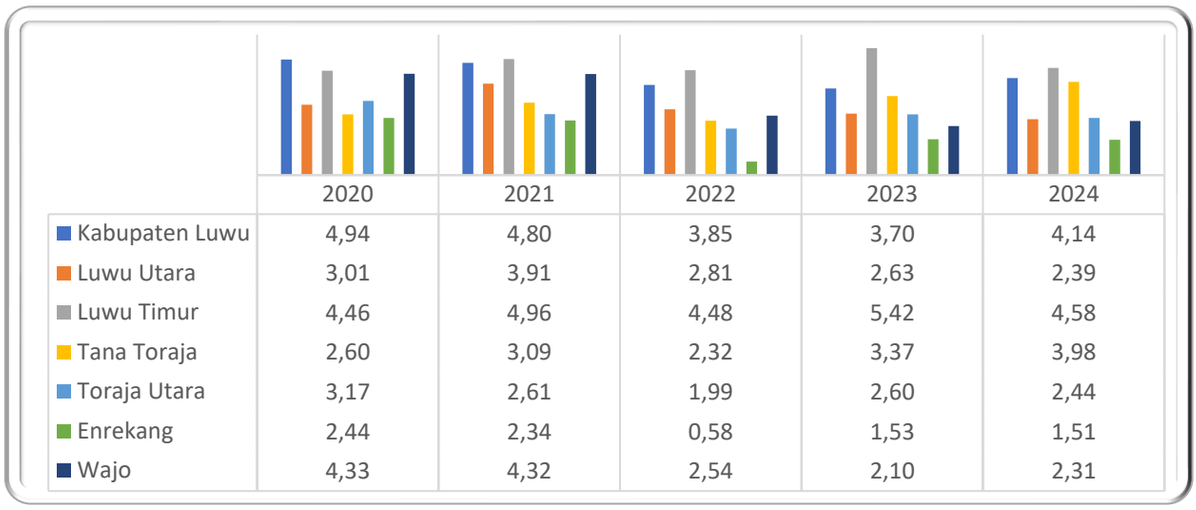


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Selama lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu berfluktuasi namun cenderung menurun. Dimana TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,94% dan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,70. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan TPT menjadi 4,14%. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana alam banjir yang mengakibatkan para petani menganggur karena lahan yang tidak berfungsi serta adanya pemutusan kontrak tenaga kerja konstruksi oleh PT. Bumi Mineral Sulawesi akibat dari beralihnya kontruksi ke industri pengolahan.

Grafik 2.7.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Luwu	4,94	4,80	3,85	3,70	4,14
Luwu Utara	3,01	3,91	2,81	2,63	2,39
Luwu Timur	4,46	4,96	4,48	5,42	4,58
Tana Toraja	2,60	3,09	2,32	3,37	3,98
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99	2,60	2,44
Enrekang	2,44	2,34	0,58	1,53	1,51
Wajo	4,33	4,32	2,54	2,10	2,31

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, TPT Kabupaten Luwu berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini tentu menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan tenaga kerja dan mendorong kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah Kabupaten Luwu agar memprioritaskan tenaga kerja dalam daerah.

2.1.5. Kemiskinan

Untuk data capaian kemiskinan Kabupaten Luwu pada Maret 2025 masih pada tahapan penyusunan dan rekonsiliasi dengan pusat, sehingga belum dipublikasikan untuk level Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, data yang ditampilkan hanya data capaian pada periode Maret 2024, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu sebesar 44.240 orang (11,70 persen), turun sebanyak 3.430 orang dibandingkan pada Maret 2023 yang berjumlah 47.670 orang (12,71). Namun, angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang masing-masing sebesar 8,06 persen dan 9,03 persen.

Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu masing-masing sebesar 2,05 dan 0,53. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Meski demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan

Nasional, yaitu masing-masing sebesar 1,39 dan 1,46 untuk P1 dan 0,34 dan 0,35 untuk P2.

Sementara itu, garis kemiskinan Kabupaten Luwu pada Maret 2024 sebesar Rp. 433.898, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 414.118. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional maka capaian tersebut juga masih lebih rendah. Dimana garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 459.226 dan Nasional sebesar Rp. 582.932. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, harga kebutuhan pokok dan pendapatan rata-rata masyarakat. Selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Periode Maret 2024

Indikator Kemiskinan	Satuan	Kabupaten Luwu	Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	44,24	736,48	25.219,20
Persentase	%	11,70	8,06	9,03
P1	Skor Indeks	2,05	1,39	1,46
P2	Skor Indeks	0,53	0,34	0,35
Garis Kemiskinan	Rupiah /kapita /bulan	433.898	459.226	582.932

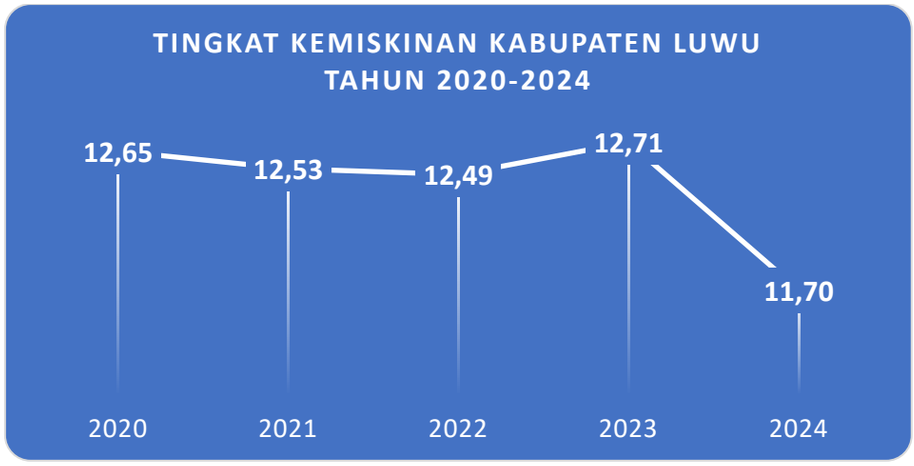
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi denhan kecenderungan menurun. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 12,71% dan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,70%. Adapun faktor pendorong menurunnya tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan pakaian siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, biaya operasional sekolah bagi peserta didik tidak mampu, jaminan kesehatan masyarakat (Pelayanan kesehatan gratis UHC-*Universal Health Coverage*), jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu, bantuan Bibit khususnya komoditi uggulan sector pertanian, perkebunan dan perikanan.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah melaksanakan pendidikan dan keterampilan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pembinaan dan pemberdayaan BUMDES dan Lembaga kerja sama antar desa, Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, Pemberdayaan usaha perikanan dan pertanian, Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan dan pertanian skala mikro dan kecil, dan Pemberian bantuan sarana dan prasarana hewan ternak. Sementara itu, untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur agar mempermudah akses mobilitas penduduk untuk meningkatkan perekonomian melalui rehabilitasi fasilitas kesehatan, rehabilitasi fasilitas pendidikan, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan tani, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur irigasi, dan pembangunan infrastruktur drainase.

Grafik 2.8.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, tahun 2025.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan wilayah setara pada tahun 2024, Kabupaten Luwu berada pada posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 11,70% diikuti oleh Kabupaten Enrekang sebesar 11,25% dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 11,24%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.9.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22	12,66	11,24
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81	6,93	6,55
Tana Toraja	12,1	12,27	12,18	12,48	10,79
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
Enrekang	12,17	12,47	12,39	12,69	11,25
Wajo	6,95	6,46	6,57	6,73	6,47

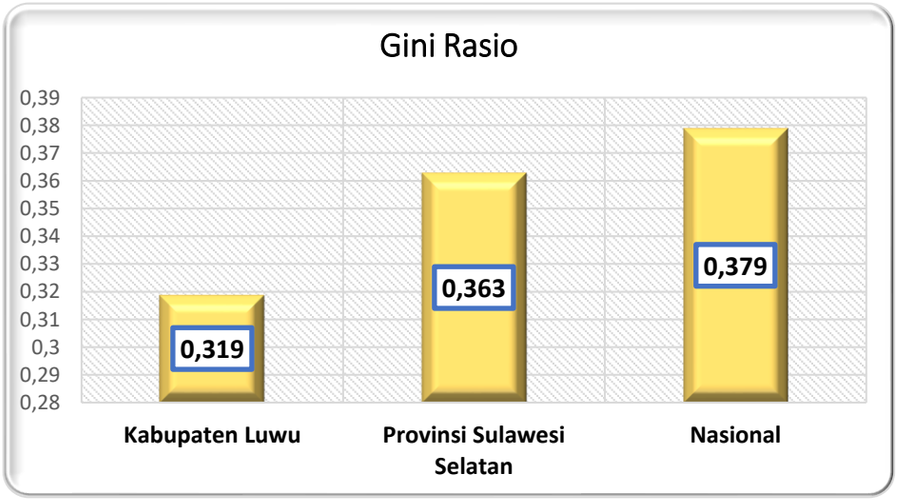
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.1.6. Gini Rasio

Sama halnya dengan data kemiskinan, data capaian gini rasio pada Maret 2025 masih dalam tahapan penyusunan dan rekonsiliasi dengan pusat, sehingga belum dipublikasikan pada level Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, data yang ditampilkan hanya data capaian periode Maret 2024, dengan nilai gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,319. Angka tersebut berada dibawah angka Provinsi dan Nasional dimana gini rasionya masing-masing sebesar 0,363 dan 0,379. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu tergolong sedang, tetapi hal ini tidak berbanding positif dengan angka kemiskinan, dimana fakta yang terjadi bahwa Masyarakat Luwu merata dengan pendapatan yang rendah. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10.

Gini Rasio Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Periode Maret 2024

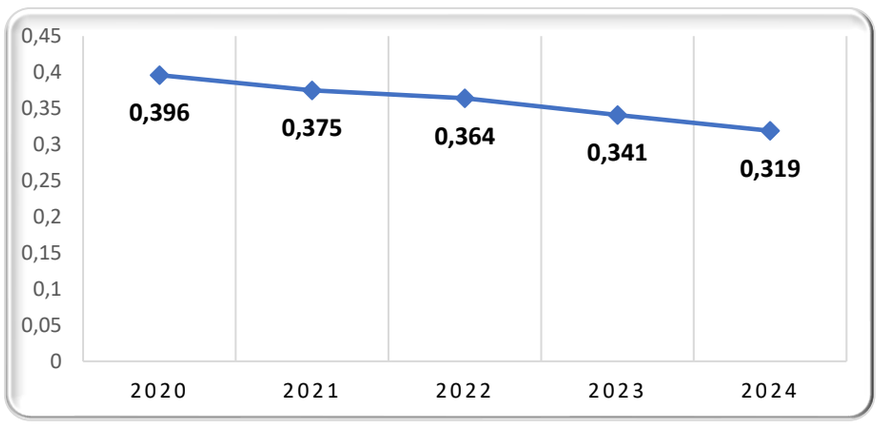


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Gini rasio Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan yaitu dari 0,396 pada tahun 2020 menjadi 0,319 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin meratanya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Luwu. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat Kabupaten Luwu tidak terlepas dari peran pemerintah yang terus mengupayakan berbagai program seperti perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui APBD dan APBDes; membangun infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertinggal sehingga membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi; pemberdayaan digital, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal, serta membuka peluang pasar hasil produksi masyarakat desa melalui BUMDES.

Grafik 2.11.

Gini Rasio Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

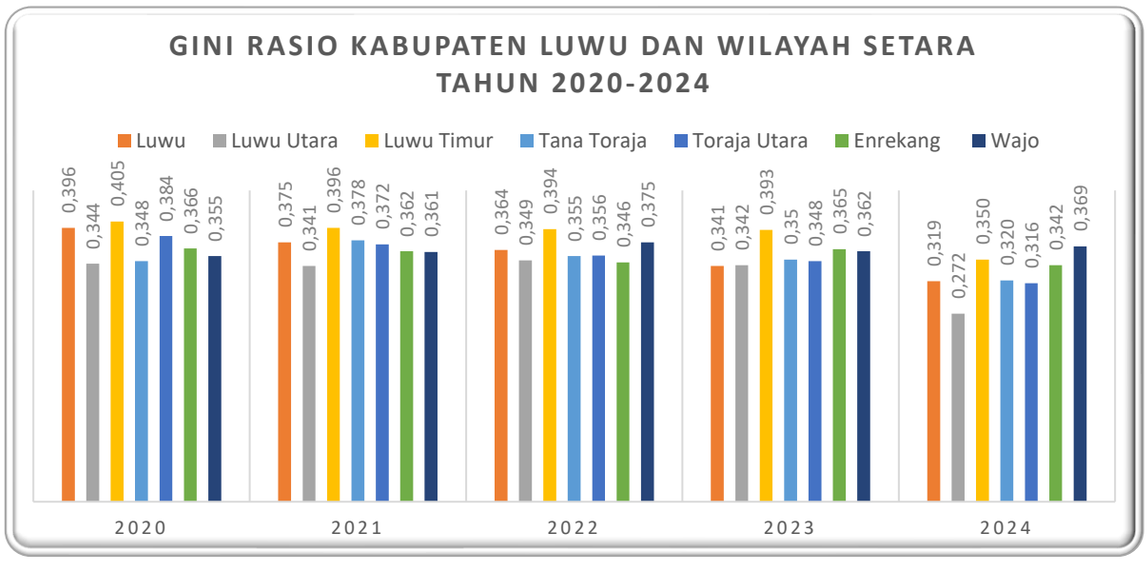


Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara pada tahun 2024, Kabupaten Luwu berada pada posisi ketiga dengan gini rasio terendah yaitu sebesar 0,319. Kabupaten Wajo pada posisi pertama yaitu sebesar 0,272, kemudian Kabupaten Toraja Utara pada posisi kedua yaitu sebesar 0,316. Capaian ini memberikan gambaran bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Luwu semakin menyempit. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.12.

Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai poin utama dari pembangunan daerah. IPM didefinisikan sebagai kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Nasional Bruto Perkapita. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian yang direpresentasikan oleh 3 komponen meliputi : Indeks Kesehatan panjang umur dalam menjalani hidup sehat, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Indeks (RLS), dan Indeks paritas daya beli/Purchasing Power Party (PPP).

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, adapun peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan capaian pada masing-masing komponen perhitungan seperti AHH, HLS, dan Pengeluaran Perkapita yang merupakan pendorong utama capaian IPM. Dari beberapa komponen pembentuk IPM, Rata-rata Lama Sekolah merupakan komponen yang perlu ditingkatkan sebab capaiannya sampai dengan tahun 2024 sebesar

8,81 tahun yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu hanya sampai kelas dua sekolah menengah pertama.

Tabel 2.7.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

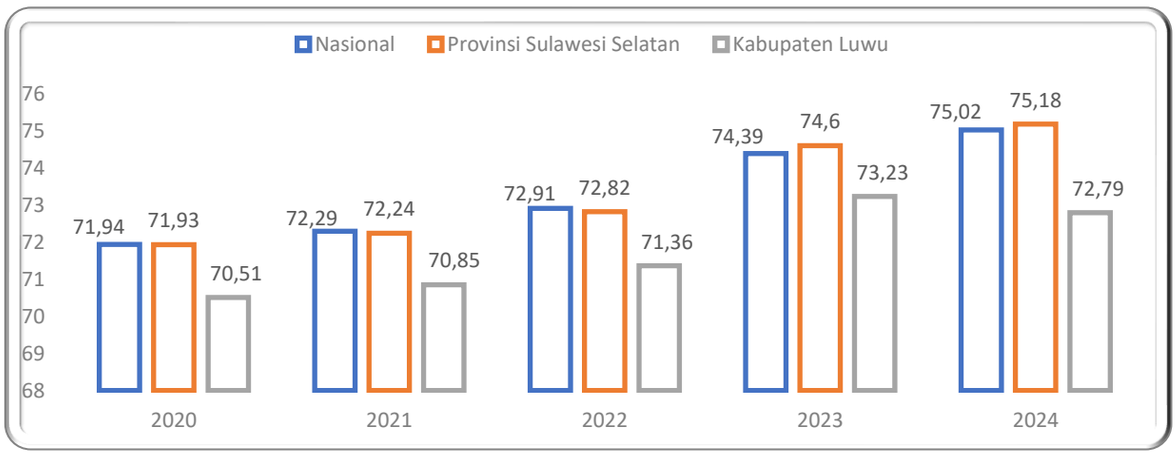
KOMPONEN IPM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,66	72,76	73,06	73,30	73,52
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,33	13,39	13,40	13,41	13,43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,24	8,35	8,48	8,73	8,81
Indeks Paritas Daya Beli (PPP)	Rupiah	-	Rp10.116,00	Rp10.308,00	Rp10.691,00	Rp11.121,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
Ranking Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan	Angka	11	13	14	14	15

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Selama lima tahun terakhir, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan, yaitu dari 70,51 pada tahun 2020 menjadi 72,79 pada tahun 2024. Akan tetapi masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2024 capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 berada di atas Nasional yaitu sebesar 75,02. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.13.

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

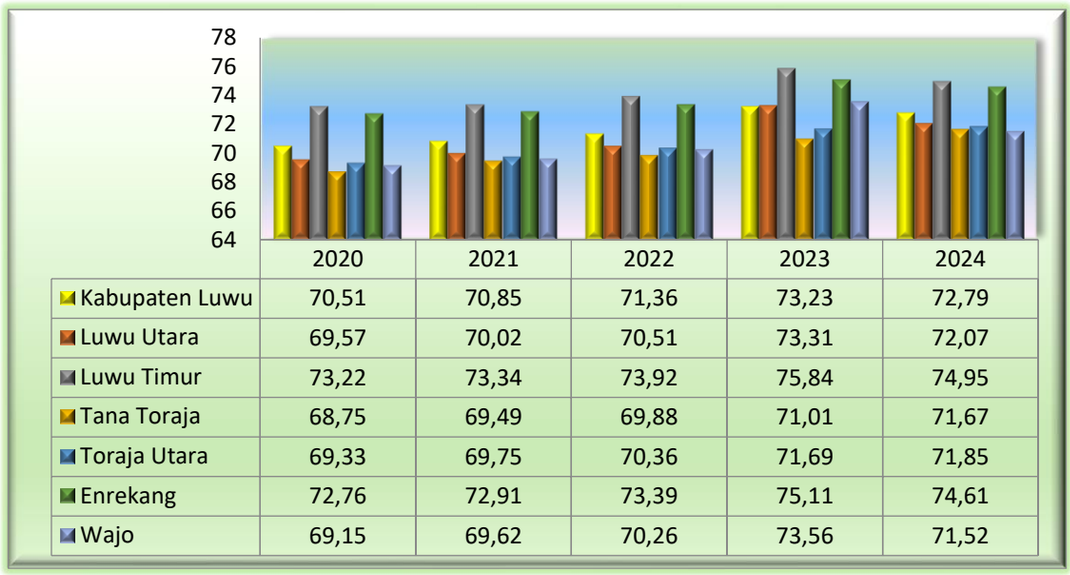


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025.

Pada tahun 2024 capaian nilai IPM Kabupaten Luwu telah mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin atau menjadi sebesar 73,86, dimana pada tahun 2023 sebesar 73,23. Meski terjadi peningkatan namun, capaian tersebut menempatkan Kabupaten Luwu pada peringkat ke lima belas dari 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan wilayah setara pada tahun 2024, Kabupaten Luwu berada pada posisi ketiga dengan IPM tertinggi, kemudian pada posisi kedua yaitu Kabupaten Enrekang dengan IPM sebesar 74,61 dan posisi pertama yaitu Kabupaten Luwu Timur dengan IPM sebesar 74,95. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14.

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Luwu	70,51	70,85	71,36	73,23	72,79
Luwu Utara	69,57	70,02	70,51	73,31	72,07
Luwu Timur	73,22	73,34	73,92	75,84	74,95
Tana Toraja	68,75	69,49	69,88	71,01	71,67
Toraja Utara	69,33	69,75	70,36	71,69	71,85
Enrekang	72,76	72,91	73,39	75,11	74,61
Wajo	69,15	69,62	70,26	73,56	71,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja suatu daerah, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu, maka dapat dilihat capaian IKU yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029. Adapun capaian masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	44,62	49,21	54,71	46,49	60,8

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
			(C)	(C)	(CC)		(B)
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor Indeks	60,04	60,08	60,88	61,81	62,18
			(B)	(B)	(B)	(B)	(B)
3	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	70,51	70,85	71,36	73,23	73,86
5	Indeks Pendidikan	Skor Indeks	64,49	65,03	65,48	66,36	66,67
6	Indeks Kesehatan	Skor Indeks	77,45	77,60	84,58	78,46	82,33
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor Indeks	Cukup	Cukup	76,45	77,69	78,21
8	Tingkat mobilitas	%	N.A	0,87	0,87	0,95	0,95
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N.A	97	74,89	82,00	82,00
10	Angka kemiskinan	%	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
11	PDRB perkapita ADHB	Juta Rupiah	44,02	48,55	54,03	57,36	59,73
12	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80	81,28	81,88	81,61	82,23
13	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,26	5,29	5,01	6,21	1,74
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor Indeks	76,01	74,31	76,04	75,21	73,83
15	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	3,2	2,8	2,8	2,20	2,10
16	Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	Desa	N.A	52	52	47,00	42,00
17	Persentase desa mandiri	%	0,00	0,97	1,44	5,31	5,31
18	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,3	6,03	5,69	5,64	4,36

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
19	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	11,06	7,66	4,51	3,80	3,80
20	Indeks Kepuasan Masyarakat atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Skor Indeks	79,28	80,06	78,14	82,82	80,20
21	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	%	N.A	100	100	100	100
22	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skor Indeks	71,67	71,5	72,19	78,54	48,48
23	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor Indeks	192,23 (Tinggi)	187,71 (Tinggi)	187,91 (Tinggi)	187,91	187,91
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Indeks	73,12	51,43	75,32	79,92	data belum rilis
25	Maturitas SPIP	Level	2,8	2,8	3	3	3
26	Indeks Pelayanan Publik	Skor Indeks	N.A	N.A	2,15	2,48	2,40
27	Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja	Persen	-6,45	6,63	7,80	7,06	0,84
28	Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
29	Indeks Desa Membangun	Skor Indeks	0,5947 (Tertinggal)	0,6201 (Berkembang)	0,6515 (Berkembang)	0,6757 (Berkembang)	0,7032 (Berkembang)
30	Indeks Daya Saing Daerah	Skor Indeks	N.A	N.A	2,82	2,79	3,23
31	Pertumbuhan Investasi	Persen	N.A	-5,88	457,4	37,01	-50
32	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO^2 eq	218.339,96	218.212,00	219.136,52	223.729,01	1.341.279,21

Sumber: Hasil Olah Data Tim Penyusun, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 24 indikator utama pembangunan mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Sementara itu, terdapat 8 indikator yang capaiannya menurun antara lain : Pertumbuhn PDRB sekto pertanian, kehutanan dan perikanan; Indeks Kerukunan Umat Beragama; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Kepuasan Masyarakat atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia; Indeks kualitas

lingkungan hidup; Indeks Pelayanan Publik; Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja; dan Pertumbuhan Investasi.

2.3. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja

2.3.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Sebagai informasi terkait jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 tersaji dalam tabel yakni seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2025

No	URAIAN	RKPD	KUA & PPAS	APBD
1	Jumlah Program	133	133	130
2	Jumlah Kegiatan	265	265	262
3	Jumlah Sub Kegiatan	944	944	934

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Luwu 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada RKPD tahun 2025 terdapat 133 program, 265 kegiatan, dan 944 sub kegiatan, sementara yang terakomodir dalam APBD tahun 2025 sebanyak 130 program, 262 kegiatan dan 934 sub kegiatan. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga kedepannya hal ini harus menjadi perhatian penting bagi para *stakeholder* untuk dapat menjaga aspek konsistensi perencanaan dan pengaggaran agar keberhasilan pencapaian program prioritas kepala daerah dapat tercapai.

2.3.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2025. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.

Realiasasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 Hingga Triwulan I

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	REALISASI s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keuangan	Fisik
1	DINAS PENDIDIKAN	465.089.245.869	67.893.835.811	14,60	24,82
2	DINAS KESEHATAN	222.762.821.161	19.610.577.933	8,80	32,17
3	RSUD BATARA GURU	178.312.186.288	39.477.581.540	22,14	37,64
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	125.680.493.764	2.518.504.814	2,00	34,57
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	12.478.212.834	817.263.284	6,55	26,40
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.405.197.726	1.437.596.440	19,41	33,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	7.065.476.145	1.653.012.309	23,40	39,77
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28.999.009.853	836.452.551	2,88	23,71
9	DINAS SOSIAL	4.960.488.263	838.145.393	16,90	28,72
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	6.852.887.900	1.343.614.711	19,61	33,33
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	3.508.382.546	539.898.366	5,82	21,75
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.913.160.309	844.426.898	21,58	36,68
13	DINAS PERTANAHAN	2.295.399.374	456.185.303	19,87	33,79
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.993.637.471	1.023.831.021	7,88	30,12
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	6.265.843.999	1.454.442.309	23,21	39,46
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	8.828.380.364	1.821.597.320	20,63	35,08
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	10.784.583.801	627.946.032	5,82	24,53
18	DINAS PERHUBUNGAN	10.947.050.061	2.127.719.000	19,44	33,04
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.615.836.364	999.093.308	15,10	25,67
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	3.659.248.575	739.021.689	20,20	34,33
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	5.007.037.742	899.629.122	17,97	30,54
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.370.524.247	865.102.711	13,58	23,09
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5.892.347.209	1.095.531.609	18,59	31,61
24	DINAS PERIKANAN	6.269.269.684	1.022.241.454	16,31	27,72
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.184.583.431	889.005.356	17,15	29,15
26	DINAS PERTANIAN	32.153.461.730	5.015.490.040	15,60	26,52
27	DINAS PERDAGANGAN	6.529.607.445	1.238.748.509	18,97	32,25
28	SEKRETARIAT DAERAH	38.884.567.730	9.095.941.972	23,39	39,77
29	SEKRETARIAT DPRD	30.117.425.360	5.886.209.744	19,54	33,23

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	REALISASI s/d Triwulan I	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keuangan	Fisik
30	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.744.188.711	934.514.087	12,07	20,51
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	302.377.994.664	18.304.168.303	6,05	27,54
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.130.272.603	2.782.857.843	19,69	33,48
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	8.149.361.480	1.374.657.869	16,87	28,68
34	INSPEKTORAT	12.028.074.131	2.276.673.853	18,93	32,18
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.474.675.514	642.362.270	11,73	26,16
	JUMLAH	**1.615.730.934.348**	**199.383.880.774**	**12,34**	**30,60**

Sumber : Bappelitbangda Kabupten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Luwu tahun 2025 sebesar Rp. 1.615.730.934.348, anggaran tersebut terbagi atas 35 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga Maret 2025 adalah sebesar 12,34% dengan capaian realisasi fisik sebesar 30,60%.

Sebagian besar perangkat daerah pada triwulan I tahun 2025 memiliki penyerapan anggaran kategori “Tinggi” yaitu dengan persentase berkisar antara ≥13% - ≤25%, sebanyak 25 OPD. Sementara itu sebanyak 10 OPD masuk dalam kategori “Rendah” dengan persentase serapan anggaran berkisar kurang dari 13%.

2.3.3 Evaluasi Capaian Pendanaan Program dan Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori “Rendah” untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 13%. Kategori “Tinggi” untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran berkisar ≥13% - ≤25% dan kategori “Sangat Tinggi” untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 25 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 25 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat OPD

dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori “Sangat Tinggi”.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 148 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori Rendah ada sebanyak 104 program atau 70,27 persen (realisasinya 0 - 13%). Untuk capaian kinerja kategori Tinggi sebanyak 37 program atau 25 persen (realisasinya ≥13% - ≤25%), dan untuk capaian kinerja kategori Sangat Tinggi sebanyak 7 program atau 4,73 persen (realisasi diatas 25%).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 450 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 308 kegiatan atau 68,44 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan I dalam kategori rendah yaitu 0 – 13 persen, sementara yang berada dalam kategori Tinggi sebanyak 107 kegiatan atau 23,78 persen, dan kategori Sangat Tinggi dengan capaian realisasi diatas 25 persen sebanyak 35 kegiatan atau 7,80 persen. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	DINAS PENDIDIKA	4	3	1	0	13	11	2	0
2	DINAS KESEHATAN	5	4	0	1	20	16	2	2
3	RSUD BATARA GURU	2	0	1	1	2	0	1	1
4	DINAS PU & TATA RUANG	11	10	1	0	22	20	2	0
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	5	4	1	0	30	28	2	0
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	5	1	0	13	10	3	0
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	1	1	0	11	7	4	0
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	2	1	1	0	12	4	4	4
9	DINAS SOSIAL	6	4	2	0	14	8	5	1
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	1	1	0	10	4	4	2
11	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	5	3	1	1	13	7	4	2

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	3	2	1	0	9	5	3	1
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	2	1	0	11	5	2	4
14	DINAS PERTANAHAN	5	4	1	0	10	6	4	0
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	6	1	1	13	9	2	2
16	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5	3	2	0	14	7	6	1
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	3	1	2	0	8	4	3	1
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	4	3	1	0	11	9	2	0
19	DINAS PERHUBUNGAN	3	1	2	0	13	8	5	0
20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANTIS	5	4	1	0	9	8	1	0
21	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	5	3	1	1	11	7	2	2
22	DINAS PENANAMAN MODAL & PSP	5	4	1	0	11	8	2	1
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	3	1	0	13	9	3	1
24	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	3	2	1	0	10	6	4	0
25	DINAS PERIKANAN	4	3	1	0	14	11	3	0

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Pendanaan		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	7	6	0	1	14	11	1	2
27	DINAS PERTANIAN	5	4	1	0	12	11	1	0
28	DINAS PERDAGANGAN	5	5	0	0	12	8	3	1
29	SEKRETARIAT DAERAH	3	1	2	0	20	7	12	1
30	SEKRETARIAT DPRD	2	1	1	0	16	14	2	0
31	INSPEKTORAT	3	2	1	0	12	8	2	2
32	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	4	1	0	17	16	1	0
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	2	1	0	11	8	3	0
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	0	1	1	8	3	3	2
35	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	3	2	1	0	11	5	4	2
	JUMLAH	**148**	**104**	**37**	**7**	**450**	**308**	**107**	**35**
	Total		**148**				**450**		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 13 persen. Kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 13 – 25 persen dan kategori Sangat Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 25 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 25 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan bahwa untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah yaitu dari 148 program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama, capaian kinerja program yang masuk pada kategori Rendah atau dibawah 13 persen terdapat 58 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori Tinggi (diatas 13-25 persen) terdapat 62 program, selebihnya sebanyak 28 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi yang pencapaiannya lebih dari 25 persen pada triwulan I Tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 450 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama terdapat 136 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori Rendah, sedangkan yang capaian kinerja kategori Tinggi terdapat 218 kegiatan, selebihnya terdapat 96 kegiatan yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori Sangat Tinggi karena capaian kinerjanya lebih dari 25 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan I Tahun 2025. Adapun gambaran pencapaian target kinerja program dan kegiatan hingga triwulan I tahun 20205, dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12.

Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	DINAS PENDIDIKAN	4	1	2	1	13	4	6	3
2	DINAS KESEHATAN	5	3	1	1	20	6	10	4
3	RSUD BATARA GURU	2	1	1	0	2	1	1	0
4	DINAS PU & TATA RUANG	11	5	5	1	22	7	11	4
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	5	2	2	1	30	9	15	6
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	3	2	1	13	6	5	2
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	1	1	0	11	4	5	2
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	2	1	1	0	12	4	6	2
9	DINAS SOSIAL	6	3	2	1	14	4	7	3
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	1	1	0	10	3	5	2
11	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	5	4	1	0	13	4	6	3

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
12	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	3	2	1	0	9	3	4	2
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	1	1	1	11	3	5	3
14	DINAS PERTANAHAN	5	2	2	1	10	4	4	2
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	3	4	1	13	4	6	3
16	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5	2	2	1	14	4	7	3
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	3	1	1	1	8	2	4	2
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	4	1	2	1	11	3	5	3
19	DINAS PERHUBUNGAN	3	2	0	1	13	4	6	3
20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANTIS	5	2	2	1	9	3	4	2
21	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	5	2	2	1	11	3	6	2
22	DINAS PENANAMAN MODAL & PSP	5	1	3	1	11	3	5	3
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	1	2	1	13	4	6	3
24	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	3	1	2	0	10	3	5	2
25	DINAS PERIKANAN	4	1	2	1	14	4	7	3
26	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	7	2	4	1	14	3	6	5

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigkat Capaian Kinerja		
			≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%		≤ 13%	≥ 13 - ≤ 25%	> 25%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
27	DINAS PERTANIAN	5	1	3	1	12	4	6	2
28	DINAS PERDAGANGAN	5	2	1	2	12	4	5	3
29	SEKRETARIAT DAERAH	3	1	1	1	20	6	10	4
30	SEKRETARIAT DPRD	2	1	1	0	16	5	8	3
31	INSPEKTORAT	3	2	1	0	12	4	6	2
32	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	2	2	1	17	5	9	3
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	0	2	1	11	3	6	2
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	0	1	1	8	2	4	2
35	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	3	0	1	2	11	1	7	3
	JUMLAH	**148**	**58**	**62**	**28**	**450**	**136**	**218**	**96**
	Total		**148**				**450**		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Tabel 2.13.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Luwu Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																	
1.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**																	
1.1.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	70,56	301.885.117.473	58,40	81.346.627.990		123.313.483.025		30.300.000,00	0	30.300.000	58,40	81.376.927.990	82,77	26,96	Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	100		97,04						0		97,04		97,04		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	98,56		40,92						0		40,92		41,52		
		Rata-rata Kemampuan Literasi	%	45,00		57,25						0		57,25		127,22		
		Rata-rata Kemampuan Numerasi	%	27,80		56,68						0		56,68		203,88		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS)	Orang				43.490.265.671		73.715.715.339		13.800.000,00	0	13.800.000	0	43.504.065.671			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						32.817.026.876		34.713.980.670		8.200.000,00	0	8.200.000	0	32.825.226.876			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						4.271.947.908		10.313.490.290		8.300.000,00	0	8.300.000	0	4.280.247.908			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						767.387.535		4.570.296.726		0	0	0	0	767.387.535			Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.1.03	**Program Pengembangan Kurikulum**	Persentase Kurikulum yang Dikembangkan	%	100	44.680.753	100	62.368.652,00	100	207.933.681		0	0		100	62.368.652	100	139,59	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						62.368.652		207.933.681		0	0	0	0	62.368.652			Dinas Pendidikan
1.1.04	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	99,56	544.052.046	89,96	989.226.805,00	99	1.447.346.896		0	0		89,96	989.226.805	90,36	181,83	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Adanya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen				989.226.805,00	1	1.447.346.896		0	0	0	0	989.226.805			Dinas Pendidikan
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				333.410.920.696,00	100	68.948.941.386		67.863.535.811,00	0	67.863.535.811	0	401.274.456.507			
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen				29.979.391	100	100.297.341		0	0		0	29.979.391			Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*				*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaran administrasi keuangan daerah pada SKPD	%				332.447.971.633	100	323.043.526.530		67.791.227.999,00	0	4.200.000	0	332.452.171.633			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%				21.413.480	100	55.283.805		4.200.000,00	0	0	0	21.413.480			Dinas Pendidikan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%				12.870.435	100	231.779.489		-	0	0	0	12.870.435			Dinas Pendidikan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Ketersediaan admnistrasi umum perangkat daerah	%				351.434.544	100	965.583.122		-	0	68.107.812	0	419.542.356			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%				504.355.403	100	670.253.950		68.107.812,00	0	0	0	504.355.403			Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%					100	108.519.034									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%	100			26.393.484.733,00	100	26.866.451.893		9.496.513.495			0	26.393.484.733,00	0	#DIV/0!	RSUD
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang				26.393.484.733,00	100	26.866.451.893,00		9.496.513.495	0	9.496.513.495	0	35.889.998.228,00			RSUD
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	100	492.890.916.171		130.580.689.039,00	100	128.967.466.300		29.981.068.045	0	29.981.068.045	0	160.561.757.084,00	0	32,58	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%				8.710.686.125,00	100	8.967.466.300,00			0	0	0	8.710.686.125,00			RSUD
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit	%				121.870.002.914,00	100	120.000.000.000,00		29.981.068.045	0	29.981.068.045	0	151.851.070.959,00			RSUD
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
1.02.02.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			70.613.494.035,00	100	68.948.941.386,00		19.273.696.651,00			0	70.613.494.035,00			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%				104.035.585,00	100	408.012.328,00		20.417.357,00	0	20.417.357,00	0	124.452.942,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	%				69.143.199.896,00	100	66.738.218.908		18.980.590.827,00	0	18.980.590.827,00	0	88.123.790.723,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%				6.500.000,00	100	40.600.000		0,00	0	0,00	0	6.500.000,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%				0	100	20.240.000		0	0		0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%				498.018.555,00		439.431.008		117.839.100,00	0	117.839.100,00	0	615.857.655,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								58.671.844		0		0	0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						739.477.659,00		869.200.000		130.333.813,00	0	130.333.813,00	0	869.811.472,00			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				122.262.340,00		374.567.298		24.515.554,00	0	24.515.554,00	0	146.777.894,00			Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	100	492.890.916.171	94,86	76.243.430.103,00	100	101.104.617.393,00		214.076.590,00	0		94,86	76.243.430.103,00	94,86	15,47	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	%				40.312.618.999,00	85	40.401.329.649		30.750.000,00	0	30.750.000,00	0	40.343.368.999,00			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	%				35.805.963.907,00	100	60.647.590.088		183.326.590,00	0	183.326.590,00	0	35.989.290.497,00			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	%				24.040.042,00	100	24.997.656		0,00	0	0,00	0	24.040.042,00			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	%				0	100	30.700.000		0	0	0,00	0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,001	4.834.876.253	0,1741	1.638.144.094,00		1.703.120.824,00		22.804.692,00	0	22804692	0,1741	1.660.948.786,00	17410,00	34,35	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Angka	0,027		0,5219		0,021				0		0,5219		1932,96		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	79,56		94,00		78,91				0		94		118,15		Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	%					100	40.011.950		0	0	0	0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP	%					100	202.586.445		Rp22.804.692,00	0	22804692	0	22.804.692,00			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	%				1.452.520.330,00	100	1.460.522.429		0,00	0	0,00	0	1.452.520.330,00			Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100	925.929.012	100	181.923.357,00	100	442.259.717		0	0		100	181.923.357,00	100	19,65	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	%				80.364.042,00	100	160.989.306		0,00	0	0,00	0	80.364.042,00			Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat					48.700.015,00	230	81.545.865		0,00	0	0,00	0	48.700.015,00			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi										0		0	0,00			Dinas Kesehatan
1..02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								30.730.400		0	0	0	0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						52.859.300,00		168.994.146		0,00	0	0,00	0	52.859.300,00			Dinas Kesehatan
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	%	100	2.220.499.094	100	207.880.791,00	100	275.909.641		100.000.000,00	0	100000000	100	307.880.791,00	100	13,87	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok				131.737.500,00	22	133.984.589		100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	231.737.500,00			Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								34.645.052		0	0	0,00	0	0,00			Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	%				76.143.291,00	100	107.280.000		0	0	0,00	0	76.143.291,00			Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			10.712.578.395,00	100	12.899.560.586		2.409.004.814,00	0	2.409.004.814,00	0	#VALUE!			Dinas PUTR
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%				0	100	51.668.998		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%				8.861.061.653	100	10.099.950.070		2.272.934.436,00	0	2.272.934.436	0	11.133.996.089,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%				562.597.116	100	973.203.730		0,00	0	0	0	562.597.116,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%				3.916.515	100	12.493.778		0,00	0	0	0	3.916.515,00			Dinas PUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%				11.733.000	100	131.821.964		0,00	0	0	0	11.733.000,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%				0	100	39.997.000			0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%				908.803.783	100	1.056.481.087		136.070.378,00	0	136.070.378	0	1.044.874.161,00			Dinas PUTR
1.03.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				364.466.328	100	533.943.959		0,00	0	0	0	364.466.328,00			Dinas PUTR
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Angka	0,40	40.630.447.564,00	11,13	16.475.536.985	11,40	17.639.097.559		109.500.000,00	0	109500000	11,13	16.585.036.985	2782,50	40,82	Dinas PUTR
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	54,21		69,19		68,00				0		69,19		127,63		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA	Lokasi				1.714.331.953	40	4.150.049.723		0,00	0	0	0	1.714.331.953,00			Dinas PUTR
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	Ha				14.761.205.032		13.489.047.836		109.500.000,00	0	109.500.000	0	14.870.705.032,00			Dinas PUTR
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	5.133.870.000,00	80,41	631.691.500,00	82,05	2.085.000.001		0,00	0	0	80,41	631.691.500,00	80,41	12,30	Dinas PUTR
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	%				631.691.500,00	79,63	2.085.000.001		0,00	0	0	0	631.691.500,00			Dinas PUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	%	100	500.000.000			31,00	150.000.000		0,00	0		0	0,00			Dinas PUTR
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	Unit					1	150.000.000		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	90,45	458.040.000,00	75,98	146.714.000	76,88	1.133.210.105		0,00	0	0	75,98	146.714.000,00	84,00	32,03	Dinas PUTR
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	%				146.714.000	77,15	1.133.210.105		0,00	0	0	0	146.714.000,00			Dinas PUTR
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	%	51,67	21.871.322.941,00	0,57	2.658.803.443,00	0,9716	4.900.255.038		0,00	0	0	0,57	2.658.803.443,00	1,10	12,16	Dinas PUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	%				2.658.803.443	0,9716	4.900.255.038		0,00	0	0	0	2.658.803.443,00			Dinas PUTR
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase luas permukiman yang dikembangkan	%	100		0		0,025	1.949.499.000		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	%					0,025	1.949.499.000		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Angka	9,21	5.138.569.079,00	0,12	504.926.450,00	10,73	1.200.142.771		0,00	0	0	0,12	504.926.450,00			Dinas PUTR
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	%				504.926.450,00		1.200.142.771		0,00	0	0	0	504.926.450,00			Dinas PUTR
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	%	5,71	10.903.245.406,00	0,00002	264.289.100,00		4.302.004.181		0,00	0	0	0,00002	264.289.100,00	0,00	2,42	Dinas PUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%				264.289.100,00		4.302.004.181		0,00	0	0	0	264.289.100,00			Dinas PUTR
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Angka	50,81	162.473.061.390,00	30,67	93.297.751.145,00		83.921.528.426		0,00	0	0	30,67	93.297.751.145,00	60,36	57,42	Dinas PUTR
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%				93.297.751.145,00		83.921.528.426		0,00	0	0	0	93.297.751.145,00			Dinas PUTR
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	5,01	251.753.698,00	0	0	81,14	432.541.891		0,00	0	0	0	0,00	0,00	-	Dinas PUTR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi kompetensi	Angka	30,02		0		29,38			0,00	0		0	0,00	0,00		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	Orang				0	284	284.247.715		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan	Sistem Informasi				0	1	141.363.956		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota	%				0	50	6.930.220		0,00	0	0	0	0,00			Dinas PUTR
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Ketaatan terhadap RTRW	%	34,90	962.577.280,00	5,62	545.401.520	5,33	932.410.056		0,00	0	0	5,62	545.401.520,00	16,10	56,66	Dinas PUTR
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	%				474.175.350	13,04	52.114.500		0,00	0	0	0	474.175.350,00			Dinas PUTR
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Dokumen				71.226.170	3	550.000.000		0,00	0	0	0	71.226.170,00			Dinas PUTR
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			100			3.348.567.314,00		4.501.284.498		798.943.484,00	0	798943484	0	4.147.510.798,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.735.400		46.080.568		5.586.500,00	0	5.586.500	0	25.321.900,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.554.232.138		3.358.304.256		663.881.469,00	0	663.881.469	0	3.218.113.607,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	%				16.946.000	100	25.024.200		4.000.000,00	0	4.000.000	0	20.946.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	%				15.000.000	90	89.216.726		0,00	0	0	0	15.000.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				366.440.210	100	504.733.604		53.305.660,00	0	53.305.660	0	419.745.870,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						337.259.397		387.894.012		50.384.617,00	0	50.384.617	0	387.644.014,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				38.954.169	100	90.031.132		21.785.238,00	0	21.785.238	0	60.739.407,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan iban rumah yang layak huni	%	100	1.854.262.242,00	0	538.940.400		600.235.719		10.675.300,00	0	10.675.300	0	549.615.700,00	0,00	29,64	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Dilakukan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	%				58.968.700		263.108.094		2.023.500,00	0	2.023.500	0	60.992.200,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Diberikan Sosialisasi Penyediaan, Rehabilitasi dan Relokasi	%						100		0,00	0	0	0	0,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	%				465.256.000	100	31.036.590			0	0	0	465.256.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	%				14.715.700	100	250.015.086		8.651.800,00	0	8.651.800	0	23.367.500,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6,45	5.515.588.234,00	6,19	22.954.200,00	6,02	1.996.038.703			0	0	6,19	22.954.200,00	95,97	0,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%					100	50.023.398		4.441.000,00	0	4.441.000	0	4.441.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata	%				10.266.000,00		216.009.360		2.749.000,00	0	2.749.000	0	13.015.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Kumuh di Kawasan Rumah Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	Kawasan				12.688.200,00	22	1.730.005.945		0,00	0	0	0	12.688.200,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,02	7.000.000.000,00	4,8	499.916.700,00	13,90	1.268.000.000		1.692.000,00	0	1692000	4,8	501.608.700,00	47,90	7,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian	Perumahan				499.916.700,00		1.268.000.000		0,00	0	0	0	499.916.700,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	80,79	13.837.669.746,00	3,96	7.317.788.600,00	96,21	3.756.516.061		0,00	0	0	3,96	7.317.788.600,00	4,90	52,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Perumahan				7.317.788.600,00	3	3.756.516.061		3.203.500,00	0	3.203.500	0	7.320.992.100,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
											3.203.500,00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.726.209.268,00		3.726.209.268	100	4.317.530.684		1.143.100.809	0	1.143.100.809	0	4.869.310.077,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	%				47.953.711	100	96.039.170		1.230.100	0	1.230.100	0	49.183.811,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu	%				3.161.614.789	100	3.431.651.520		1.069.040.494	0	1.069.040.494	0	4.230.655.283,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%				24.347.721	100	30.214.234		1.400.000	0	1.400.000	0	25.747.721,00			Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%				1.911.533	100	285.556.624		0	0	0	0	1.911.533,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				229.984.739	100	229.970.503		40.661.995	0	40.661.995	0	270.646.734,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%				85.891.260	100	13.156.941		0	0	0	0	85.891.260,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%				165.597.385	100	189.581.692		29.268.220	0	29.268.220	0	194.865.605,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%				8.908.130	100	41.360.000		1.500.000	0	1.500.000	0	10.408.130,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	9.777.333.735,00	100	5.209.229.559,00	100	2.777.114.328		294.495.631	0	294495631	100	5.503.725.190,00	100,00	56,29	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100		100		100				0		100		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	%				5.064.349.901	100	2.474.637.506		289.590.631	0	289.590.631	0	5.353.940.532,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	%				144.879.658	90	257.296.844		4.905.000	0	4.905.000	0	149.784.658,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	%					100	45.179.978		0	0	0	0	0,00			Satuan Polisi Pamong Praja
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Kegiatan					1				0		0				
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Orang					4				0		0				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	%					90				0		0				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.303.515.071,00		6.303.515.071	100	6.485.919.899		1.647.853.659,00	0	1.647.853.659	0	7.951.368.730,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	%					100	80.068.326		4.159.440,00	0	4.159.440	0	4.159.440,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	%				4.150.353.412	100	3.539.973.880		1.306.531.536,00	0	1.306.531.536	0	5.456.884.948,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	%				5.600.000	100	8.400.000		1.400.000,00	0	1.400.000	0	7.000.000,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				185.332.151	100	269.410.525		37.812.801,00	0	37.812.801	0	223.144.952,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								627.429.352		0	0	0	0	0,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				1.722.755.942	100	1.594.104.416		237.138.782,00	0	237.138.782	0	1.959.894.724,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah						239.473.566		366.533.400		60.811.100	0	60.811.100	0	300.284.666,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	712.519.385,00	100		100	428.119.703		5.158.650,00	0	5158650	100	5158650			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	70,92								0		0				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana yang Terlapor	%					100	200.932.300		3.811.100,00	0	3.811.100	0	3.811.100,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%					100	9.999.19		1.017.250,00	0	1.017.250	0	1.017.250,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang Telah Diketahui Penyebabnya dalam 1 (Satu) Tahun	%					100	15.006.476		330.300,00	0	330.300	0	330.300,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kecamatan					22	24.999.737		0	0	0	0	0,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian, Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi	%					100	177.182.000		0	0	0	0	0,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			2.948.984.610,00	100	3.386.073.389		825.246.176,00	0	825.246.176	0	3.774.230.786,00			BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%				13.991.167	100	25.283.975		3.962.635,00	0	3.962.635	0	17.953.802,00			BPBD
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%				2.310.215.283	100	2.343.563.919		666.938.552,00	0	666.938.552	0	2.977.153.835,00			BPBD
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi barang milik daerah	%				5.000.000	100	7.768.770		1.500.000,00	0	1.500.000	0	6.500.000,00			BPBD
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah	%				311.320.443	100	215.000.578		51.894.286,00	0	51.894.286	0	363.214.729,00			BPBD
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%				206.058.152	100	732.668.380		97.693.703,00	0	97.693.703	0	303.751.855,00			BPBD
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintahan daerah	%				102.399.565	100	61.787.767		3.257.000,00	0	3.257.000	0	105.656.565,00			BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	862.406.412,00	95,00	367.855.851	100	683.932.425		11.206.375,00	0	11206375	95	379.062.226	95,00	43,95	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100		90,00						0		90		90,00		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		100						0		100		100,00		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah orang yang terlayani dalam pemberian Informasi wilayah rawan bencana	%				16.116.726	100	366.956.809		7.360.460,00	0	3.705.495	0	19.822.221,00			BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase ketersediaan dukungan perencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	%				343.091.592	100	201.591.776		0	0	140.420	0	343.232.012,00			BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase ketersediaan peralatan dan logistik serta aparat tanggap darurat yang responsif	%				3.450.000		61.041.601		3.705.495,00	0	#REF!	0	#REF!			BPBD
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%				5.197.533	100	54.342.239		140.420,00	0	#REF!	0	#REF!			BPBD
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																	
1.06.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100			3.274.806.364,00	100	4.202.866.196		792.744.269,00	0	792.744.269	0	4.067.550.633,00			Dinas Sosial
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	%				13.601.191	100	26.335.737		2.251.526,00	0	2.251.526	0	15.852.717,00			Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	%				2.699.210.600	100	3.348.566.621		698.877.233,00	0	698.877.233	0	3.398.087.833,00			Dinas Sosial
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	%				5.923.007	100	9.610.060		1.400.000,00	0	1.400.000	0	7.323.007,00			Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				183.533.883	100	250.348.105		33.266.590,00	0	33.266.590	0	216.800.473,00			Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	%				260.404.844	100	256.435.261		52.568.920	0	52.568.920	0	312.973.764,00			Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				112.132.839	100	311.570.412		4.380.000	0	4.380.000	0	116.512.839,00			Dinas Sosial
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	%	100	85.358.295,00	87,50	5.952.955,00		18.187.632		0	0	0	87,5	5.952.955,00	87,50	6,97	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	%	100								0		0		0,00		Dinas Sosial
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yag Memperoleh Pemberdayan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	%					1	1.045.526		0	0	0	0	0,00			Dinas Sosial
01.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	PSKS				5.952.955	2	17.142.106		0	0	0	0	5.952.955,00			Dinas Sosial
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di Luar Panti	%	100	159.975.888,00	91,60	18.342.766		56.154.035		0	0	0	91,6	18.342.766	91,60	11,47	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		91,60						0		91,6		91,60		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100		91,60						0		91,6		91,60		
		Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100		91,60						0		91,6		91,60		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Layanan				18.342.766	4	34.544.587		0	0	0	0	18.342.766,00			Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Layanan				0	1	21.609.448		0	0	0	0	0,00			Dinas Sosial
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	247.825.003,00	56,09	247.825.003,00	100	477.690.881		3.701.124	0	3.701.124	56,09	251.526.127,00	56,09	101,49	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%				247.825.003,00	100	477.690.881		3.701.124	0	3.701.124	0	251.526.127,00			Dinas Sosial
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	1.219.165.403,00	93,12	259.540.164,00	100	316.689.553		40.700.000	0	40700000	93,12	300.240.164,00	93,12	24,63	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Layanan				26.014.700	15	44.394.073		0	0	0	0	26.014.700,00			Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Layanan				233.525.464	1	272.295.480		40.700.000	0	40.700.000	0	274.225.464,00			Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	%	100	43.251.079,00	100	11.902.000,00	100	19.444.800		1.000.000	0	1.000.000	100	12.902.000,00	100,00	29,83	Dinas Sosial
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Unit				11.902.000,00	1	19.444.800		1.000.000	0	1.000.000	0	12.902.000,00			Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			4.972.639.866,00	100	5.662.054.019		1.335.453.946	0	1.335.453.946	0	6.308.093.812,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.590.500	100	13.219.947		0	0	0	0	2.590.500,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%				4.399.038.399	100	4.950.479.543		1.239.083.092	0	1.239.083.092	0	5.638.121.491,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah	%				4.372.000	100	6.447.220		1.000.000	0	1.000.000	0	5.372.000,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%					100	15.000.000			0	0	0	0,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	%				246.102.730	100	319.222.646		50.211.165	0	50.211.165	0	296.313.895,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	%				260.061.847	100	308.929.186		40.034.689	0	40.034.689	0	300.096.536,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	%				60.474.390	100	48.755.477		5.125.000	0	5.125.000	0	65.599.390,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	90,45	3.552.652.882,00	50,65	679.891.165	81,68	1.900.729.307		0	0	0	50,65	679.891.165,00	56,00	19,14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	%	71,89		65,08		71,12				0		65,08		90,53		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	%				664.585.565	75	1.882.362.957		0	0	0	0	664.585.565,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	%				15.305.600	80	18.366.350		0	0	0	0	15.305.600,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	4,05	102.913.578,00		48.945.100,00	7,5	77.140.458		8.160.765	0	8.160.765	0	57.105.865,00	0,00	55,49	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	%				30.284.100,00	100	57.117.238		8.160.765	0	8160765	0	38.444.865,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	%				18.661.000	60	20.023.220		0	0	0	0	18.661.000,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	2.253.851.699,00	16,85	1.111.056.200,00	100	2.778.148.893		0	0	0	16,85	1.111.056.200,00	16,85	49,30	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	%				16.195.900	100	38.495.584		0	0	0	0	16.195.900,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	%				1.094.860.300	100	2.739.653.309		0	0	0	0	1.094.860.300,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha			184,5	16.129.700,00	12	24.999.096		0	0	0	184,5	16.129.700,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan			1		1				0		1		#DIV/0!		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04.24.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	%				16.129.700,00		24.999.097		0	0	0	0	16.129.700,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
2.08.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			2.479.759.698,00	100	2.892.779.144		539.898.366,00	0	539.898.366	0	3.019.658.064,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				21.457.950	100	32.124.283		0,00	0	0	0	21.457.950,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				2.024.693.919	100	2.208.553.865		467.387.542,00	0	467.387.542	0	2.492.081.461,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				5.176.460	100	7.133.980		1.000.000,00	0	1.000.000	0	6.176.460,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.280.762		274.724.411		43.202.741,00	0	43.202.741	0	228.483.503,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.388.507		304.633.220		7.256.433	0	7.256.433	0	243.644.940,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.762.100	100	65.609.385		21.051.650	0	21.051.650	0	27.813.750,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,40	43.703.498,00	0,02	78.643.725,00	0,37	130.002.807		0,00	0	0	0,02	78.643.725,00	5,00	179,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		%			0,02	27.052.701		50.002.696			0	0	0,02	27.052.701,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		%			0,02	51.591.024		80.000.111		0,00	0	0	0,02	51.591.024,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Angka	24,27	206.577.977,00	0,003	42.163.351,00		119.930.520		0,00	0	0	0,003	42.163.351,00	0,01	20,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Angka						100.135.160		0,00	0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Angka						19.795.360		0	0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	%	81,23	401.180.000			80,01	50.072.566			0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%						50.072.566			0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	%				20.559.229	100	30.203.676			0	0	0	20.559.229,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak						20.559.229		30.203.676			0	0	0	20.559.229,00			
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	693.093.664				100.000.200			0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								100.000.200			0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			100			3.107.506.641,00		3.470.438.695		840.426.898,00	0	840.426.898	0	3.947.933.539,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.358.297		27.246.743		4.881.305,00	0	4.881.305	0	19.239.602,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.653.154.249		2.838.875.858		0,00	0	0	0	2.653.154.249,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.983.791		3.348.309		2.052.759,00	0	2.052.759	0	6.036.550,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.727.858		10.479.246		1.926.921,00	0	1.926.921	0	9.654.779,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.490.658		237.091.773		64.607.314,00	0	64.607.314	0	209.097.972,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31.036.950			0	0	0	0,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.729.198		274.964.200		34.372.856,00	0	34.372.856	0	228.102.054,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.062.590		47.395.616		13.775.300,00	0	13.775.300	0	103.837.890,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN**	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapita/Hari	0,042	322.581.390,00	165,23	359.739.627,00	108,77	423.200.234		4.000.000,00	0	4000000	165,23	363.739.627,00	393404,76	112,76	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Komsumsi Energi	Gr/Kapita/Hari	0,703		6,02		109,52				0		6,02		856,33		
		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	Angka	6,70		98,35		6,02				0		98,35		1467,91		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						51.478.247		158.008.165		4.000.000	0	4.000.000	0	55.478.247,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						308.261.380		215.394.992		0	0	0	0	308.261.380,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						0		49.797.077		0	0	0	0	0,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	%	25,20	257.214.853,00	80,18	81.791.553,00	80,27	68.017.974		0	0	0	80,18	81.791.553,00	318,17	31,80	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia						1	9.095.609		0	0	0	0	0,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						81.791.553		58.922.365		0	0	0	0	81.791.553,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Keamanan Pangan yang diuji		100	250.823.248				21.788.530			0	0	0	0,00			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								21.788.530			0	0	0	0,00			Dinas Ketahanan Pangan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			100														
2.10.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						1.924.575.845,00		2.188.736.750		456.185.303,00	0	456.185.303	0	2.380.761.148,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.377.068		19.197.835		377.289,00	0	377.289	0	7.754.357,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.447.191.178		1.511.815.528		398.602.539,00	0	398.602.539	0	1.845.793.717,00			Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.464.021		4.086.286		0	0	0	0	2.464.021,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.906.152		34.900.126			0	0	0	30.906.152,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						176.196.791		243.019.061		11.891.125,00	0	11.891.125	0	188.087.916,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.972.000		0	0	0	0	0,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.112.450		314.268.000		36.515.150,00	0	36.515.150	0	263.627.600,00			Dinas Pertanahan
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.328.185		52.477.914		8.799.200,00	0	8.799.200	0	42.127.385,00			Dinas Pertanahan
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100	123.272.852,00	66,00	36.010.504,00	100	88.949.904		0	0	0	66	36.010.504,00	66,00	29,21	Dinas Pertanahan
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi					36.010.504,00				0	0	0	0	36.010.504,00			Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**								280.000.000		0	0	0	0	0,00			Dinas Pertanahan
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								280.000.000		0	0	0	0	0,00			Dinas Pertanahan
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah	%	100	92.546.851,00		12.535.550,00		15.014.370		0	0	0	0	12.535.550,00	0,00	13,55	Dinas Pertanahan
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12.535.550,00		15.014.370		0	0	0	0	12.535.550,00			Dinas Pertanahan
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	0,36	750.053.232,00	100	119.302.072,00		144.974.510		0	0	0	100	119.302.072,00	27777,78	15,91	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						119.302.072,00		144.974.510		0	0	0	0	119.302.072,00			Dinas Pertanahan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																	
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			2.492.148.791,00	100	2.941.397.818		702.972.221,00	0	702.972.221	0	3.195.121.012,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.038.381		19.647.713		2.264.951,00	0	2.264.951	0	16.303.332,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.189.504.737		2.600.101.538		612.034.660,00	0	612.034.660	0	2.801.539.397,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.850.161		8.724.477		0,00	0	0	0	5.850.161,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.645.315		108.466.690		45.952.615,00	0	45.952.615	0	158.597.930,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.312.197		147.150.000		35.333.135,00	0	35.333.135	0	161.645.332,00			Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.798.000		57.307.400		7.386.860,00	0	7.386.860	0	51.184.860,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	5.584.212.443,00	77,71	291.951.015,00		325.677.770		0,00	0	0	77,71	291.951.015,00	77,71	5,23	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						4.880.800		9.474.000		0,00	0	0	0	4.880.800,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						287.070.215		316.203.770		0,00	0	0	0	287.070.215,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	415.459.800,00	68,24	57.900.455,00		84.845.159		9.793.000,00	0	9.793.000	68,24	67.693.455,00	126,37	16,29	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						57.900.455,00		84.845.159		9.793.000,00	0	9.793.000	0	67.693.455,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase luas kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola			777.444,00	9,58	777.444,00		8.114.000		0,00	0	0	9,58	777.444,00	#DIV/0!	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						777.444,00		8.114.000		0,00	0	0	0	777.444,00			Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah B3)	%	20,98	250.440.742,00		2.736.039,00		7.130.889		0,00	0	0	0	2.736.039,00	0,00	1,09	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						2.736.039,00		7.130.889		0,00	0	0	0	2.736.039,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai	%	54,01	10.469.242,00		9.595.374,00		17.668.272		4.980.800,00	0	4.980.800	0	14.576.174,00	0,00	139,23	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						9.595.374,00		17.668.272		4.980.800,00	0	4.980.800	0	14.576.174,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	40.000.000,00	7,26	573.800,00		7.902.598		0,00	0	0	7,26	573.800,00	7,26	1,43	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						573.800,00		7.902.598		0,00	0	0	0	573.800,00			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	99,34	6.475.612.420,00	96,31	1.820.238.517,00		4.689.046.551		306.085.000,00	0	306.085.000	96,31	2.126.323.517,00	96,95	32,84	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						1.820.238.517,00		4.689.046.551		306.085.000,00	0	306.085.000	0	2.126.323.517,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100			3.639.043.748,00	100	4.422.720.984		1.381.426.430,00	0	1.381.426.430	0	5.020.470.178,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen				10.874.390	2	21.611.750		2.000.000,00	0	2.000.000	0	12.874.390,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				3.065.585.230	33	3.382.441.396		855.266.501,00	0	855.266.501	0	3.920.851.731,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				6.958.850	4	9.889.000		1.400.000,00	0	1.400.000	0	8.358.850,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen				11.726.080	1	24.796.500		6.000.000,00	0	6.000.000	0	17.726.080,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket				211.888.193	9	559.398.888		479.307.276,00	0	479.307.276	0	691.195.469,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					8	10.524.000		0,00	0	0	0	0,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan				278.401.735	2	317.876.026		37.452.653,00	0	37.452.653	0	315.854.388,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kendaraan				53.609.270	29	96.183.424		0,00	0	0	0	53.609.270,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	100	990.353.744,00	99,45	566.986.087		280.764.996		31.143.931,00	0	31.143.931		598.130.018	0,00	60,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	23,21		54,80						0				0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	100		95,75		100				0				0,00		
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						545.299.487		234.392.096		31.143.931,00	0	31.143.931	0	576.443.418,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan pendafataran penduduk	Laporan				21.686.600	1	46.372.900		5.083.200,00	0	5.083.200	0	26.769.800,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,51	219.017.967,00	0,9247	80.426.299,00		106.707.625		10.488.748,00	0	10.488.748	0,9247	90.915.047,00	181,31	41,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan				61.819.799		60.836.505		10.488.748,00	0	10.488.748	0	72.308.547,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan				18.606.500	1	45.871.120		0,00	0	0	0	18.606.500,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100	500.358.492,00	99,00	199.475.862,00	100	270.457.010		26.300.000,00	0	26.300.000	99	225.775.862,00	99,00	45,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan	Dokumen				33.117.187	1	51.722.780		6.300.000,00	0	6.300.000	0	39.417.187,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan				166.358.675		218.734.230		20.000.000,00	0	20.000.000	0	186.358.675,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	%	100	15.077.701	99,00	0	100	7.675.900		0,00	0	0	99	0,00	99,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen				0	2	7.675.900		0,00	0	0	0	0,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			100			3.719.613.577,00		4.594.084.647		923.630.920,00	0	923.630.920	0	4.643.244.497,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.042.300		38.328.062		0,00	0	0	0	13.042.300,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.037.993.024		3.688.178.305		847.073.971,00	0	847.073.971	0	3.885.066.995,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								35.541.440		1.400.000,00	0	1.400.000	0	1.400.000,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26.605.000		28.088.620		0,00	0	0	0	26.605.000,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.151.253		320.568.490		25.857.400,00	0	25.857.400	0	310.008.653,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.350.000		38.323.900		0,00	0	0	0	18.350.000,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						309.160.000		401.281.830		49.299.549,00	0	49.299.549	0	358.459.549,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01..2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.312.000		43.774.000		0,00	0	0	0	30.312.000,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	74,23	250.000.000				40.000.000		869.621.800,00	0	869.621.800	0	869.621.800,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								40.000.000			0	0	0	0,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.04	Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Administrasi PemerintahanDesa										869.621.800,00							
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase program kerja sama antar desa yang berlanjut setelah tahap awal pelaksanaan	%	98,00	38.917.564,00	39,13	10.966.500,00		17.000.000			0	0	39,13	10.966.500,00	39,93	28,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						10.966.500,00		17.000.000			0	0	0	10.966.500,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	7,25	6.015.679.455,00	14,49	3.522.181.653,00	6,23	5.245.547.029		869.621.800,00	0	869621800		4.391.803.453,00	0,00	73,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase peningkatan status desa maju	%	6,3		39,13		6,21				0				0,00		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.522.181.653		5.245.547.029		869.621.800,00	0	869.621.800	0	4.391.803.453,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Presentase Desa Dengan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	%	57,20	2.281.134.440,00	0	1.040.984.750,00		1.070.000.000		28.344.600,00	0	28.344.600	0	1.069.329.350,00	0,00	46,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga				1.040.984.750		1.070.000.000		28.344.600,00	0	28.344.600	0	1.069.329.350,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
2.14.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan	100			2.513.224.620,00	17	2.990.142.944		488.735.952,00	0	488.735.952	0	3.001.960.572,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan				4.816.500	6	12.998.523		0,00	0	0	0	4.816.500,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan				1.773.020.942	5	2.024.626.435		444.995.952,00	0	444.995.952	0	2.218.016.894,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan				4.520.000	2	60.000.000			0	0	0	4.520.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan				352.452.848	8	433.562.979		0,00	0	0	0	352.452.848,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.218.000		299.631.777		37.740.000,00	0	37.740.000	0	273.958.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Kegiatan				142.196.330	1	159.323.230		6.000.000,00	0	6.000.000	0	148.196.330,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Total Fretility Rate (TFR)	Angka	2,35	931.561.022,00	2,33	289.327.089,00	2,9	654.809.639		0,00	0	0	2,33	289.327.089,00	99,15	31,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Total Fretility Rate (TFR)				2,33	289.327.089,00		654.809.639		0,00	0	0	2,33	289.327.089,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	32,14	9.077.377.088,00	66,07	5.259.018.424,00	51,2	8.901.926.132		139.210.080,00	0	139210080	66,07	5.398.228.504,00	205,57	59,47	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	30,02		13,10		32,09				0		13,1		43,64		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%				1.389.328.224	4	1.977.422.470		139.210.080,00	0	139.210.080	0	1.528.538.304,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%				628.200.000	90	681.000.000		0,00	0	0	0	628.200.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03..2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%				2.605.976.200	100	1.436.188.222		0,00	0	0	0	2.605.976.200,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%				635.514.000,00	100	4.807.315.440		0,00	0	0	0	635.514.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga ((BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	%		2.468.000.200,00	80,00	2.468.000.200,00	84	2.126.910.000		0,00	0	0	80	2.468.000.200,00	#DIV/0!	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%				2.468.000.200,00		2.126.910.000		0,00	0	0	0	2.468.000.200,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	DINAS PERHUBUNGAN																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.231.856.587,00		4.813.814.145		1.091.436.171		1.091.436.171	0	5.323.292.758			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.716.379,00		43.805.096		0		0	0	15.716.379			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan administrasi keuangan secara tepat waktu	%				3.382.534.008,00	100	3.670.452.063		Rp956.396.210,00		956.396.210	0	4.338.930.218			Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%				1.450.000,00	100	28.816.560		0		0	0	1.450.000			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%				295.247.288,00	100	373.005.255		Rp49.398.161,00		49.398.161	0	344.645.449			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%					70	24.573.087		0		0	0	-			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%				381.121.172,00	100	512.940.000		Rp79.841.800,00		79.841.800	0	460.962.972			Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.787.740,00	100	160.222.084		Rp5.800.000,00		5.800.000	0	161.587.740			Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,63	14.796.811.081	0,62	6.864.023.139,00	0,57	6.950.362.457		Rp1.030.882.829,00		1.030.882.829	1	7.894.905.968	98,41	53,36	Dinas Perhubungan
		V/C Ratio di Jalan kabupaten	%	0,95		0,48		0,9					0	0	-	50,53		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%				3.787.863.634,00	40	4.130.811.930		Rp823.570.429,00		823.570.429	0	4.611.434.063			Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	%				276.406.000,00	100	912.031.049		0		0	0	276.406.000			Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%				155.833.000,00	100	133.913.789		5.200.000		5.200.000	0	161.033.000			Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%				2.642.787.913,00	80	1.759.149.739		201.112.400		201.112.400	0	2.843.900.313			Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%				1.132.592,00	80	14.455.950		1.000.000		1.000.000	0	2.132.592			Dinas Perhubungan
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	%	92	92.263.500		31.300.000,00	91,02	52.731.350		5.400.000		5.400.000	0	36.700.000	0,00	39,78	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan penyelenggaraan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					31.300.000,00		52.731.350		5.400.000		5.400.000	0	36.700.000			Dinas Perhubungan
													0	0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						3.925.614.410,00	100	4.174.867.197		958.293.308		958.293.308	0	4.883.907.718			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	%				22.727.355,00		46.255.388		2.000.000		2.000.000	0	24.727.355			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.420.954.636,00		3.603.512.524		951.080.148		951.080.148	0	4.372.034.784			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%				330.280.707,00	100	331.259.407		0		0	0	330.280.707			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%				111.958.152,00	100	128.963.078		5.213.160		5.213.160	0	117.171.312			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Ketentuan/ Kebutuhan	%				39.693.560,00	100	64.876.800		0		0	0	39.693.560			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	92,8	4.742.781.393		1.624.333.593,00	92,67	1.671.120.410		36.000.000		36.000.000	0	1.660.333.593	0,00	35,01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	86,9		60		86,2					0	60	-	69,04		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.624.333.593,00		1.671.120.410		36.000.000		36.000.000	0	1.660.333.593			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82,09	5.966.055.027	19,29	450.077.415,00	80,23	755.827.450		2.800.000		2.800.000	19	452.877.415	23,50	7,59	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						450.077.415,00	82,09	755.827.450		2.800.000		2.800.000	0	452.877.415			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**												0	0	-			
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	242.709.470	100	35.920.740,00	100	179.986.560		2.000.000		2.000.000	100	37.920.740	100,00	15,62	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100					0	100	-	100,00		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						35.920.740,00		179.986.560		2.000.000		2.000.000	0	37.920.740			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**												0	0	-			
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	72.178.864		31.128.613,00	100	43.399.400		0		0	0	31.128.613	0,00	43,13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten	%				1.425.000,00	100	10.218.100		0		0	0	1.425.000			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				2.578.412.207,00	100	3.748.519.814		640.368.864		640.368.864	0	3.218.781.071			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%				5.686.649,00	100	31.579.217		587.379		587.379	0	6.274.028			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%				2.040.255.304,00	100	2.519.564.721		541.902.393		541.902.393	0	2.582.157.697			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0		3.490.052		0		0	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.429.775,00		605.590.441		45.753.506		45.753.506	0	266.183.281			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.030.000,00		115.031.524		0		0	0	6.030.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						292.120.479,00		348.000.000		49.185.586		49.185.586	0	341.306.065			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.890.000,00		85.003.859		0		0	0	13.890.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Aktif	%	27,31	71.050.000	41,62	8.283.786,00	27,09	34.998.787		0		0	42	8.283.786	152,40	11,66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	%				8.283.786,00	100	34.998.787		0		0	0	8.283.786			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dibina	%	35,67	582.779.732	6,4	10.107.982,00	35,21	294.645.384		0		0	6	10.107.982	17,94	1,73	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	%				10.107.982,00	100	294.645.384		0		0	0	10.107.982			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	2.336.734.906		365.745.264,00	100	500.508.900		98.652.825		98.652.825	0	464.398.089	0,00	19,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						365.745.264,00		500.508.900				0	0	365.745.264			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase perusahaan industri yang melapor pada aplikasi sinas	%	100	41.593.001	8,75	11.422.495,00	100	24.989.463		0		0	9	11.422.495	8,75	27,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						11.422.495,00		24.989.463		0		0	0	11.422.495			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						3.618.994.716,00		4.370.646.867		895.144.122		895.144.122	0	4.514.138.838			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.952.111,00		21.536.900		3.868.689		3.868.689	0	19.820.800			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.437.808.640,00		2.566.979.302		679.291.327		679.291.327	0	3.117.099.967			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.503.052,00		11.657.320		0		0	0	4.503.052			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						328.030.731,00		291.181.478		61.129.483		61.129.483	0	389.160.214			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.800.000,00		261.681.233		0		0	0	10.800.000			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						749.091.382,00		968.505.448		131.062.623		131.062.623	0	880.154.005			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.058.800,00		163.605.186		19.792.000		19.792.000	0	55.850.800			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	11,9	55.477.017	96,24	64.330.800,00	11,21	84.889.134		1.770.000		1.770.000	96	66.100.800	808,74	119,15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota										1.770.000		1.770.000	0	1.770.000			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								84.889.134				0	0	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	100	81.651.147	12,78	2.744.600,00	100	88.875.152		0		0	13	2.744.600	12,78	3,36	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.744.600,00		88.875.152		0		0	0	2.744.600			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Indeks	88,56	92.066.671	99,58	25.955.421,00	88,23	83.431.920		0		0	100	25.955.421	112,44	28,19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						25.955.421,00		83.431.920		0		0	0	25.955.421			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Cakupan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	1.025.740.486	100	382.474.200,00	100	390.714.872		2.715.000		2.715.000	100	385.189.200	100,00	37,55	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						382.474.200,00		390.714.872		2.715.000		2.715.000	0	385.189.200			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%				3.630.908.474,00	100	4.009.944.746		863.470.472		863.470.472	0	4.494.378.946			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%				12.656.000,00	100	85.631.600		0		0	0	12.656.000			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%				2.809.925.981,00	100	3.104.077.704		792.342.931		792.342.931	0	3.602.268.912			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan	%				24.780.000,00	100	40.020.000		5.420.000		5.420.000	0	30.200.000			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						376.455.932,00		367.838.834		17.253.400		17.253.400	0	393.709.332			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	%				44.516.230,00	90	3.631.900		0		0	0	44.516.230			Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				240.114.931,00				37.929.141		37.929.141	0	278.044.072			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				80.719.400,00	90	113.611.400		10.525.000		10.525.000	0	91.244.400			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	405.200.000	90	45.955.593,00	100	389.617.117		0		0	90	45.955.593	90,00	11,34	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan ,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	%				45.955.593,00	100	298.817.117		0		0	0	45.955.593			Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	86	2.661.794.901	90	1.904.065.206,00	85,76	2.547.098.214		1.632.239		1.632.239	90	1.905.697.445	104,65	71,59	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewennga daerah kabupaten	%				1.629.105.550,00	90	335.085.000		0		0	0	1.629.105.550			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%				103.964.113,00	90	473.644.969		0		0	0	103.964.113			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%				100.000.000,00	90	1.100.000.000		0		0	0	100.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%				70.995.543,00	90	385.290.420		1.632.239		1.632.239	0	72.627.782			Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	90,36	410.060.000		22.757.182,00	90,21	280.645.403		0		0	0	22.757.182	0,00	5,55	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%				22.757.182,00	100	280.645.403		0		0	0	22.757.182			Dinas Pemuda dan Olahraga
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	%				3.985.903.497,00	100	5.039.049.760		1.095.531.609		1.095.531.609	0	5.081.435.106			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.490.576,00		81.601.562		3.908.500		3.908.500	0	26.399.076			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adminstrasi keuangan secara tepat waktu					3.394.394.971,00	100	3.696.761.087		969.333.756		969.333.756	0	4.363.728.727			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	%				4.905.184,00	100	9.250.780		1.400.000		1.400.000	0	6.305.184			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	%				168.128.195,00	100	327.986.487		53.910.039		53.910.039	0	222.038.234			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				0	100	80.123.586		0		0	0	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				361.149.871,00	100	536.977.438		58.849.194		58.849.194	0	419.999.065			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%				34.834.700,00	100	306.348.820		8.130.120		8.130.120	0	42.964.820			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka	0,89	441.485.307	3,48	30.969.776,00	0,84	300.938.336		0		0	3	30.969.776	391,01	7,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%				22.800.215,00		196.800.304		0		0	0	22.800.215			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kegemaran membaca	%				8.169.561,00	100	104.138.032		0		0	0	8.169.561			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	53,14	64.582.211	90	2.850.000,00	53	64.302.656		0		0	90	2.850.000	169,36	4,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*				*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	%				2.850.000,00	100	31.579.979		0		0	0	2.850.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	DINAS PERIKANAN																	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						4.025.896.626,00	100	4.872.340.256		1.017.241.454		1.017.241.454	0	5.043.138.080			Dinas Perikanan
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				25.408.300,00	7	91.808.177		0		0	0	25.408.300			Dinas Perikanan
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan				3.532.116.743,00	3	4.062.225.536		993.841.454		993.841.454	0	4.525.958.197			Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.600.000,00	1	8.400.000		1.400.000		1.400.000	0	7.000.000			Dinas Perikanan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Laporan				0	1	29.700.000		0		0	0	-			Dinas Perikanan
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						278.401.128,00		313.549.019		0		0	0	278.401.128			Dinas Perikanan
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	Unit					4	46.416.200		0		0	0	-			Dinas Perikanan
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				151.699.455,00	1	180.364.000		22.000.000		22.000.000	0	173.699.455			Dinas Perikanan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit				32.671.000,00	30	139.877.324		0		0	0	32.671.000			Dinas Perikanan
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase produksi perikanan tangkap	%	102,67	7.796.097.625	0,33	1.861.864.716,00	102,09	3.607.009.012		0		0	0	1.861.864.716	0,32	23,88	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%				1.861.864.716,00	100	3.583.009.012		0		0	0	1.861.864.716			Dinas Perikanan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota										0		0	0	-			Dinas Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan kualitas Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					1	24.000.000		0		0	0	-			Dinas Perikanan
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	100	16.116.641.488	0,64	6.208.303.017,00	100	8.327.654.823		5.000.000		5.000.000	1	6.213.303.017	0,64	38,55	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										0		0	0	-			Dinas Perikanan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%				6.208.303.017,00	100	8.327.654.823		5.000.000		5.000.000	0	6.213.303.017			Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	51,89	850.739.180	100	912.958.050,00	51,2	1.232.796.000		0		0	100	912.958.050	192,72	107,31	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Kota yang direhabilitasi Sarana dan prasarananya	Unit Usaha				912.958.050,00	2	1.212.736.000		0		0	0	912.958.050			Dinas Perikanan
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	91,18	2.542.089.197	70,57	882.008.437,00	90,99	517.233.910		17.303.000		17.303.000	71	899.311.437	77,40	35,38	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota	%				191.246.418,00	95,2	467.613.910		15.550.000		15.550.000	0	206.796.418			Dinas Pariwisata
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	%				609.017.184,00	95,2	35.020.000		1.753.000		1.753.000	0	610.770.184			Dinas Pariwisata
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	%				81.744.835,00	95,2	14.600.000		0		0	0	81.744.835			Dinas Pariwisata
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	%	91,54	471.979.060	77,24	183.100.050,00	91	2.084.234		0		0	77	183.100.050	84,38	38,79	Dinas Pariwisata
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%				183.100.050,00	95	2.084.234		0		0	0	183.100.050			Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	3.044.181.910	68,61	1.518.220.480,00	100	26.057.250		8.971.500		8.971.500	69	1.527.191.980	68,61	50,17	Dinas Pariwisata
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%				1.518.220.480,00	98	26.057.250		8.971.500		8.971.500	0	1.527.191.980			Dinas Pariwisata
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	%				3.122.405.697,00	98	4.752.897.982		861.450.856		861.450.856	0	3.983.856.553			Dinas Pariwisata
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%				10.017.510,00	98	39.378.276		2.420.800		2.420.800	0	12.438.310			Dinas Pariwisata
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%				2.718.774.672,00	98,5	2.862.644.124		793.832.930		793.832.930	0	3.512.607.602			Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				92.420.165,00	97,61	630.617.940		19.295.700		19.295.700	0	111.715.865			Dinas Pariwisata
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	%				255.917.185,00	95	380.000.000		44.850.426		44.850.426	0	300.767.611			Dinas Pariwisata
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	%				45.276.165,00	67	235.786.192		1.051.000		1.051.000	0	46.327.165			Dinas Pariwisata
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	90	2.286.720.113	98,58	98.718.900,00	0,89	957.882.602		1.280.000		1.280.000	99	99.998.900	109,53	4,37	Dinas Pariwisata
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten	%					80	257.805.760		0		0	0	-			Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	%				98.718.900,00	30	700.076.842		1.280.000		1.280.000	0	99.998.900			Dinas Pariwisata
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Tingkat hunian akomodasi	%	50,34	431.605.229	32,14	3.013.285,00	50,23	238.136.000		0		0	32	3.013.285	63,85	0,70	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	%				3.013.285,00	87	238.136.000		0		0	0	3.013.285			Dinas Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	10,98	392.400.000	0		10,56	445.502.262		0		0	0	-	0,00	0,00	Dinas Pariwisata
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%					75	345.502.262		0		0	0	-			Dinas Pariwisata
	DINAS PERTANIAN																	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					17.877.044.198,00	100	19.221.311.223		4.897.490.040		4.897.490.040	0	22.774.534.238			Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%					100	19.183.320		0		0	0	-			Dinas Pertanian
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis				17.370.139.453,00	4	18.438.867.567		4.876.490.040		4.876.490.040	0	22.246.629.493			Dinas Pertanian
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaranaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				206.718.801,00	100	446.913.978		0		0	0	206.718.801			Dinas Pertanian
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	%				186.300.500,00	100	202.999.858		21.000.000		21.000.000	0	207.300.500			Dinas Pertanian
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	%				108.885.444,00	65	113.346.500		0		0	0	108.885.444			Dinas Pertanian
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan produksi Perkebunan	%	10,76	21.277.472.121	0,17	1.285.906.350,00	2,34	11.467.205.465		2.000.000		2.000.000	0	1.287.906.350	1,58	6,05	Dinas Pertanian
		Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan	%	11,89		-1,99		2,5						-2		-16,74		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase peningkatan produksi Hortikultura	%	10		16,09		4,12						16		160,90		
		Persentase peningkatan produksi Peternakan	%	12,02		5,53		11,8						6		46,01		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	%				354.549.850,00	91,07	6.199.620.000		0		0	0	354.549.850			Dinas Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	%				931.356.500,00	24	4.077.655.465		2.000.000		2.000.000	0	933.356.500			Dinas Pertanian
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	Jenis				0	7	1.189.930.000		0		0	0	-			Dinas Pertanian
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	%	0,26	21.855.461.593		12.352.663.898,00	0,25	11.839.093.940		0		0	0	12.352.663.898	0,00	56,52	Dinas Pertanian
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%				248.201.819	3	439.989.000		0		0	0	248.201.819			Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	Unit				12.104.462.079	98	11.399.104.940		0		0	0	12.104.462.079			Dinas Pertanian
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11,2	72.437.099	22,32	4.801.040,00	11	10.712.500		0		0	22	4.801.040	199,29	6,63	Dinas Pertanian
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	%				4.801.040,00	12	10.712.500		0		0	0	4.801.040			Dinas Pertanian
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	%	100	6.347.521.254	100	2.638.961.110,00	100	938.458.480		116.000.000		116.000.000	100	2.754.961.110	100,00	43,40	Dinas Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	Desa/Kelurahan				2.638.961.110,00	100	938.458.480		116.000.000		116.000.000	0	2.754.961.110			Dinas Pertanian
	DINAS PERDAGANGAN																	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah					4.951.450.754,00	100	6.690.593.243		1.216.537.965		1.216.537.965	0	6.167.988.719			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.191.000,00		50.541.930		0		0	0	5.191.000			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.906.236.372,00		4.521.747.567		985.924.102		985.924.102	0	4.892.160.474			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN dengan predikat kinerja baik	%					100	50.160.000		0		0	0	-			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%				182.807.363,00	100	343.237.915		64.131.955		64.131.955	0	246.939.318			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				812.033.899,00	100	1.452.343.455		158.344.908		158.344.908	0	970.378.807			Dinas Perdagangan
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				45.182.120,00	100	257.806.776		8.137.000		8.137.000	0	53.319.120			Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	91	6.556.749.100		139.568.780,00	90,67	100.000.100		0		0	0	139.568.780	0,00	2,13	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan					139.568.780,00	100	100.000.100		0		0	0	139.568.780			Dinas Perdagangan
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	20,01	164.042.658	78,50	539.492.251,00	100	273.941.253		11.001.000		11.001.000	79	550.493.251	392,30	335,58	Dinas Perdagangan
		Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun	%	100				20,67						0	-	0,00		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan				1.425.000,00	100	3.777.616		4.515.000		4.515.000	0	5.940.000			Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten	Laporan				536.607.251,00	100	258.342.622		5.331.000		5.331.000	0	541.938.251			Dinas Perdagangan
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeriksa	Kali				1.460.000,00	100	11.821.015		1.155.000		1.155.000	0	2.615.000			Dinas Perdagangan
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase pertumbuhan ekspor daerah		0,97	280.000.000			0,8	225.157.484		0		0	0	-	0,00	0,00	Dinas Perdagangan
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pertumbuhan ekspor daerah	%					100	225.157.484		0		0	0	-			Dinas Perdagangan
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	209.517.553	91,72	60.683.033,00	100	100.011.460		11.209.544		11.209.544	92	71.892.577	91,72	34,31	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						60.683.033,00	100	100.011.460		11.209.544		11.209.544	0	71.892.577			Dinas Perdagangan
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	%				24.241.599.488,00	100	34.337.478.387		8.643.140.825		8.643.140.825	0	32.884.740.313			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%				396.194.309,00	100	328.534.530		39.190.777		39.190.777	0	435.385.086			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Seara Tepat Waktu	%				9.400.775.235,00	99	11.087.961.087		2.601.906.232		2.601.906.232	0	12.002.681.467			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dalam Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian	%				120.187.532,00	95	136.445.176		11.801.000		11.801.000	0	131.988.532			Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Prediat Kinerja baik Berdasarkan Hasil Penilaian Perjanjian Kinerja	%				75.750.000,00	100	102.200.000		13.800.000		13.800.000	0	89.550.000			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%				2.823.864.993,00	100	4.103.469.996		356.816.304		356.816.304	0	3.180.681.297			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%				682.030.130,00	100	5.845.178.000		3.554.500.000		3.554.500.000	0	4.236.530.130			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa	%				6.015.474.681,00	100	4.436.849.144		971.404.982		971.404.982	0	6.986.879.663			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	%				1.189.087.456,00	100	2.126.494.146		174.216.848		174.216.848	0	1.363.304.304			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%				1.019.919.982,00	100	3.351.336.147		477.274.958		477.274.958	0	1.497.194.940			Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	%				1.601.054.700,00	100	1.730.365.935		269.709.000		269.709.000	0	1.870.763.700			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	%				270.569.829,00	100	300.289.927		58.916.824		58.916.824	0	329.486.653			Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%				646.690.641,00	100	788.354.299		113.603.900		113.603.900	0	760.294.541			Sekretariat Daerah
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Nilai LPPD	Angka	3,01	10.039.512.163	3,7	3.519.781.698,00	2,95	2.541.672.098		257.206.547		257.206.547	4	3.776.988.245	122,92	37,62	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	100		80		100						80	-	80,00		
		Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100		100		100						100	-	100,00		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	%				759.840.531,00	80	320.859.611		58.235.164		58.235.164	0	818.075.695			Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	%				2.091.571.307,00	100	1.514.311.286		70.213.510		70.213.510	0	2.161.784.817			Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	%				652.998.156,00	95	680.426.875		128.757.873		128.757.873	0	781.756.029			Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	%				15.371.704,00	100	26.074.326		0		0	0	15.371.704			Sekretariat Daerah
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	%	0,72	2.742.147.532		516.109.954,00	0,56	620.849.111		195.594.600		195.594.600	0	711.704.554	0,00	25,95	Sekretariat Daerah
		Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	%	81,99		100		81,23						100	-	121,97		
		Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100		100		100						100	-	100,00		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%				175.094.700,00	20	242.800.051		46.843.300		46.843.300	0	221.938.000			Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	%				29.822.100,00	100	49.067.462		3.200.000		3.200.000	0	33.022.100			Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	%				279.394.554,00	100	284.982.098		140.751.300		140.751.300	0	420.145.854			Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	%				31.798.600,00	100	43.999.500		4.800.000		4.800.000	0	36.598.600			Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						13.483.454.771,00		22.932.258.642		5.241.218.401		5.241.218.401	0	18.724.673.172			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.468.150,00		39.703.206		0		0	0	12.468.150			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.800.292.587,00		4.053.007.042		1.085.676.799		1.085.676.799	0	4.885.969.386			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.900.000,00		9.266.183		1.400.000		1.400.000	0	6.300.000			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.645.469,00		319.049.280		0		0	0	104.645.469			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						484.314.327,00		504.245.567		78.670.573		78.670.573	0	562.984.900			Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								214.253.576		0		0	0	-			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						423.958.416,00		944.329.500		144.507.642		144.507.642	0	568.466.058			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						217.804.130,00		418.974.792		0		0	0	217.804.130			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						7.767.909.542,00		15.408.670.264		3.900.963.387		3.900.963.387	0	11.668.872.929			Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						667.162.150,00		1.020.759.232		30.000.000		30.000.000	0	697.162.150			Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100	15.655.827.131	85,71	6.528.724.184,00	100	5.826.547.370		644.991.343		644.991.343	86	7.173.715.527	85,71	45,82	Sekretariat DPRD
		Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD	%	100		85,71		100						86	-	85,71		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						904.428.976,00		694.197.540		0		0	0	904.428.976			Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						338.684.295,00		646.749.650		0		0	0	338.684.295			Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						88.908.400,00		238.268.350		0		0	0	88.908.400			Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						533.595.225,00		1.657.127.980		150.046.629		150.046.629	0	683.641.854			Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						507.193.500,00		1.204.457.960		0		0	0	507.193.500			Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						4.155.913.788,00		1.385.745.890		494.944.714		494.944.714	0	4.650.858.502			Sekretariat DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH																	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.01	**PERENCANAAN**																	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	%				4.154.305.272,00	100	6.635.245.627		847.605.707		847.605.707	0	5.001.910.979			Bappelitbangda
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Dokumen				6.858.192,00	8	32.262.808		0		0	0	6.858.192			Bappelitbangda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis				2.987.415.901,00	8	3.733.658.210		691.543.276		691.543.276	0	3.678.959.177			Bappelitbangda
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis				5.000.000,00	1	101.120.000		0		0	0	5.000.000			Bappelitbangda
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis				692.252.589,00	10	1.092.848.180		110.287.570		110.287.570	0	802.540.159			Bappelitbangda
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit					13	797.006.291		0		0	0	-			Bappelitbangda
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis				311.842.879,00	4	447.527.402		29.700.491		29.700.491	0	341.543.370			Bappelitbangda
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit				150.935.711,00	10	430.822.736		16.074.370		16.074.370	0	167.010.081			Bappelitbangda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	2.109.825.642	100	654.938.866,00	100	1.082.934.133		49.213.178		49.213.178	100	704.152.044	100,00	33,37	Bappelitbangda
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	%				466.300.362,00	100	883.554.818		49.213.178		49.213.178	0	515.513.540			Bappelitbangda
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah	Dokumen				87.650.000,00	3	100.779.315		0		0	0	87.650.000			Bappelitbangda
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah	Dokumen				100.988.504,00	1	98.600.000		0		0	0	100.988.504			Bappelitbangda
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	1.501.942.549		208.278.280,00	100	707.776.882		19.651.926		19.651.926	0	227.930.206	0,00	15,18	Bappelitbangda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan	Perangkat Daerah				94.652.411,00	43	356.068.308		14.883.808		14.883.808	0	109.536.219			Bappelitbangda
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan	Perangkat Daerah				46.175.020,00	8	175.052.228		574.660		574.660	0	46.749.680			Bappelitbangda
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan	Perangkat Daerah				67.450.849,00	7	176.656.346		4.193.458		4.193.458	0	71.644.307			Bappelitbangda
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Hasil kelitbangan utama	Rekomendasi		2.136.598.952		152.972.353,00	1	703.353.234		6.735.276		6.735.276	0	159.707.629	0,00	7,47	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang laksanakan					102.427.353,00	2	445.392.314		6.735.276		6.735.276	0	109.162.629			Bappelitbangda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang laksanakan					50.545.000,00	2	213.176.920		0		0	0	50.545.000			Bappelitbangda
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**								364.776.960		11.308.000		11.308.000	0	11.308.000	0,00	0,00	Bappelitbangda
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan								239.228.480		11.308.000		11.308.000	0	11.308.000			Bappelitbangda
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi								125.548.480		0		0	0	-			Bappelitbangda
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.02	**KEUANGAN**																	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						5.777.053.223,23	100	5.791.413.914		1.461.801.006		1.461.801.006	0	7.238.854.229			BKAD
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%				117.377.145,00	100	90.028.725		1.000.000		1.000.000	0	118.377.145			BKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	%				4.185.398.105,73	100	4.502.553.658		1.157.269.527		1.157.269.527	0	5.342.667.633			BKAD
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan BMD SKPD yang tertib	%				61.249.395,00	95	86.746.900		7.000.000		7.000.000	0	68.249.395			BKAD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%				65.490.549,00	100	63.563.300		0		0	0	65.490.549			BKAD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi Umum	%				850.088.804,50	100	559.404.943		205.153.960		205.153.960	0	1.055.242.765			BKAD
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%				51.800.000,00	94	85.755.721		0		0	0	51.800.000			BKAD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	%				248.191.851,00	100	277.474.000		60.880.800		60.880.800	0	309.072.651			BKAD
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%				197.457.373,00	94	125.886.667		30.496.719		30.496.719	0	227.954.092			BKAD
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100	563.137.308.909	100	78.510.677.778,62	100	267.900.776.131		16.750.699.116		16.750.699.116	100	95.261.376.895	100,00	16,92	BKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	97		98		96,23						98	-	101,03		
		Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	100		99		100						99	-	99,00		
		Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	%	99		100		98,45						100	-	101,01		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%				1.417.036.733,62	100	1.181.161.145		179.296.383		179.296.383	0	1.596.333.117			BKAD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%				456.572.441,00	98	316.515.113		76.510.321		76.510.321	0	533.082.762			BKAD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%				630.928.813,00	99	588.538.068		121.089.012		121.089.012	0	752.017.825			BKAD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan	%				75.377.855.624,00	100	265.243.326.253		16.268.793.400		16.268.793.400	0	91.646.649.024			BKAD
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Megimplementasikan Sistem Informasi secara tertib	%				628.284.167,00	98	571.235.552		105.010.000		105.010.000	0	733.294.167			BKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	100	2.072.002.836	99	814.882.397,00	100	508.494.434		91.668.181		91.668.181	99	906.550.578	99,00	43,75	BKAD
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%			99	814.882.397,00	96	508.494.434		91.668.181		91.668.181	99	906.550.578			BKAD
	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
5	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.02	**KEUANGAN**																	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						8.525.424.597,00	100	9.065.775.192		2.007.698.986		2.007.698.986	0	10.533.123.583			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					83.693.097,00	3	74.871.904		2.000.000		2.000.000	0	85.693.097			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					6.408.636.569,00	2683	5.816.900.406		1.472.254.858		1.472.254.858	0	7.880.891.427			Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					13.670.000,00	4	25.124.272		8.481.000		8.481.000	0	22.151.000			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					456.774.876,00	16	382.051.361		65.446.786		65.446.786	0	522.221.662			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					50.292.140,00	6	150.693.000		77.880.000		77.880.000	0	128.172.140			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah					1.152.144.298,00	30	1.204.663.983		201.815.223		201.815.223	0	1.353.959.521			Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat					283.004.233,00	12	1.076.880.810		161.451.512		161.451.512	0	444.455.745			Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					77.209.384,00	20	334.589.456		18.369.607		18.369.607	0	95.578.991			Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	91,39	5.446.171.181	97,4	1.666.580.303,00	91,21	1.666.983.320		775.158.857		775.158.857	97	2.441.739.160	106,58	44,83	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	99,42		79		99,02						79	-	79,46		
		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	91,83		99,6		91,23						100	-	108,46		
		Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	80,61		96,9		80,34						97	-	120,21		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.666.580.303,00		1.666.983.320		775.158.857		775.158.857	0	2.441.739.160			Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.03	**KEPEGAWAIAN**																	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%				4.507.570.068,00	100	4.767.089.092		1.130.681.590		1.130.681.590	0	5.638.251.658			BKPSDM
5.3.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan					97.648.710,00	10	126.734.678		18.964.250		18.964.250	0	116.612.960			BKPSDM
5.3.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.307.557.080,00	100	3.152.683.606		975.094.639		975.094.639	0	4.282.651.719			BKPSDM
5.3.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.600.000,00	100	8.400.000		1.400.000		1.400.000	0	7.000.000			BKPSDM
5.3.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						508.460.049,00		631.830.740		40.308.785		40.308.785	0	548.768.834			BKPSDM
5.3.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						491.184.999,00	100	753.392.000		81.811.916		81.811.916	0	572.996.915			BKPSDM
5.3.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.079.230,00		94.048.068		13.102.000		13.102.000	0	101.181.230			BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	Angka	1,23	9.697.369.212	0,293	2.223.650.144,00	1,12	4.299.838.037		243.976.279		243.976.279	0	2.467.626.423	23,82	25,45	BKPSDM
		Rasio Pegawai Fungsional	Angka	1,01		0,243		0,96						0	-	24,06		
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Angka	0,8		1		0,52						1	-	125,00		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ,pemberhentian dan informasi kepegawaian	%				413.861.214,00	100	749.861.425		62.667.340		62.667.340	0	476.528.554			BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	persentase Mutasi dan Promosi ASN					397.930.590,00	100	520.829.520		22.864.700		22.864.700	0	420.795.290			BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN					1.346.133.410,00	100	2.781.605.806		138.257.744		138.257.744	0	1.484.391.154			BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					65.724.930,00	100	247.541.286		20.186.495		20.186.495	0	85.911.425			BKPSDM
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	96,51	2.804.843.000	66,24	200.889.275,00	96	981.805.071		0		0	66	200.889.275	68,64	7,16	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sertifikasi,kelembagaan,Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional					200.889.275,00	100	981.805.071		0		0	0	200.889.275			BKPSDM
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%				4.218.659.046,00	100	7.714.780.677		2.035.138.723		2.035.138.723	0	6.253.797.769			Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu					35.641.595,00	100	114.070.845		14.250.000		14.250.000	0	49.891.595			Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu					3.316.839.042,00	100	5.369.925.902		1.519.901.078		1.519.901.078	0	4.836.740.120			Inspektorat
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD					4.293.000,00	100	21.715.080		3.500.000		3.500.000	0	7.793.000			Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Dengan Kinerja Baik					124.838.300,00	100	384.276.000		37.801.260		37.801.260	0	162.639.560			Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					516.938.208,00	100	842.703.973		390.499.262		390.499.262	0	907.437.470			Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik						72,07	143.961.441		0		0	0	-			Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.801.895,00	100	429.408.236		37.762.775		37.762.775	0	169.564.670			Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					88.307.006,00	100	408.719.200		31.424.348		31.424.348	0	119.731.354			Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	94	6.885.937.573	90	1.381.821.904,00	92,3	3.335.906.495		189.985.130		189.985.130	90	1.571.807.034	95,74	22,83	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	94		85		92,3					0	85	-	90,43		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPD Kabupaten pada Tahun (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 20224)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*13*		*14 = 7+13*		*15 = 14/6 x 100%*		*16*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	94		90		92,3					0	90	-	95,74		
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	94		100		93,3					0	100	-	106,38		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal					885.713.404,00	100	2.232.334.780		85.361.130		85.361.130	0	971.074.534			Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Tertentu					496.108.500,00	100	1.103.571.715		104.624.000		104.624.000	0	600.732.500			Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		100	934.136.260	100	73.548.920,00	100	643.956.500		51.550.000		51.550.000	100	125.098.920	100,00	13,39	Inspektorat
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Yang Dirumuskan					4.400.000,00	100	63.635.300		11.060.000		11.060.000	0	15.460.000			Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi					69.148.920,00		580.321.200		40.490.000		40.490.000	0	109.638.920			Inspektorat

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi OPD Triwulan I Tahun 2025.

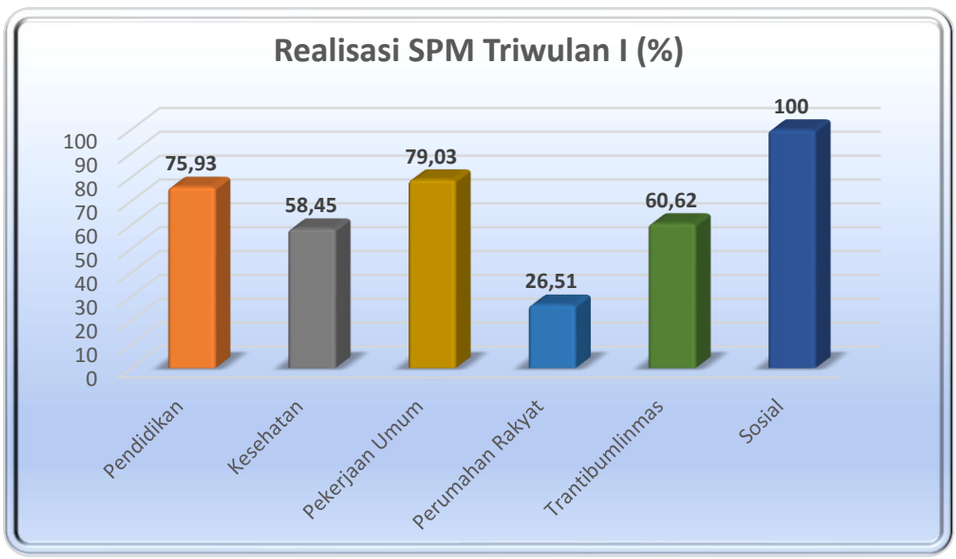
2.3.5 Evaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan Mandatori dan Urusan

Pelaksanaan evaluasi yang sifatnya mandatori dan urusan masih pada pencapaian kinerja yang pencapaiannya diukur dalam kurun waktu tertentu misalnya pencapaian triwulan, semesteran dan tahunan. Rata-rata target pencapaian indikator pengukurannya berada pada akhir periode atau akhir tahun, sehingga masih terdapat beberapa kendala dalam menggambarkan evaluasi pencapaian di beberapa indikator misalnya pada indikator yang sifatnya mandatori seperti SPM dan SDGs dan pencapaian indikator kinerja daerah (IKD). Gambaran pencapaian indikator yang dapat disajikan pada subab ini yakni pencapain kinerja hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 berdasarkan Urusan.

2.3.5.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Berdasarkan Mandatori (SPM)

Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap tahun dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Pelaporan Penerapan SPM Berbasis Elektronik yang diinput oleh masing-masing OPD pengampu SPM. Realiasi SPM sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.15.
Realisasi SPM Triwulan I Tahun 2025



Sumber : e-SPM, 2025.

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Luwu menunjukkan progres awal yang cukup positif yaitu 66,75 persen, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Realisasi capaian indikator SPM dari 6 urusan wajib pelayanan dasar menunjukkan bahwa

sebagian besar perangkat daerah telah mulai melakukan upaya pelaksanaan sesuai rencana kerja tahunan.

Secara umum, capaian rata-rata realisasi indikator SPM pada Triwulan I berada pada kisaran 26–100%, yang sejalan dengan proyeksi waktu dan kegiatan yang bersifat awal tahun seperti persiapan pelaksanaan program, pengadaan barang/jasa, serta penyesuaian anggaran. Beberapa urusan menunjukkan capaian yang lebih progresif, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Sosial, yang realisasinya telah mencapai lebih dari 70%.

Sementara itu, pada urusan seperti perumahan rakyat realisasi masih 26% dikarenakan sebagian besar program intervensi bersifat kegiatan fisik dan baru akan berjalan optimal pada Triwulan II. Dari sisi kendala, beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya capaian pada triwulan ini antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat proses administrasi, koordinasi antar perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan, serta terbatasnya data terverifikasi pada awal tahun untuk kebutuhan pelaporan indikator SPM.

Ke depannya, pemerintah daerah akan melakukan percepatan pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antar sektor, serta penguatan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan setiap indikator SPM dapat tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan

2.3.5.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Seperti halnya dengan pengukuran capain kinerja yang lain maka evaluasi capaian anggaran dan kinerja berdasarkan urusan dibagi dalam 3 kategori yakni: a. kategori rendah (≤ 13%); b. kategori Tinggi (≥13% - ≤25%) dan c. kategori Sangat Tinggi (≥25%). Berikut hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan.

Tabel 2.14.

Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Luwu Triwulan I Tahun 2025
Berdasarakan Urusan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Wajib	**898.292.842.208**	**969.287.983.567**	**110.371.049.609**	**11,39**	**14,80**	**11,39**	**T**	**R**
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**803.348.606.516**	**874.440.945.615**	**95.605.388.535**	**10,93**	**14,21**	**10,93**	**T**	**R**
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	465.186.014.085	465.089.245.869	67.893.835.811	14,60	18,98	14,60	T	T
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	222.842.906.327	222.762.821.161	19.610.577.933	8,80	11,44	8,80	R	R
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.086.552.271	125.680.493.764	2.518.504.814	2,00	2,61	2,00	R	R
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.121.926.349	12.478.212.834	817.263.284	6,55	8,51	6,55	R	R
1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	43.150.719.221	43.469.683.724	3.927.061.300	9,03	11,74	9,03	R	R
1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.960.488.263	4.960.488.263	838.145.393	16,90	21,97	16,90	T	T
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**94.944.235.692**	**94.847.037.952**	**14.765.661.074**	**15,57**	**20,24**	**15,57**	**T**	**T**

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6.845.776.172	6.845.776.172,00	1.343.614.711	19,63	25,51	19,63	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.288.262.406	3.508.382.546	539.898.366	15,39	20,01	15,39	T	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3.913.160.021	3.913.160.309	844.426.898	21,58	28,05	21,58	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.295.399.374	2.295.399.374	456.185.303	19,87	25,84	19,87	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	12.993.637.471	12.993.637.471	1.023.831.021	7,88	10,24	7,88	R	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.154.254.167	6.265.843.999	1.454.442.309	23,21	30,18	23,21	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.828.380.364	8.828.380.364	1.821.597.320	20,63	26,82	20,63	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.784.583.801	10.784.583.801	627.946.032	5,82	7,57	5,82	R	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	10.947.050.061	10.947.050.061	2.127.719.000	19,44	25,27	19,44	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	6.509.213.670	6.509.213.670	997.093.308	15,32	19,91	15,32	T	T

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.048.835.312	3.048.835.312	640.368.864	21,00	27,30	21,00	ST	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.007.037.742	5.007.037.742	899.629.122	17,97	23,36	17,97	T	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.907.320.247	6.370.524.247	865.102.711	13,58	17,65	13,58	T	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	71.359.594	71.359.594	2.000.000	2,80	3,64	2,80	R	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	35.263.100	35.263.100	0	-	-	-	R	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.530.242.981	1.530.242.981	26.274.500	1,72	2,23	1,72	R	R
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.749.028.937	5.848.601.937	1.095.531.609	18,73	24,35	18,73	T	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	35.430.272	43.745.272	0	-	-	-	R	R
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**49.824.185.463**	**49.124.204.300**	**8.237.863.684**	**16,77**	**21,80**	**16,77**	**T**	**T**
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6.269.269.684	6.269.269.684	1.022.241.454	16,31	21,20	16,31	T	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.654.340.450	3.554.340.450	862.730.856	24,27	31,55	24,27	ST	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.753.442.893	32.153.461.730	5.015.490.040	15,60	20,28	15,60	T	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.529.607.445	6.529.607.445	1.238.748.509	18,97	24,66	18,97	T	T

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	610.413.263	610.413.263	98.652.825	16,16	21,01	16,16	T	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	7.111.728	7.111.728	0	-	-	-	R	R
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**69.001.993.090**	**69.001.993.090**	**14.982.151.716**	**21,71**	**28,23**	**21,71**	**ST**	**T**
4	Sekretariat Daerah	38.884.567.730	38.884.567.730	9.095.941.972	23,39	30,41	23,39	ST	T
4	Sekretariat DPRD	30.117.425.360	30.117.425.360	5.886.209.744	19,54	25,41	19,54	ST	T
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**325.723.007.106**	**332.401.817.458**	**20.613.340.259**	**6,20**	**8,06**	**6,20**	**R**	**R**
5	Perencanaan	6.351.122.889	6.903.620.917,00	916.470.811,00	13,28	17,26	13,28	T	T
5	Keuangan	310.560.688.823	316.508.267.267,00	18.304.168.303,00	5,78	7,52	5,78	R	R
5	Kepegawaian	7.646.564.009	7.646.564.009,00	1.374.657.869,00	17,98	23,37	17,98	T	T
5	Pendidikan dan Pelatihan	502.797.471	502.797.471,00	0	-	-	-	R	R
5	Penelitian dan Pengembangan	661.833.914	840.567.794,00	18.043.276,00	2,15	2,79	2,15	R	R
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**10.165.371.784**	**12.028.074.131**	**2.276.673.853**	**18,93**	**24,61**	**18,93**	**T**	**T**
6	Inspektorat Daerah	10.165.371.784	12.028.074.131	2.276.673.853	18,93	24,61	18,93	T	T
7	**Unsur Kewilayahan**	**58.546.546.851**	**57.497.105.029**	**11.181.966.946**	**19,45**	**25,28**	**19,45**	**ST**	**T**
7	Kecamatan Bajo	4.336.655.198	2.895.154.897	641.656.111	22,16	28,81	22,16	ST	T
7	Kecamatan Bajo Barat	1.468.627.120	1.480.957.120	285.950.577	19,31	25,10	19,31	ST	T
7	Kecamatan Basse Sangtempe	1.714.568.985	1.730.009.175	11.337.737	0,66	0,85	0,66	R	R

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.818.343.086	1.834.224.086	417.088.399	22,74	29,56	22,74	ST	T
7	Kecamatan Belopa	5.075.972.521	5.083.131.521	1.128.127.223	22,19	28,85	22,19	ST	T
7	Kecamatan Belopa Utara	3.257.020.510	3.271.557.510	582.561.890	17,81	23,15	17,81	T	T
7	Kecamatan Bupon	2.258.704.492	2.271.638.439	499.658.309	22,00	28,59	22,00	ST	T
7	Kecamatan Kamanre	2.107.649.218	2.121.051.940	431.949.759	20,36	26,47	20,36	ST	T
7	Kecamatan Lamasi	3.245.987.419	3.289.003.869	734.667.434	22,34	29,04	22,34	ST	T
7	Kecamatan Lamasi Timur	1.312.774.843	1.348.641.593	249.508.969	18,50	24,05	18,50	T	T
7	Kecamatan Larompong	2.439.442.151	2.454.062.151	330.813.581	13,48	17,52	13,48	T	T
7	Kecamatan Larompong Selatan	2.047.854.431	2.057.544.431	511.071.951	24,84	32,29	24,84	ST	T
7	Kecamatan Latimojong	1.602.520.971	1.620.893.471	326.979.306	20,17	26,22	20,17	ST	T
7	Kecamatan Ponrang	4.426.482.948	4.432.753.808	1.063.563.432	23,99	31,19	23,99	ST	T
7	Kecamatan Ponrang Selatan	2.582.980.881	2.609.806.991	600.748.254	23,02	29,92	23,02	ST	T
7	Kecamatan Suli	2.065.580.343	2.080.485.343	405.337.674	19,48	25,33	19,48	ST	T
7	Kecamatan Suli Barat	1.697.573.603	1.713.323.703	396.867.615	23,16	30,11	23,16	ST	T
7	Kecamatan Walenrang	3.353.499.245	3.379.992.245	610.825.098	18,07	23,49	18,07	T	T
7	Kecamatan Walenrang Barat	2.273.416.133	2.290.246.133		-	-	-	R	R

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	%	Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp.(%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kecamatan Walenrang Timur	1.790.723.617	1.815.642.017	402.539.908	22,17	28,82	22,17	ST	T
7	Kecamatan Walenrang Utara	3.398.318.595	3.418.194.595	784.330.257	22,95	29,83	22,95	ST	T
7	Kecamatan Bua	4.271.850.541	4.298.789.991	766.383.462	17,83	23,18	17,83	T	T
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**5.474.675.514**	**5.474.675.514**	**642.362.270**	**11,73**	**15,25**	**11,73**	**T**	**R**
7	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.474.675.514	5.474.675.514	642.362.270	11,73	15,25	11,73	T	R
	Jumlah	**1.417.028.622.016**	**1.494.815.853.089**	**168.305.408.337**	**11,26**	**14,64**	**11,26**	**T**	**R**

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja RKPD pada semua urusan adalah sebesar 14,64% atau masuk dalam predikat "Tinggi", sementara itu rata-rata capaian pendanaannya sebesar 11,26% atau berada pada predikat "Rendah". Hal tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja dengan predikat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam predikat Rendah;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja predikat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk pada predikat Tinggi;
3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja masuk dalam predikat Tinggi dan realisasi anggaran juga berpredikat Tinggi;
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja masuk dalam predikat Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam predikat Tinggi;
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja dan anggaran masuk dalam predikat Rendah;
6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja dan anggaran masuk dalam kategori Tinggi;
7. Urusan kewilayahan rata-rata capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam predikat Tinggi, dan;
8. Unsur pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja dalam predikat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam predikat Rendah;

2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.4.1. Hambatan dalam Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Secara umum gambaran terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanakan pencapaian target kinerja RKPD pada triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh:

1. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,74% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,29%. Perlambatan tersebut dipicu oleh penurunan harga jagung, sehingga para petani memilih untuk tidak menjual hasil panen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami peningkatan dari 3,70% di tahun 2023 menjadi 4,14% di tahun 2024. Hal ini di sebabkan oleh adanya bencana alam banjir yang mengakibatkan para petani menganggur karena lahan yang tidak berfungsi serta adanya pemutusan kontrak tenaga kerja konstruksi oleh PT. Bumi Mineral Sulawesi akibat dari beralihnya kontruksi ke industri pengolahan.
3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yaitu sebesar 11,70% di tahun 2024. Angka tersebut masih tergolong tinggi meskipun telah menagalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 12,71%.
4. PDRB per kapita Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir masih di bawah capaian provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta di bawah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Wajo dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 59,73 juta rupiah.
5. Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah capaian provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, serta berada pada peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Selatan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 73,86. Umur Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah merupakan komponen yang harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

2.4.2. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Merujuk dari faktor penghambat pelaksanaan pencapaian target kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat disampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian keberhasilan target kinerja sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi pada perubahan RKPD tahun 2025 yaitu sebesar 6,72 persen, dengan dukungan program pemerintah diantaranya memberikan bantuan benih mandiri pada sektor pertanian, meningkatkan pembangunan irigasi, mendorong produksi industri pengolahan, pajak tambang galian C, dan meningatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta sektor-sektor usaha lainya.
2. Pemerintah daerah optimis menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 menjadi sebesar 3,2%. Target tersebut ditetapkan dengan beberapa pertimbangan salah satunya yaitu adanya beberapa perusahaan industri pengolahan yang akan membuka lowongan

pekerjaan dan didukung dengan peningkatann kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja di BLK Kabupaten Luwu.

3. Pemerintah daerah menargetkan Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 menurun menjadi 10,55% dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian seragam sekolah, serta pemberian BPJS Pemerintah kepada penduduk miskin.
4. Pemerintah Kabupaten Luwu menaikkan target PDRB per kapita tahun 2025 menjadi 68,23 juta rupiah dengan berbagai program yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan pelaku UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan, meningkatkan PAD Kabupaten Luwu, serta meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja.
5. Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan IPM pada tahun 2025 sebesar 74,28 dengan salah satu program prioritas yaitu peningkatan pelayanan dan pemerataan akses Pendidikan. Sementara untuk dimensi Kesehatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas Kesehatan melalui program pembangunan saran prasarana Kesehatan, peningkatan dan pemerataan aksebilitas Kesehatan dan peningkatan dan pemerataan SDM Kesehatan.

2.4.3. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan penjelasan terkait faktor penghambat dan upaya yang telah dijelaskan di atas, berikut rekomendasi dan tindak lanjut agar target kinerja dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan dapat tercapai :

1. Pemberian bantuan benih pada sektor pertanian, meningkatkan pembangunan irigasi, mendorong produksi industri pengolahan, mengefektifkan pemungutan pajak tambang galian C, dan meningatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu agar mengutamakan rekrutmen pada tenaga kerja lokal dan meningkatkan kualitas serta jenis pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian seragam sekolah, serta pemberian BPJS Pemerintah kepada penduduk miskin.

4. Pemberdayaan pelaku UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan, meningkatkan PAD, serta meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja.
5. Komponen IPM yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah untuk ditingkatkan yaitu Umur Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk meningkatkan komponen tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan program peningkatan pelayanan dan pemerataan akses Pendidikan serta Pembangunan saran prasarana Kesehatan, aksebilitas dan SDM Kesehatan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Daerah merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah maupun jangka menengah daerah serta mengatasi isu strategis dan menyelesaikan permasalahan daerah yang dilakukan melalui prioritas perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada “Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"; layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"; dan Infrastruktur merata dan berkelanjutan; Serta Desa Mandiri.

3.1.1. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro tahun 2025 diharapkan tetap stabil dan pemerintah daerah akan optimis untuk menargetkan ekonomi makro tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dari tahun 2024 khususnya pertumbuhan ekonomi. Dengan kerja keras dan program-program pemerintah daerah diantaranya peningkatan Produksi pertanian, perikanan dan Perkebunan; industry pengolahan; pertambangan; dan konstruksi pada PLTA; serta layanan Kesehatan dan Pendidikan. Pemerintah juga optimis dalam menurunkan kemiskinan dan menjaga daya beli Masyarakat.

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

3.1.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global Kembali tumbuh kuat ti tenga stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy). Hal ini didukun oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen, sementara dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Terdapat 17 lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I, dimana lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang signifikan dengan capaian 10,52 persen (yoy). Hal ini disebabkan karena pemerintah saat ini berkomitmen untuk pencapaian swasembada pangan dengan memperkuat program cetak sawah, optimalisasi lahan, hingga dukunggan sarana dan prasarana produksi. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi dengan capaian -1,23 persen. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas pemeliharaan pada tambang emas dan tembaga serta penurunan harga komoditas global akibat turunnya permintaan.

Berdasarkan capaian tersebut, Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai kisaran 4,6 – 5,4 persen yang ditargetkan pada tahun 2025. Pemerintah tetap optimis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk capaian tahun 2025. Dengan beberap strategi untuk mengembalikan pertumbuhan pertanian dan menjaga sektor lapangan usaha agar tetap bertumbuh dan berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.

3.1.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut berasal dari kontribusi positif dari 15 sektor lapangan usaha, sedangkan pertumbuhan yang mengalami kontraksi yaitu

sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian -3,94 persen, dikarenakan penurunan produksi nikel dan tambang galian C, dan sektor konstruksi dengan capaian -3,11 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja modal APBN dan APBD. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar 16,56 persen. Hal ini mendongkraj pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang disebabkan tumbuhnya produksi padi dan produksi ikan tangkap.

Jika dilihat dari target sasaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 sebesar 5,73 persen, maka pemerintah akan mendorong program-program kerja terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor unggulan Sulawesi Selatan yakni sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan yang mengalami kontraksi.

3.1.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,36 persen, hal ini terjadi karena adanya sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,74 persen, hal ini disebabkan karena penurunan harga jagung, sehingga para petani memilih untuk tidak menjual hasil panen. Sedangkan yang menopang ekonomi Luwu yakni Sektor industry pengolahan dengan capaian 15,3 persen. Hal ini disebabkan karena perusahan Bumi mineral Sulawesi mulai beroperasi untuk pengolahan nikel.

Perekonomian Kabupaten Luwu dapat memberikan kontribusi sebesar 2,75 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Hal ini berarti menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar lebih meningkatkan perekonomian Luwu dan memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian pemerintah optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi pada perubahan tahun 2025 yaitu 6,72 persen, dengan dukungan program-program pemerintah Luwu yakni memberikan bantuan benih mandiri pada sektor pertanian, meningkatkan Pembangunan irigasi, mendorong produksi industry pengolahan, pajak tambang galian C, dan meningatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan, serta sektor-sektor usaha lainya.

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

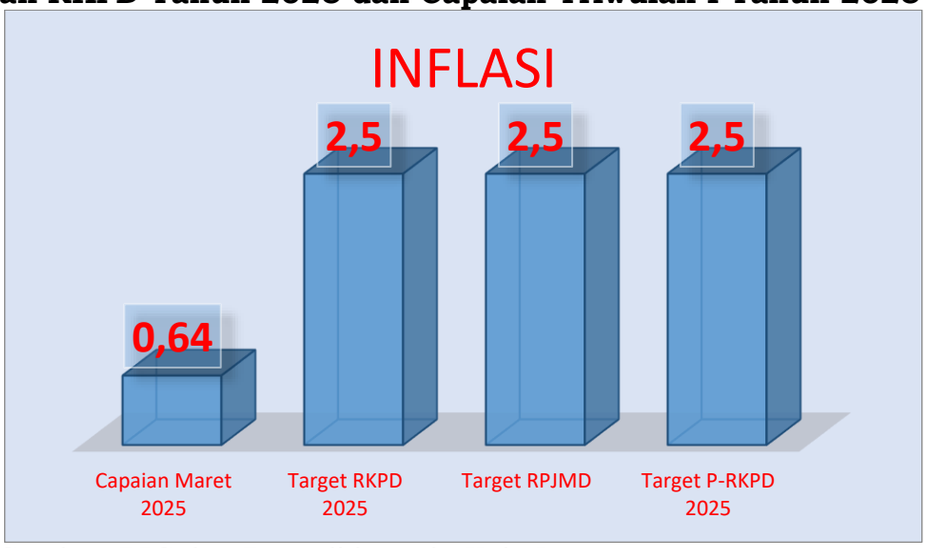
3.1.1.2. Inflasi

Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,64 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2025 sebesar 2,5% ± 1%. Secara *year on year*, beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,07%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,03%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,59%; kelompok kesehatan sebesar 0,44%; kelompok transportasi sebesar 1,25%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,46%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,20%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,13%.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1,0% (yoy). Terkait hal tersebut yang menjadi tantangan untuk TPID Kabupaten Luwu agar berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dengan 4K strategi yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki program prioritas dalam mengendalikan inflasi yaitu, melaksanakan program Gerakan menanam cabai, program Gerakan pasar murah, program operasi pasar, program tersebut dilaksanakan pada perangkat daerah dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan.

Grafik 3.2.
Inflasi Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 (Persen)

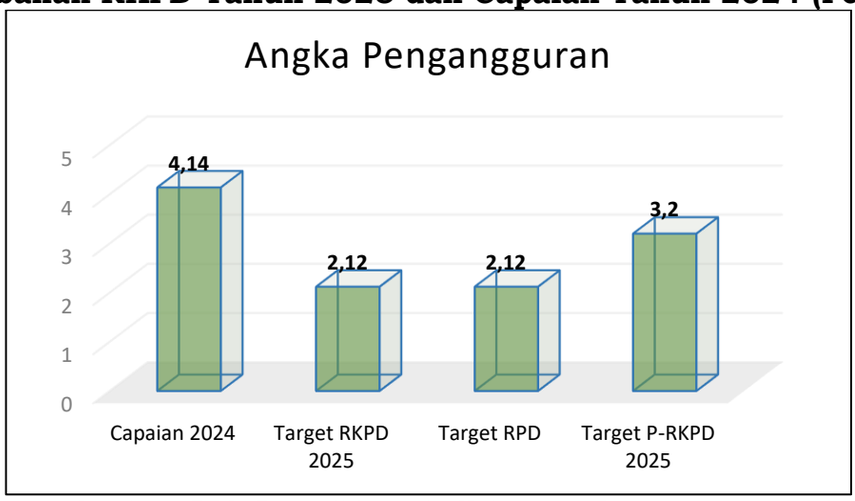


Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

3.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berbagai upaya pemerintah yang telah dianggap berhasil untuk keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi, termasuk mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi, tenyata tidak serta merta mendongkrak penurunan tingkat pengangguran, sehingga pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu sebesar 4,14 persen, lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 3,70 persen. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat optimis menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 sebesar 3,2 persen. Target yang ditetapkan meningkat dari RKPD Pokok 2025, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan realisasi tahun 2024 dan target RPJPD Tahun 2025-2045. Target tahun 2025 3,2 persen menurun dari capaian 2024 4,14 persen karena mengingat di tahun 2025 sudah ada rekrutmen pegawai pada PT. Macmahong dan semakin banyak Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di Kabupaten Luwu, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan kualitas sumber daya manusia akan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang terdapat di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Luwu.

Grafik 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)



Sumber : BPS, Bappelitbangda Kabupaten Luwu.

Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Kabupaten Luwu untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Luwu agar dapat bersaing ditingkat nasional untuk memasuki lapangan pekerjaan yang tersedia. Pemerintah daerah tetap optimis untuk menurunkan Tingkat pengangguran pada tahun 2025 sebesar 3,2 persen dengan berbagai strategi yang dilakukan yaitu salah satunya peningkatan kualitas pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu dan melakukan kerja sama dengan pihak Perusahaan yang terdapat di Kabupaten Luwu.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, dengan adanya komitmen dan Upaya pemerintah daerah untuk menurunkan Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 10,55 persen. Kemiskinan Luwu tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 11,70 persen dari 12,71 persen. Tantangan untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2025 adalah melakukan strategi untuk pemberdayaan Masyarakat dari segi UMKM dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, Pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian seragam sekolah, serta pemberian BPJS Pemerintah kepada penduduk miskin. Dengan demikian, pemerintah Luwu menargetkan penurunan kemiskinan dari 11,70 persen menjadi 10,55 persen pada tahun 2025.

Grafik 3.4.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)

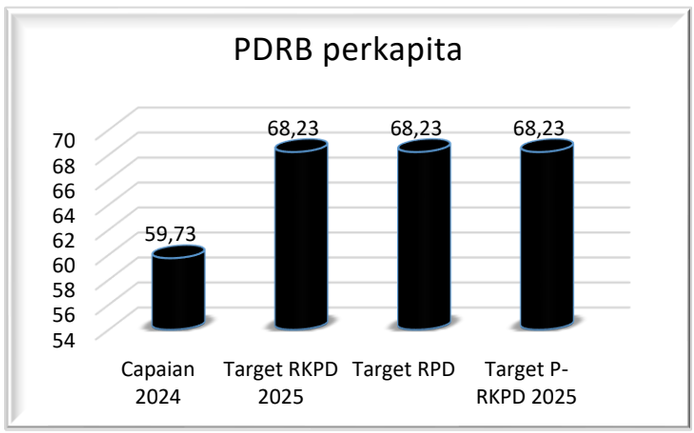


Sumber : BPS & Bappelitbangda Kabupaten Luwu

3.1.1.5 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan tentang kemakmuran suatu daerah, dimana perbandingan antara PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Luwu sebesar 59,73 juta rupiah dan pemerintah Luwu tetap optimis untuk menaikkan target tahun 2025 sebesar 68,23 juta rupiah dengan berbagai program yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan pelaku UMKM dan industry pengolahan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan, meningkatkan PAD Kabupaten Luwu, serta meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja Luwu.

Grafik 3.5.
PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta. Rp)



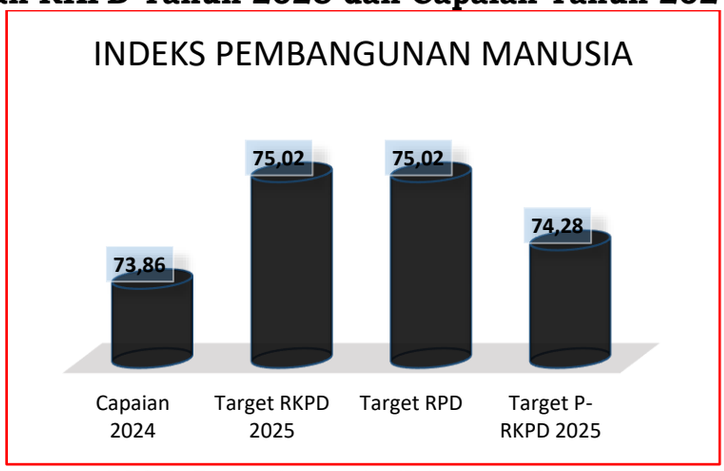
Sumber : BPS & Bappelitbangda Kabupaten Luwu,2025.

3.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia digunakan untuk mengukur kualitas manusia di suatu daerah. Pada tahun 2024 IPM Luwu sebesar 73,86, hal ini

menggambarkan bahwa target yang ditetapkan dalam RKPD 2025 sangat optimis, Maka dari itu pemerintah daerah menargetkan IPM RKPD Perubahan dan RPD Tahun 2025-2026 lebih rendah dari RKPD 2025 dan memiliki deviasi yang rendah dari capaian tahun 2024 yaitu 74,28 untuk memperbaiki kualitas manusia menjadi lebih baik terutama dimensi Pendidikan dan Kesehatan.

Grafik 3.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Angka)



Sumber : BPS & Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Peningkatan kualitas manusia dapat diatasi dengan program peningkatan pelayanan dan pemerataan akses Pendidikan. Seseorang dengan Pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah. Maka dari itu pemerintah daerah Luwu terus berupaya meningkatkan kualitas Pendidikan dengan menjadikan salah satu program prioritas dalam perubahan RKPD 2025. Untuk dimensi Kesehatan, program pemerintah daerah Luwu dalam meningkatkan kualitas Kesehatan Luwu dengan cara Pembangunan saran prasarana Kesehatan, aksebilitas dan SDM Kesehatan.

3.2. TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Tantangan dalam pengelolaan ekonomi daerah adalah produktivitas sumber daya alam dan peningkatan kualitasi sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

3.2.1. Aspek eksternal

Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik

menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber, perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang.

Tantangan ekonomi di tingkat domestik memainkan peran krusial dalam menggambarkan prospek pertumbuhan Indonesia di tahun 2025. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin mengandalkan faktor domestik menjadi fokus utama. Momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan lebih tergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2025. Meskipun pengeluaran fiskal tinggi selama periode pemilihan umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran terkait berlanjutnya pengeluaran fiskal sepanjang tahun dapat memperlambat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut.

Kedua, kebijakan moneter yang bersifat kondusif menjadi perhatian berikutnya. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga acuan (BI7-DRR) sebesar 5,50 persen pada tahun 2025, bergantung pada kebijakan dovish yang diambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat.

Di tengah tantangan yang dihadapi, aktivitas ekonomi tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu kontribusi untuk memberbaiki postur ekonomi nasional yaitu Ekonomi sulawesi selatan yang akan terus diusahakan untuk tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami perlambatan, kuatnya ekonomi sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Secara sektoral perekonomian sulsel didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha konstruksi dan pertambangan.

3.2.2. Aspek Internal

Tantangan perekonomian Kabupaten Luwu saling terkait dengan tantangan Provinsi Sulawesi Selatan yakni Tingginya angka inflasi yang keluar dari Target 2,5±1%. Inflasi Kabupaten Luwu bulan maret tahun 2025 sebesar 0,64%. hal ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan berada kisaran 1% sampai 2,5%. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu menunjukkan oerlambatan sehingga berada pada kisaran 4,36 persen yang masih berada di bawah Sulawesi Selatan yakni 5,78 persen pada tahun 2025. Maka dari itu pemerintah tetap optimis untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 6,72 persen. Perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2025 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Target Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Luwu Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Ketimpangan Pendapatan	PDRB perkapita (Juta. Rp)	Inflasi (%)
74,28	10,55	3,2	6,72	0,302	68,23	2,5

Sumber: Bappelitbangda Kab. Luwu.

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan prospek perekonomian Luwu sejalan dengan tema Pembangunan pada tahun 2025 yaitu **Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat** dengan program kerja yang akan dilaksanakan melalui Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"; layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"; dan Infrastruktur merata dan berkelanjutan; Serta Desa Mandiri. Untuk mencapai hal tersebut maka di fokuskan pada arah kebijakan:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Luwu, mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, peningkatan kualitas

sumber daya manusia serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur daerah.

3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan yang berkualitas.
4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan industri di Luwu, pemberdayaan angkatan kerja melalui pelatihan tenaga kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan.
6. Meningkatkan sektor-sektor unggulan daerah dalam rangka percepatan hirilisasi industri dan penciptaan potensi investasi daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu

3.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

3.3.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 masih bergantung dari

penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap dinamika regulasi nasional serta kebutuhan penguatan strategi fiskal daerah. Dasar utama perubahan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mengatur ulang arsitektur fiskal nasional melalui pendekatan berbasis kinerja, penyederhanaan transfer ke daerah, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang *Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025* memberikan konsekuensi terhadap komposisi pendapatan daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kini lebih selektif dan berbasis indikator kinerja tertentu.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), arah kebijakan pendapatan Kabupaten Luwu tahun 2025 difokuskan pada strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan sistem informasi dan digitalisasi pendapatan, antara lain:
    - Penerapan sistem pembayaran elektronik (e-payment) untuk pajak dan retribusi.
    - Pengembangan dashboard monitoring penerimaan real time.
    - Interkoneksi database wajib pajak dengan sistem pelayanan perizinan terpadu.
3. Perbaikan tata kelola pemungutan dengan pendekatan berbasis teknologi informasi serta peningkatan koordinasi antar-Perangkat Daerah pengelola PAD.
4. Penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan UU HKPD dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
5. Peningkatan kualitas belanja pendapatan, melalui penguatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung tercapainya indikator kinerja fiskal yang menjadi syarat pemberian insentif dari pemerintah pusat.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan peningkatan efektivitas pemungutan PAD serta peningkatan daya ungkit fiskal

untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis kinerja.

Pada Tahun 2025 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensfikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Tabel 3.2.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

Uraian	RKPD Pokok 2025	Parsial Terakhir 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-2
PENDAPATAN	**1.612.922.078.660**	**1.557.322.082.341**	**1.557.972.082.341**	**-50.899.996.319**
Pendapatan Asli Daerah	**211.863.920.215**	**228.781.386.943**	**229.431.386.943**	**21.617.466.728**
Pajak Daerah	70.895.580.690	72.833.386.943,00	72.833.386.943,00	1.937.806.253
Retribusi Daerah	9.368.339.525	144.948.000.000,00	145.598.000.000,00	136.279.660.475
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	126.600.000.000	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-117.100.000.000
Pendapatan Transfer	**1.374.872.506.252**	**1.304.735.556.631**	**1.304.735.556.631**	**-70.136.949.621**
Pendapatan Transfer Pusat	1.290.214.450.492	1.201.433.498.000,00	1.201.433.498.000,00	-88.780.952.492
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.658.055.760	103.302.058.631,00	103.302.058.631,00	18.644.002.871
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**26.185.652.193**	**23.805.138.767,00**	**23.805.138.767,00**	**-2.380.513.426**
Hibah	0	-	-	0
Lain-lain pendapatan	26.185.652.193	23.805.138.767,00	23.805.138.767,00	-2.380.513.426

Berdasarkan data yang disajikan, total pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan RKPD Pokok. Nilai pendapatan yang semula sebesar Rp1.612.922.078.660 turun menjadi Rp1.557.972.082.341 pada target perubahan, atau mengalami penurunan sebesar Rp50.899.996.319.

Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan dari sumber Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren peningkatan.

PAD mengalami kenaikan sebesar Rp21.617.466.728, dari RKPD Pokok Rp211.863.920.215 menjadi Rp229.431.386.943 pada target perubahan. Peningkatan ini bersumber dari:

1. Pajak Daerah naik sebesar Rp1.937.806.253, dari Rp70.895.580.690 menjadi Rp72.833.386.943.
2. Retribusi Daerah mengalami lonjakan signifikan sebesar Rp136.279.660.475, dari Rp9.368.339.525 menjadi Rp145.598.000.000. Hal ini mencerminkan adanya kebijakan baru terkait penyesuaian pendapatan BLUD yang awalnya di sektor lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi BLUD.
3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp500.000.000, dari Rp5 miliar menjadi Rp5,5 miliar.
4. Namun, terjadi penurunan drastis pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp117.100.000.000, dari Rp126,6 miliar menjadi hanya Rp5,5 miliar. Penurunan ini bisa terjadi akibat realokasi pendapatan BLUD ke retribusi BLUD.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan dalam komponen tertentu, pertumbuhan signifikan pada retribusi daerah sangat mempengaruhi kenaikan PAD.

Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp70.136.949.621, dari Rp1.374.872.506.252 menjadi Rp1.304.735.556.631. Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat menurun cukup tajam sebesar Rp88.780.952.492, dari Rp1.290.214.450.492 menjadi Rp1.201.433.498.000.
2. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp18.644.002.871, dari Rp84.658.055.760 menjadi Rp103.302.058.631.

Penurunan dari pusat merupakan tantangan besar bagi daerah, mengingat adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Penyesuaian Dana Transfer Tahun 2025 yang dimana poin penting terkait efisiensi belanja yang menjadi acuan Inspres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun demikian, adanya peningkatan transfer antar daerah menunjukkan adanya kolaborasi atau skema pendanaan antarwilayah yang lebih aktif.

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami penurunan sebesar Rp2.380.513.426, dari Rp26.185.652.193 menjadi Rp23.805.138.767.

1. Semua penerimaan dalam pos ini berasal dari lain-lain pendapatan, karena hibah tidak dianggarkan.
2. Penurunan tersebut dapat mencerminkan berkurangnya potensi pendapatan tidak rutin atau tidak berkelanjutan yang sebelumnya dianggarkan pada RKPD Pokok.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui opsen pajak, Pemerintah Kabupaten Luwu akan:

1. Melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan balik nama kendaraan bermotor sesuai alamat domisili di Kabupaten Luwu;
2. Mengintegrasikan program-program edukatif yang mempermudah masyarakat dalam melakukan proses balik nama;
3. Menyelaraskan kebijakan daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan MoU dan PKS tersebut, termasuk penguatan koordinasi antar-instansi terkait.

Diharapkan dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, dapat terjadi peningkatan penerimaan dari Opsen BBNKB, yang akan berdampak positif terhadap kapasitas fiskal daerah dan memperkuat kemandirian keuangan Kabupaten Luwu.

3.3.2. Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah merupakan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 akan dititik beratkan pada :

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029

2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan
4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Kawasan Permukiman
6. Penguatan Kelembagaan dan Komptensi ASN.

Dalam rangka mewujudkan Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan BelanjaTransfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yangdibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan BelanjaTransfer dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.3.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran

penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.3.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3.3.2.1.3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja UrusanPemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatacara Pengangaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

3.3.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4. Belanja Transfer

3.3.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2025 yang belum direalisasikan kepada Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

3.3.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan epada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Nomor 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Anggaran 2025. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan

keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan tersebut adalah Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2025 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

Uraian	RKPD Pokok 2025	Parsial Terakhir 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-2
BELANJA	**1.611.922.078.660**	**1.588.522.082.341**	**1.588.514.282.302**	**-23.399.996.319**
BELANJA OPERASI	**1.082.324.250.974**	**1.126.574.841.269**	**1.126.567.041.229**	**44.250.590.295**
Belanja Pegawai	692.653.831.004	686.328.571.333,40	686.328.571.333,40	-6.325.259.671
Belanja Barang dan Jasa	379.803.980.066	423.771.250.484,52	423.763.450.444,52	43.967.270.419
Belanja Hibah	9.470.939.904	16.262.019.451,44	16.262.019.451,44	6.791.079.547
Belanja Bantuan Sosial	395.500.000	213.000.000,00	213.000.000,00	-182.500.000
BELANJA MODAL	**264.354.501.433**	**176.155.665.169**	**176.155.665.169**	**-88.198.836.264**
Belanja Modal Tanah	280.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00	-180.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.112.173.992	43.841.042.447,00	43.841.042.447,00	4.728.868.455
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.560.851.686	65.843.876.175,00	65.843.876.175,00	-38.716.975.511
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.341.132.682	61.332.111.246,64	61.332.111.246,64	-52.009.021.435
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.660.343.073	3.538.635.300,00	3.538.635.300,00	-2.121.707.773
Belanja Modal Aset Lainnya	1.400.000.000	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	200.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	**10.000.000.000**	**26.670.886.094**	**26.670.886.095**	**16.670.886.094**
Belanja Transfer	**255.243.326.253**	**259.120.689.809**	**259.120.689.809**	**3.877.363.556**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.448.040.703	8.768.838.809,00	8.768.838.809,00	3.320.798.106
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	249.795.285.550	250.351.851.000,00	250.351.851.000,00	556.565.450

Berdasarkan perbandingan antara RKPD Pokok Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp23.299.996.319, dari Rp1.611.922.078.660 menjadi Rp1.593.287.451.679. Penurunan ini didominasi oleh penyesuaian signifikan pada belanja modal, meskipun terdapat kenaikan pada belanja operasi, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Operasi Naik sebesar Rp44.250.590.295, dari Rp1.082.324.250.974 menjadi Rp1.129.757.672.243. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan layanan dasar dan operasional rutin. Belanja Pegawai justru mengalami penurunan sebesar Rp6.325.259.671, menurun dari Rp692.653.831.004 menjadi Rp686.630.180.019. Penurunan ini bisa disebabkan oleh optimalisasi belanja pegawai atau pergeseran struktur gaji. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp43.967.270.419, mencerminkan penguatan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan perangkat daerah. Belanja Hibah meningkat sebesar Rp6.791.079.547, mengindikasikan peningkatan dukungan untuk pihak ketiga atau lembaga kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp182.500.000, dari Rp395.500.000 menjadi Rp213.000.000.

Belanja Modal Mengalami penurunan tajam sebesar Rp88.098.836.264, dari Rp264.354.501.433 menjadi Rp175.589.803.533. Penurunan ini mencerminkan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang menjadi dasar adanya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian dana transfer tahun 2025 sehingga Penurunan terbesar terjadi pada pembangunan fisik seperti jalan, gedung, dan jaringan infrastruktur. Ini kemungkinan sebagai bentuk penyesuaian akibat keterbatasan fiskal atau percepatan program.

Belanja Tak Terduga Mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp16.670.886.094, dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp28.819.286.094. Kenaikan ini mencerminkan kewaspadaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kejadian luar biasa, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Belanja Transfer Meningkat sebesar Rp3.877.363.556, dari Rp255.243.326.253 menjadi Rp259.120.689.809. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan dukungan kepada pemerintah desa dan daerah lainnya melalui skema transfer. Ini menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan kewenangan desa serta memperkuat sinergi antar pemerintah daerah.

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

Uraian	RKPD Pokok 2025	Parsial Terakhir 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4-2*
Penerimaan Pembiayaan	**0**	**21.300.000.000**	**31. 265.369.338**	**31. 265.369.338**
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	0	21.300.000.000,00	31.265.369.338	31.265.369.338
Pencairan Dana Cadangan	-			
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-			
Penerimaan pinjaman daerah	-			
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-			
Penerimaan piutang daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**0**		**0**
Pembentukan dana cadangan	-			
Penyertaan modal (investasi) daerah	1.000.000.000,00	0		**0**
Pembayaran Pokok Utang	-			
Pemberian pinjaman daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-			
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**-1.000.000.000**	0		0

Perubahan utama dalam pembiayaan daerah tahun 2025 terletak pada adanya tambahan penerimaan dari SILPA sebesar Rp 31,27 miliar, yang sebelumnya tidak dianggarkan. Hal ini berdampak positif terhadap posisi keuangan daerah, karena walaupun pengeluaran pembiayaan tetap, pembiayaan netto berubah dari defisit menjadi surplus sebesar Rp 30,27 miliar. Dengan demikian, perubahan RKPD 2025 mencerminkan perbaikan kondisi keuangan dan potensi peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rencana Pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan potensi sektor unggulan di Kabupaten Luwu.

Prioritas pembangunan disusun dengan memperhatikan surat edaran nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Berdasarkan edaran tersebut, maka sasaran dan prioritas Pembangunan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas Pembangunan pada kepala daerah yang terpilih yang tertuang pada dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran

dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pada Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, hal ini didasari dengan surat edaran nomor 900.1.1/640/SJ. Dimana pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program asta cita presiden dan wakil presiden ke dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025.

Isu strategis aktual tahun 2025-2029 yang menjadi rumusan untuk tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Luwu yakni kondisi sosial, ekonomi, Infrastruktur dan lingkungan. Kondisi sosial menggambarkan bonus demografi dan wajah perkotaan dan daya saing daerah, serta pembentukan daerah otonomi baru. Kondisi ekonomi menggambarkan potensi dan peluang investasi daerah, hirilisasi dan pemerataan pendapatan, serta penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah. Kondisi infrastruktur menggambarkan konektifitas dan kesenjangan antar wilayah, perkembangan teknologi dan transformasi digital, dan Lingkungan menggambarkan pemulihan pasca bencana dan resiko bencana yang masih tinggi. Mengacu pada Isu Strategis Aktual, maka dapat dirumuskan tujuan dan Sasaran serta indikator yang bersifat kuantitatif beserta target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun Pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahaan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,81	55,81	1	Tujuan 1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	PDRB Per Kapita	Juta. Rp	74,23	74,23
	Sasaran 1.1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	SAKIP	Angka	63,21	63,21		Sasaran 1.1.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,12	6,12
			Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Indeks	60,2321	60,2321		Sasaran 1.2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,2	3,2

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
	Sasaran 1.2	Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3		Sasaran 1.3.	Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	%	5,77	5,77
	Sasaran 1.3	Meningkatkan kualitas Layanan Publik yang inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	78,56	78,56							
2	Tujuan 2	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	Indeks	0,315	0,315	**2**	Tujuan 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)		12.482	12.482
	Sasaran 2.1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,96	11,96		Sasaran 2.1	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)		10,55	10,55

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
	Sasaran 2.2	Meningkatkan Kesempatan kerja	Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja	Persentase	7,01	7,01							
	Sasaran 2.3	Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	0,71							
3	Tujuan 3	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Indeks	3,2	3,2	**3**	Tujuan 3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi General	Angka	57,5	57,5

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
	Sasaran 3.1.	Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan Investasi	Persentase	458,01	458,01		Sasaran 3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP	Angka	62,3	62,3
	Sasaran 3.2	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,72	6,72		Sasaran 3.2.	meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Angka	80,37	80,37
	Sasaran 3.3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Indeks	75,02	75,02		Sasaran 3.3.	Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE	Angka	2,9	2,9
			Indeks Modal manusia	Indeks	-	0,5				Indeks Inovasi Daerah	Angka	44,4	44,4

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
								Sasaran 3.4.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	2,42	2,42
4	Tujuan 4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,9	73,9	4	Tujuan 4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,02	74,02
	Sasaran 4.1.	Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Indeks	186,81	186,81		Sasaran 4.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan	Angka	80,2	80,2
	Sasaran 4.2	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton Co2 eq	5.402,10	219.023		Sasaran 4.2.	meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka	83,09	83,09

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
			Penurunan intensitas Gas Rumah Kaca	%	-	2,04		Sasaran 4.3.	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	60,36	60,36
										Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	48,55	48,55
	Sasaran 4.3	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,8	76,8		Sasaran 4.4.	meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,22	74,22
							5	Tujuan 5	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	50,22	50,22
										Indeks Ekonomi Biru	Angka	101,14	101,14

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
							Sasaran 5.1	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,5	6,5
									Nilai Tukar Petani (Angka)	Angka	101,17	101,17
							Sasaran 5.2	Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	Rp/Jiwa	10,22	10,22
									Nilai Tukar Nelayan (Angka)	Angka	110,2	110,2
							Sasaran 5.3.	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,77	82,77

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
						6	Tujuan 6	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Angka)	Angka	2,72	2,72
							Sasaran 6.1	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	Angka	14,02	14,02
							Sasaran 6.2	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	10,66	10,66

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
									akses rumah tangga terhadap air minum aman	Angka	28	28
							Sasaran 6.3.	Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Angka	4,12	4,12
						7	Tujuan 7	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa	Angka	72,21	72,21

NO	TUJUAN / SASARAN (RPD 2025-2026)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPD 2025	TARGET RKPD 2025	NO.	TUJUAN / SASARAN (RPJMD 2025-2029)		INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
							Sasaran 7.1	Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	19,32	19,32
						8	Tujuan 8	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	14,82	14,82
							Sasaran 8.1	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	%	189,22	189,22
							Sasaran 8.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,54	76,54

Sumber: RPD Kab. Luwu Tahun 2025-2026 dan RPJMD Kab. Luwu Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun 2025 dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun 2025 pada rancangan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian antara dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan Pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyrakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan**:**

a. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten luwu;
b. Isu-isu strategis; dan
c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Pencegahan

stunting dan kemiskinan ekstrem; 4) Pengendalian inflasi di daerah; 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; 6) Dukungan swasembada pangan; dan 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sudah selaras dengan tema dan isu pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
Indikator	**Satuan**	**Target Perubahan RKPD 2025**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Perubahan RKPD 2025**
PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	74,23	Pertumbuhan ekonomi	%	5,3 - 5,6
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12			
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
Pengeluaran perkapita	*Rp Juta*	12.482	Gini Rasio	Angka	0,379 - 0,382
Tingkat Kemiskinan	%	*10,55*	Tingkat kemiskinan	%	7,0 - 8,0
			Kemiskinan Ekstrem	%	0
SAKIP	*Skor*	62,3	Indeks Modal Manusia	Angka	0,56
Indeks Pengelola Keuangan Daerah	*Skor*	80,37			
Indeks Inovasi Daerah	*Skor*	44,4			
Indeks Pembangunan Manusia	*Poin*	74,02			
Indeks Ekonomi Hijau	*Skor*	50,22	Nilai Tukar Petani	Angka	115 - 120
Produktivitas Pertanian	*Ton/ha*	6,5			
Indeks Ketahanan Pangan	*Skor*	82,77			
Indeks Ekonomi Biru	*Skor*	101,14	Nilai Tukar Nelayan	Angka	105 - 108

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
Indikator	**Satuan**	**Target Perubahan RKPD 2025**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Perubahan RKPD 2025**
Produktivitas Perikanan Budidaya	*Ton/ha*	10,22			
Tingkat Konektivitas Wilayah	%	14,02	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	38,6
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	10,66			
Persentase desa mandiri	%	19,32			
Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	20,77			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,54			

Tabel 4.3

Dukungan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Terhadap Sasaran RKP Tahun 2025

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
				pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
8	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
9	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
10	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
12	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
13	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
14	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
16	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		
17	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
19	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
20	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
22	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
23	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
24	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
26	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
30	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
31	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Pengembangan Prasarana Pertanian
32	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
33	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
34	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Pengelolaan Sampah
35	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
36	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
37	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
38	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
39	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
40	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
41	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
42	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
43	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
44	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
45	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
46	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
47	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
48	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
49	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			
50	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
51	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
52	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
53	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
54	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
55	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
56	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
57	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
58	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
59	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata		
60	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
61	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
62	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		
64	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
65	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
66	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		
67	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
68	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
69	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
70	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
71	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
72	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
73	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
74	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
76	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
77	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
78	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
79	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		
80	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
81	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
82	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
83	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
84	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
85	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
86	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
87	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
88	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
89	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
90	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
91	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
92	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
93	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
94	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
95	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
96	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
97	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
98	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
99	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
100	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
101	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
102	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
103	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
104	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
105	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
106	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
107	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
108	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
109	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
110	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
111	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
112	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
113	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
114	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
115	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
116	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
117	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
118	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
119	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
120	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
121	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
122	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	

No.	PRIORITAS NASIONAL (Perpres No.12 Tahun 2025 ttg RPJMN Tahun 2025-2029)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI (Pergub No 17 Tahun 2024 ttg RKPD Tahun 2025)	PROGRAM	KEGIATAN
123	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
124	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kerjasama Masyarakat yang Berkualitas dan Merata		
125	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
126	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
127	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		
128	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
129	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
130	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		
131	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu.

Tabel 4.4

Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
MISI 1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi 4.	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan		Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
			Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Misi 6.	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
MISI 3.	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
			Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
			Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	Misi 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui transformasi birokrasi berbasis digital	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Misi 5.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
Misi 7.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
			Produksi Melalui Peran Aktif Modal

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas pembangunan didalam dokumen Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sekaligus peta jalan bagi seluruh stakeholder dalam perumusan program-program prioritas pada masing-masing sektor urusan penyelenggaran pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan tema Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang akan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.5

TEMA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Tema RKPD Tahun 2025	Tema Perubahan RKPD Tahun 2025
Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama pada perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 ialah :

1. Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya;
2. Infrastruktur merata dan berkelanjutan;
3. Layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi'"
4. Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
5. Pelopor kedaulatan pangan "Luwu Mappatuwo
6. Desa Mandiri
7. Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"

Tabel 4.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Target Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	74,23
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,12
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,2
		Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	5,77
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)	12.482
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	10,55
layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,5
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,3

PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	80,37
		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	2,9
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,4
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,42
Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	74,02
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	80,2
		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	83,09
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	60,36
			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	48,55
		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	74,22
	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	50,22

PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"			Indeks Ekonomi Biru (Angka)	101,14
		Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6,5
			Nilai Tukar Petani (Angka)	101,17
		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	10,22
			Nilai Tukar Nelayan (Angka)	110,2
		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	82,77
Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,72
		Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	14,02
		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,66
			akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	28

PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	4,12
Desa mandiri	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	72,21
		Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	19,32
Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	14,82
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	189,22
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	76,54

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Adapun sinkronisasi permasalahan dan isu strategis daerah terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pemangunan Tahun 2025

No	Permaslahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
1	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Konektivitas dan kesejangan antar wilayah	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur
2	Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur daerah		Desa Mandiri	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Rasio
				Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa Mandiri
3	Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah	Perkembangan teknologi dan transformasi digital	Layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Sakip
					IPKD
				Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas SPIP
				Meningkatkan kualitas Layanan Publik yang inklusif	Indeks Layanan Publik
4	Belum Optimalnya akses dan layanan pendidikan secara merata		Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah
				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
				Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan Investasi

No	Permaslahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
5	Rendahnya derajat kesehatan masyrakat dan pelayanan kesehatan yang belum merata			Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
6	Belum optimalnya pengelolaan potensi perekonomian daerah	Peluang dan potensi investasi daerah	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Rasio
			Pelopor kedaulatan pangan "Luwu Mappatuwo"	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan
				Meningkatkan Kesempatan kerja	Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja
7	Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta menimbulkan potensi bencana	Resiko Bencana yang tinggi dan pemulihan pasca bencana	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia
				Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Penurunan intensitas Gas Rumah Kaca

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2025

Secara teoritis, strategi dapat diartikan rencana komprehensif yang diwujudkan kedalam suatu cara yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, sedangkan dalam perspektif perencanan pembangunan, strategi diasosiasikan dengan paradigma pendekatan atau metode yang dipilih guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka memenuhi target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, maka dirumuskan berbagai strategi yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Strategi Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	1	Penguatan Integrasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	T1-S1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata, serta Meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2	Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	2	Mendorong Pembinaan dan Pengawasan Secara Berkesinambungan	T1-S2		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		3	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inklusif	3	Percepatan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi	T1-S3		Berkembangnya hilirisasi sumber daya unggulan	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor.

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
2	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	4	Mendorong Koloborasi Pengentasan Kemiskinan Multi Sektoral	T2-S4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima manfaat bantuan sosial, pemberian bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5	Meningkatkan Kesempatan kerja	5	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Angkatan Kerja	T3-S5	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.
		6	Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa	6	Mendorong Percepatan Kemandirian Desa	T3-S6		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak seperti pengembangan usaha baru berbasis aset daerah, retribusi jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata, Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM), potensi lokal lainnya, serta peningkatan iklim investasi; pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Intensifikasi

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
									Pajak dan Retribusi; serta pembentukan Perusahaan Perseroan daerah untuk berkontribusi pada kemandirian fiscal daerah
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	7	Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha	7	Meningkatkan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	T3-S7		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal; Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		8	Meningkatkan Perekonomian Daerah	8	Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Pengembangan Sektor Industri	T3-S8		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
		9	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	9	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	T4-S9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
									dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	10	Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana	10	Mendorong Pengurangan Dampak dan Resiko Bencana	T4-S10		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran

NO	RKPD TAHUN 2025				NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		11	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	11	Memperkuat Pelestarian Lingkungan	T4-S11		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas melalui perencanaan pembangunan stadion dan sirkuit, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga

NO	RKPD TAHUN 2025					NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	12	Mendorong Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	T4-S12		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

NO	RKPD TAHUN 2025				NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
					T5-S13	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bibit-bibit unggul sektor pertanian; Percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian; Mendorong pemanfaatan pupuk organik dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; Mendorong optimalisasi lahan dalam pencapaian IP 200-300; Mendorong pemanfaatan teknologi reproduksi ternak melalui inseminasi buatan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani

NO	RKPD TAHUN 2025			NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				T5-S14		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.
				T5-S15		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan
				T6-S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan konektivitas

NO	RKPD TAHUN 2025			NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
							darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.
				T6-S17		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)
				T6-S18		Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan; serta Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik

NO	RKPD TAHUN 2025				NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
					T7-S19	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Meningkatnya kemandirian desa	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa
					T8-S20	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Menurunnya risiko bencana	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

NO	RKPD TAHUN 2025						NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI				TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
							T8-S21		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Pengembangan kawasan konservasi ex-situ; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu..

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah arah kebijakan merupakan suatu tindakan atau upaya nyata yang akan dilaksanakan dalam rangka mengejawantahkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penentuan arah kebijakan juga merupakan salahsatu tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena perlu memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan demi terwujudnya perencanaan yang integratif, komprehensif dan solutif.

Arah kebijakan dalam dokumen ini dijabarkan sesuai dengan fokus pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang didasarkan pada hasil analisis capaian penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh bidang urusan pada tahun 2025 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan dapat linear dan sejalan dengan target-target pembangunan yang akan dicapai diwaktu mendatang. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Arah Kebijakakan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025
1	Penyusunan Rencana Kerja Yang Tepat Sasaran dan Terukur	1	Meningkatkan efisiensi distribusi produk unggulan serta penguatan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, disertai penguatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan koperasi
2	Penguatan Tata Kelola Evaluasi Perencanaan Pembangunan	2	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri
3	Pembangunan Ekosistem Digital Pelayanan Publik Terpadu	3	Meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan investasi di sektor industri pengolahan, energi, dan pertambangan
4	Mengoptimalkan Pemutkahiran Data dan Penataan Kesejahteraan Sosial	4	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat dengan penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, jaminan kesehatan, perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
5	Menggalakkan Kegiatan-Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	5	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta mendukung implementasi pembangunan daerah melalui penyusunan regulasi yang efektif
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	6	Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan, disertai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan peran Perseroda.

No.	Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025
7	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infastruktur Pelatihan Kerja	7	Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan riset., pengembangan smart government dan digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur TIK dan ekosistem inovasi, serta penyediaan kajian kelayakan dan perencanaan yang komprehensif dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru
8	Menodorong Pertumbuhan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi	8	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif dan kolaboratif, serta pengendalian dan penegakan hukum/Perda, termasuk implementasi tata ruang daerah
9	Mendorong Eksistensi Komunitas Sosial Atau Lembaga Filantropy	9	penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas tenaga pendidik; penguatan pendidikan digital berbasis TIK/IoT; serta pengembangan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi
10	Pembinaan dan Penguatan Kompetensi Aparatur Desa	10	pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; pembudayaan hidup sehat dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas, pemerataan, dan insentif tenaga kesehatan; serta perluasan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di seluruh wilayah
11	Optimalisasi Penyelenggaraan BUMDES	11	Meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda, penguatan sumber daya dan kelembagaan olahraga; integrasi GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada seluruh sektor Pembangunan, serta menguatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak dan Perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

No.	Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025
12	Penguatan Basis Data dan Infromasi Kesejahtreraan Masyarakat	12	membangun kehidupan beragama yang harmonis dan bermanfaat, serta pelestarian kebudayaan lokal dan penguatan karakter masyarakat melalui warisan budaya dan seni tradisional.
13	Penguatan Infrastruktur Daerah	13	peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan rantai pasok yang efisien, pemberdayaan petani dan nelayan secara inklusif, serta Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi seimbang
14	Penguatan Regulasi Pendukung	14	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata untuk mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, serta daya saing daerah
15	Perluasan Akses Lapangan Kerja	15	Meningkatkan peran desa secara inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa yang adaptif
16	Penguatan Koperasi dan Kerjasama Perbankan	16	Penguatan ketangguhan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana serta integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam seluruh sektor pembangunan
17	Penguatan Pengawasan Sektor Pertanian	17	Penguatan upaya pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan sampah berkelanjutan
18	Pengembangan Komoditas Unggulan		
19	Percepatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan		
20	Perluasan Jangkauan Jaminan Kesehatan Masyarakat		

No.	Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025	No.	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025
21	Pengentasan Anak Tidak Sekolah		
22	Percepatan Penyediaan Alat-Alat Kesehatan Tingkat Lanjut		
23	Mendorong Tersedianya Sistem Peringatan Dini Bencana		
24	Mendorong Sistem Manajemen Bencana Yang Terintegrasi		
25	Penguatan Perencanaan Mitigasi Bencana		
26	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pengolahan Limbah		
27	Mendorong Penguatan Kerjasama Lintas Sektor dan Non Government Organization		
28	Penguatan Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup		
29	Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bangunan Gedung		
30	Mendorong Penguatan Infrastruktur Pengairan Guna Mendukung Ketahanan Pangan		
31	Mendorong Percepatan Pengentasan Permukiman Kumuh		
32	Percepatan Pemenuhan Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak		
33	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan		
34	Peningkatan Kapasitas Pelaku Bidang Konstruksi		

4.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Program Prioritas Rencana Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
T.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,81	987.526.009.289	
T.1	S.1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	60,2321	971.884.947.360	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	100	690.852.105.221	SELURUH OPD
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Hasil Kelitbangan Utama	Rekomendasi	5	703.353.234	Bappelitbangda
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100	267.900.776.131	BKAD
				Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	96,23		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah
						Kinerja 2025	Rp. (Pokok)	
				Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	100		
				Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	%	98,45		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	100	508.494.434	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	91,21	1.666.983.320	BAPENDA
				Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	99,02		
				Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	91,23		
				Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	80,34		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
T.1	S.2	Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas SPIP	Level	Level 3	5.126.617.510	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	92,3	3.335.906.495	INSPEKTORAT
				Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	92,3		
				Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	92,3		
				Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	93,3		
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	1.082.934.133	BAPPELITBANGDA
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	707.776.882	

RKPD TAHUN 2025							
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025 / **Rp. (Pokok)**	
T.1	S.3	Meningkatkan kualitas Layanan Publik yang inklusif		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	78,56 / 10.514.444.419	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	100 / 280.764.996	DISDUKCAPIL
				Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	22	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	96,23	
			Program Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,51 / 106.707.625	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Indeks	88,23 / 83.431.920	DPMPTSP
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Angka	2,95 / 2.541.672.098	SEK. DAERAH
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	100	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
				Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100	5.826.547.370	SEK. DPRD
				Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD	%	100		
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	92,67	1.671.120.410	KOMINFO
				Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	86,2		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100	4.200.000	22 Kecamatan
T.2	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat			Gini Ratio	Indeks	0,315	15.772.684.067	
T.2	S.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,96	3.452.372.612	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	%	100	18.187.632	DINSOS
				Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	%	100		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase keterserdiaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	89,05	143.927.100	KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/ Kapita/ Hari	63,21	423.200.234	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	84	2.126.910.000	DALDUK KB
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dibina	%	35,21	294.645.384	KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	10,56	445.502.262	DISPAR
T.2	S.2	Meningkatkan Kesempatan kerja		Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja	Persentase	7,01	3.133.525.307	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	90,32	1.900.729.307	DISNAKERTRANS
				Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	%	71,12		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Pengelohan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	80,23	1.232.796.000	PERIKANAN
T.2	S.3	Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	9.182.586.148	
			Program Penataan Desa	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	74	125.000.000	DPMD
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	97,21	40.000.000	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,05	5.245.547.029	
				Persentase peningkatan status desa maju	%	6,21		
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	2.777.114.328	SATPOL PP
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100		
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	477.690.881	DINSOS

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	90,99	517.233.910	KEBUDAYAAN
T.3	Meningkatnya daya saing daerah			Indeks daya saing daerah	Indeks	3,2	446.011.327.123	
T.3	S.1	Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan Investasi	Persentase	458,01	751.413.644	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	12,56	77.140.458	DISNAKERTRANS
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	11,21	84.889.134	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	100	88.875.152	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dengan RPIP	%	100	500.508.900	KOPERASI, UMKM, DAN PERINDUSTRIAN
T.3	S.2	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	7,89	21.861.728.101	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	%	0,56	620.849.111	
				Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	%	81,23		
				Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya	%	100	8.327.654.823	PERIKANAN

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	80,9	957.882.602	DISPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	50,23	238.136.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	9,12	11.467.205.465	PERTANIAN
				Persentase peningkatan produksi bibit ternak	%	8,77		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	90,67	100.000.100	PERDAGANGAN
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	27,34	50.000.000	KOPERASI, UMKM, INDUSTRI
			Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%	25,98	100.000.000	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
T.3	S.3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Indeks	75,02	422.403.260.587	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	70,01	123.313.483.025	PENDIDIKAN
				Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	100		
				Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	98		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	99	1.447.346.896	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	100	276.102.956.000	KESEHATAN
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	78,91	1.703.120.824	
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,001		
				Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Angka	0,021		
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	56.154.035	DINSOS
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	10,23	130.002.807	DP3A

RKPD TAHUN 2025								
Kode	Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah
						Kinerja 2025	Rp. (Pokok)	
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Angka	10,34	119.930.520	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100.000.200	
			Program Pengendalian Penduduk	Total Fretility Rate (TFR)	Angka	5,21	654.809.639	DALDUK KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	32	8.901.926.132	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,87		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100	100	389.617.117	DISPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	85,76	2.547.098.214	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan kegemaran membaca masyarakat	Angka	0,84	300.938.336	ARPUS
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	53	64.302.656	ARPUS

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	1.289.931.078	KESBANGPOL
			Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	Angka	1,12	4.299.838.037	BKPSDM
				Rasio Pegawai Fungsional	Angka	0,96		
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Angka	0,52		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	96	981.805.071	
T.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,9	137.011.339.560	
T.4	S.1	Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana		Indeks Risiko Bencana Indonesia	Indeks	186,81	1.428.741.681	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	683.932.425	BPBD
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	428.119.703	DAMKAR
				Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran	%	15		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	316.689.553	DINSOS
T.4	S.2	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton Co2 eq	219.023,00	23.581.016.379	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%	100	17.668.272	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Indeks	53	84.845.159	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	99,21	4.689.046.551	
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,57	6.950.362.457	DISHUB
				V/C Ratio di Jalan kabupaten	%	0,9		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	%	9,87	11.839.093.940	PERTANIAN
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	%	10,28		
T.4	S.3	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,8	111.019.776.429	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Angka	0,38	17.639.097.559	PUTR
				Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	53,9		

RKPD TAHUN 2025								
Kode	**Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah**			**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**		**Perangkat Daerah**
						Kinerja 2025	**Rp. (Pokok)**	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	82,01	2.085.000.001	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Angka	51,21	83.921.528.426	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	34,02	932.410.056	
			Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	600.235.719	PERKIM
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6,02	1.996.038.703	

RKPD TAHUN 2025								
Kode	Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah
						Kinerja 2025	Rp. (Pokok)	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	96,21	3.756.516.061	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	88.949.904	PERTANAHAN

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		**PDRB Per Kapita (Juta. Rp)**					**74,23**	**2.223.472.396,00**
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	35,21	10.059.515,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	URUSAN PARIWISATA	50	134.995.000,00
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	URUSAN PERDAGANGAN	90,67	68.692.324,00
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	URUSAN KETENAGAKERJAAN	53,52	1.900.729.307,00
			meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program penempatan tenaga kerja		50,32	21.058.841,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
	Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	UNSUR KOPERASI DAN UMKM		
			Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	URUSAN PENANAMAN MODAL	80,23	37.585.115,00
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal		10,23	44.624.305,00
			Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	URUSAN PERTANIAN	10,75	5.727.989,00
Meningkatnya kesejahteraan		**Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)**					**12.482**	**41.235.340.707,00**

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
sosial masyarakat	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	URUSAN SOSIAL	66	295.442.478,00
			Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial		100	11.082.965,00
			Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	URUSAN KESEHATAN	100	40.000.000.000,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/ penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Program hubungan industrial	URUSAN KETENAGAKERJAAN	20,25	928.815.264,00
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		**Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)**					**57,5**	**1.051.224.249.248,25**
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase SOP yang diterapkan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Seluruh OPD	100	740.520.967.243,25
			Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	URUSAN PEMERINTAHAN	80	3.519.891.155,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			100	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1,35	2.694.239.114,00
			Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik			100	
			Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah			100	
			Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	URUSAN PENGAWASAN	90	1.496.523.197
				Persentase tindak lanjut temuan BPK			85	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
				Persentase tindak lanjut temuan BPKP			90	
				Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi			90	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani			100	
			meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	URUSAN PEMERINTAHAN	75	977.762.911
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematanagan UKPBJ			8	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	URUSAN KEPEGAWAIAN	85,92	2.320.113.343,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			5,48	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			4,62	
	meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	URUSAN PERENCANAAN	100	735.886.913,00
				Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja program "Sangat Tinggi"			100	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	Program pengelolaan keuangan daerah	URUSAN KEUANGAN	93,95	290.682.165.145,00
			meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah		14,68	2.124.886.865
	Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21,68	785.122.710
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik		83,1	1.291.753.050

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
				Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			57	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	80,22	204.507.906
				Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			34,5	
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100	552.872.734

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	Program riset dan inovasi daerah		100	108.961.180
			meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	70,23	502.797.471

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masayarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	Persentase capaian SPM bidang pelayananTrantibum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100	2.083.199.312,00
			meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	URUSAN KESBANGPOL	80	622.598.999,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia (Angka)**					**74,28**	**121.683.981.762,00**
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	URUSAN PENDIDIKAN	100	107.878.093.765
				Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)			100	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
				Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan			100	
			meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum		100	274.925.108
			meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik		80	1.608.337.266

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar Nasional Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	URUSAN PERPUSTAKAAN	68,21	800.000.000
	meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	URUSAN KESEHATAN	100	1.831.890.124,00
			Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		89,23	432.748.600
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		90,27	1.347.377.278,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23	483.561.141
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2,3	483.561.141,00
		Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	30	38.578.743

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	Program pengembangan daya saing keolahragaan		20	2.950.491.492
	meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks kerukunan umat beragama (Angka)	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	Program kesejahteaan Rakyat	Urusan Pemerintahan	78,22	2.694.239.114
			Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik			80,33	
			Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah			100	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan	URUSAN KEBUDAYAAN	75,62	860.177.990

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		**Indeks ekonomi hijau (Angka)**					**50,22**	**7.649.171.680,00**
		indeks ekonomi biru (Angka)					**101,14**	**1.503.598.150,00**
	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Urusan Pertanian	9,21	5.561.972.873
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura			10	
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan			10,76	
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan			11,89	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
		Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian		30,22	1.753.963.400
	Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas perikanan (Ton/Ha)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Urusan Perikanan	1,5	916.304.000
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya		0,5	587.294.150
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan		56,26	15.431.600,00

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan (Angka)	Meningkatnya Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Urusan Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		81,34	333.235.407
				Tingkat Konsumsi Protein			80,75	
			Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten			24	
Meningkatnya kualitas		**Indeks Infrastruktur (Angka)**					**2,72**	**42.660.341.406,00**

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
infrastruktur daerah	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas infrastruktur (%)	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang	33,64	30.240.675.830
			Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Urusan Perhubungan	60,35	6.068.796.475
	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang	71	2.719.332.113

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
	minum yang layak bagi masyarakat	Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		81,82	884.431.000
	Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Persentase permukiman yang tertata (%)	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		81,82	557.705.895

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman	10,16	961.000.000
			meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman		4,78	1.128.400.093
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Urusan Pertanahan	20,55	100.000.000,00
Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		**Indeks desa (Angka)**					**72,21**	**4.625.561.642,00**
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	Urusan pemberdayaan dan masyarakat desa	4,83	3.842.379.508
			Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa			30,25	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		10	783.182.134
Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		**Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)**					**14,82**	**37.074.451.560,00**
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100	25.522.623.727

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			100	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	
			terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman	100	264.860.373

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
				persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			100	
			meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Urusan Pemadam kebakaran	30,46	93.208.590
				Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit			30,46	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Program penangan bencana	Urusan Sosial	100	240.589.321
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (Angka)	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Urusan lingkungan hidup	77,48	76.114.569
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan		24,02	9.596.587.472

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025								
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang	94,15	880.467.508
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampaham regional		77,88	400.000.000

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Sebagaimana tertuang pada Bab III, Perubahan pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sejumlah **Rp.1.562.022.082.341** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp.233.481.386.943,** pendapatan Transfer sejumlah **Rp. 1.304.735.556.631,** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah **Rp.23.805.138.767.**. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2025, dengan jumlah proyeksi Perubahan belanja sebesar **Rp.1.593.287.451.679** dan pendanaan untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah **Rp. 0,00**.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, taransparan, dan berkeadilan. Belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayana dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Uraian	RKPD Pokok 2025	APBD 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4-2*
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	**211.863.920.215**	**228.781.386.943**	**233.481.386.943**	**21.617.466.728**
Pajak Daerah	70.895.580.690	72.833.386.943	72.833.386.943,00	1.937.806.253
Retribusi Daerah	9.368.339.525	144.948.000.000	145.648.000.000,00	136.279.660.475
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000,00	500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	126.600.000.000	5.500.000.000	9.500.000.000,00	-117.100.000.000
Pendapatan Transfer	**1.374.872.506.252**	**1.401.431.496.631**	**1.304.735.556.631**	**-70.136.949.621**
Pendapatan Transfer Pusat	1.290.214.450.492	1.298.129.438.000	1.201.433.498.000,00	-88.780.952.492
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.658.055.760	103.302.058.631	103.302.058.631,00	18.644.002.871
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**26.185.652.193**	**23.805.138.767**	**23.805.138.767,00**	**-2.380.513.426**
Hibah	0		-	0
Lain-lain pendapatan	26.185.652.193	23.805.138.767	23.805.138.767,00	-2.380.513.426
Jumlah Pendapatan	**1.612.922.078.660**	**1.654.018.022.341**	**1.562.022.082.341**	**-50.899.996.319**
BELANJA				
BELANJA OPERASI	**1.082.324.250.974**	**1.165.770.776.748**	**1.129.757.672.243**	**44.250.590.295**
Belanja Pegawai	692.653.831.004	710.345.316.565	686.630.180.019,40	-6.325.259.671
Belanja Barang dan Jasa	379.803.980.066	439.794.595.081	426.646.402.772,52	43.967.270.419
Belanja Hibah	9.470.939.904	15.417.865.102	16.268.089.451,44	6.791.079.547
Belanja Bantuan Sosial	395.500.000	213.000.000	213.000.000,00	-182.500.000
BELANJA MODAL	**264.354.501.433**	**216.805.573.784**	**175.589.803.533**	**-88.098.836.264**
Belanja Modal Tanah	280.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00	-180.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.112.173.992	45.032.915.649	43.172.680.811,00	4.728.868.455
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.560.851.686	63.626.937.612	65.843.876.175,00	-38.716.975.511
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.341.132.682	102.257.085.223	61.334.611.246,64	-52.009.021.435
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.660.343.073	3.538.635.300	3.538.635.300,00	-2.121.707.773
Belanja Modal Aset Lainnya	1.400.000.000	2.250.000.000	1.600.000.000,00	200.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	**10.000.000.000**	**28.730.419.000**	**28.819.286.094**	**16.670.886.094**
Belanja Transfer	**255.243.326.253**	**264.011.252.809**	**259.120.689.809**	**3.877.363.556**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.448.040.703	8.768.838.809	8.768.838.809,00	3.320.798.106
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	249.795.285.550	255.242.414.000	250.351.851.000,00	556.565.450
Jumlah Belanja	**1.611.922.078.660**	**1.675.318.022.341**	**1.593.287.451.679**	**- 23.299.996.319**
Total Surplus/(Defisit)	**1.000.000.000**	**- 21.300.000.000**	**- 1.336.000.925.969**	**162.646.453.487**
Penerimaan Pembiayaan	**0**	**21.300.000.000**	**31.265.369.338**	**31.265.369.338**

Uraian	RKPD Pokok 2025	APBD 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	0	21.300.000.000	31.265.369.338	31.265.369.338
Pencairan Dana Cadangan	-			
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-			
Penerimaan pinjaman daerah	-			
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-			
Penerimaan piutang daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**0,00**		**0**
Pembentukan dana cadangan	-			
Penyertaan modal (investasi) daerah	1.000.000.000,00			**0**
Pembayaran Pokok Utang	-			
Pemberian pinjaman daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-			
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**-1.000.000.000**	**21.300.000.000,00**	**31.265.369.338,00**	0

5.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta BIdang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini. Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebanyak dan 70 (empat puluh tujuh) program prioritas sebagai mana di jabarkan padatabel 5.2 . berikut.

Tabel 5.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	35,21	294.645.384	35,21	10.059.515	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
Peningkatan daya tarik destinasi wisata	50	957.882.602	50	134.995.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	2	149.973.770	2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	90,67	100.000.100	90,67	68.692.324	Dinas Perdagangan
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	53,52	1.900.729.307	53,52	1.900.729.307	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
	63,15		63,15		
Program penempatan tenaga kerja	50,32	77.140.458	50,32	21.058.841	
program Perencanaan dan Pembangunan Industri		356.568.800			UNSUR KOPERASI DAN UMKM
Program pengembangan iklim penanaman modal	80,23	84.889.134	80,23	37.585.115	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program promosi penanaman modal	10,23	88.875.152	10,23	44.624.305	
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10,75	11.839.093.940	10,75	5.727.989.530	URUSAN PERTANIAN
Program perlindungan dan jaminan sosial	66	477.690.881	66	295.442.478	Dinas Sosial
Program pemberdayaan sosial	100	18.187.632	100	11.082.965	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	40.000.000.000	100	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
Program hubungan industrial	20,25	2.778.148.893	20,25	928.815.264	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	747.628.550.075	100		Seluruh OPD
Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	5.826.547.370	80	3.519.891.155	Sekretariat DPRD

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	2.541.672.098	100	2.694.239.114	Sekretariat Daerah
Program penyelenggaraan pengawasan	90	3.335.906.495	90	1.496.523.197	Inspektorat Daerah
	85		85		
	90		90		
	90		90		
	100		100		
Program perekonomian dan pembangunan	75	620.849.111	75	977.762.911	Sekretariat Daerah
Program kepegawaian daerah	100	4.299.838.037	100	2.320.113.343	BKPSDM
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	1.082.934.133	100	735.886.913	Bappelitbangda
	100		100		
Program pengelolaan keuangan daerah	85	267.900.776.131	85	290.682.165.145	BKAD
	98		98		

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
	100		100		
Program pengelolaan pendapatan daerah	14,68	1.666.983.320	14,68	2.124.886.865	BAPENDA
Program pengelolaan aplikasi informatika	21,68	755.827.450	21,68	785.122.710	Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan statistik
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	1.671.120.410	83,1	1.291.753.050	
	57		57		
Program pendaftaran penduduk	80,22	280.764.996	80,22	204.507.906	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	34,5		34,5		
Program penelitian dan pengembangan daerah	100	703.353.234	100	552.872.734	Bappelitbangda
Program riset dan inovasi daerah	100	364.776.960	100	108.961.180	

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program pengembangan sumber daya manusia	70,23	981.805.071	70,23	502.797.471	BKPSDM
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100	2.777.114.328	100	2.083.199.312	Satpol PP
	100		100		
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	80	654.786.892	80	622.598.999	Kesbangpol
Program pengelolaan pendidikan	100	123.313.483.025	100	107.878.093.765	Dinas Pendidikan
	100		100		
	100		100		

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program pengembangan kurikulum	100	207.933.681	100	274.925.108	
Program pendidik dan tenaga kependidikan	80	1.447.346.896	80	1.608.337.266	
Program pembinaan perpustakaan	68,21	300.938.336	68,21	800.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	1.912.548.444	100	1.831.890.124	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	89,23	275.909.641	89,23	432.748.600	RSUD Batara Guru
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	30,23	1.703.120.824	30,23	1.347.377.278	Dinas Kesehatan
	80,22		80,22		

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program peningkatan kualitas keluarga	23	654.809.639	23	483.561.141	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program pengendalian penduduk	2,3	530.713.667	2,3		Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	30	2.126.910.000	30	2.049.404.714	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30	389.617.117	30	38.578.743	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	20	2.547.098.214	20	2.950.491.492	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	78,22	2.541.672.098	78,22	2.694.239.114	Sekretariat Daerah
	80,33		80,33		

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program pengembangan kebudayaan	75,62	517.233.910	75,62	860.177.990	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9,21	11.467.205.465	9,21	5.561.972.873	Dinas Pertanian
	10		10		
	10,76		10,76		
	11,89		11,89		
Program penyuluhan pertanian	30,22	938.458.480	30,22	1.753.963.400	
Program pengelolaan perikanan tangkap	1,5	3.607.009.012	1,5	916.304.000	Dinas Perikanan
Program pengelolaan perikanan budidaya	0,5	8.327.654.823	0,5	587.294.150	
Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	56,45	1.232.796.000	56,45	15.431.600	
	80,67		80,67		
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	46	41.004.000	46		Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	81,34 80,75	423.200.234	81,34 80,75	333.235.407	
Program Penyelenggaraan Jalan	33,64	83.921.528.426	33,64	30.240.675.830	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	60,35	6.950.362.457	60,35	6.068.796.475	Dinas Perhubungan
Program pengelolaan sumber daya air	71	17.639.097.559	71	2.719.332.113	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,82	2.085.000.001	81,82	884.431.000	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	81,82	4.900.255.038	81,82	557.705.895	
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	10,16	1.268.000.000	10,16	961.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Program kawasan permukiman	4,78	1.996.038.703	4,78	1.128.400.093	

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	20,55	2.460.000.000	20,55		Dinas Pertanahan
Program administrasi pemerintahan desa	4,83	5.245.547.029	4,83	3.842.379.508	Dinas pemberdayaan dan masyarakat desa
	30,25		30,25		
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	10	1.070.000.000	10	783.182.134	
Program penanggulangan bencana	100	683.932.425	100	25.522.623.727	Badan penanggulangan bencana daerah
	100		100		
	100		100		
Program pengembangan perumahan	100	600.235.719	100	264.860.373	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman

PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2025		Perubahan RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Target	Pagu	Target	Pagu	
	100		100		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	428.119.703	100	93.208.590	Dinas Pemadam kebakaran
	30,46		30,46		
Program penanganan bencana	100	316.689.553	100	240.589.321	Dinas Sosial
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	77,48	84.845.159	77,48	76.114.569	Dinas lingkungan hidup
Program pengelolaan persampahan	24,02	4.689.046.551	24,02	9.596.587.472	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	94,15	932.410.056	94,15	880.467.508	PUTR
Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	77,88	150.000.000	77,88	400.000.000	

5.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta BIdang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini.

INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PERUBAHAN RKPD KAB. LUWU TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	8	9	10	12	13	14	20
						DINAS PENDIDIKAN				450.144.006.873	465.186.014.085			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				450.144.006.873	465.186.014.085			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				450.144.006.873	465.186.014.085			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	325.175.243.271	355.424.657.946			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100.297.341	136.837.260			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	44.037.309	47.041.180	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.708.910	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.263.614	19.760.788	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.095.380	20.151.590	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.918.522	10.637.552	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.807.071	4.797.631	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	11.175.445	8.740.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaran administrasi keuangan daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	323.043.526.530	357.194.339.865			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2750 Orang/bulan	2750 Orang/bulan	322.614.153.970	353.817.601.078	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	370.920.000	324.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	24.703.580	37.404.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	33.748.980	29.858.990	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	55.283.805	57.191.760			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	3 Laporan	30.083.805	26.491.760	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.200.000	25.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 persen	100 persen	231.779.489	150.832.910			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	80.973.649	68.981.594	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	58.880.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	650 Orang	650 Orang	91.925.840	14.597.710	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Ketersediaan admnistrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	965.583.122	495.255.485			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.726.136	4.767.435	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.966.800	21.219.881	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.093.650	24.868.680	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	43.801.600	21.535.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	45.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	144.867.736	68.109.945	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	61.100.000	47.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	626.027.200	124.476.822	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	670.253.950	501.688.990			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	252.253.950	227.688.990	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	418.000.000	294.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	108.519.034	70.618.060			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	51.379.034	36.018.060	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	14.500.000	14.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	42.640.000	20.100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	123.313.483.025	107.878.093.765			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS)	15 Ruang 1 Dokumen 1 Sekolah 37500 Peserta Didik 7100 Peserta Didik 90 Ruang	15 Ruang 1 Dokumen 1 Sekolah 37500 Peserta Didik 7100 Peserta Didik 90 Ruang	73.715.715.339	63.733.360.964			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 0	3 0	1.000.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	15.319.536.844	374.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	265.000.000	221.437.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	100 Unit	4.260.941.880	13.486.793.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	173.420.000	214.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	175.000.000	164.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	840.000.000	11.100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	50 Paket	50 Paket	2.087.600.000	288.820.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	276.009.250	384.879.439	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	65.401.821	50.408.660	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	353.342.101	174.020.441	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	27.121.497	27.130.897	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 Orang	12 Orang	248.634.499	284.763.324	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	30 Ruang	30 Ruang	2.888.306.137	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1200 Orang	1200 Orang	147.757.669	91.658.069	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	120 Konten Digital	120 Konten Digital	200.414.824	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	401 Orang	401 Orang	125.253.666	85.253.766	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	275 Dokumen	291.256.738	279.401.393	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	66.925.890	78.955.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	108.391.768	55.891.768	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku	5000 Buku	502.680.000	110.240.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 0	100 0	1.045.620.000	2.607.054.450	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 0	20 0	2.587.025.380	3.523.245.000	-	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								

							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500 Orang	500 Orang	87.060.505	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	323.014.870	249.458.417	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 0	10 0	1.750.000.000	6.165.735.951	-	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37000 0	37000 0	37.000.000.000	36.172.350.000	-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	1.500.000.000	1.317.986.750	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Anak usia 13-15 yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS)	14.083 siswa 15 ruang 1 dokumen 1 sekolah 60 ruang	14.083 siswa 15 ruang 1 dokumen 1 sekolah 60 ruang	34.713.980.670	28.282.147.416			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit	1.000.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.200.000.000	8.850.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	220.500.000	3.368.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	735.000.000	11.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium								
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	1.176.000.000	473.350.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit	529.200.000	10.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	50 Unit	4.370.000.000	1.870.081.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	1.000.000.000	2.788.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	300.000.000	3.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29600 Peserta Didik	29600 Peserta Didik	17.475.290.000	17.393.887.094	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	179.999.469	263.826.146	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	47.314.452	47.205.171	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	217.001.393	190.356.495	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	15 Orang	97.579.931	231.335.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	185.000.000	54.509.336	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	200.000.000	18.026.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	150.000.000	20.529.080	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	106 Dokumen	106 Dokumen	251.640.000	140.799.185	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	223.090.439	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100.000.000	99.085.890	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5500 Satuan Pendidikan	5500 Satuan Pendidikan	298.590.425	334.797.490	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang	396.900.000	400.450.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	290 Orang	290 Orang	50.000.000	18.594.080	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku	5000 Buku	500.000.000	308.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6260 Paket	6260 Paket	848.965.000	2.494.216.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	1.585.000.000	111.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	1.300.000.000	315.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik PAUD Terlaksananya Proses Belajar PAUD Terwujudnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	226 sekolah 90 %	226 sekolah 90 %	10.313.490.290	10.599.536.702			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	1.612.918.599	646.750.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6328 Peserta Didik	6328 Peserta Didik	4.080.560.000	4.368.746.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	700 Orang	179.993.367	129.763.760	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	227 Satuan Pendidikan	227 Satuan Pendidikan	250.145.906	184.958.186	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								

							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	25 Orang	25 Orang	48.837.262	99.231.140	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	179.159.400	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200 Orang	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10 Dokumen	199.990.000	369.578.713	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	171.600.188	89.222.907	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	773.358.578	587.760.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200 Orang	7.317.120	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	500.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	100.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	20 Unit	300.000.000	219.350.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	1.200.000.000	2.839.998.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7875 Satuan Pendidikan	7875 Satuan Pendidikan	27.109.870	54.747.432	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	5 Ruang	175.000.000	166.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 0	132.500.000	267.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	7 Ruang	175.000.000	775.750.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Biaya Personil Peserta Didik Nonformal	8 PKBM	8 PKBM	4.570.296.726	2.540.636.763			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	1.984.890.000	2.296.790.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	45.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	8.185.526	13.645.652	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	100.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	123.776.100	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200 Orang	19.389.500	14.376.780	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	15 Dokumen	57.582.633	193.911.068	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.086.215	71.168.943	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 Buku	2500 Buku	150.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	352.800.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	5 Ruang	352.800.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200 Orang	30.000.000	16.804.480	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	400.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	19.434.748	15.996.473	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium								
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	351.792.002	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	24.560.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	400.000.002	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persentase Kurikulum yang Dikembangkan	100 99 % %	99 100 % %	207.933.681	274.925.108			
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Di Sekolah	80 %	80 %	207.933.681	290.614.737			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	75.481.390	85.631.990	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	30 Dokumen	30 Dokumen	132.452.291	189.293.118	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	99,00 persen	99,00 persen	1.447.346.896	1.608.337.266			
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Adanya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 dokumen	1 dokumen	1.447.346.896	2.001.612.757			DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30 Dokumen	30 Dokumen	890.882.106	1.166.482.777	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Laporan	100 Laporan	556.464.790	441.854.489	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						RSUD BATARA GURU				155.833.918.193	173.062.186.288			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				155.833.918.193	173.062.186.288			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				155.833.918.193	173.062.186.288			
5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	26.866.451.893	28.362.186.288			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 Persen	100 Persen	26.866.451.893	33.612.186.288			RSUD BATARA GURU
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4320 Orang/bulan	4320 Orang/bulan	26.866.451.893	28.362.186.288	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Pendapatan dari BLUD Dana Alokasi Umum (DAU)	RSUD BATARA GURU
6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	100 %	128.967.466.300	144.700.000.000			

	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	8.967.466.300	0,00			RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	2.112.233.500	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2 Unit	6.855.232.800	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	120.000.000.000	144.700.000.000			RSUD BATARA GURU
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000.000	144.700.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	RSUD BATARA GURU
						PUSKESMAS BELOPA				1.733.489.040	1.622.782.180			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.733.489.040	1.622.782.180			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.733.489.040	1.622.782.180			
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.730.789.040	1.617.432.180			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.715.639.040	1.617.432.180			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	451 Orang	38.400.000	48.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	12.600.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3758 Orang	66.750.000	70.050.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	47 Orang	0,00	12.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	313 Orang	18.900.000	27.868.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	16.200.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	271.150.000	225.040.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	14.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.650.000	30.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.500.000	18.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	47 Orang	0,00	5.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	118.750.000	87.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	765.439.040	765.414.180	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	265.500.000	231.510.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000	3.850.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	13.500.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	9.450.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	1.350.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000	12.150.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	22.350.000	1.350.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	33.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	29.850.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	15.150.000	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.150.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	2.700.000	5.350.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.700.000	5.350.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	5.350.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LATIMOJONG				1.921.042.560	1.805.782.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.921.042.560	1.805.782.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.921.042.560	1.805.782.200			
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	100 %	1.921.042.560	1.795.878.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	100 %	1.921.042.560	1.795.878.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	81.480.000	49.954.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% 0	100% Orang	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	61.200.000	53.600.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	21 Orang	0,00	26.400.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	15 Orang	8.800.000	8.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	314.792.000	211.812.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	658 Dokumen	0,00	8.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	15 Dokumen	84.500.000	87.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12 Dokumen	4.550.000	17.377.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	300 Orang	0,00	16.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	15 Dokumen	296.333.960	192.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	717.913.200	717.913.200	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	30 Dokumen	254.623.400	227.022.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 0	0 Laporan	39.600.000	0,00	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 0	0 0	8.850.000	13.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	46.400.000	0,00	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	79.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	85.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	9.904.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	9.904.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	9.904.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS NOLING				2.458.880.540	2.298.723.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.458.880.540	2.298.723.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.458.880.540	2.298.723.200			
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	100 %	2.451.530.540	2.292.369.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.441.030.540	2.292.369.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	201 Orang	36.800.000	56.700.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	0 Orang	9.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1687 Orang	2064 Orang	60.800.000	57.500.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	33 Orang	0,00	13.200.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	351 0	351 0	36.000.000	20.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	0 Orang	14.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	254.303.221	229.232.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	9.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	23.200.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.100.000	23.202.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	8998 Orang	0,00	4.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	12 Dokumen	249.000.000	107.900.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.431.925.200	1.431.925.200	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	230.302.119	229.572.000	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 Orang	0 Orang	4.000.000	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	800.000	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	18.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	1.038.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1050 Dokumen	0,00	12.600.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	54.100.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	10.500.000	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	10.500.000	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	7.350.000	6.354.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7.350.000	6.354.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.350.000	6.354.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BASTEM				1.931.654.990	1.745.779.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.931.654.990	1.745.779.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.931.654.990	1.745.779.200			
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.913.874.990	1.737.679.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.901.838.200	1.737.679.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	121 Orang	60.000.000	115.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	114 Orang	9.550.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	435 Orang	45.960.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	828 Orang	44.800.000	34.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	897 Orang	897 Orang	58.477.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	29 Orang	19.860.000	47.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	13.200.000	14.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	6.620.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	163.220.000	269.232.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	7.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	13.400.000	15.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.300.000	5.697.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	300 Orang	0,00	12.900.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	36 Dokumen	270.330.000	120.750.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	732.445.200	732.445.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	34 Dokumen	34 Dokumen	234.576.000	228.823.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	6.800.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14 Orang	14 Orang	6.600.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	25.300.000	19.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	158.400.000	2.332.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	45.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	68.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	12.036.790	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.036.790	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	17.780.000	8.100.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.780.000	8.100.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	17.780.000	8.100.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS WALENRANG				1.913.421.938	1.710.645.308			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.913.421.938	1.710.645.308			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.913.421.938	1.710.645.308			
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.911.521.938	1.699.075.308			

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.891.721.938	1.699.075.308			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	433 Orang	411 Orang	26.400.000	70.560.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	433 Orang	433 Orang	12.090.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 0	2368 0	16.800.000	28.100.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	43 Orang	0,00	11.450.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 Orang	467 Orang	3.700.000	15.300.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	559 Orang	559 Orang	9.750.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	285.015.450	230.882.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	197 Dokumen	0,00	9.850.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	7.100.000	6.150.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	26.180.000	16.600.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	92 Orang	0,00	4.600.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	113.950.000	63.100.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	941.093.508	941.093.508	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	255.792.980	207.506.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	650.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	500 Orang	11.050.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	533 Orang	533 Orang	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	6 Orang	0,00	316.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Bulan Dokumen	11903 Dokumen	68.150.000	18.017.800	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	112.000.000	1.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	2123 Dokumen	0,00	20.850.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	53.450.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	19.800.000	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	19.800.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.900.000	11.570.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.900.000	11.570.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	1.900.000	11.570.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS WALENRANG TIMUR				2.104.348.345	2.004.180.835			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.104.348.345	2.004.180.835			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.104.348.345	2.004.180.835			
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.104.348.345	1.994.980.835			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.094.087.405	1.997.080.835			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	350 Orang	21.600.000	24.720.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	15 Orang	12.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1900000 Orang	2812 Orang	90.000.000	102.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	37 Orang	0,00	2.700.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	413 Orang	445 Orang	12.000.000	15.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	411 Orang	411 Orang	6.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	221.733.360	236.494.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	16.300.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000	19.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen	12.677.105	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	20.457.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	37 Orang	0,00	20.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1 Dokumen	174.597.105	102.780.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 0	0 0	1.147.803.835	1.147.803.835	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1 Dokumen	250.076.000	204.176.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	14.400.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	60 Orang	4.800.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	411 Orang	411 Orang	4.800.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1 Dokumen	57.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	46.650.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	10.260.940	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.260.940	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	9.200.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	7.100.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	9.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAMASI TIMUR				1.798.015.084	1.617.277.864			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.798.015.084	1.617.277.864			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.798.015.084	1.617.277.864			
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.788.765.084	1.608.685.364			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.763.315.084	1.611.577.864			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	79.200.000	40.500.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	9.450.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	45.600.000	27.600.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	10.200.000	11.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	600.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1000 Dokumen	1000 Dokumen	229.715.627	178.822.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	100 Dokumen	9.300.000	11.425.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	200 Dokumen	200 Dokumen	10.710.000	14.559.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen	226.150.000	208.786.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	100% Dokumen	829.504.864	829.504.864	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	300 Dokumen	300 Dokumen	240.834.593	204.278.500	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1000 Laporan	1000 Laporan	5.000.000	7.200.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang	250 Orang	2.450.000	1.100.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100 Dokumen	100 Dokumen	20.200.000	33.300.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	150 Dokumen	150 Dokumen	44.400.000	39.810.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	25.450.000	2.350.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen	25.450.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.250.000	8.592.500			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	9.250.000	3.350.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Dokumen	100 Dokumen	9.250.000	8.592.500	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						DINAS KESEHATAN				172.474.848.961	179.552.636.970			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				172.474.848.961	179.552.636.970			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				172.474.848.961	179.552.636.970			
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	68.948.941.386	74.823.256.399			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	408.012.328	405.282.986			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	191.499.793	153.204.793	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.028.350	8.603.700	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.999.692	7.050.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.499.714	8.799.714	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.999.785	8.749.785	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.999.994	5.499.994	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	149.985.000	90.235.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	100 %	66.738.218.908	80.380.102.465			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	3500 Orang/bulan	66.166.537.904	72.405.199.856	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	354.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	39.999.773	36.199.773	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.746	1.999.746	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	29.681.485	25.088.440	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	40.600.000	26.248.536			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	10.648.536	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.600.000	15.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	20.240.000	20.240.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	2 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	44 Orang	20.240.000	10.740.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	439.431.008	376.121.564			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.981.322	4.981.322	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.977.063	4.977.063	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.486.132	18.486.132	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.999.792	9.999.792	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.999.348	5.676.904	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	349.987.351	300.000.351	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	58.671.844	16.706.795			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	13.825.000	6.912.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	44.846.844	9.794.295	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	869.200.000	866.208.824			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	16.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	166.000.000	305.808.824	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	679.200.000	543.600.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	70 %	374.567.298	421.799.879			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	199.987.298	143.066.236	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	24.580.000	4.140.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	274.593.643	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KESEHATAN
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	100 %	101.104.617.393	102.598.004.293			

	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85 %	85 %	40.401.329.649	39.347.739.158			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	1 Unit	8.300.000.000	7.643.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	6 Unit	1.772.640.000	2.289.330.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	1 Unit	3.145.052.300	53.587.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	3.836.040.000	8.578.538.384	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	21 Unit	1.687.356.000	2.542.810.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	1 Unit	14.373.768.000	3.460.093.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	10 Unit	630.311.630	6.810.055.140	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	1.000.012.859	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.494.600.000	2.787.306.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit	300 Unit	77.000.000	155.202.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4.050.953.860	7.157.364.510	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)								
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	5 Layanan	23.095.000	35.008.510	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	10.500.000	164.497.344	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	100 %	60.647.590.088	60.891.523.962			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	NA Orang	24.992.575	86.151.338	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5374 Orang	5374 Orang	25.000.000	122.270.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5408 Orang	5408 Orang	41.951.710	72.737.931	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	28106 Orang	87.127.656	59.870.122	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	58889 Orang	140.839.802	78.919.998	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	222198 Orang	95.774.790	64.737.332	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	28540 Orang	30.120.430	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	70524 Orang	21.396.700	15.876.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	4432 Orang	408.676.000	107.367.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	871 Orang	19.408.350	14.638.350	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	6579 Orang	470.008.200	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	6579 Orang	17.610.000	14.540.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	68.365.000	28.863.120	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	17.075.000	14.102.880	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	21.495.360	430.791.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	12.138.350	41.774.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	674.724.010	34.899.088	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.870.000	288.005.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	16.330.612	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.983.670	108.720.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	na Orang	20.706.200	9.794.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	na Orang	25.445.000	7.300.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	986.676.930	327.889.322	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000.000	50.041.585.390	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								

							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	NA Paket	24.962.000	18.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	300.001.940	427.717.281	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	4.249.999.619	6.164.460.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 0	1 0	18.599.235	1.280.514.192	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	22 Unit	29.986.050	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	24.983.781	5.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	27.575.000	6.030.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	100.000.000	299.999.910	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	NA Orang	9.976.508	644.280	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	NA Orang	24.950.000	7.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	NA Orang	15.800.000	1.080.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	7 Tatanan	29.990.000	14.740.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	13.025.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	124.992.212	86.526.462	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	243.376.734	559.050.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	24.997.333	7.972.333	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik								
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.849	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	9.989.094	14.864.427	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	100 %	24.997.656	34.265.656			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.997.656	22.936.656	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.700.000	29.983.049			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	22 Unit	30.700.000	16.010.971	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN

23	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	78,91 0,021 100 % Angka %	78,91 0,021 100 % Angka %	1.703.120.824	1.347.377.278			
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	100 %	40.011.950	45.000.650			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.011.950	1.095.816	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	10.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	100 %	202.586.445	95.179.250			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	202.586.445	58.042.462	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	100 %	1.460.522.429	1.277.539.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1500 Orang	1500 Orang	1.460.522.429	1.277.539.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
24	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	100 %	442.259.717	351.250.400			
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	100 %	160.989.306	130.625.500			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	160.989.306	130.625.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	230 Produk	81.545.865	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	81.545.865	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	30.730.400	30.730.400			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.730.400	16.970.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	168.994.146	203.654.500			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	71 Unit	71 Unit	168.994.146	203.654.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	100 %	275.909.641	432.748.600			
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	22 Kelompok	133.984.589	150.000.000			DINAS KESEHATAN

	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	133.984.589	235.788.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	34.645.052	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	34.645.052	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	100 %	107.280.000	196.960.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	107.280.000	196.960.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN				1.942.748.444	1.834.444.124			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.942.748.444	1.834.444.124			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.942.748.444	1.834.444.124			
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.912.548.444	1.831.890.124			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.912.548.444	1.831.890.124			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	13.800.000	57.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang	9.000.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	74.000.000	57.550.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	19 Orang	0,00	11.400.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	12.800.000	12.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3 Orang	3 Orang	9.800.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	264.000.000	243.632.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	10 Dokumen	0,00	4.900.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40 Dokumen	40 Dokumen	16.900.000	13.997.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000	14.350.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	5.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen	230.800.000	118.050.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	968.726.124	968.726.124	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen	231.222.320	230.172.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	10 Laporan	12.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	4.900.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	50 Dokumen	50 Dokumen	16.000.000	10.500.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	50 Dokumen	50 Dokumen	23.600.000	813.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen	0,00	11.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	10 Dokumen	0,00	72.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	30.200.000	2.554.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	30.200.000	2.554.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	30 Dokumen	30.200.000	2.554.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAROMPONG				2.064.615.840	1.921.828.800			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.064.615.840	1.921.828.800			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.064.615.840	1.921.828.800			
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.037.770.840	1.913.053.800			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.035.640.800	1.915.363.760			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	467 Orang	467 Orang	11.640.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	467 Orang	0,00	43.860.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang	330 Orang	5.710.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1986 Orang	1986 Orang	66.175.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	432 Orang	0,00	58.165.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	468 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	40 Orang	0,00	4.365.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442 Orang	442 Orang	26.190.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	14 Orang	0,00	20.370.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	618 Orang	618 Orang	14.550.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	618 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	271.080.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen	0,00	254.897.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen	0,00	10.900.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	7 Dokumen	30.270.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	7 Dokumen	0,00	23.430.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	27.160.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	7 Dokumen	0,00	10.365.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	300 Orang	0,00	5.360.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	194.830.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	2 Dokumen	0,00	69.399.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	1.086.874.800	1.086.874.800	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	169.576.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	77.565.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	0,00	213.878.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	2.910.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	80 Orang	5.820.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	116 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106 Orang	106 Orang	1.500.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	106 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	14.550.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	16.005.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2 Dokumen	29.240.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	1.455.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	300 Dokumen	0,00	24.735.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	468 Dokumen	0,00	68.995.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	2.130.040	1.355.040			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.130.040	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	26.845.000	8.775.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	26.845.000	5.110.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	26.845.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0,00	8.775.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS SULI				2.016.271.612	1.896.219.372			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.016.271.612	1.896.219.372			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.016.271.612	1.896.219.372			

30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.005.911.612	1.887.115.372			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	undefined	undefined undefined	undefined undefined	2.002.846.064	1.887.115.372			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	100 Orang	44.800.000	104.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	12.990.000	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	84.250.000	48.700.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	9.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	14.600.000	18.200.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	4.500.000	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	253.012.752	225.682.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	4.650.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000	9.900.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.400.000	18.362.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.900.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	164.800.000	75.400.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.771.372	1.050.771.372	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	224.641.940	219.152.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	3.450.000	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	7.850.000	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	300.000	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100 0	100 0	34.880.000	30.148.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 0	100 0	46.200.000	2.250.000	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	13.500.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	53.500.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	3.065.548	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.065.548	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	10.360.000	9.104.000			

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.360.000	9.104.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 0	100 0	10.360.000	9.104.000	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS SULI BARAT				2.127.832.826	1.991.358.796			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.127.832.826	1.991.358.796			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.127.832.826	1.991.358.796			
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.121.832.826	1.986.158.796			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.112.320.526	1.986.158.796			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	47.400.000	44.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	0 Orang	19.050.000	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	1433 Orang	70.400.000	49.300.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	24 Orang	0,00	9.600.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	200 Orang	13.200.000	22.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	241.990.000	226.458.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	11.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.900.000	22.650.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	68.040.000	21.350.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	24 Orang	0,00	17.300.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	184.000.000	116.314.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40 Dokumen	40 Dokumen	1.100.267.796	1.100.267.796	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	231.622.730	231.119.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	13.500.000	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	145 Orang	0 Orang	6.100.000	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14 Orang	0 Orang	10.000.000	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.450.000	27.200.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	62.400.000	5.600.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	20.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	59.900.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	9.512.300	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.512.300	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	6.000.000	5.200.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	6.000.000	5.200.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	5.200.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BELOPA UTARA				1.770.642.012	1.593.145.272			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.770.642.012	1.593.145.272			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.770.642.012	1.593.145.272			
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	100 %	1.767.442.012	1.588.091.272			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	100 %	1.701.544.152	1.588.091.272			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	384 Orang	384 Orang	38.080.000	74.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	369 Orang	369 Orang	11.580.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.571 Orang	3.571 Orang	62.000.000	46.450.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	14 Orang	0,00	13.450.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	394 Orang	394 Orang	6.400.000	12.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	457 Orang	457 Orang	8.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	239.262.240	211.032.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	8.700.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	17.550.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	59.970.000	25.737.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	14 Orang	0,00	2.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	132.200.000	79.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	802.995.912	802.939.272	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	213.376.000	208.672.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	394 Orang	394 Orang	8.800.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	457 Orang	457 Orang	8.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	26.200.000	29.961.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	63.480.000	1.700.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	21.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	30.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	65.897.860	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.897.860	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	3.200.000	5.054.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.200.000	5.054.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	5.054.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BAJO				2.109.762.680	2.012.002.020			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.109.762.680	2.012.002.020			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.109.762.680	2.012.002.020			
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.078.362.680	2.001.552.020			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.078.362.680	2.000.448.020			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	46.400.000	96.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	246 Orang	14.900.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2302 Orang	2302 Orang	44.500.000	27.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang	0,00	13.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang	15.815.000	27.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	380 Orang	380 Orang	4.400.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	194.340.000	250.460.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	3.100.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.850.000	26.400.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.700.000	20.720.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	34 Orang	0,00	17.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	198.465.000	76.950.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.132.826.020	1.132.826.020	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	265.111.660	225.746.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	6.600.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41 Orang	41 Orang	9.855.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	500.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	22.100.000	19.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	11.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	51.550.000	Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	31.400.000	10.450.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	31.400.000	11.554.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	31.400.000	10.450.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BAJO BARAT				2.020.786.650	1.886.808.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.020.786.650	1.886.808.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.020.786.650	1.886.808.200			
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.011.986.650	1.878.754.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.011.986.650	1.878.754.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang	100.000.000	71.640.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104 Orang	104 Orang	18.680.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1712 Orang	1712 Orang	48.000.000	75.200.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	5.400.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	286 Orang	286 Orang	20.400.000	23.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 0	0 0	2.200.000	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	296.182.300	249.832.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	13.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	17.600.000	9.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	48.490.000	27.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	151.200.000	95.703.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 0	0 0	995.485.200	995.485.200	-	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	217.469.150	231.472.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	8.800.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	286 Orang	286 Orang	4.200.000	0,00	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 0	0 0	2.200.000	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	9.080.000	13.320.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000	4.302.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	21.600.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	37.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.800.000	8.054.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.800.000	8.054.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	8.800.000	8.054.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS KAMANRE				1.706.727.140	1.565.661.410			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.706.727.140	1.565.661.410			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.706.727.140	1.565.661.410			
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.688.327.140	1.554.907.410			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.585.327.140	1.554.907.410			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	76.800.000	66.225.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	164 Orang	164 Orang	7.790.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1722 Orang	1722 Orang	56.600.000	31.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	0,00	4.800.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	199 Orang	6.800.000	15.270.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	246.903.890	254.542.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	15.860.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000	15.670.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	33.620.000	9.390.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	41 Orang	0,00	2.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	131.550.000	76.032.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	742.301.410	742.301.410	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	213.431.840	224.172.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	4.500.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	199 Orang	199 Orang	2.600.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang	600.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.330.000	14.240.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.400.000	9.845.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	23.700.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	49.060.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	103.000.000	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	18.400.000	10.754.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	18.400.000	10.754.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000	10.754.000	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PONRANG SELATAN				2.338.167.166	2.267.438.076			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.338.167.166	2.267.438.076			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.338.167.166	2.267.438.076			
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.329.867.166	2.256.248.076			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	-	100 %	2.326.746.066	2.256.248.076			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	407 Orang	597 Orang	53.200.000	127.786.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	401 Orang	401 Orang	25.750.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3668 Orang	3844 Orang	60.000.000	58.800.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	62 Orang	0,00	27.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	347 Orang	497 Orang	26.250.000	30.750.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	420 Orang	420 Orang	1.600.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	261.680.000	202.688.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	9.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	8.850.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.830.000	17.950.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	62 Orang	0,00	15.850.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	94.200.000	55.693.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.280.066	1.360.091.066	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	242.806.000	241.570.010	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.300.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52 Orang	52 Orang	3.500.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	750.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	16.400.000	13.520.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	107.700.000	1.500.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	26.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	59.200.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	3.121.100	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 0	1 0	3.121.100	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.300.000	11.190.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.300.000	11.190.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 0	1 0	8.300.000	11.190.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PONRANG				2.598.531.166	2.488.577.176			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.598.531.166	2.488.577.176			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.598.531.166	2.488.577.176			
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.594.831.166	2.480.223.176			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.589.265.205	2.480.223.176			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	0 0	36.480.000	49.400.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	0 Orang	11.390.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	0 0	84.000.000	81.050.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	7.526.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 0	0 0	28.200.000	19.500.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 0	0 Orang	1.800.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 0	0 0	230.236.339	204.332.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	21.450.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	15.350.000	16.185.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 0	0 0	38.040.000	28.036.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	12.300.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 0	0 0	215.750.000	119.536.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 0	0 0	1.612.174.176	1.612.174.176	-	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 0	0 0	251.444.690	218.772.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 0	0 Laporan	11.800.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 0	0 Orang	3.650.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 0	0 Orang	900.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 0	0 0	9.950.000	9.600.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 0	0 0	38.100.000	762.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	24.400.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	55.200.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	5.565.961	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 0	0 Dokumen	5.565.961	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	3.700.000	8.354.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.700.000	8.354.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	3.700.000	8.354.000	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

						PUSKESMAS BUA				3.251.383.748	3.162.405.848			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.251.383.748	3.162.405.848			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.251.383.748	3.162.405.848			
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	3.245.833.748	3.149.075.848			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.243.988.248	3.149.075.848			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	40.200.000	59.420.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	8.100.000	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	43.527.600	42.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	7.800.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	30.800.000	36.400.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	5.600.000	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	264.887.000	263.232.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	2.100.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	12.700.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44.400.000	28.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang	0,00	3.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	196.450.000	132.560.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	2.256.447.648	2.256.447.648	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	217.576.000	219.616.200	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.400.000	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	5.600.000	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	2.800.000	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000	21.600.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	86.600.000	3.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	10.500.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	50.700.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	1.845.500	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.845.500	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	5.550.000	13.330.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.550.000	13.330.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.550.000	13.330.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BASTEM UTARA				2.035.343.370	1.844.358.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.035.343.370	1.844.358.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.035.343.370	1.844.358.200			
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.027.093.370	1.838.438.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.016.020.870	1.838.438.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	60.300.000	51.480.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	61.700.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	100 Orang	43.200.000	61.630.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	16.888.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	16.500.000	17.307.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	0 Orang	5.500.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	282.800.000	220.352.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0,00	16.560.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.100.000	10.070.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	73.500.000	14.450.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10 Orang	0,00	11.040.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	235.200.000	145.580.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	851.245.200	851.245.200	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	254.345.670	232.756.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	7.780.000	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	8.250.000	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 0	0 Orang	2.750.000	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 0	0 0	12.750.000	21.400.000	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	51.100.000	25.440.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	76.800.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	65.440.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	11.072.500	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.072.500	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	8.250.000	5.920.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.250.000	5.920.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000	5.920.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS WALENRANG UTARA				1.898.406.954	1.804.991.684			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.898.406.954	1.804.991.684			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.898.406.954	1.804.991.684			
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.892.906.954	1.800.037.684			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.885.995.654	1.800.037.684			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	48.000.000	85.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	18.700.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	36.000.000	18.100.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	0,00	14.700.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	10.200.000	21.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	2.050.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	238.880.000	209.932.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	8.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	15.200.000	18.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	34.250.000	41.393.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	30 Orang	0,00	7.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	217.200.000	108.150.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	100% Dokumen	933.305.654	933.255.684	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	210.280.000	231.472.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	10.950.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	4.100.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 dokumen Orang	1 dokumen Orang	2.200.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8.280.000	13.185.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	96.400.000	2.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	28.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	57.050.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	6.911.300	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.911.300	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
51	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	5.500.000	4.954.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.500.000	4.954.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	4.954.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS WALENRANG BARAT				2.290.835.170	2.159.863.200			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.290.835.170	2.159.863.200			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.290.835.170	2.159.863.200			
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.279.455.170	2.148.323.200			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.265.634.200	2.148.323.200			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	55.200.000	27.145.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	11.400.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1043 Orang	980 Orang	62.400.000	49.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	11 Orang	0,00	9.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	36 Orang	36.400.000	30.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen	240.000.000	265.232.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	5.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	8 Dokumen	25.600.000	25.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	24.300.000	19.250.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0,00	12.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	17 Dokumen	300.000.000	197.652.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	100% Dokumen	1.103.991.200	1.103.991.200	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	25 Dokumen	254.443.000	224.753.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	27.150.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang	4.050.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	5 Dokumen	16.300.000	18.300.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	104.400.000	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	673 Dokumen	0,00	67.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	3500 Dokumen	0,00	92.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	13.820.970	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	13.820.970	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	11.380.000	11.540.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	11.380.000	11.540.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	11.380.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	10 Dokumen	0,00	11.540.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAMASI				2.213.250.032	2.055.996.392			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.213.250.032	2.055.996.392			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.213.250.032	2.055.996.392			
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.203.450.032	2.043.996.392			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.193.067.392	2.043.996.392			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	308 Orang	48.000.000	76.037.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302 Orang	302 Orang	30.000.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3732 Orang	3732 Orang	40.000.000	38.950.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	47 Orang	0,00	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	610 Orang	610 Orang	34.000.000	13.900.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	418 Orang	418 Orang	30.000.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	246.000.000	199.532.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	6.100.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	19.100.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	7.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	410 Orang	0,00	9.400.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	90.210.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.241.641.392	1.241.641.392	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	223.776.000	222.926.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	20.850.000	28.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	38.800.000	900.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	24.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	60.300.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	10.382.640	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.382.640	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	9.800.000	12.000.000			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	9.800.000	12.000.000			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.800.000	12.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				131.545.249.614	55.086.552.271			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				131.545.249.614	55.086.552.271			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				131.545.249.614	55.086.552.271			
56	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	12.899.560.586	12.261.764.702			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	51.668.998	13.061.363			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	38.768.789	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.900.209	13.061.363	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.099.950.070	12.052.397.130			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan	1296 Orang/bulan	9.748.518.468	10.238.495.278	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	338.920.000	220.960.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.511.602	12.901.852	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	12.493.778	10.999.879			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.493.778	10.999.879	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	100 Persen	131.821.964	13.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	30.072.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	101.749.964	6.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	973.203.730	692.683.230			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.408.601	8.003.334	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	274.810.200	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.232.167	31.232.167	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Jasa Usaha	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	68.400.000	66.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	75.696.133	80.523.753	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.166.275	6.921.450	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	502.490.354	208.751.263	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	39.997.000	0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.997.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.056.481.087	882.080.595			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	24.000.000	16.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	157.681.087	221.720.595	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	874.800.000	723.600.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	533.943.959	295.793.768			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	108.361.400	67.583.572	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	400.022.559	199.970.196	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	15.110.000	17.790.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.450.000	10.450.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

57	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	68.00 11.40 % Angka	68.00 11.40 % Angka	17.639.097.559	2.719.332.113			
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA	40 Titik/Lokasi	40 Titik/Lokasi	4.150.049.723	2.526.975.847			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai								
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,736 KM	32,736 KM	100.001.520	47.345.040	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	8,00 KM	8,00 KM	1.950.002.640	408.350.120	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,30 KM	0,30 KM	1.900.042.298	362.683.062	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai								
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,25 KM	0,25 KM	200.003.265	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	8904 Ha	8904 Ha	13.489.047.836	14.821.111.272			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,30 KM	0,30 KM	600.042.584	2.222.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi								
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	1 Bendung	1,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	1,5 KM	6.950.023.304	415.334.140	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	2 KM	951.661.772	70.000.240	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi								
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	3 Bendung	3.948.726.995	199.657.255	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	4,83 KM	1.038.593.180	1.213.740.256	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Bendung	5 Bendung	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82.05 %	82.05 %	2.085.000.001	884.431.000			
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	70.63 %	70.63 %	2.085.000.001	750.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								

							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0,5-1 Liter/Detik	0,5-1 Liter/Detik	750.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,5-1 Liter/Detik	0,5-1 Liter/Detik	700.000.000	684.431.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	80 SR	635.000.000	200.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	31 Persen	31 Persen	150.000.000	400.000.000			
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	1 BUAH	1 BUAH	150.000.000	400.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	400.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	76,88 %	76,88 %	1.133.210.105	376.113.676			
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	77,15 %	77,15 %	1.133.210.105	376.113.676			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	20 M^3/Hari	933.210.105	376.113.676	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	0,9716 %	0,9716 %	4.900.255.038	557.705.895			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	0,9716 Persen	0,9716 Persen	4.900.255.038	4.271.452.390			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6600 M	6600 M	4.400.255.038	557.705.895	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan								
							Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang dikembangkan	0,025 %	0,025 %	1.949.499.000	198.500.283			
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	0,025 Persen	0,025 Persen	1.949.499.000	1.000.028.600			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota								
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	1 Ton/hari	1.949.499.000	198.500.283	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	10,73 %	10,73 %	1.200.142.771	5.994.023.324			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	809 Angka	809 Angka	1.200.142.771	5.600.058.975			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	1.100.140.600	3.694.019.949	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	1,00	2.200.001.205	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800 Dokumen	800 Dokumen	100.002.170	100.002.170	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00002 %	0,00002 %	4.302.004.181	302.348.225			
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2 Angka	2 Angka	4.302.004.181	699.975.042			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	3 Kawasan	4.302.004.181	302.348.225	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	700 Angka	700 Angka	83.921.528.426	30.240.675.830			
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	36,13 Persen	36,13 Persen	83.921.528.426	80.091.669.788			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	199.500.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	2 Jembatan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
							Panjang Jalan yang Dibangun	140 KM	140 KM	22.239.086.998	6.339.756.538	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan								
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	5 KM	26.628.031.864	7.370.494.816	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10 KM	10 KM	3.292.541.358	4.125.812.017	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	5 KM	1.449.997.440	9.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	2 Jembatan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	4 Jembatan	900.124.228	200.040.202	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan								

							Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	9 Jembatan	19.214.656.761	8.598.369.487	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	2 Jembatan	200.320.890	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	300 KM	300 KM	1.250.000.000	1.000.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan								
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	0,2 KM	6.797.183.847	109.147.234	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 KM	1,00 KM	1.000.055.454	2.488.055.536	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembatan	1 Jembatan	750.029.586	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	29,38 81,14 angka angka	81,14 29,38 angka angka	432.541.891	271.189.715			
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	284 Orang	284 Orang	284.247.715	271.247.715			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	60 Orang	284.247.715	271.189.715	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan	1 Sistim Informasi	1 Sistim Informasi	141.363.956	29.436.438			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	3 Perangkat Pendukung	3 Perangkat Pendukung	59.151.500	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	8,00 Dokumen	8,00 Dokumen	33.221.478	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	48.990.978	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota	50 Persen	50 Persen	6.930.220	0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	10 Bangunan Konstruksi	6.930.220	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	5,33 Persen	5,33 Persen	932.410.056	880.467.508			
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	13,04 Persen	13,04 Persen	52.114.500	52.114.500			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	1 Laporan	52.114.500	52.114.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000	500.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar								
							Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	350.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	330.295.556	330.293.556			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	236.395.556	362.683.008	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	93.900.000	115.670.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.122.074.981	12.121.926.349			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.122.074.981	12.121.926.349			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.122.074.981	12.121.926.349			
68	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	4.501.284.498	4.429.442.454			
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	-	100 %	46.080.568	46.080.568			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.001.505	18.384.332	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.021.661	5.021.661	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.003.211	3.003.211	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.022.428	5.022.428	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.025.041	3.025.041	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.006.722	10.006.722	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	-	100 %	3.358.304.256	3.473.469.108			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	3.072.074.981	3.210.159.833	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	272.720.000	249.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.002.635	5.002.635	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.508.368	2.508.368	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.998.272	5.998.272	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	25.024.200	25.024.200			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.024.200	25.024.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	90 %	90 %	89.216.726	32.000.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	32.000.000	22.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	22.200.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	15.016.726	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	20.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	504.733.604	417.696.484			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.007.123	5.007.123	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	82.920.154	26.076.313	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.513.277	7.513.277	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.636.448	22.356.899	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.034.470	5.034.470	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	15.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.001.206	15.001.206	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	355 Laporan	335.620.926	160.104.463	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.502.526	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	387.894.012	369.500.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.394.012	110.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	259.500.000	259.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	90.031.132	221.389.474			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	64.751.132	93.469.474	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	5.280.000	7.920.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000	120.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
69	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan iban rumah yang layak huni	100 %	100 %	600.235.719	264.860.373			
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Dilakukan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	100 %	100 %	263.108.094	210.108.094			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.013.603	30.024.042	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	5.002.616	1.950.836	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.008.158	9.978.255	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	10.051.135	10.051.135	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.005.730	6.721.690	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								

							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.005.890	7.432.295	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	153.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.020.962	6.628.203	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Diberikan Sosialisasi Penyediaan, Rehabilitasi dan Relokasi	100 %	100 %	54.051.945	49.037.129			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	22.020.085	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator								
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50 Orang	15 Orang	10.019.012	5.004.196	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	70 Orang	70 Orang	22.012.848	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	100 %	100 %	31.036.590	31.036.590			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	10.530.964	10.530.964	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	20.505.626	14.388.676	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	100 %	2.024.004	12.619.101			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	2.024.004	9.550.526	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Difasilitasi	100 %	100 %	250.015.086	97.199.086			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik								
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	50.015.086	52.599.555	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
							Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan								
							Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Permohonan SKGB yang Difasilitasi	100 %	100 %	0,00	0,00			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	6,02 %	6,02 %	1.996.038.703	1.128.400.093			
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	50.023.398	50.023.398			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	50.023.398	31.929.371	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata	100 %	100 %	216.009.360	215.009.360			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	211.004.242	207.220.202	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha								
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	5.005.118	2.204.228	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha								
							Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Kumuh di Kawasan Rumah Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	22 Kawasan	22 Kawasan	1.730.005.945	998.967.242			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	8 Unit Rumah	1.500.000.000	869.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU								
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	20.001.703	4.164.443	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.004.242	13.881.849	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,96 Ha	0,96 Ha	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 Unit	0 Unit	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,90 %	13,90 %	1.268.000.000	961.000.000			
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian	100 %	100 %	1.268.000.000	861.000.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	8 Unit Rumah	35 Unit Rumah	1.018.000.000	961.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	0 Unit	250.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	96,21 %	96,21 %	3.756.516.061	5.338.223.430			
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	3 Perumahan	3 Perumahan	3.756.516.061	5.290.000.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	1 Lokasi	3.460.000.000	5.022.536.748	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	50.004.326	29.396.706	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU								
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	1 Kelompok	20.511.578	20.511.578	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	3 Laporan	75.000.157	65.778.398	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				7.094.645.012	7.086.133.172			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.094.645.012	7.086.133.172			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.094.645.012	7.086.133.172			
73	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.317.530.684	5.002.933.860			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	96.039.170	58.389.170			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	44.828.052	12.428.052	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.276	8.250.276	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.319.896	7.671.896	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.387.190	8.087.190	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.443.190	4.707.190	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	11.840.100	8.290.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	9.970.466	8.954.466	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	3.431.651.520	4.292.577.503			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/bulan	444 Orang/bulan	3.227.320.187	4.090.198.031	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	183.171.906	183.084.022	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	1.612.466	1.612.466	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4.295.163	8.831.163	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.582.686	1.582.686	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.880.232	8.092.232	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	2.788.880	2.788.880	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	30.214.234	12.137.578			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	832.770	896.431	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	768.100	908.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	974.866	1.294.149	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	27.638.498	9.038.498	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	100 Persen	285.556.624	111.016.624			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	163 Paket	163 Paket	280.360.000	104.320.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen	37 Dokumen	1.693.760	1.693.760	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	37 Dokumen	37 Dokumen	2.072.616	3.572.616	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37 Dokumen	37 Dokumen	1.430.248	1.430.248	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	229.970.503	294.073.216			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	0,00	5.287.114	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.392.382	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.597.895	13.929.531	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.096.420	5.096.420	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.351.700	6.351.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.657.900	6.224.245	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	193.556.390	101.741.110	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.317.816	49.317.816	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	13.156.941	11.350.280			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	13.156.941	11.350.280	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	189.581.692	171.581.692			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	37.133.092	37.133.092	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.448.600	50.448.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000	84.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	41.360.000	143.571.100			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	13.650.000	16.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	25.210.000	9.550.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7 Unit	0,00	113.871.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
74	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 100 % %	100 100 % %	2.777.114.328	2.083.199.312			
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	2.474.637.506	2.105.099.932			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	22.828.000	7.707.212	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	37.161.320	18.022.346	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								

							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125 Orang	125 Orang	1.855.741.125	48.957.155	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.074.540	6.368.914	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat								
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.500	2.650.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan								
							Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	10 Orang	10 Orang	112.980.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat								
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	2337 Orang	2337 Orang	63.218.106	19.155.964	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas								
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	40 Orang	22.678.308	11.335.034	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 0	12 0	213.182.206	1.740.357.849	-	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	9.860.000	7.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah								
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	5.435.040	5.294.240	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	92.631.402	92.631.402	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	18.196.959	5.825.572	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	90 Persen	90 Persen	257.296.844	164.724.617			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	9.270.820	5.115.410	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	3.189.806	3.189.806	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	1 unit	2.997.000	2.997.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	3.891.527	2.113.377	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah								
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	4 laporan	5.029.396	5.029.396	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah								
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	10 Dokumen	10 Dokumen	1.188.104	1.188.104	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	11.547.457	4.945.143	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	18.166.999	6.291.945	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	202.015.735	60.117.581	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terbentuknya Sekretariat PPNS Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	100 Persen 1 Kegiatan 4 Orang 90 Persen	100 Persen 1 Kegiatan 4 Orang 90 Persen	45.179.978	40.676.014			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS								
							Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12.096.090	5.451.198	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS								
							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	12 Laporan	28.083.888	15.754.164	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN				6.914.039.602	7.065.476.145			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.914.039.602	7.065.476.145			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.914.039.602	7.065.476.145			
75	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6.485.919.899	6.972.267.555			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	80.068.326	9.706.238			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	38.530.034	2.177.080	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.581.314	2.701.314	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.001.314	2.251.314	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.955.664	2.576.530	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	3.539.973.880	4.811.664.043			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	3.386.613.880	4.658.304.043	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	153.360.000	153.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	8.400.000	8.400.000			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	269.410.525	171.269.532			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	47.227.094	28.097.008	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	30.203.844	23.375.707	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	37.008.587	20.164.817	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Laporan	129 Laporan	149.971.000	43.820.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	627.429.352	162.999.615			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	554.368.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	19.908.252	24.885.315	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	53.153.100	121.387.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.594.104.416	1.575.634.916			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	600 Laporan	588.506	588.506	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63.439.000	63.439.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.530.076.910	1.511.607.410	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit	100 Unit	366.533.400	293.131.711			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	53.124.600	48.106.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	203.341.900	170.933.611	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	85.996.000	29.120.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	14.999.800	35.909.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	9.071.100	9.062.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
76	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran undefined Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran	70,34 100 undefined % % undefined	100 undefined 70,34 % undefined %	428.119.703	93.208.590			
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana yang Terlapor	100 %	100 %	200.932.300	79.657.990			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	4 Dokumen	52.490.900	9.667.190	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	19 Unit	19 Unit	148.441.400	67.915.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	100 %	9.999.190	3.169.500			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.190	1.884.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang Telah Diketahui Penyebabnya dalam 1 (Satu) Tahun	100 %	100 %	15.006.476	2.623.780			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran								
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	25 Dokumen	25 Dokumen	15.006.476	1.943.780	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	22 Kecamatan	22 Kecamatan	24.999.737	8.032.320			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	22 Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	24.999.737	8.032.320	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian, Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi	100 %	100 %	177.182.000	6.050.000			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	PM Laporan	PM Laporan	25.000.000	3.765.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 Laporan	50 Laporan	152.182.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.070.005.814	28.999.009.853			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.070.005.814	28.999.009.853			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.070.005.814	28.999.009.853			
77	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.386.073.389	3.476.386.126			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	25.283.975	24.792.623			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	21.545.440	21.545.440	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	518.669	709.475	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.910	500.910	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	901.638	828.360	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	650.357	650.357	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.166.961	558.081	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	2.343.563.919	2.588.006.154			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.255.599.339	2.494.755.474	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	86.040.000	165.070.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.124.540	552.240	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	800.040	658.440	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi barang milik daerah	100 persen	100 persen	7.768.770	7.768.770			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	768.770	768.770	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	215.000.578	127.817.051			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.598.197	3.861.609	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	56 Dokumen	56 Dokumen	4.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	61 Paket	61 Paket	25.451.850	21.828.821	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.889.850	4.159.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	167.060.681	48.473.636	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	732.668.380	523.278.390			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	48.076.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.668.380	67.961.370	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	582.000.000	437.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	61.787.767	150.227.043			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	52.197.767	143.517.043	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	4.590.000	3.210.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000	3.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
78	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	683.932.425	25.522.623.727			
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah orang yang terlayani dalam pemberian Informasi wilayah rawan bencana	100 persen	100 persen	366.956.809	210.238.226			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 Orang	700 Orang	67.965.703	15.398.170	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	298.991.106	170.706.472	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase ketersediaan dukungan perencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	201.591.776	19.761.326			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	10 Kawasan	10 Kawasan	13.602.864	2.704.620	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 Orang	40 Orang	9.726.060	4.404.660	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	178.262.852	4.813.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase ketersediaan peralatan dan logistik serta aparat tanggap darurat yang responsif	100 persen	100 persen	61.041.601	34.743.946			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 Dokumen	15 Dokumen	28.814.432	21.257.418	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	20 Orang	19.961.595	2.819.435	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	12.265.574	4.040.404	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 persen	100 persen	54.342.239	36.662.320			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 Laporan	10 Laporan	3.426.924	1.373.452	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	58 Orang	58 Orang	12.632.100	5.464.080	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	23.886.932	25.285.643.512	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	14.396.283	3.997.584	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL				5.091.033.097	4.960.488.263			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.091.033.097	4.960.488.263			
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.091.033.097	4.960.488.263			
79	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100 %	4.202.866.196	4.365.635.736			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	26.335.737	20.957.548			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	13.955.292	12.998.746	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160	596.062	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160	598.540	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.095.010	598.540	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.155	557.240	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	7.553.960	5.608.420	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	3.348.566.621	3.495.575.056			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	3.190.958.297	3.353.741.410	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	153.960.000	139.320.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Retribusi Daerah - LRA	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.067.494	1.067.494	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.580.830	1.446.152	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %	100 %	9.610.060	8.971.134			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.610.060	8.971.134	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0 0	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	250.348.105	133.107.816			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	1.256.084	1.471.115	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	14.310.450	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.502.150	5.012.745	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.751.592	1.152.152	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	22.980.721	8.847.404	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	1.250.000	750.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	188.897.108	55.687.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100 %	100 %	256.435.261	297.321.890			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan	14.357.520	12.500.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.077.741	92.821.240	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	372 Laporan	372 Laporan	162.000.000	192.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	311.570.412	463.889.492			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	105.696.412	161.169.492	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	6.740.000	2.720.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.134.000	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS SOSIAL
80	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	100 %	100 %	18.187.632	11.082.965			
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yag Memperoleh Pemberdayan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	1 Komunitas	1 Komunitas	1.045.526	0,00			DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT								
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1 Keluarga	1.045.526	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2 PSKS	2 PSKS	17.142.106	16.641.170			DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	6.150.166	5.656.861	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	20 Sertifikat	10.991.940	5.426.104	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
81	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	56.154.035	28.757.263			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	4 Layanan	4 Layanan	34.544.587	33.776.511			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	6.084.554	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	2.146.423	2.898.935	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	26.313.610	8.051.475	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								

							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0,00	9.038.897	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Layanan	1 Layanan	21.609.448	16.223.956			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	11.975.184	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	9.634.264	8.767.956	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
82	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	477.690.881	295.442.478			
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	477.690.881	346.832.750			DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	60000 Keluarga	42.992.949	70.603.162	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	60000 Keluarga	434.697.932	224.839.316	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
83	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %	316.689.553	240.589.321			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15 Layanan	15 Layanan	44.394.073	19.681.420			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	2160 Orang	44.394.073	17.710.626	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	272.295.480	228.280.320			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	272.295.480	222.878.695	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
84	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	100 %	100 %	19.444.800	18.980.500			
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	19.444.800	20.297.000			DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	19.444.800	18.980.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				10.443.071.773	7.502.878.900			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.418.072.677	7.495.767.172			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				10.418.072.677	7.495.767.172			
85	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.662.054.019	5.450.761.442			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	13.219.947	3.076.289			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	10.381.936	1.567.563	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	486.843	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	486.843	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	549.383	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	549.383	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan Laporan	5 Laporan Laporan	765.559	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	4.950.479.543	5.052.946.075			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan Orang/bulan	53 Orang/Bulan Orang/bulan	4.839.599.543	4.966.926.075	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	110.880.000	92.020.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	6.447.220	6.076.700			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	6.447.220	6.076.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	15.000.000	0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang Orang	3 Orang Orang	15.000.000	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	100 Persen	100 Persen	319.222.646	129.289.307			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket Paket	2 Paket Paket	3.108.014	793.875	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket Paket	2 Paket Paket	54.779.450	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket Paket	3 Paket Paket	4.166.141	1.750.102	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 dokumen Dokumen	5 dokumen Dokumen	8.400.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket Paket	5 Paket Paket	41.467.501	24.094.565	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	10.881.540	2.897.765	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	196.420.000	54.147.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 Persen	100 Persen	308.929.186	250.901.593			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	24.799.186	12.261.283	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	93.440.000	74.000.310	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	5.890.000	2.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	184.800.000	174.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	48.755.477	31.585.494			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit Unit	15 Unit Unit	43.755.477	27.635.494	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Unit	1 Unit Unit	5.000.000	3.950.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
86	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	71,12 81,68 % %	71,12 81,68 % %	1.900.729.307	1.095.131.625			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	75 Persen	75 Persen	1.882.362.957	500.000.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								

							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	50 Orang	1.765.810.896	1.093.299.512	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit Unit	5 Unit Unit	116.552.061	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	80 Persen	80 Persen	18.366.350	1.832.113			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga Lembaga	4 Lembaga Lembaga	18.366.350	1.832.113	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
87	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	7,50 %	7,50 %	77.140.458	21.058.841			
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	57.117.238	24.310.689			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang Orang	100 Orang Orang	34.627.231	18.126.841	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	40 Orang	22.490.007	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	60 Persen	60 Persen	20.023.220	6.258.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang Orang	3 Orang Orang	20.023.220	2.932.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
88	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	100 %	2.778.148.893	928.815.264			
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	30 Persen	30 Persen	38.495.584	9.583.928			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan Perusahaan	2 Perusahaan Perusahaan	10.999.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	27.496.584	8.680.928	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	100 Persen	100 Persen	2.739.653.309	930.343.159			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara Perkara	2 Perkara Perkara	17.353.557	6.241.701	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	12484 Orang Orang	12484 Orang Orang	2.722.299.752	913.892.635	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				24.999.096	7.111.728			
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				24.999.096	7.111.728			
89	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	12 1 Ha Kawasan	12 1 Ha Kawasan	24.999.096	7.111.728			
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	12 Ha 1 Kawasan	12 Ha 1 Kawasan	24.999.096	13.882.728			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	0 0	0 0	24.999.096	7.111.728	Kab. Luwu, Bua, Bukit Harapan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.322.988.913	3.288.262.406			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.322.988.913	3.288.262.406			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.322.988.913	3.288.262.406			
90	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.892.779.144	3.193.415.968			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	32.124.283	21.125.093			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	30.035.093	10.805.093	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	2.089.190	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.208.553.865	2.733.592.931			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.100.673.865	2.668.432.931	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	107.880.000	65.160.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	7.133.980	7.068.431			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.133.980	7.068.431	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	42 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	274.724.411	295.803.061			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	57.799.350	16.726.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	11.662.061	11.662.061	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	189.263.000	117.830.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	304.633.220	231.149.878			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	108.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	58.633.220	48.749.878	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	138.000.000	182.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	65.609.385	49.581.074			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	60.369.385	49.581.074	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.240.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
91	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,37 100 % Persen	100 0,37 Persen %	130.002.807	22.407.422			
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase anggaran responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	100 %	100 %	50.002.696	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								
							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	80 Orang	80 Orang	50.002.696	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase anggaran responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	100 %	100 %	80.000.111	39.986.062			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	5 Organisasi	80.000.111	22.407.422	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
92	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	24,09 angka	24,09 angka	119.930.520	69.289.016			
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.34 %	10.34 %	100.135.160	94.740.960			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.135.160	52.325.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.34 %	10.34 %	19.795.360	30.035.056			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	15 Orang	19.795.360	16.963.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	15 Layanan	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.34 %	10.34 %	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
93	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	80,01 %	80,01 %	50.072.566	0,00			
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	80.01 %	80.01 %	50.072.566	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	50.072.566	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	100 %	100 %	30.203.676	0,00			
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	100 %	100 %	30.203.676	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.203.676	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
95	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	0,00	3.150.000			
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	100 %	100 %	0,00	5.300.000			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
96	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	100.000.200	0,00			
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.200	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	546 Orang	546 Orang	100.000.200	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota								
							Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota								
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS KETAHANAN PANGAN				3.983.445.433	3.913.160.021			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.983.445.433	3.913.160.021			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.983.445.433	3.913.160.021			
97	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.470.438.695	3.536.953.797			
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	27.246.743	18.031.513			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	4.732.114	4.999.049	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.991.450	3.019.063	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.459.370	3.022.963	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.677.657	1.359.020	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.413.064	1.194.373	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.023.604	2.946.056	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.949.484	1.490.989	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.838.875.858	3.080.155.280			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.677.812.188	2.966.626.299	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	145.270.000	96.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.671.914	4.693.640	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	12.121.756	12.235.341	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	3.348.309	4.183.281			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.348.309	4.183.281	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.479.246	5.450.244			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 Paket	51 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	5.479.246	5.450.244	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	5.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	237.091.773	314.927.505			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.591.526	1.893.622	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.579.013	2.400.637	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.188.520	7.281.356	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000	9.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.188.304	15.305.992	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	65 Laporan	192.544.410	148.443.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	31.036.950	0,00			DINAS KETAHANAN PANGAN

	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	31.036.950	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	274.964.200	199.083.502			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.964.200	20.283.502	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	246.000.000	178.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	47.395.616	41.724.860			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	20 Unit	32.659.216	37.664.860	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12 Unit	11.080.000	4.060.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.656.400	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
98	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan Tingkat Komsumsi Energi ; Tingkat Konsumsi Protein Tingkat Komsumsi Protein	62 109,52 ; 108,77 6,02 Gr/ Kapita/ Hari Persen Persen	6,02 109,52 ; 108,77 62 Persen Persen Gr/ Kapita/ Hari	423.200.234	333.235.407			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	158.008.165	137.185.754			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia								
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit	11.639.954	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	100 Keluarga	49.749.720	13.838.188	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota								
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	14.628.177	23.608.865	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	28.359.260	23.089.646	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota								
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan								
							Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.249.757	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota								
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis								
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	1.342.883	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan								
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.159.162	30.135.020	Kab. Luwu, Bajo, Bajo Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk Kab. Luwu, Bua, Tana Rigella Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.879.252	3.981.512	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-	215.394.992	209.449.512			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13,45 Ton	9,19 Ton	199.944.992	199.944.992	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota								
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	10 Ton	15.450.000	8.827.260	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	49.797.077	32.407.362			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.764.731	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	2 Laporan	27.061.766	29.809.924	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	5.970.580	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
99	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	80,27 Persen	80,27 Persen	68.017.974	36.421.914			
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	9.095.609	16.492.625			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.095.609	12.414.625	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	58.922.365	27.819.959			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	12.132.280	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	8.359.583	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi								
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	31.509.840	24.007.289	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	6.920.662	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
100	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	21.788.530	6.548.903			
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	21.788.530	0,00			DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2.544.530	6.548.903	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	19.244.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN
						DINAS PERTANAHAN				2.717.675.534	2.295.399.374			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.717.675.534	2.295.399.374			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.717.675.534	2.295.399.374			
101	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.188.736.750	2.097.364.462			
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun	-	100 %	19.197.835	2.658.415			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.342.322	953.626	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.955.126	827.863	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.007.626	876.926	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.007.626	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.893.713	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.991.422	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	1.511.815.528	1.668.759.358			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20/12 Orang/bulan	20/12 Orang/bulan	1.358.675.700	1.568.791.495	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	139.800.000	98.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.312.402	1.327.863	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.027.426	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	4.086.286	444.363			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.086.286	444.363	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	34.900.126	0,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	32.600.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	2.300.126	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	243.019.061	104.809.358			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.988.162	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.076.666	554.312	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.047.569	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	7.234.876	545.407	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	3.964.800	639.324	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	15.027.727	1.689.052	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	15.000.000	250.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	184.515.375	55.309.100	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.163.886	279.163	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	8.972.000	0,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8.972.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	314.268.000	227.868.000			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.268.000	8.268.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	294.000.000	213.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.477.914	137.867.968			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	43.969.614	137.137.968	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1 Unit	5.720.000	730.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.788.300	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANAHAN
102	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	88.949.904	18.168.026			
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	100 %	100 %	88.949.904	30.232.026			DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	2 Berita Acara	41.884.132	9.572.050	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	47.065.772	8.595.976	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
103	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	280.000.000	100.000.000			
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	280.000.000	100.000.000			DINAS PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
104	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-	15.014.370	5.451.862			

	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Persentase Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	15.014.370	7.151.862			DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah								
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	15.014.370	5.451.862	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah								
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
105	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	144.974.510	74.415.024			
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat	-	100 %	144.974.510	100.000.024			DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	25 Dokumen	144.974.510	74.415.024	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERTANAHAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP				8.081.783.057	12.993.637.471			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.081.783.057	12.993.637.471			
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.081.783.057	12.993.637.471			
106	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	2.941.397.818	3.144.644.865			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			19.647.713	19.647.713			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.726.000	12.726.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.168.396	1.168.396	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.648	749.648	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.099.085	2.099.085	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	754.085	754.085	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.045.318	1.045.318	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.105.181	1.105.181	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2.600.101.538	2.658.850.613			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.511.793.057	2.550.742.132	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	85.680.000	105.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.379.185	1.379.185	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.249.296	1.249.296	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			8.724.477	8.724.136			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.724.477	8.723.534	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			108.466.690	247.075.842			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	714.788	714.788	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	977.077	977.077	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.988.000	4.148.880	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.911.508	11.911.508	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	92.875.317	124.813.460	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	147.150.000	162.749.892			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	16.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000	49.199.892	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.950.000	1.950.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.200.000	87.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	57.307.400	159.307.400			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	57.307.400	159.307.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
107	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	325.677.770	152.817.774			
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	9.474.000	9.474.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota								
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	9.474.000	4.733.152	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	-	316.203.770	166.203.770			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.054.000	3.674.598	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	140.047.272	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.149.770	4.362.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
108	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	84.845.159	76.114.569			
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	84.845.159	88.082.549			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								

							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	60.235.510	60.191.775	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.830.477	4.880.562	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	2 0	14.779.172	11.042.232	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
109	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	8.114.000	4.213.368			
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	8.114.000	8.114.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0 Ha	8.114.000	4.213.368	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Air Tanah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
110	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	-	7.130.889	3.588.273			
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	-	7.130.889	7.130.889			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	7.130.889	3.588.273	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
111	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	17.668.272	11.107.890			
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.668.272	17.668.272			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	1 0	7.952.774	6.527.106	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	9.715.498	4.580.784	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	7.902.598	4.563.261			
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	7.902.598	7.902.598			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	7.902.598	4.563.261	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
113	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	-	4.689.046.551	9.596.587.472			
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-	-	4.689.046.551	9.516.869.177			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	2 Unit	3.000.000.000	7.333.170.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.487.307	91.205.602	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6077,54 Ton	6077,54 Ton	1.677.559.244	2.172.211.870	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.326.515	6.154.254.106			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.088.326.515	6.154.254.106			
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.326.515	6.154.254.106			
114	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	4.422.720.984	5.667.481.844			
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.611.750	19.961.750			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.009.200	14.009.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.618.650	1.318.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.594.150	994.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.398.150	1.098.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.385.650	935.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.605.950	1.605.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	3.382.441.396	3.530.957.687			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.224.405.896	3.399.232.187	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	152.796.250	127.236.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.276.750	1.676.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.962.500	2.812.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.889.000	9.589.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.064.200	764.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.824.800	8.824.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	24.796.500	37.253.820			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	24.796.500	37.253.820	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	559.398.888	872.153.137			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7.222.058	10.757.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	225.369.450	704.367.576	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	19.898.700	13.724.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.062.100	4.119.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000	13.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17.398.200	11.155.180	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	261.448.380	57.237.336	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	8 unit	10.524.000	805.761.324			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.524.000	805.761.324	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	317.876.026	313.813.480			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	927.480	927.480	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	228.148.546	248.086.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	88.800.000	64.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	29 unit	96.183.424	135.282.221			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	71.159.424	128.172.221	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	6.900.000	3.450.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12.024.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	6.100.000	3.660.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
115	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan akta kelahiran	100 %	100 %	280.764.996	204.507.906			
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	234.392.096	199.569.836			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	4 Dokumen	84.584.100	84.584.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	40.759.980	17.343.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
							Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	23.968.016	12.779.756	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk								
							Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	4 Dokumen	4 Dokumen	85.080.000	76.013.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan pendafataran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	46.372.900	27.536.900			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	46.372.900	13.788.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
116	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	0,51 Angka	0,51 Angka	106.707.625	72.065.060			
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	60.836.505	58.537.060			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	42.724.520	42.724.520	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	18.111.985	15.812.540	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	45.871.120	27.035.120			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	45.871.120	13.528.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
117	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100 %	100 %	270.457.010	202.524.222			
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.722.780	51.722.780			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.722.780	51.722.780	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	218.734.230	168.994.810			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	86.029.420	18.179.232	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan								
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	2 Dokumen	132.704.810	132.622.210	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	100 %	100 %	7.675.900	7.675.074			
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	7.675.900	7.675.074			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5.643.000	4.699.133	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.032.900	2.975.941	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.966.631.676	8.811.740.363			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.966.631.676	8.811.740.363			
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.966.631.676	8.811.740.363			
119	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.594.084.647	4.186.178.721			
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	38.328.062	24.891.917			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.913	15.823.517	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.906	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.903	3.068.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.128	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.331.212	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.688.178.305	3.679.480.229			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.522.655.485	3.538.544.909	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	84 Dokumen	156.372.734	129.512.734	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.878.478	2.700.978	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4.271.608	4.271.608	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	35.541.440	12.612.096			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35.541.440	12.612.096	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	28.088.620	3.121.320			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	23.100.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	4.988.620	9.604.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	320.568.490	149.211.535			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5.388.770	1.647.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	4.991.366	1.871.428	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	9.989.823	25.336.632	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5.015.990	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	26.400.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	9.999.265	4.999.884	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	5.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	50 Laporan	253.783.276	56.153.321	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	38.323.900	26.716.100			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit Unit	5 Unit	38.323.900	23.208.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	401.281.830	310.393.830			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.393.830	9.793.830	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.888.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	11.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	372.000.000	279.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	43.774.000	47.580.202			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	28.994.000	44.948.904	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8 Unit	14.780.000	5.480.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
120	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-	40.000.000	0,00			
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	40.000.000	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa								
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	207 Desa	207 Desa	40.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

121	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah BUMDesa Bersama presentase Pemetasan Desa Tertinggal Skor Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Presentasi Pengentasan Desa Tertinggal	-	9 100 50 90 Jumlah persen Nilai persen	17.000.000	0,00			
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	-	17.000.000	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen	25 Dokumen	10.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	45 Dokumen	45 Dokumen	7.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
122	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa maju Persentase peningkatan status desa mandiri	6,21 6,23 % %	6,21 6,23 % %	5.245.547.029	3.842.379.508			
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		100 persen	5.245.547.029	3.944.678.756			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	40 Dokumen	19.999.236	24.996.948	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	3.729.535.352	3.343.957.845	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang	235.387.441	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000	14.555.776	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Laporan	10 Laporan	1.085.250.000	357.046.508	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa								
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	30 Desa	30 Desa	50.375.000	19.200.842	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	5 Dokumen	0,00	82.621.589	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Desa Dengan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	99.00 persen	99.00 persen	1.070.000.000	783.182.134			
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	103 lembaga	103 lembaga	1.070.000.000	1.030.000.000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat								
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	18.162.929	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	103 Lembaga	103 Lembaga	40.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	28 Laporan	28 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	765.019.205	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.673.788.715	10.784.183.801			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.673.788.715	10.784.183.801			
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.673.788.715	10.784.183.801			
124	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	17 Kegiatan	17 Kegiatan	2.990.142.944	2.774.439.480			
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.998.523	6.195.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.999.746	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.746	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.746	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.746	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.746	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.999.793	1.032.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.024.626.435	2.189.744.858			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	2.024.626.435	2.189.744.858	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	60.000.000	0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	60.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	433.562.979	292.569.559			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.862.068	933.808	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	57.241.800	32.128.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.114.600	5.192.434	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.341.235	5.321.859	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	12.700.000	10.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39 Paket	39 Paket	28.072.200	23.446.643	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	37.350.000	38.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	262.881.076	86.120.760	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	299.631.777	260.634.336			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	10.391.777	10.382.336	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.360.000	18.842.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan	240 Laporan	264.880.000	213.980.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	159.323.230	115.420.882			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	159.323.230	132.450.882	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
125	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fretility Rate (TFR)	2,90 %	2,90 %	654.809.639	483.561.141			
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Total Fretility Rate (TFR)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	654.809.639	489.528.014			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	259.885.368	259.994.268	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	149.943.603	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	3 Laporan	244.980.668	223.566.873	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
126	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	51,20 32,09 % %	32,09 51,20 % %	8.901.926.132	5.476.778.466			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.977.422.470	1.906.985.280			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana								
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	1 Kegiatan Unit	379.200.000	440.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	5 Kegiatan Laporan	1.448.197.270	1.342.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	150.025.200	124.980.960	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	90 %	90 %	681.000.000	1.816.000.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	227 Orang	227 Orang	681.000.000	1.816.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	100 %	100 %	1.436.188.222	1.456.189.026			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	1 Kegiatan Laporan	36.863.222	42.300.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	960 Orang	960 Orang	721.875.000	711.722.506	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	38 Unit	1 Unit	650.000.000	660.725.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	27.450.000	34.650.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	100 %	100 %	4.807.315.440	304.400.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	3 Laporan	442.400.000	304.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas								
							Jumlah DASHAT di Kampung KB	227 Unit	227 Unit	4.364.915.440	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
127	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	84 %	84 %	2.126.910.000	2.049.404.714			
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.126.910.000	2.083.432.394			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	10 Unit	300.000.000	130.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan	50.310.000	39.004.714	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	282 Kelompok	282 Kelompok	1.776.600.000	1.880.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERHUBUNGAN				11.816.907.952	10.947.050.061			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.816.907.952	10.947.050.061			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11.816.907.952	10.947.050.061			
128	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	-	undefined undefined	4.813.814.145	4.828.584.548			
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja PD secara tepat waktu	-	100 %	43.805.096	45.803.096			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	11.416.960	11.992.960	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.426.040	8.426.040	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.473.580	5.895.580	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.127.260	7.127.260	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.141.496	5.141.496	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.219.760	7.219.760	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	3.670.452.063	5.366.298.646			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.654.887.863	3.848.862.446	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.061.320	9.933.320	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	7.502.880	7.502.880	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 %	100 %	28.816.560	30.676.560			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	6.616.560	8.476.560	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	22.200.000	11.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	373.005.255	367.801.927			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.965.150	10.965.150	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.017.538	8.017.538	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	13.028.970	7.819.270	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	7.950.000	7.950.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	43.540.597	43.546.969	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000	8.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	281.003.000	140.474.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70 %	80 %	24.573.087	29.505.626			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	24.573.087	12.779.126	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	512.940.000	496.501.331			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	46.297.400	28.498.731	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	109.372.600	109.592.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	357.270.000	358.410.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	160.222.084	160.452.862			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	142.885.684	135.508.462	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	7.310.000	9.990.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.026.400	14.954.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
129	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio di Jalan kabupaten Rasio konektivitas angkutan jalan	0,8 0,37 undefined Angka	0,9 0,57 % Angka	6.950.362.457	6.068.796.475			
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	40 %	85 %	4.130.811.930	4.094.148.587			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan								
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	325 Unit	325 Unit	4.120.411.930	1.048.322.468	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	15 Unit	10.400.000	3.016.826.586	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C Cakupan penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 %	0 % 100 %	912.031.049	988.018.761			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang								
							Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit	912.031.049	988.018.761	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	100 %	133.913.789	133.034.354			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor								

							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1400 Unit	1400 Unit	84.023.474	72.623.474	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	1000 Dokumen	25.005.000	23.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	5 Unit	24.885.315	34.875.880	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	80 %	80 %	1.759.149.739	888.822.356			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.088.649.739	741.298.356	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 Dokumen	7 Dokumen	670.500.000	129.560.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Daerah PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	80 %	80 %	14.455.950	19.751.950			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin								
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	12 Laporan	14.455.950	13.770.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
130	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan lintas	91,02 %	52.731.350	49.669.038			
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan penyelenggaraan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 %	100 %	52.731.350	52.729.038			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal								
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	12 Laporan	52.731.350	49.669.038	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				6.825.201.017	6.615.836.364			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.825.201.017	6.615.836.364			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.601.815.057	6.509.213.670			
131	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	4.174.867.197	4.432.337.910			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	undefined undefined	undefined undefined	46.255.388	46.255.388			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.696.564	25.696.564	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.026.260	13.030.260	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.532.564	2.532.564	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.603.512.524	3.881.678.785			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.400.641.984	3.678.808.245	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	188.460.000	188.460.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.731.500	3.731.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	10.679.040	10.679.040	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 	100 % 	331.259.407	366.366.870			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	94.609.420	186.388.142	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.958.039	3.958.039	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.251.322	2.251.322	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.683.116	11.683.116	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	214.757.510	107.279.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 	100 % 	128.963.078	128.963.078			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.563.078	24.563.078	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104.400.000	104.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Ketentuan/ Kebutuhan	100 % 	100 % 	64.876.800	64.876.800			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	41.356.800	41.356.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	23.520.000	23.520.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
132	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	92,67 86.20 % %	92,67 86.20 % %	1.671.120.410	1.291.753.050			
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	86.20 % 92.67 %	86.20 % 92.67 %	1.671.120.410	1.388.492.850			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media								
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	1.212.866.380	943.018.820	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	33.410.052	11.031.972	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik								
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	42.556.932	25.906.932	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten								
							Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	100 Konten	365.000.344	303.152.344	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik								
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	3 Orang	17.286.702	8.642.982	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
133	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80,23 %	80,23 %	755.827.450	785.122.710			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82,09 %	82,09 %	755.827.450	903.480.860			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda								
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	270.000.364	250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah								
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	103.810.000	98.280.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas								
							Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	6 Program	22.767.086	2.872.796	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE								
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	359.250.000	433.969.514	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				179.986.560	71.359.594			
134	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	179.986.560	71.359.594			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	179.986.560	100.680.594			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	35 Orang	35 Orang	69.208.683	19.946.683	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional								
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	20.001.000	930.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral								
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase	53.261.725	26.621.220	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia								
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	33.396.000	21.200.203	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	10 Dokumen	10 Dokumen	4.119.152	2.661.488	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				43.399.400	35.263.100			
135	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	100 %	43.399.400	35.263.100			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten	100 %	100 %	10.218.100	10.218.100			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000	1.952.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	6.358.100	3.223.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	35 PD	35 PD	33.181.300	33.181.300			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	33.181.300	30.087.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN				4.869.938.697	3.709.240.669			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.194.530.334	3.098.827.406			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.194.530.334	3.098.827.406			
136	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 PERSEN	100 PERSEN	3.898.429.814	3.327.901.629			
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 PERSEN	100 PERSEN	31.579.217	21.196.868			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.351.191	13.571.191	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.972.520	981.243	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	2.105.593	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.565.182	842.874	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.490.476	1.339.418	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	19.449.848	2.356.549	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 PERSEN	100 PERSEN	2.519.564.721	2.545.553.676			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.378.777.961	2.425.364.276	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	122.340.000	114.810.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.988.000	4.036.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	9.458.760	1.273.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	3.490.052	730.892			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.490.052	730.892	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	40.260.000	0,00			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 0	0 Paket	40.260.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	605.590.441	180.777.736			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.499.135	383.069	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	108.492.752	0,00	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	28.800.000	5.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	20 Paket	10.026.126	6.866.923	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.990.000	1.100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	446.791.100	70.694.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.991.328	2.485.536	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	115.031.524	33.233.897			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	115.031.524	28.956.731	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	348.000.000	320.198.427			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	42.998.427	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	348.000.000	277.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	234.913.859	332.265.971			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	85.003.859	25.043.051	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
137	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	27,09 %	27,09 %	34.998.787	10.235.868			
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	100 PERSEN	100 PERSEN	34.998.787	20.029.868			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	460 Unit Usaha	461 Unit Usaha	34.998.787	10.235.868	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
138	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala	-	21,00 %	24.872.255	0,00			
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	-	100 PERSEN	24.872.255	0,00			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	180 Unit Usaha	180 Unit Usaha	24.872.255	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
139	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	25,62 %	25,62 %	91.494.094	24.992.940			
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	40 PERSEN	40 PERSEN	91.494.094	0,00			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50 Orang	91.494.094	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	227 Orang	0,00	24.992.940	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
140	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	0,00	24.999.154			
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	227 Unit Usaha	0,00	24.999.154	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
141	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dibina	35,21 %	35,21 %	294.645.384	10.059.515			

	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	100 PERSEN	100 PERSEN	294.645.384	20.030.045			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	149.694.120	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	26000 Unit Usaha	150 Unit Usaha	44.955.064	10.059.515	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	50 Orang	99.996.200	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	100 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				675.408.363	610.413.263			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				675.408.363	610.413.263			
142	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.898.429.814	3.327.901.629			
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	234.913.859	332.265.971			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15 Unit	149.910.000	299.361.700	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
143	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	"Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP"	-	100 %	500.508.900	301.060.202			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	-	1 DOKUMEN	500.508.900	305.334.574			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	5 Dokumen	500.508.900	301.060.202	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
144	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	24.989.463	9.991.361			
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	24.989.463	19.009.921			DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	125 Dokumen	24.989.463	9.991.361	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.018.557.945	5.007.037.742			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.018.557.945	5.007.037.742			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.018.557.945	5.007.037.742			
145	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.370.646.867	4.851.238.068			
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	21.536.900	25.860.431			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.457.050	3.436.329	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.599.240	3.436.329	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.813.500	3.436.329	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.037.700	3.432.360	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.442.980	3.924.478	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.419.540	4.151.978	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.766.890	4.042.628	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	2.566.979.302	2.866.540.009			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang/bulan	396 Orang/bulan	2.466.967.352	2.729.849.558	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen 0	1 Dokumen 0	83.400.000	116.760.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 0	1 Laporan 0	2.987.390	5.514.165	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen 0	1 Dokumen 0	2.937.900	3.840.780	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan 0	4 Laporan 0	10.686.660	10.575.506	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	11.657.320	12.743.415			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0	1 Laporan 0	11.657.320	12.743.415	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	85.500.000	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Kegiatan 0	1 Kegiatan 0	33.000.000	0,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	52.500.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	291.181.478	269.731.962			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket 0	20 Paket 0	7.659.898	7.682.707	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket 0	1 Paket 0	32.217.565	37.962.739	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 0	1 Paket 0	7.839.735	8.046.366	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 0	1 Paket 0	14.214.280	6.304.150	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen 0	2 Dokumen 0	15.500.000	9.500.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Paket 0	20 Paket 0	10.000.000	5.000.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	203.750.000	112.369.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	261.681.233	275.371.877			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan Unit	1 Laporan Unit	261.681.233	314.313.852	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	968.505.448	1.100.035.056			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 0	1 Laporan 0	11.493.854	9.347.189	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 0	1 Laporan 0	609.011.594	614.799.129	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 0	1 Laporan 0	348.000.000	438.900.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	163.605.186	393.564.681			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	114.806.006	93.298.701	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan Unit	1 Laporan Unit	48.799.180	288.570.380	-	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
146	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	84.889.134	37.585.115			
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi PERDA Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Kepada Pelaku Usaha	-	10 Pelaku Usaha	0,00	50.632.655			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	2 Dokumen	0,00	37.585.115	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	84.889.134	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	84.889.134	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
147	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	88.875.152	44.624.305			
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	-	1 Dokumen	88.875.152	61.550.305			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	88.875.152	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	0,00	44.624.305	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
148	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	83.431.920	41.627.476			
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	-	500 Izin / Non Izin	83.431.920	58.553.476			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	83.431.920	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	200 Pelaku Usaha	0,00	41.627.476	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
149	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	390.714.872	31.962.778			
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	-	20 Pelaku Usaha	390.714.872	51.500.778			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	57.771.975	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	215.356.383	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	117.586.514	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	500 Kegiatan Usaha	0,00	31.962.778	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				7.227.305.480	6.907.320.247			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.227.305.480	6.907.320.247			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.227.305.480	6.907.320.247			

150	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.009.944.746	3.780.322.889			
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	85.631.600	41.562.092			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.060.100	11.286.692	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.897.500	4.661.368	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.897.500	4.408.498	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.897.500	4.517.148	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.897.500	4.571.216	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.897.500	2.860.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	16.084.000	9.257.170	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	3.104.077.704	3.255.680.005			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.929.305.480	3.100.525.663	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	158.368.444	145.992.706	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.361.780	4.775.636	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.042.000	4.386.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan	100 %	100 %	40.020.000	34.755.274			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40.020.000	34.755.274	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.130.000	0,00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	25.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	130.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	367.838.834	67.367.255			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	3.030.679	1.599.343	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.973.599	2.163.864	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	9.884.700	7.464.912	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	9.897.840	2.330.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 Dokumen	84 Dokumen	19.800.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	6 Paket	19.895.336	4.166.246	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	37.758.580	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	264.598.100	68.397.590	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	90 %	90 %	3.631.900	51.990.063			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	41.300	24.980.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	41.300	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	3.508.000	8.485.063	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	41.300	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	270.003.308	247.600.000			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.003.308	40.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	222.000.000	187.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	113.611.400	91.677.500			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	72.660.100	65.347.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.910.000	7.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	20.000.000	19.950.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	41.300	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
151	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100 90 % %	90 100 % %	389.617.117	38.578.743			
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	100 %	100 %	298.817.117	50.000.143			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	100 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	30 Orang	117.217.117	38.578.743	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	1 Unit	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	90.800.000	0,00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
152	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional) Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	90 85,76 % %	85,76 90 % %	2.547.098.214	2.950.491.492			
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenngan daerah kabupaten	90 %	90 %	335.085.000	799.983.200			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 0	1 0	45.400.000	0,00	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	10 Unit	244.285.000	1.413.675.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	90 %	473.644.969	618.207.604			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	3 Kegiatan	392.407.419	523.521.906	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota								
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 0	1 0	45.400.000	0,00	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	55 Orang	55 Orang	35.837.550	108.351.569	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	90 %	90 %	253.077.825	0,00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah								
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	30 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	100 Orang	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota								
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	71.477.825	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	90 %	90 %	1.100.000.000	650.000.000			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000	650.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	90 %	90 %	385.290.420	311.677.388			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan								
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1 Laporan	69.911.400	80.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	54.764.754	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	2 Lembaga	169.814.266	174.942.817	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
153	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	90,21 %	90,21 %	280.645.403	137.927.123			
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	100 %	280.645.403	150.023.723			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	46.227.453	37.927.123	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	36.144.259	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	45.400.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan								
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	52.873.691	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.465.374.470	5.784.459.209			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.465.374.470	5.784.459.209			
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.401.071.814	5.749.028.937			
154	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.039.049.760	4.949.028.937			
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	-	100 %	81.601.562	35.086.872			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.903.422	18.358.799	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.012	4.090.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.012	2.015.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.012	4.090.012	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.012	2.015.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	49.638.092	4.518.025	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adminstrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	3.696.761.087	3.977.225.934			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.564.926.823	3.856.362.210	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	123.840.000	111.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.572.132	4.011.862	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	6.422.132	5.011.862	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	9.250.780	10.028.865			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.250.780	10.028.865	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	34 orang	34 orang	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	327.986.487	250.232.320			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	3.555.621	4.418.749	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.326.140	5.004.035	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.449.040	11.063.498	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	20 Dokumen	33.000.000	21.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	22.245.686	20.083.638	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1 Laporan	25.000.000	14.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	230.410.000	91.215.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	80.123.586	68.271.276			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20 Unit	80.123.586	51.544.776	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								

							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	536.977.438	448.345.030			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.498.738	2.160.030	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	230.478.700	192.985.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	304.000.000	253.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	306.348.820	259.411.640			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit	55.870.120	143.454.040	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10 Unit	17.140.000	11.620.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	233.338.700	104.337.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah								
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
155	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pertumbuhan kegemaran membaca masyarakat	0,84 Angka	0,84 Angka	300.938.336	800.000.000			
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kegemaran membaca	100 %	100 %	196.800.304	412.032.681			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	20 Perpustakaan	17.238.224	39.565.704	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	100 Layanan	25 Layanan	65.728.512	56.379.998	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat								
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-	0 Eksemplar	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi								
							Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	-	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0 Dokumen	25 Dokumen	0,00	41.782.374	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	300 Eksemplar	64.103.914	70.426.121	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Eksemplar	50 Eksemplar	28.779.654	203.878.484	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik								
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	20.950.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kegemaran membaca	100 %	100 %	104.138.032	387.967.319			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	100 Orang	100 Orang	38.227.393	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	23.375.520	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	250 Orang	250 Orang	37.672.482	171.920.172	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat								
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 Lokus	2 Lokus	28.238.157	192.671.627	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
156	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	85 %	85 %	61.083.718	0,00			
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	61.083.718	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno								
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	200 Orang	200 Orang	61.083.718	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan								
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara								
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara								
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				64.302.656	35.430.272			
157	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	"Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku"	53 %	53 %	64.302.656	35.430.272			
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	100 %	31.579.979	43.745.272			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis								
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25 Berkas	25 Berkas	10.743.452	22.001.488	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis								
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15 Berkas	15 Berkas	20.836.527	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	0,00	13.428.784	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis								

							Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	-	0 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-	0 Lembaga	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0006	Penyusunan Database Arsiparis								
							Jumlah arsiparis	-	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan								
							Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	0 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip								
							Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	-	0 Lembaga	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	-	0 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-	0 Instansi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	100 %	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI								
							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis								
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	100 %	32.722.677	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna	0 Pengguna	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	32.722.677	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
158	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	0,00	0,00			
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun								
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	0 Berkas	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar	0 Daftar	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan								

							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-	-	0,00	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang								
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN				18.039.800.091	6.269.269.684			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.039.800.091	6.269.269.684			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				18.039.800.091	6.269.269.684			
159	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	4.872.340.256	4.750.239.934			
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	91.808.177	91.266.492			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	43.695.355	31.355.125	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.487.560	6.747.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.361.050	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.703.592	10.252.105	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.599.020	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.316.600	5.546.702	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.645.000	4.710.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4.062.225.536	4.526.079.519			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.770.052.284	3.859.776.541	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	286.560.000	158.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.613.252	7.902.978	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	8.400.000	8.400.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	29.700.000	29.700.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket	29.700.000	29.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	313.549.019	265.077.785			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	3.345.721	3.345.721	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.018.000	6.018.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.834.500	6.834.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000	10.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	71.496.598	71.325.364	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.054.200	15.054.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000	92.545.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	4 Unit	4 Unit	46.416.200	56.904.726			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	46.416.200	30.188.626	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180.364.000	162.364.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.364.000	30.364.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	132.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	139.877.324	228.973.512			DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	40.047.324	138.193.512	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	9.830.000	9.830.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	90.000.000	80.950.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
160	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap	102,09 %	102,09 %	3.607.009.012	916.304.000			
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	3.583.009.012	853.800.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	30.159.012	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap								
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	32 Unit	32 Unit	3.552.850.000	853.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	DINAS PERIKANAN

	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	0,00	96.260.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	0,00	38.504.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan kualitas Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	24.000.000	24.000.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	24.000.000	24.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
161	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	8.327.654.823	587.294.150			
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	0,00	86.650.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok	0,00	51.990.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	8.327.654.823	535.304.150			DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.014.023	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	2.846.890.800	397.841.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit	60 Unit	5.440.750.000	137.462.950	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	DINAS PERIKANAN
162	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	51,20 %	51,20 %	1.232.796.000	15.431.600			
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko"	1 Dokumen	1 Dokumen	20.060.000	0,00			DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri								
							Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	20.060.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Kota yang direhabilitasi Sarana dan prasarananya	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1.212.736.000	30.886.000			DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Ton	2 Ton	30.886.000	15.431.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1.181.850.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				6.954.414.240	5.184.583.431			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				559.995.394	1.530.242.981			
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				559.995.394	1.530.242.981			
163	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	90,99 %	90,99 %	517.233.910	860.177.990			
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota	95,20 Persen	95,20 Persen	467.613.910	666.279.255			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	156.284.000	468.782.634	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	311.329.910	69.219.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	95,20 Persen	95,20 Persen	35.020.000	988.964.786			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	35.020.000	208.934.696	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	50 Sertifikat	50 Sertifikat	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	95,20 Persen	95,20 Persen	14.600.000	246.988.968			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat								
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	14.600.000	113.241.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat								
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
164	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	95 %	95 %	2.084.234	228.001.532			
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen	95 Persen	2.084.234	248.223.532			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	50 Orang	0,00	228.001.532	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	2.084.234	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
165	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	90 %	90 %	14.620.000	0,00			
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen	90 Persen	14.620.000	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	55 Orang	55 Orang	14.620.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
166	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	90 %	90 %	26.057.250	442.063.459			
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	90 Persen	90 Persen	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	98 Persen	98 Persen	26.057.250	449.543.459			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	2 Objek	0,00	192.063.459	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	2 Objek	26.057.250	250.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penertiban Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen	90 Persen	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
167	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Permuseuman yang di kelola	90 Persen	90 Persen	0,00	0,00			
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Museum Kabupateb/Kota	90 Persen	90 Persen	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu								
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum								
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.394.418.846	3.654.340.450			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.394.418.846	3.654.340.450			
168	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	98 Persen	98 Persen	4.752.897.982	3.476.393.450			
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	39.378.276	7.296.810			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.723.616	1.149.010	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.680	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.680	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.680	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.680	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.867.940	1.229.560	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	98,5 Persen	98,5 Persen	2.862.644.124	3.067.569.587			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	2683 Orang/bulan	2.663.337.504	2.894.030.661	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	151.800.000	144.840.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28.871.180	1.340.480	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.003.300	1.607.986	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.632.140	31.057.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	36.300.000	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket	36.300.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,61 Persen	97,61 Persen	630.617.940	157.058.142			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.515.859	1.986.395	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	136.603.467	14.310.450	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.768.563	6.546.952	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.903.800	2.808.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	2.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.844.136	9.070.706	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403 Laporan	403 Laporan	404.982.115	55.947.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkata daerah dalam kondisi baik	76,8 Persen	76,8 Persen	568.171.450	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	162.960.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	300.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	105.211.450	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	95 Persen	95 Persen	380.000.000	286.268.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000	30.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	58.268.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	252.000.000	180.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	67 Persen	67 Persen	235.786.192	25.782.121			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	109.880.992	28.422.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.720.000	1.460.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	115.185.200	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
169	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	50 %	50 %	957.882.602	134.995.000			
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten	80 Persen	80 Persen	257.805.760	149.984.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								

							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	53.805.760	24.965.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	204.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	80 Persen	80 Persen	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	30 Persen	30 Persen	700.076.842	20.230.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	200.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	350.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	50.076.842	10.030.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
170	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	5 %	5 %	238.136.000	17.987.000			
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	87 Persen	87 Persen	238.136.000	29.985.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	215.000.000	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								

							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	2 Promosi	6.136.000	17.987.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
171	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase PAD Sektor Pariwisata	5 %	5 %	0,00	0,00			
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif kabupaten yang disediakan prasarananya	1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
172	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	100 Orang	100 Orang	445.502.262	24.965.000			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	75 Persen	75 Persen	345.502.262	49.907.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	150.538.446	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI								
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata								
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	50 Orang	150.963.816	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan	2 Laporan	44.000.000	24.965.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	75 Persen	75 Persen	100.000.000	0,00			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	100.000.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha								
							Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif								
							Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						DINAS PERTANIAN				43.476.781.608	32.786.439.835			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				43.476.781.608	32.786.439.835			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				43.476.781.608	32.786.439.835			
173	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	19.221.311.223	19.737.751.532			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	19.183.320	10.050.220			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.255.780	4.255.780	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN

	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.525.100	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.641.160	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.897.220	2.897.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.897.220	2.897.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.966.840	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 jenis	4 jenis	18.438.867.567	24.221.301.854			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2208 Orang/bulan	2208 Orang/bulan	18.209.771.887	19.019.596.488	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	220.080.000	212.040.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	9.015.680	5.955.680	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaranaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	446.913.978	309.164.841			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	76.694.100	28.497.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.281.838	6.398.382	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.627.411	5.369.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000	18.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	39.999.638	33.009.318	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	294.310.991	86.218.732	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perizinan Tertentu Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	202.999.858	218.068.012			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.999.858	67.368.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.000.000	150.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	65 Persen	65 Persen	113.346.500	94.548.700			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174 Unit	174 Unit	107.856.500	89.058.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	5.490.000	5.490.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
174	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi hortikultura Persentase peningkatan produksi perkebunan Persentase peningkatan produksi peternakan	4,12 2,34 11,80 2,50 % % % %	2,50 4,12 2,34 11,80 % % % %	11.467.205.465	5.561.972.873			
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	91.07 Persen	91.07 Persen	6.199.620.000	2.328.280.000			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							

							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	6.199.620.000	996.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	24 Hektar	24 Hektar	4.077.655.465	3.527.713.373			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	4.077.655.465	4.409.072.873	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	7 jenis	7 jenis	1.189.930.000	156.000.000			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119 Ekor	119 Ekor	1.189.930.000	156.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	DINAS PERTANIAN
175	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	0,25 %	0,25 %	11.839.093.940	5.727.989.530			
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	3 jenis	3 jenis	439.989.000	165.225.696			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	439.989.000	165.223.310	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	98 Unit	98 Unit	11.399.104.940	5.112.776.220			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	20 Unit	3.999.877.220	4.063.448.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air								
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	539.750.000	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	359.892.400	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	6.499.585.320	1.499.318.220	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PERTANIAN
176	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	"Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular"	11 %	11 %	10.712.500	4.762.500			
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12 bulan	12 bulan	10.712.500	10.712.500			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	10.712.500	4.762.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
177	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100 %	100 %	938.458.480	1.753.963.400			
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	227 Desa/Kelurahan	227 Desa/Kelurahan	938.458.480	983.330.000			DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Unit	22 Unit	99.868.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22 Unit	22 Unit	838.590.480	954.457.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian								

							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	135 Orang	0,00	799.506.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	DINAS PERTANIAN
						DINAS PERDAGANGAN				7.389.703.540	6.529.607.445			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.389.703.540	6.529.607.445			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7.389.703.540	6.529.607.445			
178	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6.690.593.243	6.174.590.060			
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	50.541.930	19.198.996			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	31.243.020	4.877.480	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.623.740	2.615.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.622.900	2.622.340	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.628.900	2.457.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.632.280	2.632.280	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.424.900	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.366.190	3.993.896	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.521.747.567	5.210.170.961			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan	576 Orang/bulan	4.514.401.727	4.705.467.121	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.308.940	2.308.940	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.642.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.394.900	2.394.900	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase pendapatan dari retribusi daerah terhadap potensi retribusi yang dikelola perangkat daerah	100 %	100 %	14.755.600	0,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	14.755.600	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 %	100 %	50.160.000	24.420.000			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 Paket	71 Paket	50.160.000	24.420.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	343.237.915	291.998.499			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.505.995	5.857.832	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9.954.126	48.007.076	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.006.548	8.487.616	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.666.800	3.693.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	150 Dokumen	18.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	26.022.646	32.025.577	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12.500.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500 Laporan	2500 Laporan	270.581.800	178.538.849	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	0,00	0,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.452.343.455	1.067.479.133			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	34.935.205	42.954.672	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	1.417.408.250	909.324.461	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	257.806.776	168.700.620			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	50.130.704	66.100.620	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	2.600.000	5.810.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	205.076.072	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
179	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	90,67 %	90,67 %	100.000.100	68.692.324			
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	100 %	100 %	100.000.100	86.144.413			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	16 Unit	100.000.100	68.692.324	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
180	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun Persentase kinerja realisasi pupuk	100 20,67 % %	20,67 100 % %	273.941.253	208.435.147			
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	100 %	100 %	3.777.616	12.744.600			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	3.777.616	6.577.300	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten	100 %	100 %	258.342.622	227.108.400			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	58.340.740	44.602.744	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	200.001.882	145.755.703	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeriksa	100 %	100 %	11.821.015	22.748.800			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan								
							Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5 Dokumen	5 Dokumen	3.330.356	8.974.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Laporan	5 Laporan	5.160.534	2.525.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan	3.330.125	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
181	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	0,80 %	0,80 %	225.157.484	16.425.300			

	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pertumbuhan ekspor daerah	100 %	100 %	225.157.484	32.400.600			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	163.078.480	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	276.120	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	61.802.884	16.425.300	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS PERDAGANGAN
182	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku [deleted]	100 %	100 %	100.011.460	61.464.614			
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	100 %	100.011.460	110.000.000			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	5 Unit	40.011.320	26.516.112	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	20 Orang	60.000.140	34.948.502	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Daerah - LRA	DINAS PERDAGANGAN
						SEKRETARIAT DAERAH				37.499.999.596	40.686.167.730			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37.499.999.596	40.686.167.730			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				37.499.999.596	40.686.167.730			
183	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100 %	100 %	34.337.478.387	37.014.165.705			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	328.534.530	356.457.808			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	250.332.483	213.288.044	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22.702.247	22.701.834	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	27.699.983	27.699.983	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	27.799.817	20.143.947	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Seara Tepat Waktu	99 %	99 %	11.087.961.087	10.887.629.256			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	9.719.377.220	9.502.947.363	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.286.518.672	1.201.582.821	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	57.040.175	52.506.312	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	25.025.020	25.025.020	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dalam Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian	95 %	95 %	136.445.176	109.887.058			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	136.445.176	97.807.058	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Prediat Kinerja baik Berdasarkan Hasil Penilaian Perjanjian Kinerja	100 %	100 %	102.200.000	81.700.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket	52.200.000	111.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	50.000.000	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	4.103.469.996	4.530.565.613			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	67.525.515	66.871.488	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	7.846.587	7.846.587	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	145.000.000	1.220.587.405	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	318.841.104	318.841.104	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	152.425.220	286.701.459	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	180.000.000	180.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	1.734.500.000	1.678.070.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	42 Laporan	1.174.030.000	417.518.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75 Dokumen	75 Dokumen	323.301.570	320.901.570	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	5.845.178.000	7.235.961.142			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.342.800.000	4.585.810.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	2.500.000.000	1.429.609.932	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	2.378.000	507.012.910	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa	100 %	100 %	4.436.849.144	4.935.953.760			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.751.952.000	1.630.512.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan	352.659.750	1.213.375.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	2.332.237.394	1.952.529.010	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	100 %	100 %	2.126.494.146	1.725.010.078			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	409.792.368	255.760.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	486 Unit	486 Unit	1.048.932.578	1.161.547.816	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400 Unit	400 Unit	399.959.200	58.567.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	200 Unit	74.700.000	7.470.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	193.110.000	119.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	3.351.336.147	3.840.706.147			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	703.177.147	1.004.785.833	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	57 Paket	57 Paket	175.700.000	437.550.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	220.000.000	220.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.252.459.000	2.622.788.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	100 %	100 %	1.730.365.935	3.046.765.935			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.187.140.410	1.557.940.410	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	284.072.280	1.101.072.280	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	259.153.245	370.753.245	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 %	100 %	300.289.927	388.692.636			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen	108.242.794	137.706.729	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	90.333.808	59.801.590	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	66.587.252	45.884.940	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	7.640.965	3.669.896	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	27.485.108	17.351.108	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	788.354.299	645.780.195			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	70 Laporan	70 Laporan	626.477.289	369.407.820	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	80 Laporan	80 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50 Laporan	50 Laporan	161.877.010	355.517.741	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
184	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik Nilai LPPD	100 2,95 % Angka	100 2,95 % Angka	2.541.672.098	2.694.239.114			
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	80 %	80 %	320.859.611	394.378.511			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	122.659.770	113.597.958	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	90.150.023	51.630.643	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	108.049.818	136.150.759	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	100 %	1.514.311.286	1.989.510.622			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	11 Dokumen	826.842.114	826.575.416	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	212.591.002	522.477.620	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	474.878.170	441.053.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	95 %	95 %	680.426.875	774.280.754			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	900 Dokumen	900 Dokumen	336.649.873	233.067.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	10 Kasus	202.929.753	196.953.973	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan								
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	93 Dokumen	93 Dokumen	140.847.249	153.732.167	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	100 %	100 %	26.074.326	26.074.326			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	19.074.698	11.999.698	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	5 Laporan	6.999.628	6.999.628	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
185	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	81,23 100 0,56 % % %	100 0,56 81,23 % % %	620.849.111	977.762.911			
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 Laporan	20 Laporan	242.800.051	237.510.051			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.591.644	10.253.644	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	119.239.261	75.307.261	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	60.269.644	38.352.644	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	42.699.502	154.773.265	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	16 Laporan	16 Laporan	49.067.462	56.267.462			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	49.067.462	38.168.462	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	100 %	284.982.098	759.697.959			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	120.491.832	516.514.561	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	58.192.366	61.070.410	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	5 Orang	106.297.900	50.331.164	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	43.999.500	36.799.500			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	43.999.500	32.991.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD				28.758.806.012	30.117.425.360			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				28.758.806.012	30.117.425.360			

	4	02				SEKRETARIAT DPRD				28.758.806.012	30.117.425.360			
186	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	22.932.258.642	26.597.534.205			
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	39.703.206	39.703.206			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.336.603	11.336.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.660.000	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.660.000	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.660.000	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.660.000	4.660.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.726.603	9.726.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.053.007.042	4.354.464.947			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/bulan	540 Orang/bulan	3.732.997.653	4.030.855.558	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.290.000	303.890.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.066.603	5.066.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.926.183	4.926.183	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	9.726.603	9.726.603	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	9.266.183	8.666.183			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.266.183	8.666.183	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	319.049.280	319.049.280			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	46 Paket	30.360.000	30.360.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	2.893.400	2.893.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	52.500.000	52.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	233.295.880	90.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	504.245.567	729.266.255			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.411.687	7.411.687	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.741.780	3.741.780	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	61.560.100	61.560.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.874.400	24.874.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	107.500.000	106.450.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	47 Paket	47 Paket	118.657.760	118.657.760	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	27.900.000	27.900.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	152.599.840	206.777.764	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	214.253.576	3.189.446.327			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	2.105.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	0,00	117.363.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	113.975.576	428.467.727	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	100.278.000	537.815.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	944.329.500	943.001.202			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	380.329.500	379.001.202	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	544.800.000	544.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	418.974.792	979.404.792			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	144.510.000	98.840.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	225.790.000	250.490.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	177 Unit	10.544.792	10.544.792	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	31.730.000	613.130.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	6.400.000	6.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	15.408.670.264	15.328.962.909			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	14.991.825.264	15.136.572.909	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	416.845.000	192.390.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	1.020.759.232	1.020.757.748			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD								

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	10 Laporan	10 Laporan	96.613.600	96.613.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	924.145.632	924.144.148	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
187	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	100 %	100 %	5.826.547.370	3.519.891.155			
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	694.197.540	1.045.875.525			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	640.197.540	26.553.350	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan								
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	135.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	646.749.650	581.393.050			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	10.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	10.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	218.740.650	106.689.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	218.740.650	112.249.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	188.268.350	91.283.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	238.268.350	229.176.350			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	55.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan								
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	188.268.350	92.893.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	1.657.127.980	963.461.590			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.351.332.780	445.131.960	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	2 Orang	96.000.000	96.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang	10 Orang	144.000.000	126.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	22.500.000	22.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.500.000	10.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	32.795.200	32.795.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	1.204.457.960	825.781.230			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	54.671.470	27.310.735	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8.565.000	8.565.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses								

							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	1.141.221.490	638.749.110	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	1.385.745.890	1.899.372.636			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.382.745.890	1.459.671.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH				9.494.086.836	7.012.956.803			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.494.086.836	7.012.956.803			
	5	01				PERENCANAAN				8.425.956.642	6.351.122.889			
188	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.635.245.627	5.325.240.721			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	8 Dokumen	100 Persen 8 Dokumen	32.262.808	20.831.080			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.940.615	7.673.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.173.443	2.111.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.192.060	2.309.260	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.946.780	2.986.370	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.445.130	2.185.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.564.780	3.564.780	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Persentase Dokumen Administrasi Keuangan PD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	8 Jenis	100 Persen 8 Jenis	3.733.658.210	3.663.158.571			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.720.997.602	3.654.709.235	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.811.618	2.200.346	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	6.848.990	6.248.990	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	101.120.000	75.360.000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	21.120.000	45.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	80.000.000	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum PD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	10 Jenis	100 Persen 10 Jenis	1.092.848.180	933.203.249			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	3.895.469	10.671.467	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.131.590	10.131.590	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	24.514.000	24.514.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	0 0	25.633.000	22.860.000	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0 0	128.500.000	94.200.000	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	63.379.617	40.664.472	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 0	0 0	25.000.000	25.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	588.206.320	238.208.518	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 0	0 0	223.588.184	238.672.684	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	13 Unit	13 Unit	797.006.291	116.006.289			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	594.365.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	202.641.291	66.082.089	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Disediakan Sesuai Ketentuan	4 Jenis	100 Persen 4 Jenis	447.527.402	383.132.922			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.618.862	12.618.862	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	312.908.540	202.514.060	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	126.000.000	168.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Sesuai Ketentuan	10 Unit	100 Persen 10 Unit	430.822.736	421.900.976			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	204.541.036	311.920.328	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	44.280.000	28.920.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	175.285.700	70.659.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	6.716.000	15.253.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
189	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	1.082.934.133	735.886.913			
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanan Pembangunan Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	883.554.818	701.519.378			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	106.850.230	65.289.030	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya							
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	155.187.115	68.093.115	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	43.240.800	40.640.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.500.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	73.268.000	74.068.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	1000 Usulan	32.954.400	17.704.400	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	451.554.273	302.752.033	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah Persentase Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	3 Dokumen	100 Persen 3 Dokumen	100.779.315	100.779.315			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	13.779.315	13.779.315	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	6 Orang	6 Orang	87.000.000	87.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	98.600.000	77.315.220			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	98.600.000	56.560.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

190	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	707.776.882	289.995.255			
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan Persentase Ketersediaan Jenis Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Disusun Sesuai Ketentuan	43 perangkat daerah	100 Persen 43 perangkat daerah	356.068.308	200.394.758			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29 Dokumen	29 Dokumen	85.734.860	20.606.560	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	10.833.080	8.536.402	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	11.770.820	3.248.328	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	35.147.095	29.279.072	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	14 Dokumen	9.914.000	8.538.143	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	67.829.856	37.514.644	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	16.870.820	5.742.670	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	117.967.777	32.693.777	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan Persentase Ketersediaan Jenis Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	8 perangkat daerah	100 Persen 8 perangkat daerah	175.052.228	94.843.668			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	45.106.956	10.332.956	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	1.383.520	1.633.520	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	7.660.000	1.270.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	38.538.910	46.250.240	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	41.762.743	8.495.743	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	4.869.709	1.395.709	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	5.650.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	30.080.390	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	176.656.346	115.175.491			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	68.634.457	35.631.489	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	12.055.180	1.799.180	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	13.650.000	3.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	22.542.499	12.290.188	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	25.830.000	12.443.388	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	8.444.210	3.485.246	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	25.500.000	5.168.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.068.130.194	661.833.914			
191	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	2 Litbang	100 Persen	703.353.234	552.872.734			
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	2 Litbang	100 Persen 1 Kegiatan	445.392.314	352.947.294			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	309.777.860	275.435.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	82.667.160	0,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	2 Laporan	52.947.294	52.947.294	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Dilaksanakan Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang dilaksanakan Sesuai Ketentuan	2 Litbang	100 Persen 2 Kegiatan	213.176.920	203.060.000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	108.062.660	0,00	-	DBH Sawit	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	105.114.260	201.530.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Peleksanaan Fasilitasi Inovasi dan Haki	80 Persen	100 Persen 80 Persen	44.784.000	0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen	44.784.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	0 Laporan	0,00	22.960.440	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
192	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Riset dan Inovasi Daerah Yang Diselenggarakan Sesuai Ketentuan	-	100 Persen	364.776.960	108.961.180			
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Fasilitasi Dukungan Riset dan Inovasi Daerah	-	2 Dokumen	239.228.480	199.229.980			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset								
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	1 Naskah	58.394.480	36.217.180	-	DBH Sawit	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah								
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	180.834.000	47.558.000	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Inovasi dan Invensi Persentase Laporah Hasil Invensi dan Inovasi Yang Disusun Sesuai Ketentuan	-	100 Persen 3 Dokumen	125.548.480	85.330.520			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi								
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	25.596.880	13.186.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi								
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	57.401.120	12.000.000	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi								
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah	1 Naskah	42.550.480	0,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				274.200.684.479	298.578.816.220			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				274.200.684.479	298.578.816.220			
	5	02				KEUANGAN				274.200.684.479	298.578.816.220			
193	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.791.413.914	7.108.608.917			
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	90.028.725	109.263.170			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.505.340	4.465.592	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.249.240	10.654.273	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.678.250	11.655.843	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	38.304.540	38.953.119	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.118.100	3.200.919	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41 Laporan	41 Laporan	1.446.375	1.446.375	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35.726.880	38.887.049	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	4.502.553.658	5.219.778.124			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	588 Orang/bulan	3.822.175.177	4.576.306.004	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	668.858.265	722.502.536	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.437.238	5.749.238	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.082.978	5.740.978	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan BMD SKPD yang tertib	95 %	95 %	86.746.900	87.733.900			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	86.746.900	85.173.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 %	100 %	63.563.300	127.727.552			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	3 Paket	38.940.000	95.550.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41 Dokumen	41 Dokumen	2.983.300	7.057.552	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	4.680.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5 Orang	16.960.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi Umum	100 %	100 %	559.404.943	962.916.084			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.542.919	5.542.919	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.039.183	31.990.843	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.529.342	20.388.983	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	313 Dokumen	49.800.000	83.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	26.062.403	31.683.759	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	32.000.000	48.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	397.431.096	378.352.588	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	94 %	94 %	85.755.721	368.179.407			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.121.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	19 Unit	46.634.721	293.123.507	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	277.474.000	261.110.090			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.791.097	3.865.177	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237.682.903	221.244.913	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	36.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	94 %	94 %	125.886.667	337.272.850			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	118.596.667	221.945.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	5.200.000	5.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.090.000	110.127.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
194	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan APBD	98 %	98 %	267.900.776.131	290.682.165.145			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	100 %	100 %	1.181.161.145	1.424.183.459			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	22.714.324	19.114.182	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	23.441.410	34.834.145	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	57 Dokumen	16.316.000	10.447.298	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	57 Dokumen	10.152.600	9.128.578	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	57 Dokumen	8.228.310	5.383.535	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	57 Dokumen	8.160.460	4.793.874	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	438.551.000	418.217.880	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	411.020.252	438.120.417	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	17.920.290	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	14 Dokumen	44.687.706	31.788.631	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57 Dokumen	57 Dokumen	105.981.497	287.513.552	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang	73.987.296	56.939.889	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	98 %	98 %	316.515.113	361.815.046			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57 Dokumen	57 Dokumen	47.238.906	39.380.789	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1300 Dokumen	1300 Dokumen	27.351.500	33.728.344	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15 Dokumen	15 Dokumen	67.874.320	56.789.986	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	3 Laporan	66.420.597	54.489.204	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57 Dokumen	57 Dokumen	47.871.134	50.427.424	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	114 Orang	59.758.656	74.317.121	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	99 %	99 %	588.538.068	729.851.259			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	57 Laporan	57 Laporan	83.579.123	70.015.933	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 Dokumen	57 Dokumen	30.530.920	30.505.704	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	5 Laporan	55.390.540	41.264.878	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	5 Laporan	126.798.838	143.799.282	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	66.057.716	59.384.349	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	18.826.233	10.249.378	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	90.489.652	62.689.874	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	12.902.932	102.871.506	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang	99.539.894	82.383.269	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota							
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	4.422.220	4.835.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	100 %	265.243.326.253	292.741.671.809			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	828 Laporan	1656 Laporan	249.795.285.550	250.351.851.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15 Laporan	15 Laporan	10.000.000.000	28.819.286.094	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	414 Laporan	828 Laporan	5.448.040.703	8.768.838.809	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Megimplementasikan Sistem Informasi secara tertib	98 %	98 %	571.235.552	517.235.552			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	114 Dokumen	114 Dokumen	571.235.552	508.775.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

195	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	99 %	99 %	508.494.434	788.042.158			
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	96 %	96 %	508.494.434	908.789.268			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga								
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.442.081	31.787.623	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.156.086	17.262.005	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.084.074	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	57 Laporan	57 Laporan	76.369.306	151.289.345	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan	57 Laporan	76.559.850	109.952.262	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	50 Laporan	58.142.241	26.603.054	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 Laporan	50 Laporan	75.863.832	198.689.398	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	56.060.046	56.480.910	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	114 Laporan	114 Laporan	32.994.139	28.129.118	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	35.968.734	30.566.238	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang	28.854.045	137.282.205	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH				10.732.758.512	14.130.272.603			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.732.758.512	14.130.272.603			
	5	02				KEUANGAN				10.732.758.512	14.130.272.603			
196	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	9.065.775.192	12.005.385.738			
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	74.871.904	79.584.673			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen Dokumen	7 Dokumen Dokumen	28.554.279	27.406.434	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	7.513.372	7.513.372	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	6.467.087	6.467.087	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.733.569	6.733.569	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.198.307	6.452.307	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.899.963	5.026.577	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	16.505.327	10.640.327	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2683 orang/bulan	2683 orang/bulan	5.816.900.406	7.824.826.793			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	2683 Orang/bulan	5.566.828.924	7.526.793.311	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	219.276.171	256.843.171	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.137.807	9.314.807	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.158.271	12.738.271	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.120.826	7.908.826	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	4.369.837	4.369.837	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4.008.570	4.008.570	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.124.272	37.766.383			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.998.547	16.716.658	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	18.125.725	21.049.725	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	382.051.361	399.840.141			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	379.144.609	393.648.609	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.906.752	6.191.532	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 orang	6 orang	150.693.000	207.859.564			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	76.560.000	118.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	4.088.000	11.584.564	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	6.960.000	6.100.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	6.960.000	4.575.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	130.000	130.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	55.995.000	26.298.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	30 Paket	30 Paket	1.204.663.983	1.916.577.112			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.567.763	29.567.763	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	231.998.835	445.459.647	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	88.726.885	88.726.885	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	299.104.000	399.488.960	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	62.000.000	62.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.387.770	47.552.127	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	30.000.604	33.000.604	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 Laporan	162 Laporan	436.878.126	567.785.330	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Jenis	12 Jenis	1.076.880.810	1.109.019.570			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	181.540.810	113.289.570	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	22.940.000	27.330.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	872.400.000	968.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	20 Unit	334.589.456	725.474.298			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	235.919.456	295.664.298	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	98.670.000	429.810.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
197	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	91,21 80,34 99,02 91,23 % % % %	99,02 80,34 91,21 91,23 % % % %	1.666.983.320	2.124.886.865			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan,Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan,Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah,Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB.	11 Dokumen	11 Dokumen	1.666.983.320	2.379.839.941			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	39.171.319	23.485.686	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	36.036.223	30.137.940	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	28.520.934	22.749.154	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	5.010.890	2.497.082	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	60.580.465	45.554.465	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	111.013.141	451.748.802	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	17518 Obyek Pajak	17518 Obyek Pajak	14.228.820	10.243.410	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Opsen PKB	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	25.559.689	33.091.689	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	175180 Layanan	175180 Layanan	473.252.708	793.161.604	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	29.179.978	24.833.978	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	341.255.596	320.805.385	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.006.918	8.892.932	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	340.056.738	277.127.907	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	58.095.810	31.109.330	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	91.014.091	49.447.501	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.048.732.200	8.148.975.543			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.048.732.200	8.148.975.543			
	5	03				KEPEGAWAIAN				9.066.927.129	7.646.178.072			
198	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	4.767.089.092	5.326.064.729			
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	10 dokumen	126.734.678	278.504.678			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	31.065.598	183.373.560	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.821.298	20.434.476	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.508.772	23.051.772	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.494.650	21.252.310	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.344.622	15.181.932	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.566.860	20.238.040	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.932.878	21.353.730	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.152.683.606	3.863.938.180			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.825.139.512	3.533.730.885	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.060.000	253.980.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.488.600	18.729.520	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.995.494	19.490.096	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.400.000	8.400.000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	631.830.740	601.250.740			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	7.837.167	7.837.167	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	40 Dokumen	232.000.000	202.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	50.092.573	59.261.173	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000	22.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	319.901.000	198.520.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	753.392.000	657.342.000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000	114.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.392.000	88.542.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	494.000.000	398.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	94.048.068	94.048.068			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	76.628.068	75.628.068	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	17.420.000	19.860.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
199	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	0,52 Angka	0,52 Angka	4.299.838.037	2.320.113.343			
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ,pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 persen	100 persen	749.861.425	562.122.425			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3000 Dokumen	3000 Dokumen	88.253.164	45.241.164	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3500 Dokumen	3500 Dokumen	315.334.334	194.520.334	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi								
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	300 Dokumen	87.552.824	36.454.824	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7 Lembaga	7 Lembaga	81.484.080	38.120.080	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	91.345.569	41.105.569	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	85.891.454	49.729.454	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	persentase Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen	100 Persen	520.829.520	520.829.520			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	600 Dokumen	600 Dokumen	174.351.750	118.228.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1700 Dokumen	1700 Dokumen	346.477.770	326.668.770	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	100 Persen	2.781.605.806	2.347.935.806			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	215.463.654	20.419.960	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	80 Dokumen	80 Dokumen	409.740.728	409.740.728	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	100 Dokumen	1.744.400.000	738.860.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	20 Orang	102.000.692	58.516.692	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	7 Dokumen	7 Dokumen	93.841.529	57.641.529	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional								
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	50 Orang	50 Orang	113.195.121	73.419.121	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional								
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	70 Orang	70 Orang	102.964.082	40.072.082	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 persen	100 persen	247.541.286	229.685.286			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang	700 Orang	105.913.810	50.470.810	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40 Laporan	40 Laporan	141.627.476	20.903.476	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				981.805.071	502.797.471			
200	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	96 %	96 %	981.805.071	502.797.471			
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sertifikasi,kelembagaan,Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 persen	100 persen	981.805.071	839.344.071			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	12 Laporan	981.805.071	502.797.471	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT DAERAH				11.694.643.672	10.165.371.539			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.694.643.672	10.165.371.539			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				11.694.643.672	10.165.371.539			
201	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.714.780.677	8.099.698.079			

	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	114.070.845	114.070.845			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	51.994.264	46.768.572	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.338.706	13.799.900	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.446.725	13.281.725	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.137.759	11.137.759	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.892.506	9.892.506	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	17.260.885	22.587.885	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	5.369.925.902	6.027.619.764			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.085.361.974	5.730.545.836	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	268.140.000	281.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.739.408	8.739.408	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.684.520	8.483.793	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %	100 %	21.715.080	21.715.080			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	21.715.080	21.715.080	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Dengan Kinerja Baik	100 %	100 %	384.276.000	384.276.000			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	130 Paket	102.200.000	96.260.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	36 Orang	282.076.000	141.188.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	36 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	842.703.973	948.674.696			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	11.306.751	11.306.751	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	243.714.168	361.725.851	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.462.725	10.462.725	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.768.400	20.768.400	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.289.769	15.904.769	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	75.000.000	75.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.001.270	57.417.570	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	55.500.000	75.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	86 Laporan	361.660.890	211.825.918	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	72,07 %	72,07 %	143.961.441	172.526.315			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.997.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	69.125.000	27.650.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	34.839.441	24.885.315	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	429.408.236	429.408.236			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	111.408.236	111.408.236	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	318.000.000	235.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	408.719.200	461.489.200			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	144.102.300	124.885.180	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	53 Unit	33.500.000	30.050.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	231.116.900	299.866.900	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pajak Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
202	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peresentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti [deleted] Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi Persentase tindak lanjut temuan BPK	92,3 100 93,3 % % %	100 93,3 92,3 % % %	3.335.906.495	1.496.523.197			
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal	100 %	100 %	2.232.334.780	1.930.007.780			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	30 Laporan	777.127.480	407.161.382	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	18 Laporan	111.620.880	90.860.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	13 Laporan	102.485.880	18.240.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	26 Laporan	228.345.880	105.425.880	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18 Laporan	72 Laporan	732.003.930	74.003.930	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan	42.564.800	22.514.800	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	238.185.930	128.373.730	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Tertentu	100 %	100 %	1.103.571.715	948.411.715			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian								
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	203.854.320	203.854.320	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	37 Laporan	899.717.395	446.087.395	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
203	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	643.956.500	569.150.263			

	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Yang Dirumuskan	100 %	100 %	63.635.300	63.635.300			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	63.635.300	70.485.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Bagi Hasil	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	20 %	20 %	580.321.200	526.239.200			INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	318.515.110	288.556.566	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	74.551.179	82.901.179	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	158.019.650	87.271.957	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	29.235.261	39.935.261	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT DAERAH
						KECAMATAN BAJO				2.603.418.454	2.606.628.804			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.603.418.454	2.606.628.804			
	7	01				KECAMATAN				2.603.418.454	2.606.628.804			
204	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.599.218.454	2.577.628.804			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.188.760	3.749.173			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.291.460	2.291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	291.460	291.873	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	291.460	291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	291.460	291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	291.460	291.460	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.731.460	291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.354.816.316	2.410.163.326			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.303.952.516	2.359.299.526	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	49.200.000	49.200.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	582.920	582.920	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.080.880	1.080.880	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	6.291.460	6.291.460			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.291.460	6.291.460	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	52.412.936	42.743.612			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.541.378	1.541.378	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.650.820	1.659.080	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.006.738	10.302.414	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	7.940.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.414.000	10.201.500	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	48.855.400	35.636.900			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	48.855.400	17.818.450	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	114.519.600	91.370.900			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.097.400	1.440.291	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.422.200	15.422.200	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	74.400.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	17.133.982	14.799.532			KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	15.673.982	13.439.532	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.460.000	1.460.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Bajo, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
205	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	4.200.000	29.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			4.200.000	29.000.000			KECAMATAN BAJO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	4.200.000	29.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO
						KELURAHAN BAJO				257.799.994	261.399.994			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				257.799.994	261.399.994			
	7	01				KECAMATAN				257.799.994	261.399.994			
206	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	257.799.994	261.399.994			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	257.799.994	261.399.994			KECAMATAN BAJO
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	257.799.994	261.399.994	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BAJO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	-	KECAMATAN BAJO
						KECAMATAN BAJO BARAT				1.496.043.000	1.468.627.120			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.496.043.000	1.468.627.120			
	7	01				KECAMATAN				1.496.043.000	1.468.627.120			
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.454.886.500	1.446.970.620			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	50 Persen	50 Persen	9.063.900	5.965.900			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 0	2 0	2.867.900	2.867.900	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.549.000	1.549.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.549.000	1.849.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.549.000	1.549.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.549.000	1.849.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.224.343.720	1.262.398.120			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.175.162.720	1.213.217.120	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	47.655.600	47.655.600	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.525.400	4.778.900	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	6.767.000	6.767.000			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.767.000	6.767.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Predikat Kinerja Baik	100 Persen	100 Persen	9.240.000	7.920.000			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	12 Paket	9.240.000	7.920.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	76.546.112	62.416.112			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.175.987	5.175.987	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	6.454.600	6.454.600	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	11.764.025	16.411.385	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3 Laporan	7.500.000	11.750.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	44.451.500	17.991.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	24.418.994	0,00			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	24.418.994	0,00	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	74.931.000	60.531.000			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.731.000	13.731.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.200.000	46.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	29.575.774	35.302.488			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	29.575.774	37.453.628	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	9.156.500	9.156.500			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 Kali	9.156.500	9.156.500			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	9.156.500	9.156.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	32.000.000	12.500.000			

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	32.000.000	30.500.000			KECAMATAN BAJO BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	32.000.000	12.500.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BAJO BARAT
						KECAMATAN BASSE SANGTEMPE				1.780.009.615	1.714.568.129			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.780.009.615	1.714.568.129			
	7	01				KECAMATAN				1.780.009.615	1.714.568.129			
210	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.723.874.443	1.671.925.952			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	3.196.800	2.400.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	632.700	600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	632.700	600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	499.500	540.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	499.500	300.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	466.200	540.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	466.200	570.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.484.074.711	1.544.449.820			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	1.439.635.711	1.480.009.820	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	43.440.000	53.760.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	499.500	950.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	499.500	1.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	100 Persen	13.919.400	0,00			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket	13.919.400	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	92.570.468	55.373.596			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	803.135	936.062	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	2.551.790	6.328.548	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	1.450.751	2.159.400	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	5.083.912	8.480.990	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE

	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	8.500.000	7.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	59.780.880	15.407.550	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	9 Unit	9 Unit	47.668.047	0,00			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	47.668.047	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 Persen	100 Persen	57.718.008	52.936.410			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan	6.526.558	6.464.610	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	3.191.450	2.071.800	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	32.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	18.727.009	29.707.172			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	18.727.009	30.307.172	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
211	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	8.345.172	5.642.177			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	8.345.172	5.642.177			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	6.587.000	2.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.758.172	3.142.177	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	2.550.000	1.000.000			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen	2.550.000	1.000.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.550.000	1.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
213	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	45.240.000	36.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 Persen	100 Persen	45.240.000	32.500.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	45.240.000	36.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
						KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA				1.633.188.595	1.818.343.086			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.633.188.595	1.818.343.086			
	7	01				KECAMATAN				1.633.188.595	1.818.343.086			
214	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	-	100 Persen	1.565.468.595	1.777.843.086			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	-	100 Persen	2.128.986	2.161.200			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA

	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	869.906	885.600	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	314.770	318.900	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	314.770	318.900	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	314.770	318.900	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	314.770	318.900	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	-	100 Persen	1.397.028.595	1.649.422.287			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.333.188.595	1.585.582.287	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	63.840.000	63.840.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-	100 Persen	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	34 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	69.326.102	52.497.537			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.100.845	1.189.327	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.691.965	2.671.616	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	1.745.456	1.814.250	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.996.455	6.274.192	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	2.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	40.591.381	20.717.152	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	0,00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	-	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-	100 Persen	25.895.100	20.505.450			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.895.100	20.505.450	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	57.760.400	51.760.400			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	18.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.360.400	1.360.400	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.400.000	32.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	-	100 Persen	7.329.412	11.377.212			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	7.329.412	11.627.212	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	-	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	6.500.000	5.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	6.500.000	5.000.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	6.500.000	5.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	3.000.000	1.500.000			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Koordinasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	3.000.000	1.500.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	1.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
217	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelengaraan pelayanan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	-	100 Persen	58.220.000	34.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	-	100 Persen	58.220.000	34.000.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	58.220.000	34.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
						KECAMATAN BELOPA				3.736.025.732	4.090.578.938			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.736.025.732	4.090.578.938			
	7	01				KECAMATAN				3.736.025.732	4.090.578.938			
218	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.669.025.732	4.045.078.938			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.317.400	318.600			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	318.600	318.600	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	247.800	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	403.800	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	347.200	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.487.265.743	3.901.378.190			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.436.025.743	3.847.738.190	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	51.240.000	53.640.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	7.200.000	7.200.000			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.200.000	7.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun								

							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	59.679.143	45.805.824			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	260.188	260.188	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.872.550	1.145.850	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	965.075	766.422	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.550.330	18.245.364	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000	8.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	31.131.000	7.829.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	93.450.450	83.850.450			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.250.450	20.250.450	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	67.200.000	63.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	20.112.996	13.684.874			KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	18.222.996	12.384.874	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.300.000	1.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	590.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
219	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	5.000.000	3.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	5.000.000	3.000.000			KECAMATAN BELOPA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
220	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	3.000.000	3.000.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	3.000.000	3.000.000			KECAMATAN BELOPA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
221	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	59.000.000	39.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	59.000.000	39.500.000			KECAMATAN BELOPA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	59.000.000	39.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
222	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	0,00	0,00			

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN BELOPA
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA
						KELURAHAN BALO BALO				239.198.954	240.194.848			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				239.198.954	240.194.848			
	7	01				KECAMATAN				239.198.954	240.194.848			
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	239.198.954	240.194.848			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	-	4 Kelurahan	239.198.954	240.194.848			KECAMATAN BELOPA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 0	0 0	239.198.954	240.194.848	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
						KELURAHAN SENGA				239.199.799	243.199.794			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				239.199.799	243.199.794			
	7	01				KECAMATAN				239.199.799	243.199.794			
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Yang Dilaksanakan Kecamatan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	100 % undefined	239.199.799	243.199.794			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Kelurahan	-	1	239.199.799	243.199.794			KECAMATAN BELOPA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 0	0 0	239.199.799	243.199.794	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
						KELURAHAN TAMPUMIA RADDA				272.736.895	273.799.290			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				272.736.895	273.799.290			
	7	01				KECAMATAN				272.736.895	273.799.290			
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	272.736.895	273.799.290			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	-	1 Kelurahan	272.736.895	273.799.290			KECAMATAN BELOPA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 0	0 0	272.736.895	273.799.290	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
						KELURAHAN TANAMANAI				209.199.673	228.199.651			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				209.199.673	228.199.651			
	7	01				KECAMATAN				209.199.673	228.199.651			
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100 %	209.199.673	228.199.651			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	-	4 Kelurahan	209.199.673	228.199.651			KECAMATAN BELOPA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	209.199.673	228.199.651	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
						KECAMATAN BELOPA UTARA				2.687.813.813	2.668.643.470			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.687.813.813	2.668.643.470			
	7	01				KECAMATAN				2.687.813.813	2.668.643.470			
227	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.625.813.813	2.635.643.470			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.428.585.332	2.481.478.959			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.387.836.302	2.433.358.959	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40.749.030	48.120.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	4.869.030	4.800.000			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.869.030	4.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	98.707.250	75.227.250			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.359.470	3.359.470	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	23.293.580	23.301.840	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	39.054.200	7.851.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0,00	0,00			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	79.116.203	74.316.203			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.916.203	17.916.203	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.200.000	56.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	14.535.998	14.535.998			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	11.695.998	11.695.998	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	2.840.000	2.840.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
228	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
229	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	56.000.000	27.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	56.000.000	27.000.000			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	56.000.000	27.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BELOPA UTARA
						KELURAHAN PAMMANU				299.199.930	299.599.627			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				299.199.930	299.599.627			
	7	01				KECAMATAN				299.199.930	299.599.627			
230	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	100 persen	299.199.930	299.599.627			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persen	100 persen	299.199.930	299.599.627			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	299.199.930	299.599.627	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA UTARA
						KELURAHAN SABE				324.885.379	288.599.473			

	7					UNSUR KEWILAYAHAN				324.885.379	288.599.473			
	7	01				KECAMATAN				324.885.379	288.599.473			
231	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 100 % persen	100 100 % persen	324.885.379	288.599.473			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persen	100 persen	324.885.379	288.599.473			KECAMATAN BELOPA UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	324.885.379	288.599.473	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BELOPA UTARA
						KECAMATAN BUPON				1.965.334.566	1.972.793.122			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.965.334.566	1.972.793.122			
	7	01				KECAMATAN				1.965.334.566	1.972.793.122			
232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.900.178.865	1.926.137.421			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.712.331.266	1.779.835.140			KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 0	17 0	1.665.334.566	1.732.838.440	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	46.996.700	46.996.700	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	6.076.700	6.076.700			KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.076.700	6.076.700	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	89.738.173	63.378.033			KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	2.126.215	1.806.465	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.646.100	803.580	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.487.158	10.200.654	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61.002.000	26.045.317	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.076.700	12.076.700	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	60.810.303	59.554.425			KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.410.303	21.154.425	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.400.000	38.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 unit	5 unit	31.222.423	27.338.440			KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	31.222.423	27.338.440	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
233	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	100 %	6.155.701	6.155.701			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 Kali	6.155.701	6.155.701			KECAMATAN BUPON
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	6.155.701	6.155.701	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
234	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	59.000.000	40.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Forkomcam Persentase Pelaksanaan Urusan	100 Persen	100 Persen	59.000.000	40.500.000			KECAMATAN BUPON
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	59.000.000	40.500.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUPON
						KELURAHAN NOLING				302.800.000	285.911.370			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				302.800.000	285.911.370			
	7	01				KECAMATAN				302.800.000	285.911.370			
235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan yang Dilaksanakan Kecamatan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen	302.800.000	285.911.370			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Dilakukan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 Persen	302.800.000	288.800.000			KECAMATAN BUPON
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	83.111.370	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUPON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas	42 Pokmas / Ormas	202.800.000	202.800.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUPON
						KECAMATAN KAMANRE				1.779.538.526	1.822.650.473			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.779.538.526	1.822.650.473			
	7	01				KECAMATAN				1.779.538.526	1.822.650.473			
236	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.724.538.526	1.782.650.473			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.773.776	1.773.642			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.773.776	2.353.140	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.541.284.441	1.617.799.266			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.479.538.851	1.556.053.676	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	60.110.100	60.340.200	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.635.490	2.670.958	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	6.153.400	6.153.400			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.153.400	6.153.400	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	55.549.975	57.463.705			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	699.779	884.816	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	559.655	2.556.283	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.682.328	3.358.595	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	4.200.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.826.973	13.252.199	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	10.000.000	11.500.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26.781.240	13.378.518	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	3.508.000	3.508.000			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.508.000	0,00	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100.576.510	92.697.010			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.309.740	6.619.480	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.866.770	17.987.270	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.400.000	63.900.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	15.692.424	16.658.344			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	15.326.624	16.480.538	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	365.800	961.400	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KAMANRE
237	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	6.500.000	6.500.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 laporan	1 laporan	6.500.000	6.500.000			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	6.500.000	Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
238	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	48.500.000	33.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	48.500.000	33.500.000			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	48.500.000	33.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Kamanre, Bunga Eja	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN KAMANRE
						KELURAHAN CILALLANG				294.399.823	284.998.483			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				294.399.823	284.998.483			
	7	01				KECAMATAN				294.399.823	284.998.483			
239	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen	100 Persen	294.399.823	284.998.483			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat	1 Lembaga Kemasyarakat	294.399.823	284.998.573			KECAMATAN KAMANRE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	294.399.823	284.998.483	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KAMANRE
						KECAMATAN LAMASI				2.375.972.231	2.820.212.419			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.375.972.231	2.820.212.419			
	7	01				KECAMATAN				2.375.972.231	2.820.212.419			
240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.325.972.231	2.747.212.419			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	6.342.520	6.936.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.342.520	1.387.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.387.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.387.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.387.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.387.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.141.538.691	2.550.966.369			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.071.972.231	2.489.203.869	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	69.566.460	61.762.500	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	10.902.900	8.684.500			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.902.900	8.684.500	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	2.534.000	6.524.545			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2.534.000	6.524.545	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	41.606.477	64.564.727			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.422.320	3.169.335	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	13.235.157	25.233.392	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	62 Laporan	25.949.000	18.081.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	7.114.000	34.010.550			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	1.228.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.886.000	19.700.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	109.904.743	97.340.851			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	24.000.000	24.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.104.743	30.140.851	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.800.000	43.200.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	6.028.900	10.576.327			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	4.608.900	4.076.327	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	1.420.000	6.500.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
241	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	100 %	1.000.000	8.750.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	1.000.000	8.750.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	1.000.000	8.750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.000.000	7.750.000			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	1.000.000	7.750.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	1.000.000	7.750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
243	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	0,00	12.000.000			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	0,00	12.000.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	0,00	12.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
244	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	42.000.000	36.250.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	42.000.000	36.250.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	42.000.000	36.250.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
245	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	6.000.000	8.250.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	6.000.000	8.250.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	8.250.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI
						KELURAHAN LAMASI				355.000.000	425.775.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				355.000.000	425.775.000			
	7	01				KECAMATAN				355.000.000	425.775.000			
246	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	0,00	0,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN LAMASI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAMASI
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	355.000.000	425.775.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	355.000.000	436.400.000			KECAMATAN LAMASI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	167.775.000	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAMASI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	255.000.000	258.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAMASI
						KECAMATAN LAMASI TIMUR				1.382.641.718	1.312.774.843			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.382.641.718	1.312.774.843			
	7	01				KECAMATAN				1.382.641.718	1.312.774.843			
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	1.312.521.718	1.267.774.843			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	-	100 Persen	2.410.000	1.980.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	240.000	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	240.000	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	390.000	240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000	260.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	760.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	-	100 Persen	1.146.881.932	1.146.881.932			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	1.098.641.932	1.098.641.932	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	48.240.000	48.240.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pada SKPD	-	100 % 100 Persen	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	-	100 Persen	6.600.000	10.560.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	15 Paket	6.600.000	10.560.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 Persen	89.953.086	79.115.977			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	750.822	417.342	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.805.969	2.020.378	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	9.095.265	4.944.757	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	75.501.030	35.866.750	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	-	100 Persen	2.000.000	0,00			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	44.685.390	45.885.390			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.085.390	5.085.390	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.600.000	34.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	13.991.310	13.218.294			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	10.811.310	10.278.294	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	730.000	690.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.450.000	2.250.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	-	100 %	4.760.000	3.500.000			

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	-	100 Persen	4.760.000	3.500.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	4.760.000	3.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
250	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	59.000.000	37.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang ditugaskan Kepala Daerah	-	100 Persen	59.000.000	37.500.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	59.000.000	37.500.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
251	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 Persen	6.360.000	4.000.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	-	100 Persen	6.360.000	4.000.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	3.180.000	2.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	3.180.000	2.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAMASI TIMUR
						KECAMATAN LAROMPONG				2.155.136.411	2.114.642.299			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.155.136.411	2.114.642.299			
	7	01				KECAMATAN				2.155.136.411	2.114.642.299			
252	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.088.836.411	2.068.842.299			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.850.000	2.836.300			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000	836.300	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.935.457.032	1.941.927.506			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.879.262.356	1.879.262.356	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54.400.000	61.320.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.794.676	1.345.150	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	15.130.928	15.469.668			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	14.000.000	14.520.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.130.928	949.668	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	61.541.951	60.339.595			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	540.000	705.585	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	600 Paket	600 Paket	3.200.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.200.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	11.001.951	14.014.010	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	45.000.000	29.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	68.856.500	57.478.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	38.400.000	20.400.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.456.500	19.078.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	18.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5.000.000	5.411.230			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	5.000.000	5.411.230	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	10.000.000	7.500.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	10.000.000	7.500.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	7.500.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
254	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	6.300.000	6.300.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	6.300.000	6.300.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	6.300.000	6.300.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
255	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	50.000.000	32.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	50.000.000	32.000.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	32.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG
						KELURAHAN LAROMPONG				321.999.898	324.799.852			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				321.999.898	324.799.852			
	7	01				KECAMATAN				321.999.898	324.799.852			
256	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	321.999.898	324.799.852			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	37.081.280	41.880.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	37.081.280	41.880.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.136.700	1.200.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	336.700	0,00	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.200.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	282.781.918	281.469.852			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.780.402	43.433.336	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.998.860	6.918.860	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	267.002.656	231.117.656	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	250.000			KECAMATAN LAROMPONG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0,00	250.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG
						KECAMATAN LAROMPONG SELATAN				1.719.623.540	1.724.414.528			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.719.623.540	1.724.414.528			
	7	01				KECAMATAN				1.719.623.540	1.724.414.528			
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.649.803.540	1.656.294.528			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.086.727	5.116.463			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.689.150	1.689.150	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.680	1.020.680	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	510.295	540.031	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	469.526	469.526	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	520.620	520.620	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	876.456	876.456	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.488.527.151	1.534.968.733			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.436.303.261	1.482.744.843	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	50.280.000	50.280.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.943.890	1.943.890	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	6.414.180	6.414.180			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.414.180	6.414.180	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	79.208.374	44.943.044			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.298.075	1.298.075	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.411.190	1.411.190	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.503.949	10.503.949	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	12.500.000	12.500.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	51.695.160	10.799.830	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	60.233.208	61.148.208			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.443.208	6.443.208	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.590.000	7.905.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.200.000	46.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	10.333.900	10.333.900			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	10.333.900	10.333.900	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
258	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	9.120.000	9.120.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	9.120.000	9.120.000			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	9.120.000	9.120.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
259	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	59.000.000	59.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	59.000.000	59.000.000			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	59.000.000	59.000.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
260	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	1.700.000	0,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	1.700.000	1.700.000			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000	0,00	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
						KELURAHAN BONEPUTE				269.800.000	323.439.903			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				269.800.000	323.439.903			
	7	01				KECAMATAN				269.800.000	323.439.903			
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	269.800.000	323.439.903			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	269.800.000	324.799.903			KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	153.639.903	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas	28 Pokmas / Ormas	169.800.000	169.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
						KECAMATAN LATIMOJONG				1.556.893.472	1.602.520.971			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.556.893.472	1.602.520.971			
	7	01				KECAMATAN				1.556.893.472	1.602.520.971			
262	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.528.009.972	1.583.737.471			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	7.191.880	4.817.880			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.867.880	1.493.880	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000	831.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000	831.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000	1.581.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.332.781.071	1.331.881.071			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.272.893.471	1.272.893.471	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54.119.300	49.679.300	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.502.700	2.602.700	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.265.600	2.265.600	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penyelenggaaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	6.619.500	5.419.500			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6.619.500	5.419.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Predikat Kinerja Baik	100 Persen	100 Persen	8.580.000	15.000.000			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	13 Paket	8.580.000	12.600.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	74.989.599	67.584.420			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.732.783	5.178.524	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.454.600	6.454.600	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12.009.216	15.520.516	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	7.000.000	7.500.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	45.593.000	19.719.216	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	100 Persen	27.815.550	22.425.900			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	27.815.550	22.425.900	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	61.200.000	34.200.000			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.200.000	36.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	8.832.372	102.781.200			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	4.782.872	113.219.064	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.840.000	690.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.209.500	4.051.200	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
263	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	100 %	8.783.500	8.783.500			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	8.783.500	8.783.500			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	8.783.500	8.783.500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	20.100.000	10.000.000			

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	20.100.000	28.000.000			KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.100.000	10.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN LATIMOJONG
						KECAMATAN PONRANG				3.853.169.513	3.733.581.703			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.853.169.513	3.733.581.703			
	7	01				KECAMATAN				3.853.169.513	3.733.581.703			
265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	3.802.969.513	3.691.081.703			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	-	100 Persen	8.142.835	2.003.021			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.447.810	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.219.005	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.119.005	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.119.005	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.119.005	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	1.119.005	135.210	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	-	100 Persen	3.556.056.700	3.542.095.641			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	504 Orang/bulan	3.488.755.641	3.488.755.641	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	61.161.725	53.234.440	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.440.950	250.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.698.384	250.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelengaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-	100 Persen	7.125.754	4.935.334			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	685.334	135.334	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.440.420	4.800.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelengaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-	100 Persen	78.597.134	17.825.065			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	799.388	106.058	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.508.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	8.211.869	932.450	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.442.165	748.181	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.780.462	965.117	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	53.255.250	6.411.780	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelengaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-	100 Persen	113.181.927	113.291.465			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	63.344.388	4.401.765	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12.688.555	16.244.695	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	37.148.984	93.329.867	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelengaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen	39.865.163	16.105.115			KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	37.944.563	16.105.115	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	610.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.310.600	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	-	100 Persen	1.600.000	5.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pelayanan dan koordinasi urusan pemerintah tingkat kecamatan	-	100 Persen	1.600.000	5.000.000			KECAMATAN PONRANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
267	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.100.000	0,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	2.100.000	0,00			KECAMATAN PONRANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2.100.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
268	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam Rangka Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100 Persen	4.250.000	5.000.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	100 Persen	4.250.000	5.000.000			KECAMATAN PONRANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.250.000	5.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
269	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelengaraan pelayanan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	-	100 Persen	42.250.000	32.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	-	100 Persen	42.250.000	32.500.000			KECAMATAN PONRANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	42.250.000	32.500.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG
						KELURAHAN PADANG SUBUR				368.147.971	375.902.714			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				368.147.971	375.902.714			
	7	01				KECAMATAN				368.147.971	375.902.714			
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	368.147.971	375.902.714			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	368.147.971	376.999.714			KECAMATAN PONRANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	129.347.971	113.702.714	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PONRANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	238.800.000	262.200.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PONRANG
						KELURAHAN PADANG SAPPA				291.999.506	316.998.453			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				291.999.506	316.998.453			
	7	01				KECAMATAN				291.999.506	316.998.453			
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	291.999.506	316.998.453			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	291.999.506	316.998.453			KECAMATAN PONRANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	99.999.506	124.998.453	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PONRANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun Pokmas / Ormas	1 tahun Pokmas / Ormas	192.000.000	192.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PONRANG
						KECAMATAN PONRANG SELATAN				2.119.405.039	2.364.899.559			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.119.405.039	2.364.899.559			
	7	01				KECAMATAN				2.119.405.039	2.364.899.559			
272	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.105.861.003	2.315.909.671			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	15.829.710	10.046.840			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	3.049.440	1.549.340	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.922	1.175.652	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.889.552	1.175.652	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.848.252	1.175.652	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.848.252	1.175.652	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.588.092	1.740.272	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	2.609.200	1.720.100	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.617.189.428	2.092.172.819			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324 0	312 0	1.537.025.084	2.025.084.631	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	76.822.740	63.746.584	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 0	1 0	3.341.604	3.341.604	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaaan Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	0,00	8.383.754			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan	0,00	8.383.754	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Persen	90 Persen	11.880.000	11.880.000			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	18 Paket	11.880.000	11.880.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	110.137.159	60.421.800			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 0	50 0	2.242.000	2.242.000	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	4.200.000	4.200.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 0	20 Paket	6.007.559	0,00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	800 0	800 0	20.000.000	11.400.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 0	0 0	77.687.600	21.279.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 0	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	95.388.820	101.181.820			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 0	0 0	8.236.236	6.563.636	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 0	12 0	21.716.500	15.509.500	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	0 0	65.436.084	77.436.084	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	100 Persen	100 Persen	255.435.886	55.130.070			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 0	0 0	75.075.886	55.130.070	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 0	0 Unit	180.360.000	0,00	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	KECAMATAN PONRANG SELATAN
273	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	-	100 %	13.544.036	8.989.888			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Persen	1 Tahun	13.544.036	8.989.888			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 0	0 0	13.544.036	8.989.888	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
274	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	-	100 %	0,00	40.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	0,00	40.000.000			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	12 Dokumen	0,00	40.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN PONRANG SELATAN
						KELURAHAN PATTEDONG				221.200.000	218.081.322			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				221.200.000	218.081.322			
	7	01				KECAMATAN				221.200.000	218.081.322			
275	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	221.200.000	218.081.322			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	221.200.000	221.600.000			KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	221.200.000	218.081.322	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PONRANG SELATAN
						KECAMATAN SULI				1.709.196.874	1.696.955.343			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.709.196.874	1.696.955.343			
	7	01				KECAMATAN				1.709.196.874	1.696.955.343			
276	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.643.655.574	1.655.914.043			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	1.467.557.006	1.505.445.512			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	192 Orang/bulan	1.425.197.006	1.460.685.512	Kab. Luwu, Suli, Suli	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.360.000	44.760.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penyelenggaaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	6.020.650	6.020.650			KECAMATAN SULI

	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.020.650	6.020.650	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	-	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	56.227.219	47.208.644			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	322.884	0,00	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.625.461	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.250.800	1.019.343	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.596.448	11.690.001	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.042.126	13.091.300	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.389.500	11.178.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	-	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 p	100 p	101.114.325	100.494.425			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.314.325	17.694.425	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.800.000	76.800.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	12.736.374	12.974.812			KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	11.611.074	12.364.812	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	730.000	610.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	395.300	0,00	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
277	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 100 % Persen	100 100 % Persen	6.541.300	6.541.300			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 Kali	6.541.300	6.541.300			KECAMATAN SULI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	6.541.300	6.541.300	Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
278	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	59.000.000	34.500.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Forkomcam Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	59.000.000	32.000.000			KECAMATAN SULI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	59.000.000	34.500.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI
						KELURAHAN SULI				363.399.695	368.625.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				363.399.695	368.625.000			
	7	01				KECAMATAN				363.399.695	368.625.000			
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	363.399.695	368.625.000			

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Desa diwilayah Kecamatan yang dilakukan kegiatan peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan Jumlah Kelurahan yang Di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	12 Desa 1 Kelurahan	12 Desa 1 Kelurahan	363.399.695	369.800.000			KECAMATAN SULI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	363.399.695	368.625.000	Kab. Luwu, Suli, Suli	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN SULI
						KECAMATAN SULI BARAT				1.481.306.654	1.453.773.757			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.481.306.654	1.453.773.757			
	7	01				KECAMATAN				1.481.306.654	1.453.773.757			
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	1.412.297.754	1.407.764.857			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	3.184.764	3.184.764			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	820.844	820.844	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	590.980	590.980	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	590.980	590.980	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	590.980	590.980	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	590.980	590.980	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	100 %	1.249.216.430	1.271.433.593			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.197.306.690	1.219.523.853	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.909.740	51.909.740	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	100 %	100 %	6.309.740	6.309.740			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.309.740	6.309.740	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	67.555.320	67.584.169			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.052.120	5.212.600	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.584.140	3.589.509	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.281.860	8.281.860	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	31.637.200	15.750.100	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	47.261.500	59.261.500			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.461.500	12.461.500	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.800.000	40.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	38.770.000	15.741.191			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	38.770.000	15.741.191	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
281	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	7.500.000	7.500.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	7.500.000	7.500.000			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	2.508.900	2.508.900			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100 %	100 %	2.508.900	2.508.900			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.508.900	2.508.900	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
283	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	59.000.000	36.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	59.000.000	36.000.000			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	59.000.000	36.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN SULI BARAT
						KELURAHAN LINDAJANG				230.800.011	243.799.846			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				230.800.011	243.799.846			
	7	01				KECAMATAN				230.800.011	243.799.846			
284	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	230.800.011	243.799.846			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	230.800.011	243.799.846			KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.011	112.999.846	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN SULI BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	130.800.000	130.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN SULI BARAT
						KECAMATAN WALENRANG				2.908.715.732	3.113.349.121			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.908.715.732	3.113.349.121			
	7	01				KECAMATAN				2.908.715.732	3.113.349.121			
285	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.846.515.732	3.043.849.121			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.586.935.400	2.835.758.286			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/bulan	476 Orang/bulan	2.533.175.400	2.785.598.286	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	50.760.000	47.160.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG

	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 %	100 %	4.800.000	4.800.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	98.289.092	90.794.122			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	4.160.400	4.160.400	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	33.520.892	38.103.595	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	60.607.800	34.128.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi Baik	100 %	100 %	56.126.700	19.700.100			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	56.126.700	19.700.100	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	63.060.000	67.860.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	14.400.000	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	19.860.000	23.019.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	28.800.000	12.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	35.304.540	40.179.740			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	35.304.540	40.179.740	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
286	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	4.000.000	0,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	2.000.000	0,00			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	-	KECAMATAN WALENRANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %	2.000.000	0,00			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WALENRANG
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	4.500.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
288	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	2.000.000	0,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	2.000.000	0,00			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WALENRANG
289	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	10.000.000	45.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	10.000.000	45.000.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	45.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
290	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	41.700.000	20.000.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	41.700.000	25.000.000			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	41.700.000	20.000.000	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG
						KELURAHAN BULO				240.399.945	240.149.963			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				240.399.945	240.149.963			
	7	01				KECAMATAN				240.399.945	240.149.963			
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	240.399.945	240.149.963			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	240.399.945	244.399.997			KECAMATAN WALENRANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 0	0 0	240.399.945	240.149.963	Kab. Luwu, Walenrang, Bulo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN WALENRANG
						KECAMATAN WALENRANG BARAT				1.862.636.354	2.273.415.994			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.862.636.354	2.273.415.994			
	7	01				KECAMATAN				1.862.636.354	2.273.415.994			
292	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.778.636.354	2.238.915.994			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	2.000.000	1.600.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1.000.000	800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.608.436.420	1.991.040.385			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	192 Orang/bulan	1.562.636.420	1.942.280.385	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	43.800.000	47.160.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	12.000.000	6.000.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	58.360.434	54.431.220			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.850.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.350.434	27.529.081	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	43.160.000	31.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	19.700.100	19.700.100			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	19.700.100	19.700.100	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	63.086.000	61.886.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	36.000.000	25.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.886.000	5.658.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000	9.600.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	15.053.400	121.088.428			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	15.053.400	121.088.428	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG BARAT
293	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.000.000	4.500.000			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	5.000.000	4.500.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	4.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
294	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	59.000.000	10.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	59.000.000	10.000.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	59.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
295	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000			KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG BARAT
						KECAMATAN WALENRANG TIMUR				1.650.967.000	1.790.723.617			

	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.650.967.000	1.790.723.617			
	7	01				KECAMATAN				1.650.967.000	1.790.723.617			
296	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.631.067.000	1.742.873.617			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.320.000	1.910.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	850.000	1.250.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	660.000	660.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	24 Dokumen	24 Dokumen	1.481.710.430	1.614.843.050			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.429.270.430	1.565.643.050	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	52.440.000	49.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	18 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket	7 Paket	91.507.170	86.214.367			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.705.493	3.839.680	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	0,00	3.225.010	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.223.500	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	23.714.377	27.020.877	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	60.463.800	26.510.400	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI				1.650.967.000	1.790.723.617			
297	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.631.067.000	1.742.873.617			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00			KECAMATAN WALENRANG TIMUR

	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01				KECAMATAN				1.650.967.000	1.790.723.617			
298	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.631.067.000	1.742.873.617			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	29.229.000	35.229.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	6.000.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.829.000	2.829.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	20.400.000	32.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.300.400	23.645.600			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	20.300.400	21.895.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
299	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	4.800.000	4.800.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.800.000	4.800.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
300	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000	38.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	10.000.000	38.000.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	38.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
301	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8 Desa	8 Desa	5.100.000	5.050.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8 Desa	8 Desa	5.100.000	5.000.000			KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	5.100.000	5.050.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
						KECAMATAN WALENRANG UTARA				2.922.281.259	3.126.944.065			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.922.281.259	3.126.944.065			
	7	01				KECAMATAN				2.922.281.259	3.126.944.065			
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.875.781.259	3.087.944.065			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	3.894.660	3.634.872			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.046.940	1.046.940	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.048.280	1.048.280	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.008.280	1.348.492	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	791.160	191.160	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.731.174.818	2.951.524.009			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.670.651.514	2.891.000.705	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54.120.000	54.120.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.060.000	850.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.343.304	3.343.304	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	26.624.906	32.235.839			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.305.816	2.860.464	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.240.090	18.701.845	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	12.079.000	5.633.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0,00	0,00			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	95.023.875	89.023.875			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	-	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.623.875	8.623.875	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.400.000	74.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	13.063.000	18.776.000			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	8.363.000	18.776.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	4.700.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
303	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	9.500.000	6.000.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	100 %	100 %	3.500.000	0,00			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	3.500.000	0,00	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
304	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	37.000.000	33.000.000			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	37.000.000	33.000.000			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.000.000	33.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN WALENRANG UTARA
						KELURAHAN BOSSO				268.000.000	271.370.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				268.000.000	271.370.000			
	7	01				KECAMATAN				268.000.000	271.370.000			
305	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	268.000.000	271.370.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	268.000.000	278.000.000			KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	268.000.000	271.370.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN WALENRANG UTARA
						KECAMATAN BUA				4.153.074.325	3.990.850.541			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.153.074.325	3.990.850.541			
	7	01				KECAMATAN				4.153.074.325	3.990.850.541			
306	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.107.762.925	3.919.603.757			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaandan Evaluasi kinerja Secara tepat waktu	100 %	100 %	1.200.000	2.000.000			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	100 %	3.921.754.526	3.687.630.749			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3.869.074.526	3.617.790.749	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	52.680.000	69.840.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	4.953.400	4.953.400			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.953.400	4.953.400	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	45.281.694	120.662.563			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	617.622	2.907.986	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.310.450	29.507.176	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1.826.140	13.852.885	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	904.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	6.557.132	16.423.616	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	15.466.350	23.431.450	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi perkantoran	100 %	100 %	123.493.995	117.279.125			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	154.870	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	24.939.125	28.479.125	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	98.400.000	88.800.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan Jasa pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	4 Unit	4 Unit	11.079.310	14.017.370			KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	11.079.310	14.017.370	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 0	0,00	0,00	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
307	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	9.158.000	10.036.000			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	100 %	9.158.000	10.036.000			KECAMATAN BUA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	7.158.000	8.036.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
308	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	1.500.000	4.060.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Oleh Kecamatan Dalam rangka Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum	100 %	100 %	1.500.000	4.060.000			KECAMATAN BUA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	4.060.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
309	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	32.653.400	55.150.784			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	32.653.400	55.150.784			KECAMATAN BUA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	32.653.400	55.150.784	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
310	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000			KECAMATAN BUA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	KECAMATAN BUA
						KELURAHAN SAKTI				272.799.974	281.000.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				272.799.974	281.000.000			
	7	01				KECAMATAN				272.799.974	281.000.000			
311	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	272.799.974	281.000.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	272.799.974	281.000.000			KECAMATAN BUA

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	272.799.974	281.000.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUA
						BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.419.331.373	5.474.675.514			
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.419.331.373	5.474.675.514			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.419.331.373	5.474.675.514			
312	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.120.745.842	2.999.708.486			
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	66.249.224	58.467.992			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	49.999.956	37.324.345	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.721	2.282.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.932	1.645.932	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.772	749.772	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.499.843	6.583.843	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 Jenis	4 Jenis	2.456.064.386	2.585.743.369			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2.228.716.222	2.363.600.205	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	147.360.000	147.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	34.999.664	29.794.664	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	44.988.500	21.208.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	2.665.000	2.665.000			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.665.000	2.665.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Jenis	2 Jenis	101.329.864	2.068.658			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	29.700.000	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	240 Dokumen	240 Dokumen	4.999.864	2.068.658	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	66.630.000	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	162.187.005	143.339.836			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.754.855	3.754.855	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	4.996.405	3.588.591	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.850.845	7.764.528	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	41.999.840	41.999.840	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	99.985.060	48.501.208	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 Unit	8 Unit	43.008.950	20.234.500			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	43.008.950	3.508.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	228.996.000	220.824.000			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.996.000	7.224.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	222.000.000	213.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	60.245.413	50.884.545			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	54.965.413	48.854.545	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	5.280.000	2.030.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
313	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	1.289.931.078	619.945.907			
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	321 Orang	73 Orang	1.289.931.078	650.499.665			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	200 Orang	18.570.718	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	30 Orang	20.860.860	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka								
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	73 Orang	1.249.999.500	619.445.907	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
314	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.212.327.199	1.180.029.904			
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Peningkatan Peran Parpol dan Pengembangan Etika Budaya Politik	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1.212.327.199	1.180.029.904			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	30 Orang	1.179.999.815	1.179.529.904	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang	21.838.160	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.989.224	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
315	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister	100 %	100 %	15.504.760	3.490.729			
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum	150 ormas	50 ormas	15.504.760	3.490.729			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	5.004.915	2.990.729	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.999.845	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
316	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	126.035.602	48.901.489			

	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	350 Orang	350 Orang	126.035.602	48.901.489			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	500.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	50 Orang	95.536.565	28.601.580	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 Orang	50 Orang	19.999.909	19.799.909	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.999.128	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
317	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	100 %	100 %	654.786.892	622.598.999			
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	654.786.892	622.598.999			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	50 Orang	44.296.270	22.100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.990.676	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	599.999.946	599.998.999	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
									J U M L A H	**1.611.922.078.660**	**1.593.287.451.679**			

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, penetapan Indikator Kinerja Daerah menjadi hal yang penting. Indikator ini bertujuan untuk mengukur pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Indikator Makro Pembangun, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Utama Pembangunan (IUP). Disamping indikator tersebut, terdapat indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) yang merupakan indikator wajib yang digunakan dalam mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Indikator Kinerja Daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan Gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa : Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator SPM dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/SDG's).

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan dan bidang pemerintahan. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator. Enam Indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah.

Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per kapita
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. PDRB Perkapita (ADHB)
7. Penurunan intensitas Emisi GRK
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
9. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi

Capaian dan target kinerja makro pembangunan secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Capaian dan Target Kinerja Indikator Makro
Tahun 2024-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,72	6,72	6,39
2	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	59,73	68,23	74,23	75,09
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,70	11,96	10,55	10,46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	2,12	3,2	3,05
5	Gini Ratio	Angka/Nilai	0,319	0,315	0,302	0,306
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka/Nilai	73,86	75,02	75,02	74,72
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.A	N.A	20,77	23,22
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	48,48	80,87	76,54	76,75
9	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi	%	3,29	N.A	3,298	3,3

Sumber Data : BPS dan RPJMD 2025-2029.

Data diatas menggambarkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu sebesar 4,36 % pada tahun 2024 dan ditarget 6,72% untuk tahun 2025

dan untuk perubahan RKPD tahun 2025, data ini diasumsikan tetap karena Pemerintah Kabupaten Luwu optimis terhadap laju pertumbuhan ekonomi hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya hampir seluru produksi sektor lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Penyebab kenaikan pada lapangan usaha ini disebabkan munculnya kegiatan-kegiatan hiburan baru seperti pasar malam, festival, dan event lari yang menjadi daya tarik pengunjung, selain itu pada lapangan usaha industry pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat karena ditunjang oleh aktivitas pengolahan mineral yang mulai aktif di PT Bumi Mineral Sulawesi.

Untuk data Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 4,14 dan ditargetkan menjadi 2,12% pada perencanaan RKPD tahun 2025 namun pada target perubahan RKPD 2025 setelah dilakukan evaluasi riil menjadi 3,2 % hal ini disebabkan oleh industri, pertanian dan UMKM local belum mampu menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan untuk menurukan Tingkat pengangguran terbuka secara drastis selain itu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, menyebabkan keterbatasan anggaran pada program penyerapa tenaga kerja, khususnya dibidang konstruksi banyak proyek padat karya serta proyek-proyek konstruksi yang sebelumnya direncanakan belum berjalan sesuai dengan rencana sehingga data tersebut dianggap terlalu ambisius.

Gini Ratio Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mencapai 0,319 data ini diasumsikan menurun menjadi 0,315 pada tahun 2025 dan Kabupaten Luwu optimis pada perubahan RKPD tahun 2025 menjadi 0,302, hal ini disebabkan oleh meningkatnya program kerja pemerintah Kabupaten Luwu terkait pemerataan pendapatan khususnya pada program bantuan sosial, pelatihan kerja, pengembangan UMKM serta pemberdayaan desa, diharapkan dengan program perematan pendapatan tersebut pendapatan Masyarakat mulai membaik sehingga ketimpangan bisa diperketat.

Pada data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu berhasil mencapai angka 73,86 pada tahun 2024 dan ditargetkan meningkat pada tahun 2025 menjadi 75,02 hal ini didorong oleh adanya peningkatan terhadap akses pendidikan termasuk beasiswa, adanya peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga menyebabkan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang menjadi kontributor besar dalam kenaikan IPM, selain itu pada akses layanan Kesehatan, kabupaten Luwu pada tahun 2025 telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), serta melakukan

penambahan tenaga Kesehatan serta peningkatan gizi Masyarakat yang mendorong kenaikan angka Umur Harapan Hidup (UHH).

PDRB per kapita kabupaten Luwu pada tahun 2024 mencapai 59,73 Juta Rupiah dan ditargetkan meningkat menjadi 68,23 Juta Rupiah pada tahun 2025, hal ini ditargetkan demikian karena meningkatnya investasi swasta khususnya pada bidang industri pengolahan di Kabupaten Luwu, berbagai program peningkatan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten serta dengan peningkatan infrastruktur daerah untuk mendorong peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Luwu.

Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 0,64 % dan ditargetkan menjadi 2,5 % pada tahun 2025 hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah pusat (BI dan Kemenkeu) yang menetapkan inflasi tahunan ideal dikisaran 2,5+1% untuk tahun 2025, sehingga daerah menyelaraskan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengatahui hasil dari pelaksanaan tujuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel. 6.2
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2026

Indikator (RPD 2025-206)	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026	Indikator (RPJMD 2025-2029)	Satuan	Target RPJMD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
			RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025					
1. Indeks Reformasi Birokrasi	*Indeks*	60,80	67,51 (B)	67,51 (B)	67,51 (B)	1. PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	74,23	74,23
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	*Indeks*	60,231	61,46	60,256	80,37	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	*%*	6,12	6,12
3. Maturitas SPIP	*Level*	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	*%*	3,2	3,2
4. Indeks Pelayanan Publik	*Indeks*	3,84	78,99	3,98	3,45	4. Pengeluaran perkapita	*Rp Juta*	12.482	12.482
5. Gini Ratio	*Indeks*	0,319	0,315	0,302	0,306	5. Tingkat Kemiskinan	*%*	10,55	10,55
6. Tingkat Kemiskinan	*Persentase*	11,70	11,96	10,55	10,46	6. SAKIP	*Skor*	62,3	62,3
7. Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja	*Persentase*	N.A	7,01	7,01	7,01	7. Indeks Pengelola Keuangan Daerah	*Skor*	80,37	80,37
8. Indeks Desa Membangun	*Nilai*	0,7032 (Berkembang)	0,710	0,710	0,710	8. Indeks Inovasi Daerah	*Skor*	44,4	44,4
9. Indeks Daya Saing Daerah	*Indeks*	3,23	3,20	3,47	3,77	9. Indeks Pembangunan Manusia	*Poin*	74,02	74,02
10. Pertumbuhan Investasi	*Persentase*	-50	46,87	46,87	5,7	10. Indeks Ekonomi Hijau	*Skor*	50,22	50,22
11. Pertumbuhan Ekonomi	*Persentase*	4,36	7,89	6,12	6,39	11. Indeks Ekonomi Biru	*Skor*	101,14	101,14
12. Indeks Pembangunan Manusia	*Indeks*	73,86	75,02	74,02	74,72	12. Produktivitas Pertanian	*Ton/ha*	6,5	6,5
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*Indeks*	48,48	80,03	76,54	77,02	13. Produktivitas Perikanan Budidaya	*Ton/ha*	10,22	10,22
14. Indeks Risiko Bencana Indonesia	*Indeks*	187,91	160,34	160,34	188	14. Indeks Ketahanan Pangan	*Skor*	82,77	82,77
15. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	*Ton Co2 eq*	228.550,873	219.023	230.575,08	1.352.591,38	15. Tingkat Konektivitas Wilayah	*%*	14,02	14,02
16. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	*Indeks*	78,21	80,21	80,21	80,21	16. Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	*%*	10,66	10,66
						17. Persentase desa mandiri	%	19,32	19,32
						18. Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	20,77	20,77
						19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,54	76,54

Sumber : BPS dan Tim Pengelola Data RKPD Perubahan 2025

Data yang tertuang dalam tabel di atas bersumber dari data BPS, dan RPJMD 2025-2029, data ini merupakan gambaran kondisi capaian pada tahun 2024, yang akan menjadi baseline perencanaan dan perkiraan capaian tahun 2025 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2025.

6.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 serta target pada perubahan RKPD Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu
Tahun 2024 - 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,36	7,89	6,12	7,89	BPS
2	Laju Inflasi	%	1,87	3	2,5	3	BPS
3	PDRB per kapita	Juta Rp	59,73	68,23	63,89	68,23	BPS
4	Angka Melek Huruf	%	95,07	100,00	100	100	BPS
5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	9,05	9,05	9,05	BPS
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	15,32	14,54	15,32	BPS
7	Angkat Harapan Hidup	Tahun	71,23	71	71,89	71,89	BPS
8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.1	0,03	0,03	0,03	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	N.A	4,23	4,23	4,23	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	N.A	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,31	76,89	68,47	76,89	Dinas Ketenagakerjaan dan Tramigrasi
12	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	65,48	67,43	67,43	67,43	Dinas Ketenagakerjaan dan Tramigrasi
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	14,11	10,62	14,39	10,62	Dinas Sosial
15	Penguatan cadangan pangan	%	N.A	51,82	51,82	51,82	Badan Pendapatan Daerah
16	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	N.A	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
17	Ketersediaan pangan utama	%	75,01	73,16	100	73,16	Dinas Ketahanan Pangan
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	51,73	51,75	51,75	51,75	BPS
19	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,09	11,73	11,73	11,73	BPS
20	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,09	6,98	6,98	6,98	BPS
21	Pertumbuhan Industri	%	5,09	7	5,14	7	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	1.024,293	1.047,74	1.047,74	1.047,74	BPS
2	Nilai tukar petani		100,66	-	-	-	Dinas Pertanian
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	45,26	58,13	58,13	58,13	BPS
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	N.A	96,28	96,28	96,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)	%	-0,15	0,98	0,98	0,98	BPS
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	BPS
7	Rasio ketergantungan	%	45,51	45,02	45,02	45,02	BPS
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
A	**URUSAN WAJIB DASAR**						
1.	**PENDIDIKAN**						
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**%**	93,53	100	100	100	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi kasar:						
3	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	99,46	100	100	100	Dinas Pendidikan
4	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	99,46	100	100	100	Dinas Pendidikan
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	79,47	100	100	100	Dinas Pendidikan
6	Angka Partisipasi Murni :						
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	79,57	100	100	100	Dinas Pendidikan
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	76,53	100	100	100	Dinas Pendidikan
9	Angka partisipasi sekolah :						
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	89,41	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	97,60	100	100	100	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
12	Angka Putus Sekolah:						
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	2,56	0	0	0	Dinas Pendidikan
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,80	0	0	0	Dinas Pendidikan
15	Angka Kelulusan:						
16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,00	100	100	100	Dinas Pendidikan
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,86	100	100	100	Dinas Pendidikan
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,00	100	100	100	Dinas Pendidikan
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	N/A	100	N/A	100	Dinas Pendidikan
20	Fasilitas Pendidikan:						
21	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	86,73	60,43	96,00	62,23	Dinas Pendidikan
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	42,18	14.000	1 : 1	14.000	Dinas Pendidikan
23	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	807,36	500	1 : 1	500	Dinas Pendidikan
24	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,24	106,04	100	106,04	Dinas Pendidikan
25	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	171,9	100	100	100	Dinas Pendidikan
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	N/A	75,00	95,00	75,00	Dinas Pendidikan
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	54,09	100	100	100	Dinas Pendidikan
28	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	N.A	100	100	100	Dinas Pendidikan
29	Jumlah Kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang ditetapkan	Kurikulum	2	100	2	100	Dinas Pendidikan
30	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	54,09	100	100	100	Dinas Pendidikan
31	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	71,87	2	100	2	Dinas Pendidikan
32	Rata-rata kemampuan literasi	%	57,25	43,87	100	45,00	Dinas Pendidikan
33	Rata-rata kemampuan numerasi	%	56,68	27,02	100	27,80	Dinas Pendidikan
34	Persentase Kurikulum yang dikembangkan	%	20	100	100	100	Dinas Pendidikan
35	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,96	99	100	99,56	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
36	Persentase kegiatan pengendalian perizinan pendidikan	%	100,00	100	100	100	Dinas Pendidikan
2.	**KESEHATAN**						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	11.40	100	63	100	Dinas Kesehatan
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98.86	5,60	100	5,60	Dinas Kesehatan
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	2,37	5,35	2	5,35	Dinas Kesehatan
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10,39	45,15	10,18	45,15	Dinas Kesehatan
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	166,29	0,03	7	0,03	Dinas Kesehatan
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	15,11	0,0007	16	0,0007	Dinas Kesehatan
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0.00062	0,0000054	0.006	0,0000054	Dinas Kesehatan
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0.00001	0,00013	0,00013	0,00013	Dinas Kesehatan
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0.00030	0,002645	0.00032	0,002645	Dinas Kesehatan
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0.00470	78,37	0,0049	78,37	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	73,34	99,1	80,00	99,1	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	58,52	96,8	59,00	96,8	Dinas Kesehatan
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,80	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	NA	100	NA	Dinas Kesehatan
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)	%	N.A	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	4,30	3	8,00	3	Dinas Kesehatan
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	848	65,45	1584	65,45	Dinas Kesehatan
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	227,26	130	190	130	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	64	0	27	0	Dinas Kesehatan
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85,1	100	90	100	Dinas Kesehatan
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	96,0	99,97	99,97	99,97	Dinas Kesehatan
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.26.	Angka kejadian Malaria		0,37	140	0,23	140	Dinas Kesehatan
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	100	0	100	Dinas Kesehatan
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Angka	2,57	0	2,79	0	Dinas Kesehatan
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	61,36	100	61	100	Dinas Kesehatan
2.35.	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	56,39	52,28	52,28	52,28	Dinas Kesehatan
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	53,56	96,12	54	96,12	Dinas Kesehatan
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	58,68	100	59	100	Dinas Kesehatan
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	32,91	65,89	65,89	65,89	Dinas Kesehatan
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	74,10	78,98	74,89	78,98	Dinas Kesehatan
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.42.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,50	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.46.	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	22	22	22	22	Dinas Kesehatan
2.47.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,94	80	90,07	80	Dinas Kesehatan
2.48.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,091	0,0006	0,10	0,0006	Dinas Kesehatan
2.49.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.50.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,82	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.51.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,63	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.52.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,29	93	100	93	Dinas Kesehatan
2.53.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,30	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.54.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,16	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.55.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,97	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.56.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,01	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.57.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,89	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.58.	Persentanse ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99,03	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.59.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	82,10	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.60.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	75,60	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.61.	Rata-rata indicator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	94,86	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.62.	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	%	94	78,91	100	79,56	Dinas Kesehatan
2.63.	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,5219	0,021	0,55	0,027	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
2.64.	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.65.	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	30,67	34,95	32,54	34,95	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	24,11	24,01	25,85	24,01	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,88	88,80	77,15	88,80	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	7,71	0	7,71	0	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,19	42,99	70,04	42,99	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,41	88,35	82,05	88,35	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	70,12	71,96	70,63	71,96	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	5,65	6,95	6,00	6,95	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	47,30	50,91	48,10	50,91	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.12.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	N.A	9,01	N.A	9,01	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	N.A	0,0000057	N.A	0,0000057	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.14.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasi lpemotretan citra satelit dan	Angka	0,561	0,372	0,561	0,372	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	survei foto udara terhadap luas daratan						
3.15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	5,62	33,57	5,69	33,57	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.16.	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	33,92	35,00	34,12	35,00	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.17.	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	%	0,5884	0,87	0,6621	0,87	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.18.	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	10,43	3,308	10,51	3,308	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.19.	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	2074	N.A	2374	N.A	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.20.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	50,75	95,00	50,95	95,00	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.21.	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	1	10	4	10	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.22.	Presentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	0,12	100,00	0,13	100,00	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.23.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	10,90	9,01	10,66	9,01	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.24.	Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman panati di WS	%	13,78	88,00	13,78	88,00	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.25.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	80,41	81,65	81,02	81,65	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.26.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	75,98	7,97	75,99	7,97	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.27.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	40	21,24	40	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.28.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	100	0,02	100	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
3.29.	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)	%	80,41	6,20	81,02	6,20	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.30.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	75,98	36,76	75,99	36,76	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**						
4.1.	Rasio rumah layak huni	Unit/Jiwa	0,199	0.244	0,1995	0.244	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,07	0.061	0,066	0.061	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3.	Rasio permukiman layak huni	%	0,971	1.172	0,972	1.172	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,64	106.998	89,14	106.998	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	80,32	95.566	80,75	95.566	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,14	0.291	0,29	0.291	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	6,22	4.553	4,78	4.553	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	5.997	5.920	5.762	5.920	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N.A	90.617	N.A	90.617	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.10.	Jumlah kawasan kumuh Kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	0	6,89	2.44	6,89	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.11.	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.12.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.13.	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	N.A	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
4.14.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0,07	5.65	2.44	5.65	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.15.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10.86	0.138	10.39	0.138	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.16.	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10.86	9,93	10.39	9,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.17.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.18.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan iban rumah yang layak huni	%	N.a	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.19.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0	6,02	2.44	6,02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.20.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	3.96	80,20	6.18	80,79	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.21.	Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	88,00	50	88,00	50	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	66,14	95,00	100	95,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.4.	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	120	15 menit	120	15 menit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	%	26,67	80,00	77,78	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	84,26	87	85	87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	%	85,00	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.11.	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	30	100	40	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.12.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	90	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.13.	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	95	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.14.	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.15.	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	75	100	80	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.16.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.17.	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	90	90	90	90%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.18.	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.19.	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	23,52	91,50	91,50	91,50%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.20.	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.21.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	63.238	356.275	91.751	356.275	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.22.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	92.882	95.207	95.207	95.207	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.23.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	3.335	44.595	7.151	44.595	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.24.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	92,35%	100	92,35%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.25.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6.	**SOSIAL**						
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	54	99	60	99	Dinas Sosial
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	54	98	60	98	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	54	99	54	99	Dinas Sosial
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,63	0,66	0,65	0,66	Dinas Sosial
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	88	100,00	88	100,00	Dinas Sosial
6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	98	100	98	Dinas Sosial
6.7.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	95	98	97	98	Dinas Sosial
6.8.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	81	-	84	-	Dinas Sosial
6.9.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%		99		99	Dinas Sosial
6.10.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N.A	-	N.A	-	Dinas Sosial
6.11.	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	%	93,12	99	100	99	Dinas Sosial
6.12.	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	%	23,41	100	100	100	Dinas Sosial
6.13.	Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.14.	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Sosial
6.15.	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.16.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.17.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.18.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	76,25	100	81	100	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
6.19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	56,09	81	62	81,3	Dinas Sosial
6.20.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.21.	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	%	60,63	100	100	100	Dinas Sosial
B.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**						
1.	**TENAGA KERJA**						
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	20,97	7,41	21,43	7,41	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	77,94	80,01	78,25	80,01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.5.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,93	55,60	56,00	55,60	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	25,57	n.a	27,25	n.a	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.8.	Perluasan kesempatan kerja sector formal maupun informal	%	66,07	41,12	66,75	41,12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.9.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	46,15	n.a	48,20	n.a	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.10.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	50,64	57,10	52,77	57,10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.11.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	61,90	70,50	62,52	70,50	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.12.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan	%	16,85	111,04	18,50	111,04	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
1.13.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	20,97	52,10	21,43	52,10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.14.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	50,64	90,32	52,77	90,45	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.15.	Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	%	61,90	71,12	62,52	71,89	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.16.	Persentase Besaran Pencarian Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	20,97	3,20	21,43	4,05	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.17.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	16,85	100	18,50	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,12	66	15	66	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	2,86	7	2,91	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	N.A	N.A	7,10	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.	Rasio KDRT	%	1	0,05	1	0,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	N.A	23	N.A	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan	%	0	95	0	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit						Perlindungan Anak
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0	75	0	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	95	100	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	75	100	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	75	0	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.16.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.17.	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.18.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.20.	Indeks Pembangunan Gender	%	92,80	92,60	93,00	92,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.21.	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga						Perlindungan Anak
2.22.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.23.	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.24.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,91	0,26	4,95	0,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.25.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,017	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.26.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	1,58	2,17	1,05	2,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.27.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	20	0,30	22	0,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.28.	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	%	N.A	70,06	N.A	81,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.29.	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.30.	Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	%	N.A	84,01	N.A	85,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.31.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	**PANGAN**						
3.1.	Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/ Hari	75.009,25	2.580	75.100,08	73.169	Dinas Ketahanan Pangan
3.2.	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/ Kapita / Hari	56,80 (99,65 %)	62,85	62,00 (108,77 %)	3.500	Dinas Ketahanan Pangan
3.3.	Tingkat Konsumsi Energi	Gr/ Kapita / Hari	1.789	0,698	2.300	71	Dinas Ketahanan Pangan
3.4.	Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	%	24	6,61	32	70	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
3.5.	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	%	80,18	80,27	80,27	3.500	Dinas Ketahanan Pangan
3.6.	Persentase Keamanan Pangan yang diuji	%	N.A	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
4.	**PERTANAHAN**						
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	4,93	10%	4,96	10%	Dinas Pertahanan
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	66	20%	90	20%	Dinas Pertahanan
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	N.A	-	N.A	-	Dinas Pertahanan
4.4.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N.A	-	N.A	-	Dinas Pertahanan
4.5.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	N.A	5.000 M2	N.A	5.000 M2	Dinas Pertahanan
4.6.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Pertahanan
4.7.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Pertahanan
4.8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66	100	68	100	Dinas Pertahanan
4.9.	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66	100	68	100	Dinas Pertahanan
4.10.	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Pertahanan
4.11.	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	100	0,2	100	0,36	Dinas Pertahanan
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada	ada	Dinas Lingkungan Hidup
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	0	52,50	77,28	52,50	Dinas Lingkungan Hidup
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	92,44	93,65	80,41	93,65	Dinas Lingkungan Hidup
5.6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	50,43	74,22	68,09	74,22	Dinas Lingkungan Hidup
5.7.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten :						
5.8.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	0	2	0	2	Dinas Lingkungan Hidup
5.9.	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standard Minimun	Jumlah	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.10.	Penetapan hak MHA	Jumlah	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.11.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Tidak ada	0	Tidak Ada	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.12.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.13.	Timbulan sampah yang ditangani	%	79,11	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.14.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	0,2	0	1,0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.15.	Persentase cakupan area pelayanan	%	50	0	50	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.16.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	79,11	0	50	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.17.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	30	Tidak Ada	30	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5.18.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	100	0	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.19.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	73	0	73	Dinas Lingkungan Hidup
5.20.	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	27	100	27	Dinas Lingkungan Hidup
5.21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	48,48	50	76,54	50	Dinas Lingkungan Hidup
5.22.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Terlaksana/ Belum	Belum	Belum	Belum	Terlaksana	Dinas Lingkungan Hidup
5.23.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	%	100	58	100	58	Dinas Lingkungan Hidup
5.24.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	77,71	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.25.	Indeks kualitas air	Indeks	0	0		0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
5.26.	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah B3)	%	38,37	100	39,28	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.27.	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%	54,31	72,35	55,62	72,35	Dinas Lingkungan Hidup
5.28.	Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan	%	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.29.	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	100	2,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.30.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	7,26	100	8,14	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.31.	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	79,11	99,21	82,11	99,21	Dinas Lingkungan Hidup
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
6.1.	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	86,34	100	98,85	0,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2.	Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,73	22	34,00	0,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	93,21	100	97,42	0,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	92,47	0,51	48,10	0,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	2,86	100	3	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6.	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	%	100	100	100	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	86,34	0,99	86,40	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.8.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	76,48	0,80	76,52	98,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.9.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	97,39	0,96	97,42	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.10.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	48,05	0,50	49,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
6.11.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.12.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	23,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.13.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	86,34	90,00	86,40	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.14.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	97,39	98,50	97,42	0,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.15.	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100	100,00	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.16.	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	100	100,00	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	60,38	100	72.46	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	44	228	66	228	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	22	229	30	229	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.4.	Persentase LSM aktif	%	2	70,01	5	70,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	411	100	411	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	80	418	100	418	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.9.	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	0	20	0	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.10.	Jumlah desa tertinggal	Jumlah	41	10	20	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.11.	Jumlah status desa mandiri	Jumlah	30	10	115	10	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
7.12.	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	100	74	80	74,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.13.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	19,8	97,21	30	98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.14.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	14,49	6,23	70	7,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.15.	Persentase peningkatan status desa maju	%	39,13	6,21	60	6,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.16.	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	0	56,09	0	57,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	1,34	0,81	1,30	2,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,33	2,60	2,35	32,14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	62	10,00	65	30,02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	N/A	-	N/A	84,70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	0	-	0	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	3	2,00	3	2,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.7.	Ratio Akseptor KB	Rasio	73,39	80,00	75	80,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,07	70,50	68	70,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0,35	10,00	0,34	10,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
8.10.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,26	11,50	9,25	11,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,94	27,00	27	27,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.12.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	24,94	128,00	100	128,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50,64	67,00	53	67,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	29,91	65,00	30	65,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	7,19	43,00	10	43,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.16.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	22	11,00	22	11,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.17.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	136,36	172,00	100	172,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.18.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	90	100	95	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.19.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	26,70	-	28	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.20.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100,00	100	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	143,44	138,00	100	138,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.22.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	60,00	100	60,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.23.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	21	21	21	21	Dinas Pengendalian Penduduk dan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
							Keluarga Berencana
8.24.	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	58,44	-	50	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.25.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	50,25	-	60	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.26.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	33,56	-	25	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.27.	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	45,00	45,00	45	45,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	**PERHUBUNGAN**						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum		203.714	455.874	205000	455.874	Dinas Perhubungan
9.2.	Rasio ijin trayek	%	0	0,65	0	0,65	Dinas Perhubungan
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	978	2.172	1300	2.172	Dinas Perhubungan
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	1/1/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	Dinas Perhubungan
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	29,41	9,35	32	9,35	Dinas Perhubungan
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	72,4	39,45	75	39,45	Dinas Perhubungan
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	62,3	22,35	65	22,35	Dinas Perhubungan
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,03	0,07	0,03	0,07	Dinas Perhubungan
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	203.714	451.645	205000	451.645	Dinas Perhubungan
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	218.286	451.645	220.000	451.645	Dinas Perhubungan
9.11.	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah	7	28	15	28	Dinas Perhubungan
9.12.	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah	0	1	2	1	Dinas Perhubungan
9.13.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,62	0,50	0,62	0,50	Dinas Perhubungan
9.14.	Kinerja lalu lintas kabupaten	Rasio	0,62		0,62	0,62	
9.15.	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,591	0,57	0,596	0,57	Dinas Perhubungan
9.16.	V/C Ratio di Jalan kabupaten	%	0,48	0,9	0,49	0,9	Dinas Perhubungan
9.17.	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	%	0	91,02	1	91,02	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	35	40	40	40	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	90	87	92	87	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	84.21	92	84.62	92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	67.01	85	67.25	85	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	60	65	65	65	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.6.	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	11	14	11	14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.7.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	8	14	8	14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.8.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	19.298	75	19.298	75	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.9.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	65	81	67	81	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.10.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.11.	Persentase Website OPD	%	51.42	70	51.42	70	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.12.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	19.29	75	19.29	75	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.13.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	43	85	43	85	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10.14.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	%	80	92	82,23	92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
11.1.	Persentase Koperasi Aktif	%	41,62	27,09	50,00	27,31	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.2.	Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala	%	50,00	21,00	53,33	21,06	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.3.	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	1,67	25,62	4,69	26	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.4.	Persentase koperasi yang berkualitas	%	11,17	27,34	39,06	27,90	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.5.	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dibina	%	90	35,21	100	35,67	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.6.	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%	6,40	25,98	8,02	26	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.7.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	8.538	8.688	8.688	8.688	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.8.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	6,84	8,16	8,16	8,16	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.9.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18	18	18	18	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
11.10.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6,40	8,02	8,02	8,02	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
12.	**PENANAMAN MODAL**						
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	2897	14	3000	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	Rp 5.079.994.633.736	18,42	Rp 11.802.249.288.362	18,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	Rp 2.570.000	17,89	Rp 500.000	17,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.4.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jenis Bank	12	7	14	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	1	2	1	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
12.6.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Penginapan	22	14	22	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.7.	Lama Proses Perizinan	Hari	2	1-15	2	1-15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.8.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	4	1	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.9.	Jumlah Macam Pajak	Jenis	N.A	7	N.A	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.10.	Jumlah Macam Retribusi	Jenis	N.A	3	N.A	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.11.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	10.353	21,78	11.000	21,78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.12.	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,8	88,15	88,15	88,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.13.	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	25	85,00	70	85,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.14.	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	44	14,00	40	14,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.15.	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	98	65,00	99	65,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.16.	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	1	75,00	50	75,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.17.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	N.A	11,21	N.A	11,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
12.18.	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	90	100	95	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.19.	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Indeks	93,21	88,23	95	88,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.20.	Cakupan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	97	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.21.	Persentase Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	%	98	100	99	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100%	100	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	0	100%	100	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	58	50%	60	50%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	100%	50	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	9	60	12	60	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	5	20	5	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	51	24	51	24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	3	7	6	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Kegiatan	2	7	5	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.10.	Jumlah Organisasi Olah Raga	Organisasi	3	24	3	24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.11.	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.12.	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	0	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.13.	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Cabang	4	15	5	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.14.	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	30	25	30	25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.15.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Gedung	0	3	2	4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
13.16.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	0	11	2	11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.17.	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	%	50	90	60	90	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.18.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3.05	90	20	90	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.19.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	3,78	90	10	90	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.20.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3.78	100	10	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.21.	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	0	85,76	10	86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.22.	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	0	90,21	100	90,36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14.	**STATISTIK**						
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.4.	Buku ”PDRB”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15.	**PERSANDIAN**						
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangak Kurang/ Kurang/ Cukup/ Baik/	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
		Sangat Baik					
15.3.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16.	**KEBUDAYAAN**						
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	3	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	8	2	9	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	0	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	17	2	18	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.5.	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	70,57	90,99	71,28	91,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.6.	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	%	77,24	91	77,89	91,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.7.	Persentase Pembinaan Sejarah	%	0	81		81,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.8.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	68,61	100	75,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	**PERPUSTAKAAN**						
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	15.399	7.321	18.479	7.321	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.273.950	52.377	1.274.350	52.377	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	3,48	0,80	3,48	0,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Orang	1.283	2.505	1.540	2.505	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	52.067	52.377	52.267	52.377	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	12	42	14	42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Unit	113	2	113	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Unit	-	1	-	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Unit	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.10.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,35	60	65,35	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.11.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	62,35	55	64,28	55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
17.12.	Persentase pertumbuhan kegemaran membaca masyarakat	%	30,71	0,84	32,86	0,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	**KEARSIPAN**						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80	53,95	80	54,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang	7	7	7	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Arsip	7	4	8	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Sarana	12	13	13	13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.5.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dokumen	-	13	-	14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.6.	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dokumen	-	14	-	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C.	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**						
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.1.	Produksi perikanan	ton	671.054,41	724,73	678.436, 01	724,73	Dinas Perikanan
1.2.	Konsumsi ikan	%	56,26	57,98	57,39	57,98	Dinas Perikanan
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,26	10	10,00	10	Dinas Perikanan
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	9.166,83	48,60	9.304,33	48,60	Dinas Perikanan
1.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100	19.249,44	100	19.249,44	Dinas Perikanan
1.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	0	N.A	0	N.A	Dinas Perikanan
1.7.	Nilai tukar nelayan	Indeks	109,22	110,39	110,2	110,39	Dinas Perikanan
1.8.	Persentase produksi perikanan tangkap	%	0,33	102,09	1,50	102,67	Dinas Perikanan
1.9.	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	0,64	100	0,50	100	Dinas Perikanan
1.10.	Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan	%	0	25,90	0	26,09	Dinas Perikanan
1.11.	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	0	51,20	0	51,89	Dinas Perikanan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
2.	**PARIWISATA**						
2.1.	Kunjungan wisata	Kunjungan	58	10.000	100	10.000	Dinas Pariwisata
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	1	5	2	5	Dinas Pariwisata
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	3,76	0,031	4	0,031	Dinas Pariwisata
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Objek	11	12	11	12	Dinas Pariwisata
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Objek	27	28	27	28	Dinas Pariwisata
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Objek	21	21	21	21	Dinas Pariwisata
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Objek	5	8	5	8	Dinas Pariwisata
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar	Objek	0	4	1	4	Dinas Pariwisata
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Objek	1	2	1	2	Dinas Pariwisata
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Objek	5	2	5	2	Dinas Pariwisata
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Objek	0	4	1	4	Dinas Pariwisata
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Objek	1	2	2	2	Dinas Pariwisata
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	Objek	3	4	3	4	Dinas Pariwisata
2.14.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	100%	1	100%	Dinas Pariwisata
2.15.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten	%	-0,8	100%	1	100%	Dinas Pariwisata
2.16.	Tingkat hunian akomodasi	%	0,38	100%	0,40	100%	Dinas Pariwisata
2.17.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,29	100%	0,3	100%	Dinas Pariwisata
2.18.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,001	100%	0,2	100%	Dinas Pariwisata
2.19.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	-0,8	0,89	0,1	0,90	Dinas Pariwisata
2.20.	Tingkat hunian akomodasi	%	0,38	50,23	0,40	50,34	Dinas Pariwisata
2.21.	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	0,012	0,04	0,02	0,054	Dinas Pariwisata
2.22.	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	0	10,56	1	10,98	Dinas Pariwisata
3.	**PERTANIAN**						
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.249.42	1.134.115,00	1.132.435,00	1.134.115,00	Dinas Pertanian
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	7,00	26,55	26,54	26,55	Dinas Pertanian
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.631.475,00	2.641.275,00	2.635.435,00	2.641.275,00	Dinas Pertanian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	53,21	62,75	62,40	62,75	Dinas Pertanian
3.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	-	-	-	-	Dinas Pertanian
3.6.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6,1	6,6	6,2	6,6	Dinas Pertanian
3.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	4,18	12,50	10	12,50	Dinas Pertanian
3.8.	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,1	6,6	6,5	6,6	Dinas Pertanian
3.9.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22,32	10	11	10	Dinas Pertanian
3.10.	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	0,17	2,34	2,34	10,76	Dinas Pertanian
3.11.	persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	-1,99	2,50	2,50	11,89	Dinas Pertanian
3.12.	Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	16,09	4,12	4,12	10	Dinas Pertanian
3.13.	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5,53	11,80	11,80	9,21	Dinas Pertanian
3.14.	Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik	%	28,47	0,25	30	0,26	Dinas Pertanian
3.15	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22,32	11	11	11,20	Dinas Pertanian
3.16	Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan	%	100	100	100	100	Dinas Pertanian
3.17	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	%	100	100	100	100	Dinas Pertanian
6.	**PERDAGANGAN**						
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	291.417.313.600	295.800.000.6000	295.800.000.6000	300.670.000.700	Dinas Perdagangan
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	N.A	-	N.A	-	Dinas Perdagangan
6.3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Perdagangan
6.4.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%	97	52,98	97	53,67	Dinas Perdagangan
6.5.	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	90,67	90,67	92	91	Dinas Perdagangan
6.6.	Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun	%	N.A	20,67	N.A	20,01	Dinas Perdagangan
6.7.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,29	100	99,30	100	Dinas Perdagangan
6.8.	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	%	N.A	0,80	N.A	0,97	Dinas Perdagangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
6.9.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90,67	100	100	100	Dinas Perdagangan
6.10.	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan	%	N.A	100	N.A	100	Dinas Perdagangan
7.	**PERINDUSTRIAN**						
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	5,09	7,5	5,14	7,5	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	7	40	10	40	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	kemasan	21	20	22	20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.4.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Industri	115	140	120	140	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	100	5	100	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	N.A	78	N.A	78	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A	N.A	N.A	N.A	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.8.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	N.A	100	N.A	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.9.	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	%	1	100%	1	100%	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.10.	Tersedianya informasi industry lengkap dan terkini	%	75	100	80	100	100 Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	**TRANSMIGRASI**						
8.1.	Transmigran swakarsa	KK	26	50	26	50	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	184,5	104	184,5	104	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	254	254	254	Dinas Ketenagakerjaa

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
							n dan Transmigrasi
8.4.	Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
D.	**PENUNJANG URUSAN**						
1	**PEMERINTAHAN**						
1.1.	Nilai LPPD	Angka	**3,70**	2,95	**3,75**	2,95	Sekretariat Daerah
1.2.	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
1.3.	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
1.4.	Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	%		0,56		0,56	Sekretariat Daerah
1.5.	Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	%	100	81,23	100	81,23	Sekretariat Daerah
1.6.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
1.7.	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
1.8.	Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD	%	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
2	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**						
2.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
2.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.8.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
2.9.	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
3	**KEUANGAN**						
3.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
3.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,08	1,85	0	1,85	BKAD
3.3.	Persentase belanja pendidikan	%	30,01	30,84	27,82	30,84	BKAD
3.4.	Persentase belanja kesehatan	%	22,27	18,49	24,27	18,49	BKAD
3.5.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0	0,20	0,52	0,20	BKAD
3.6.	Persentase Belanja Operasi	%	66,75	63,44	69,59	63,44	BKAD
3.7.	Persentase Belanja Modal	%	17,08	17,54	12,94	17,54	BKAD
3.8.	Persentase Belanja Tidak Terduga	%	0,08	0,10	1,71	0,10	BKAD
3.9.	Persentase Belanja Transfer	%	16,09	18,61	15,76	18,61	BKAD
3.10.	Penetapan APBD	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
3.11.	Rasio PAD	%	14,11	18,14	14,39	20,21	Bapenda
3.12.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
3.13.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2,62	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
3.14.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	3,88	96 %	0,33	96 %	BKAD
3.15.	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
3.16.	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100	100	100	100	BKAD
3.17.	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	98	96,23	98	97	BKAD
3.18.	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	99	100	99	100	BKAD
3.19.	Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	%	100	98,45	100	99	BKAD
3.20.	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	99	100	99	100	BKAD
3.21.	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	97,41	91,21	99,36	91,39	BAPENDA
3.22.	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	78,99	99,02	80,57	99,42	BAPENDA

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
3.23.	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	91,23	91,23	91,83	91,83	BAPENDA
3.24.	Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	94,45 & 94,31	80,34	100 & 96,20	80,61	BAPENDA
4	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
4.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	16,23	7,05	42,73	7,05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,48	13,88	13,88	13,88	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,33	40	10,68	40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	38	215	40	215	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	198	4000	212	4000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3.709	0,25	3.592	0,25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.7.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompotensi	%	100	N.A	100	N.A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.8.	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat tehnis dan diklat managerial	%	2,59	N.A	6,44	N.A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.9.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	95	111	100	111	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.10.	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,293	570	0,293	570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.11.	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,243	570	0,243	570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.12.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	570	100	570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
4.13.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	%	1,12	1,12	1,12	1,23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.14.	Rasio Pegawai Fungsional	%	0,96	0,96	1,01	1,01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.15.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	0,51	0,52	0,80	0,80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.16.	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	95	96	96,51	96,51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
5.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
5.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
5.3.	PENERAPAN SIDa :		100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
5.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
5.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
5.6.	Hasil kelitbangan utama	Rekomendasi	1	1	1	1	Badan Perencanan Pembangunan dan Litbang Daerah
6	**PENGAWASAN**						
6.1.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	90	92,3	90	94	Inspektorat
6.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	85	92,3	85	94	Inspektorat
6.3.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90	92,3	90	94	Inspektorat
6.4.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100	93,3	100	94	Inspektorat
6.5.	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	100	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025		
6.6.	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	90	100	90	100	Inspektorat
6.7.	Jumlah temuan BPK	temuan	16	9	9	7	Inspektorat
7	**KECAMATAN**						
7.1.	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
7.2.	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
7.3.	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
7.4.	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
7.5.	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan

Sumber : BPS & Hasil olah data Tim Penyusun Tahun 2025.

6.4. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) adalah indikator yang digunakan untuk termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, indikator ini digunakan untuk menciptakan intergasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun capaian Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Luwu, termuat dalam tabel berikut :

Tabel 6.4
Capaian dan Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan
Tahun 2024-2026

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota		Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,52	73,83	74,15
	2	Kesehatan Ibu dan Anak			
		a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	58,52	59	59
		b) Jumlah Kematian ibu	8	7	6
		c) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	32,1	22,34	20,33
	3	Penangan Tuberkulosis			
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) %	54	56,77	59,88
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	92,96	93,52
	4	Cakupan kepersetaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,42	90,00	91,00
2. Pendidikan Berkualitas yang merata	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk			
		i) Literasi Membaca	65,59	66,78	68,36
		ii) Numerasi	65,19	65,89	67,94
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,91	9,07	9,16
		c) Harapan Lama Sekolah	14,39	14,54	14,72

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota		Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
	6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	15,41	17,50	19,00
	7	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (Sumber BPS)	96,51	98,31	99,36
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	11,71	10,55	10,46
		b) Indeks Gini	0,319	0,329	0,326
	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,029	0,1	0,12
	10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	58,06	95	95,3
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)			
	12	Pengembangan Pariwisata			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum (%)	0,8	0,0088	0,0098
		b) Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)/Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara	55.354	56.120	56.500
	13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/Kota	67	87	107
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
		a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	2.373	2.466	2.569
		b) Persentase koperasi sehat di Kab/kota	24	28	32
		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-6,3463	-6,227	-6,109
		d) Produktifitas padi atau NTP bagi kab/kota yang mempunyai data NTP Kab/kota	6,1	6,2	6,3
		g) Jumlah produksi perikanan	671.054	684.720,66	701.838,70
		h) NTN	109,22	110,2	111,03
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,14	3,2	3,05
	16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,77	55,89	56,71

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota		Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,31	68,47	68,78
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK			
		Indeks Inovasi Daerah	44,22	44,4	44,87
5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru			
		a) Indeks Ekonomi Hijau	49,82	50,22	50,66
		b) Indeks Ekonomi Biru	90,31	101,14	111,98
6. Transformasi Digital	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	60,89	61,40
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	14	13,76	13,31
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	37,87	38,07	38,12
	22	Net Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	-1,5	1,23	1,29
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			
		a) Kontribusi PDRB Kab/kota terhadap provinsi (%)	3,29	3,298	3,3
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,53	78,49	81,71
		c) Indeks layanan infrastruktur/indeks infrastruktur	2,63	2,72	2,9
		d) Persentase desa mandiri	14,49	19,32	21,74
9. Tata Kelola yang berintegritas adaptif dan inovatif	24	Indeks Reformasi Hukum	98,08	98,72	99,28
	25	Indeks SPBE	2,6	2,9	3,4
	26	Indeks Pelayanan Publik	2,40 (C-)	3,45	3,45
	27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	73,98	74,18	75,19
		b) Nilai MCP KPK	49	69	69,6
		c) Indeks Maturitas SPIP	3	3	3
10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	28	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	100	100	100
	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	92,72	93,24	93,57
	30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	11,4	11,4	11,4

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota		Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
		b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD	2	3	4
		c) Persentase perempuan pengurus partai politik	30	30	30
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,20	0,25
	32	Tingkat Inflasi gabungan (%)	1,87	2,5	2,5
	33	Pertumbuhan Investasi Daerah	-50	5,7	5,75
	34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,92	80,37	81,51
		Indeks Akses Keuangan Daerah	3,50	3,59	3,63
12. Ketangguhan diplomasi dan daya saing daerah tinggi	35	Jumlah kerjasama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (sister province/sister city)	6	32	35
	36	Indeks daya saing daerah	3,23	3,77	3,97
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	37	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	70,01	79,04	79,86
	38	Indeks kerukunan umat beragama	73,83	74,22	74,71
		Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/difasilitasi oleh pemerintah daerah.	N.A	77,34	80,46
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	56,07	78,03	78,38
		b) Indeks Perlindungan Anak	56,47	60,00	61,00
	40	Indeks Ketimpangan Gender	56,47	60	61
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati			
		a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	0,37	0,49	0,57
		Pemanfaatan keberlanutan keanekaragaman hayati			
		b) Indeks pertanaman (IP) padi	180	188	188,2
		c) Proporsi sawah irigasi	10,00	10,66	10,75
		d) Jumlah produksi perikanan budidaya			
		e) Angka Konsumsi Ikan	98,25	100	100
	42	Kualitas Lingkungan Hidup			

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota		Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	48,48	76,54	77,02
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,45	6	4,75
		c) Pengelolaan Sampah			
		i) Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah (%)	14,88	16,70	17,10
		ii) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	3,12	21,86	24,04
16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			
		a) Ketahanan Energi			
		i) Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	25.019,29	26.019,00	904,87
		b) Ketahanan Pangan			
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,8	7,12	6,86
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	82,23	82,77	83,05
		iii) Skor pola pangan harapan	77	79,90	81,34
		c) Ketahanan Air			
		i) Kapasitas Air Baku	N.A	5,31	6,09
		ii) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,77	60,00	63,00
	44	Indeks Risiko Bencana	186,59	189,22	188
16. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	45	Penurunan Emisi GRK Tahunan			
		a. Kumulatif	0,2	0,21	0,30
		b. Tahunan	1,5	1,84	2,18

6.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.5

Capaian dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu

Tahun 2024-2026

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target 2026	Target Nasional	OPD Pengampu
					RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	**PENDIDIKAN**								
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	53,56	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	97,6	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	9,03	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.2	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	%	73,93	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	%	73,70	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Indeks	75,90	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Indeks	74,20	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target 2026	Target Nasional	OPD Pengampu
					RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Indeks	57,74	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.3	Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	%	57,25	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	%	56,68	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Indeks	71,31	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Indeks	73,51	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Indeks	57,4	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.4	Proposi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61,92	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.5	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D4	%	65,11	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
2.	**KESEHATAN**								
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96,82	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,63	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,29	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96,46	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96,30	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target 2026	Target Nasional	OPD Pengampu
					RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,16	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,97	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	98,01	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	97,89	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	99,03	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	82,10	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	75,60	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.	**PEKERJAAN UMUM**								
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,41	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target 2026	Target Nasional	OPD Pengampu
					RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	75,98	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	**PERUMAHAN RAKYAT**								
4.1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	**TRANTIBUM LINMAS**								
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	89,88	100	100	100	100	Satuan Polisi dan Pamong Praja
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	26,68	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	26,68	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	26,68	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	23,52	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target 2026	Target Nasional	OPD Pengampu
					RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
6.	**SOSIAL**								
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	90,15	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	76,25	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Sumber : OPD Pengelola SPM Kabupaten Luwu, 2025.

6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagaimana diketahui bahwa TPB merupakan agenda pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia serta merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan yang mencakup bidang sosial ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan.Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.6
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2024 – 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Tujuan SDGs 01 :	**MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN**						
Target 1.1 :	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.**						
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	0,71	0	0,59	0
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**						**Menurunnya Tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 7,0%.**
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,70	11,96	10,55	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	N.A	11,96	11,96	
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	90,62	97,22	98	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98% (2024). Tahun dasar 2020 : 82,07
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	BPJS Ketenagakerjaan, BPS : Sakernas	%	58,06	82,22	58,28	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57 % untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020 : 63,82% (formal) dan 3,21 % (informal)
Target 1.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**						
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	BPS : Susenas	%	Air Minum Layak : 70,12 Sanitasi Layak : 75,95	Air Minum Layak : 71,96 Sanitasi Layak : 88,80	Air Minum Layak : 71,96 Sanitasi Layak : 88,80	Meningkatkanya akses air minum layak menjadi 100 % Tahun dasar 2020 : 90,21 % akses layak, meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90 %. Tahun dasar 2020 : 79,53%
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	PM	PM	
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 Orang	7151	0	5510	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	%	20	100	40	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019 : 183 dokumen
Tujuan SDGs 02 :	**MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**						
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.**						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	%	6,80	7,12	6,50	Menurunnya pravalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Pravalence of Undernourishment – PoU) menjadi 5%. Tahun dasar 2020 : 8,34%.
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	23,6	0,23	22,34	Menurunnya pravelensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							anak balita menjadi 14%. Tahun dasar 2019 : 27,7%
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,20	6,09	7,00	Menurunnya pravelensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%. Tahun dasar 2019 : 7,4%.
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	77	83,24	90,5	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020 : 86,3 (Angka Kecukupan Energi : 2.100 kkal/kapita/hari)
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	N.A	4,82	4,84	
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**						
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS PERTANIAN	%	N.A	62,08	62,08	Terlindunginya lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP3B) menjadi 100%. Tahun dasar 2019 : 50%

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 2.a	**Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.**						
Target 2.c	**Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.**						
Tujuan SDGs 03 :	**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**						
Target 3.1 :	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.**						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 HK	80	112.25	70	Menurunnya angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183.
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	BPS	%	75,82	100	99	(a) Menurunnya angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. (b) Meningkatnya persalinan di fasilitasi pelayanan Kesehatan menjadi 95%
Target 3.2 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.**						
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.						
	(a) Angka Kematian Balita	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	16,27	14,03	0	

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
						RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		(AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.						
	(b)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	15,71	14,29	11,4	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (kelahiran hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017 : 24
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup		DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	15,71	5,27	10,39	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (kelahiran hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017 : 15
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**							
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.		DINAS KESEHATAN	Per 1000 penduduk	0,37	0,29	0,23	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405. Tahun dasar 2020 : 312
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.		DINAS KESEHATAN	Per 100.000 Penduduk	0,78	0,47	0,88	Menurunnya insidensi Hepatitits B menjadi 1,09 %. Tahun dasar 2019 : -
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.		DINAS KESEHATAN	%	100,00	100,00	100,00	a. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota endemis filariasis mencaoau eliminasi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							menjadi 190. Tahun dasar 2020 : 64 b. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eleminasi kusta menjadi sebanyak 514. Tahun dasar 2020 : 401
Target 3.4.	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.**						
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	DINAS KESEHATAN	%	N.A	PM	PM	
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	10,1	9,02	8,7	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018 : 9,1%
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	31,74	30,28	13,32	Tidak meningkatnya pravelensi tekanan darah tinggi, dengan target sebesar 34,1%. Tahun dasar 2018; 34,1%
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	31,17	28,53	32,7	Tidak meningkatnya pravelensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun, dengan target sebesar 21,8%. Tahun dasar 2018 : 21,8%.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 3.5	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.**						
Target 3.7	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan 62esehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan 62esehatan62, dan integrasi 62esehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	9,90	6,32	5,82	Menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) menjadi 2,1. Tahun dasar 2017 :2,41
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.**						
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial.	DINAS KESEHATAN	%	N.A	N.A	N.A	
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	85,38	90	91	
Target 3.c	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.**						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN	rasio	72.239	3	74.866	Meningkatnya persentase puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar menjadi 83%. Tahun dasar 2020 :39,9%.
Tujuan SDGs 04 :	**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 4.1	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak 63emahiran dan laki-laki menyelesaikan 63emahiran63 dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.**						
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.						Meningkatnya Tingkat penyelesaian Pendidikan untuk SD/sederajat menjadi 98,94%, SMP/sederajat menjadi sebesar 93,33% dan SMA/sederajat menjadi 71,71%. Tahun dasar 2020 : SD/Sederajat 96,00%; SMP/sederajat 87,89% dan SMA/sederajat 63,95%.
	(i) Tingkat penyelesaian Pendidikan jenjang SD/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	100	98,93	Meningkatnya Tingkat penyelesaian Pendidikan untuk SD/sederajat menjadi 98,94%, SMP/sederajat menjadi sebesar 93,33% dan SMA/sederajat menjadi 71,71%. Tahun dasar 2020 : SD/Sederajat 96,00%; SMP/sederajat 87,89% dan SMA/sederajat 63,95%.
	(ii) Tingkat penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	100	98,93	
4.1.2(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; usia 16-18 tahun						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	
Target 4.4	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.**						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.
Target 4.5	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.**						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.						Meningkatnya rasio angka partisipasi kasar (APK) untuk 20% termiskin dan 20% terkaya untuk Tingkat SMA/SMK/MA sederajat sebesar 0,83 dan Tingkat Pendidikan tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun 2020 : SMA/sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan tinggi sebesar 0,28
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat	Dinas Pendidikan	%	100	97,44	100	Meningkatnya rasio angka partisipasi kasar

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							(APK) untuk 20% termiskin dan 20% terkaya untuk Tingkat SMA/SMK/MA sederajat sebesar 0,83 dan Tingkat Pendidikan tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun 2020 : SMA/sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan tinggi sebesar 0,28
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	Dinas Pendidikan	%	**60**	98,8	**70**	Meningkatnya rasio angka partisipasi kasar (APK) untuk 20% termiskin dan 20% terkaya untuk Tingkat SMA/SMK/MA sederajat sebesar 0,83 dan Tingkat Pendidikan tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun 2020 : SMA/sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan tinggi sebesar 0,28
Target 4.6	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi**						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS : Susenas	%	98,24	100,00	99,00	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							literasi/keaksaraan di semua jenjang.
Tujuan SDGs 05 :	**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**						
Target 5.5	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Dinas P3A	%	2,86	19,76	30,00	Meningkatnya keterwakilan Perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20% dan DPRD Kab/Kota menjadi 17%. Tahun dasar hasil pemilu 2019 untuk DPR RI : 20,52, DPRD Provinsi : 17,53% dan DPRD Kabupaten/kota : 15,72 %.
Target 5.6	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut**						
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi 66esehatan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan 66esehatan66 terkait 66esehatan seksual dan reproduksi	DINAS P3A	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.
Target 5.b	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS : Susenas	%	N.A	92,09	N.A	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020 :57,48%.
Tujuan SDGs 06 :	**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**						
Target 6.1	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.**						
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan : Susveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga BPS : Survei Nasional	%	0,50	17,92	0,50	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Tahun dasar 2020 : 90,21% untuk akses air minum layak, 20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,9% untuk akses air minum aman.
Target 6.2	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	PUPR	%	4,52	5,98	5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020 : 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman.
Target 6.3	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan 68ndustr barang daur ulang yang aman secara global.**						
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industry cair yang diolah secara aman.	DLH	%	N.A	N.A	N.A	Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019 : 56,65.
Target 6.4	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.**						
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.	PUTR	%	1,5	2,2	2,2	Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan indusri (m3/detik) sebesar 131,36 m3/detik. Tahun dasar 2019 : 81,36 m3/detik.
Tujuan SDGs 07 :	**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 7.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	90.08	N.A	92,56	Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100% tahun dasar 2020 : 99,20%
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	Angka	N.A	PM	PM	
Tujuan SDGs 08 :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**						
Target 8.1	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.**						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	4,13	11,2	24,28	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	59,73	61,02	74,23	Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (atlas Method) diharapkan menjadi USD 5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020 : USD 3.870
Traget 8.2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya**						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	64,08	64,8	65,05	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							– 4,5 %. Tahun dasar 2020 : -1,84
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 70erempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.**						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	19,805	19.672	20,103	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	4,14	2,45	3,70	Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6 – 4,3%. Tahun dasar 2020 : 7,07%
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	7,03	5,25	7,01	
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.**						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	11,70	9,02	10,08	Meningkatnya kualitas pemuda
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**						
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	40	19	45	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020 : 4,05 juta
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	55.314	2931	60.000	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menjadi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020 : 198,24 juta
Tujuan SDGs 09 :	**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**						
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**						
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dnas PUTR	%	98	100	98	Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97% Tahun dasar 2020 : 92%
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi						
	Angkutan Udara (Pesawat)						
	Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	36.725	N.A	40.000	
	Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	201.841	N.A	220	
	Angkutan Umum (Mobil)						
	Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	218.286	N.A	217.000	
	Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	350	N.A	330	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DINAS PERHUBUNGAN	unit	1	1	1	Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019 : 15

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
9.1.2(b)	Jumlah Pelabuhan penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	N.A	PM	PM	
Target 9.2	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi 72ndustry dalam lapangan kerja dan produk 72ndustry bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur.	BPS	%	4,35	5,11	5,11	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8,1%. Tahun dasar 2020 : -2,93%
Target 9.5	**Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor 72ublic72y di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan 72ublic dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.**						
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPELITBANGDA	%	N.A	0,67	PM	Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB
Tujuan SDGs 10 :	**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA**						
Target 10.1	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**						
10.1.1.*	Indeks Gini	BPS	Angka	0,319	0,315	0,329	Menurunnya koefisien gini menjadi 0,376-0,378. Tahun dasar September 2020 : 0,385
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	N.A	PM	PM	Menurunnya Tingkat kemiskinan menjadi 8,5 – 9,0%. Tahun dasar September 2020 : 10,19%

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal	DPMD	Desa	41	32	20	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019 :19.152.
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	30	20	115	Meningkatnya desa mandiri menjadi 6.444 desa. Tahun dasar 2019 : 1.444
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS : Susenas	%	N.A	9,21	PM	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,5 – 24%
Target 10.2	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**						
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%	62	5,02	57	
Target 10.3	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**						
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	0	N.A	1	Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui Upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							berat. Tahun dasar 2019 : 401 surat keterangan
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar**						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	%	58,06	80,55	58,28	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: formal 63,82%; informal 3,21%.
Tujuan SDGs 11 :	**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**						
Target 11.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.**						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM\/BPS	%	71,53	80,47	78,49	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%. Tahun dasar 2019 : 56,51%.
Target 11.3	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.**						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	PUTR	Angka	1,68	1,82	1,75	Jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019 : 1 kota
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi 75ocus75ve terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan 75ocus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**						
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Org	7151	0	5510	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya.
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBS	%	259.576.524.000	7.130.210.000	50.000.000.000	Persentase potensi kehilanga PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10%.
Target 11.6	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	%	3,12	21,92	5,00	Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan. Tahun dasar 2019 : 54,8 % penanganan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							dan 0,88% pengurangan
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	DLH	%	N.A	N.A	N.A	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional mencapai 339.4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019 : 67,45 juta ton.
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DLH	Angka	92,44	80,08	92,68	Indeks kualitas udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019 : 86,57
Target 11.b :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan 76olistic risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.**						
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	20	100	50	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019 : 183 dokumen
Tujuan SDGs 12 :	**MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN**						
Target 12.3	**Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada 76embali retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	n.a	PM	PM	
Target 12.4	**Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap 77embali77n manusia dan lingkungan.**						
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	n.a	n.a	n.a	
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan 77embali.**						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	n.a	PM	PM	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019 : 67,45 juta ton
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.**						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usaha	NA	8	PM	
Target 12.8	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
12.8.1.(b)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan	N.A	PM	PM	
Target 12.b	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak 78okasi78unan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk 78okas.**						
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata	Destinasi	1	n.a	2	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui peningkatan jumlah Lokasi penerapan *sustainable tourism development* mencapai 22 lokasi. Tahun dasar 2019 : 12 lokasi.
Tujuan SDGs 13 :	**MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**						
Target 13.1	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.**						
13.1.1*	Jumlah korban meninggal,hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Org	7.151	0	5.510	Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya.
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	25	100	37,5	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15%.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 13.2	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	Ton co2 eq	N.A	PM	PM	
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	Ton co2 eq	1.345.279,21	PM	PM	
13.2.2.(b)	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	%	10	PM	14,82	
Tujuan SDGs 16 :	**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN**						
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	0	0	0	Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							menjadi >60%. Tahun dasar 2019 : 53,32%
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES LUWU	Org	0	0	0	Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 2019 : 53,32%
Target 16.2 :	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.**						
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	KEMENSOS, KPPPA,	%	0	0	0	Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tahun dasar 2018 : 61,7% untuk anak laki-laki dan 62% untuk anak Perempuan.
16.2.3.(a)	Proprosi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A/POLRES LUWU	**%**	5	N.A	0	
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia, BPHN	%	n.a	PM	PM	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi sebesar 81% dan 80%. Tahun dasar 2020 : 89% dan 77%.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
Target 16.6 :	**Mengembangkan 81ingkat yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua 81ingkat.**						
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	100,00	100,00	100,00	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	6,91	11,97	11,97	Meningkatnya persentase instansi pemerintah dengan skor system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B untuk Kementerian/lembaga; 100%, Provinsi : 100%, Kabupaten/kota : 80% Tahun dasar 2020 : Kementerian Lembaga 95,24%, Provinsi : 97,06%, Kabupaten/kota : 63,98%
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	100,00	100,00	100,00	Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi > Baik untuk Kementerian/Lembaga : 100%, Provinsi :85%, Kabupaten/Kota : 70% Tahun dasar 2020 : Kementerian Lembaga : 96,39%, Provinsi : 79,41%, Kabupaten/Kota : 24,41%

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan public kepatuhan pelayanan public kategori baik.	Diskominfo	Jumlah	N.A	36	N.A	Meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik menjadi 164 per 587 instansi. Tahun dasar 2019: 87 per 264 instansi
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPRD	%	2,85	7,1	2,85	Meningkatnya persentase keterwakilan Perempuan di DPR RI: 22,52 %, DPRD Provinsi : 20%, DPRD Kabupaten/Kota : 17% Tahun Dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI : 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53% dan DPRD Kabupaten/Kota : 15,72%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/BKPSDM	%	11,43	N.A	30	
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	97,39	100	97,42	Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh Lembaga pencatatan sipil menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 77,20%
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS : Susenas	%	92,02	100	100	Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%. Tahun dasar 2020 : 88,11%.
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Disdukcapil/ BPS : Susenas	%	93,21	100	93,25	Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%. Tahun dasar 2020 : 88,11%.
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**						
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	DISKOMINFO	%	34,28	n.a	40	
Target 16.b :	**Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.**						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	1	n.a	1	Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui Upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019 : 401 surat keterangan
Tujuan SDGs 17	**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**						
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA	%	6,97	19,28	6,99	Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4-12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020 : 10,68% PDB
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA	%	0,18	0,72	0,22	Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41-8,87% (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022). Tahun dasar 2020 : 8,33% PDB
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	67,01	100	67,25	Meningkatnya persentase pengguna internet menjadi 82,30%. Tahun dasar 2019 : 73,70%
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	DPMPTSP		0	-	2	Mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan Pembangunan. (Dengan meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Tahun dasar 2020 : 14 Proyek
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	DPMPTSP		0	-	1	Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam Pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2024	Target		Target Nasional 2025
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
							(KPBU). Tahun dasar 2020 : Rp.59,597 T (6 proyek)
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	DPMPTSP		0	-	1.000.000.000,00	Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam Pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun dasar 2020 : Rp.59,597 T (6 proyek)
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (VitalStatistics Register).	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) di 20 provinsi

Sumber : BPS, OPD Pengampu TPB/SDGs Kabupaten Luwu dan Tim Penyusun RPD.

Tabel di atas menunjukkan target dan capaian masing-masing indikator TPB yang diperoleh dari BPS maupun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang dimuat tersebut, diketahui bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dimasa depan, khususnya program/kegiatan yang terkait langsung dengan indikator.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Rancangan Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2025 telah melalui tahapan fasilitasi oleh tim fasilitator Provinsi Sulawesi Selatan guna penyempurnaan-penyempurnaan perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2025. Disamping itu seluruh saran masukan dari tim fasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan telah ditindaklanjuti kedalam masing-masing bab berdasarkan substansi.

7.2 Kesimpulan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu.

4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu melalukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian OPD.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2025.
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
7. Fungsi Perubahan RKPD Kab. Luwu adalah menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING